



BAPPEDA ACEH



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH

INFORMASI PEMBANGUNAN



KATA SAMBUTAN

Provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang mempunyai kekhasan tersendiri, baik dari segi sejarah maupun adat dan budaya. Sejak berdiri tahun 1958, berarti usia Provinsi "Serambi Mekkah" telah mencapai 56 tahun. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah ini, turut mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan wilayah Aceh selama lebih dari setengah abad terakhir merupakan pencapaian yang berhasil digapai masyarakat Aceh secara umum dan pemerintah daerah khususnya. Oleh karenanya, dokumen dan informasi mengenai pembangunan Provinsi Aceh tersebut dirasa penting untuk didokumentasikan dan dibukukan.

Selain sebagai bagian dari sejarah pembangunan Provinsi Aceh, informasi tersebut juga sangat berguna bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan selanjutnya.

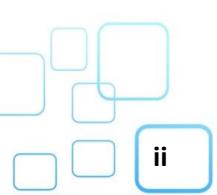
Kami menyambut baik kerjasama antara BAPPEDA Aceh dan BPS Provinsi Aceh dalam penerbitan publikasi Pembangunan Aceh dari Masa ke Masa. Diharapkan pada periode waktu tertentu publikasi ini diterbitkan kembali dengan memperbaiki dan memperkaya cakupan data, serta agar sejarah informasi pembangunan Aceh tidak hilang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai pelaku pembangunan di Aceh.

BANDA ACEH, OKTOBER 2014
KEPALA BAPPEDA ACEH

PROF. DR. IR. ABU BAKAR KARIM, M.S.





KATA PENGANTAR

Pembangunan Aceh dari Masa ke Masa merupakan publikasi hasil kerjasama antara BAPPEDA Aceh dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Publikasi ini mencakup berbagai data dan informasi penting yang merekam perjalanan panjang pembangunan Provinsi Aceh yang saat ini (2014) telah berusia 56 tahun.

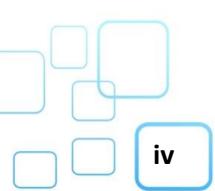
Diharapkan buku ini dapat menjawab harapan dan tantangan para peneliti dan kalangan akademis yang membutuhkan data dalam kurun waktu yang panjang sebagai bahan kajian. Selain itu, himpunan data Pembangunan Aceh dari Masa ke Masa juga merupakan informasi penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan yang lebih tepat dan akurat.

Publikasi ini mencatat beragam data dan informasi dalam periode waktu sesuai ketersediaan data, serta wilayah kabupaten/kota (pada lampiran). Penghargaan disampaikan kepada tim yang telah bekerja menyusun publikasi ini. Selanjutnya, saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang..

BANDA ACEH, OKTOBER 2014
KEPALA BPS PROVINSI ACEH

HERMANTO

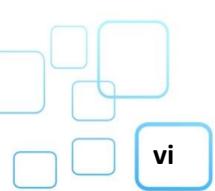




Daftar Isi

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv

	1		7		11
	21		53		59
	67		73		81
	97		109		123
	141		165	Lampiran	171



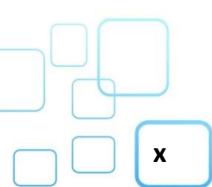
Daftar Tabel

Tabel	2.1.	Luas Provinsi Aceh Menurut Penggunaan Lahan, Tahun 2013	9
Tabel	2.2.	Kondisi Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Banda Aceh Tahun 2013	9
Tabel	2.3.	Nama-Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Banyaknya Kecamatan, Mukim, dan Gampong/Desa Tahun 2013	10
Tabel	2.4.	Jumlah Rumahtangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013	10
Tabel	4.1.	Jumlah Rumahtangga Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1983-2013	24
Tabel	4.2.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai Tahun 2009 dan 2013	24
Tabel	4.3.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2013	25
Tabel	4.4.	LuasPenanamanPadiMenurut Jenisnya (Hektar) Tahun 1969-2013	26
Tabel	4.5.	LuasPanenPadiMenurut Jenisnya (Hektar) Tahun 1969-2013	26
Tabel	4.6.	LuasPenanamanPadiMenurut Jenisnya (Hektar) Tahun 1969-2013	27
Tabel	4.7.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Tahun 1961-2013	28
Tabel	4.8.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai Tahun 1961-2013	29
Tabel	4.9.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kacang Tanah Tahun 1961-2013	30
Tabel	4.10.	Perkembangan Produksi Kacang Tanah (Ton) Tahun 2003-2013	31
Tabel	4.11.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Tahun 1961-2013	32
Tabel	4.12.	Perkembangan Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 1959-2013	33
Tabel	4.13.	Luas Areal Irrigasi yang Dikelola Menurut Jenis Irrigasi(Ha) Tahun 1972-2013	34
Tabel	4.14.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Karet Tahun 1969 - 2013	35
Tabel	4.15.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Tahun 1976 - 2013	36
Tabel	4.16.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kelapa Perkebunan Rakyat dan Kelapa Hibrida Tahun 1969-2013	37
Tabel	4.17.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kopi Perkebunan Rakyat Tahun 1969-2013	38
Tabel	4.18.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kakao Tahun 1969-2013	39
Tabel	4.19.	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Cengkeh Perkebunan Rakyat dan Tembakau Perkebunan Rakyat Tahun 1969-2013	40
Tabel	4.20.	Luas Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 1969-2013	41
Tabel	4.21.	Produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 2004-2013	42
Tabel	4.22.	Luas Tanaman Lada Perkebunan Rakyat Nilam Perkebunan Rakyat, Kapuk Perkebunan Rakyat, Tebu Perkebunan Rakyat (Ha) Tahun 1970-2013	43
Tabel	4.23.	Produksi Lada Perkebunan Rakyat Nilam Perkebunan Rakyat, Kapuk Perkebunan Rakyat, Tebu Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 1970-2013	44
Tabel	4.24.	Produksi Hasil Hutan Non-Kayu Tahun 1990 - 2013	45
Tabel	4.25.	Produksi Kayu Olahan Hasil Hutan Tahun 1989 - 2013	45

Tabel	4.26.	Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1961-2013	46
Tabel	4.27.	Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1961-2013	47
Tabel	4.28.	Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1969-2013	48
Tabel	4.29.	Pemotongan Ternak Besar dan Kecil Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1961-2013	49
Tabel	4.30.	Pemotongan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1969-2013	50
Tabel	4.31.	Produksi Penangkapan Ikan (Ton) Tahun 1959-2013	51
Tabel	4.32.	Populasi Budidaya Ikan di (Ton) Tahun 1969-2013	52
Tabel	5.1.	Perkembangan Produksi Gas Alam Cair dan Kondensat PT. Arun NGL Co. Tahun 1980-2013	55
Tabel	5.2.	Perkembangan Perusahaan Listrik Negara Tahun 1968-2012	56
Tabel	5.3.	Perkembangan Perusahaan Air Minum Tahun 2010-2013	57
Tabel	6.1.	Keadaan Perusahaan Industri Menurut Jenis Industri Tahun 1981-1998	61
Tabel	6.2.	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar Sedang Tahun 1998-2013	61
Tabel	6.3.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Jenjang Menurut Persebaran di Kabupaten/Kota Tahun 1998 & 2013	62
Tabel	6.4.	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 1998-2009	63
Tabel	6.5.	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut Subsektor Tahun 2010-2013	64
Tabel	6.6.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 1998-2009	64
Tabel	6.7.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 1998-2009	65
Tabel	7.1.	Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan (Ribu USD) Tahun 1959-2013	69
Tabel	7.2.	Nilai Ekspor Aceh Berdasarkan Komoditi (Ribu USD) Tahun 2009-2013	70
Tabel	7.3.	Nilai Ekspor Aceh Berdasarkan Pelabuhan Tahun 2009-2013	70
Tabel	7.4.	Nilai Impor Aceh Berdasarkan Komoditi (Ribu USD) Tahun 2009-2013	71
Tabel	7.5.	Impor Migas Aceh Berdasarkan Negara (Ribu USD) Tahun 2009-2013	71
Tabel	8.1.	Inflasi Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 1980 - 2013	75
Tabel	8.2.	Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 dan Januari sd Juni 2014 (2012 = 100)	76
Tabel	8.3.	Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2003 - 2014	77
Tabel	8.4.	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014	77
Tabel	8.5.	Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar, dan Nilai Tukar Petani Tahun 2008-2013	78
Tabel	8.6.	Indeks Yang Diterima Petani (IT) Menurut Sub Sektor Tahun 2008-2013	78
Tabel	8.7.	Indeks yang dibayar Petani (IB) menurut Sub Sektor Tahun 2008-2013	79
Tabel	9.1.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 1969-2012	83
Tabel	9.2.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 1998 - 2013	84
Tabel	9.3.	Panjang Jalan Nasional Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 1994 - 2013	84
Tabel	9.4.	Nama Terminal Bus Tahun 2013	85
Tabel	9.5.	Jumlah Kendaraan Bermotor Dirinci Menurut Jenis (Unit) Tahun 1972 – 2012	86

Tabel	9.6.	Nama Pelabuhan Tahun 2013	87
Tabel	9.7.	Jumlah Penumpang yang Naik dan Turun pada Pelabuhan (Orang) Tahun 2009 – 2013	88
Tabel	9.8.	Bongkar – Muat Barang pada Pelabuhan (Ton) Tahun 2009 – 2013	88
Tabel	9.9.	Nama Bandar Udara Tahun 2013	89
Tabel	9.10.	Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat pada Bandara Sultan Iskandar Muda (Unit) Tahun 1977 - 2013	90
Tabel	9.11.	Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Bandara Sultan Iskandar Muda (Orang) Tahun 1965 – 2013	91
Tabel	9.12.	Produksi Pos Menurut Jenis Tahun 1981 - 2007	93
Tabel	9.13.	Jumlah Kantor Kapasitas Sentral, Pelanggan, Kapasitas, dan Sambungan Telepon Otomatis Tahun 1982 - 2007	93
Tabel	10.1.	PDRB ADHB dan ADHK Dengan dan Tanpa Migas (Juta Rupiah) Tahun 1975-2013	100
Tabel	10.2.	Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 1975-2013	101
Tabel	10.3.	Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Sektor Dengan Migas (%) Tahun 1969-2013	102
Tabel	10.4.	Kontribusi PDRB Aceh Menurut Kelompok Sektor Tanpa Migas (%) Tahun 1975-2013	103
Tabel	10.5.	Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran (%) Tahun 1969-2013	104
Tabel	10.6.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Tahun 1975-2013	105
Tabel	10.7.	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB (Persen) Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2013	106
Tabel	10.8.	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2013	108
Tabel	11.1.	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 1982 - 2013	111
Tabel	11.2.	Jumlah Pengeluaran Pendapatan Daerah Tahun 1982 - 2013	112
Tabel	11.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 1982 - 2013	113
Tabel	11.4.	Jumlah Bank dan Kantor Bank Tahun 1993-2013	116
Tabel	11.5.	Posisi Kredit PerbankanRupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan (Juta Rupiah) Tahun 1994-2013	117
Tabel	11.6.	Jumlah Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah) Tahun 1994-2013	118
Tabel	11.7.	Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Jenis Penggunaan (Jutaan Rupiah) Tahun 1994-2013	119
Tabel	11.8.	Jumlah Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (Jutaan Rupiah) Tahun 1994-2013	120
Tabel	11.9.	Banyaknya Koperasi dan Anggota Koperasi Tahun 1969-2013	121
Tabel	11.10.	Nilai Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tahun 1969-2013	122
Tabel	12.1.	Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Tahun 1956-2013	125
Tabel	12.2.	Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 1971 – 2010	128
Tabel	12.3.	Penduduk Menurut Kegiatan Utama Tahun 1971-2013	133
Tabel	12.4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur (Persn) Tahun 1971 – 2013	135
Tabel	12.5.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 1971-2013	136
Tabel	12.6.	Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 1971 – 2013	137
Tabel	12.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tahun 1971 – 2013	138
Tabel	13.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit) Tahun 1989 – 2013	143
Tabel	13.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 1971 – 2013	144
Tabel	13.3.	Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran Tahun 1992 – 2013	145
Tabel	13.4.	Persentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2004-2013	147

Tabel	13.5.	Komposisi Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis (Persen) Tahun 1971 – 2013	149
Tabel	13.6.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 1971-2013	150
Tabel	13.7.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Sedang Diduduki Tahun 1995-2013	151
Tabel	13.8.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Umum Tahun 1971-2012	153
Tabel	13.9.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Agama Tahun 1972-2011	154
Tabel	13.10.	Persentase Pembagian Pengeluaran dan <i>Gini Ratio</i> Tahun 1984-2013	161
Tabel	13.11.	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Tahun 1990-2013	163

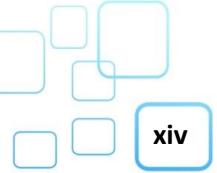


Daftar Gambar

Gambar	4.1.	Jumlah Rumahtangga Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2013	23
Gambar	4.2.	Perkembangan Produksi Padi (000 Ton) Tahun 2003-2013	27
Gambar	4.3.	Perkembangan Produksi Jagung (Ton) Tahun 2003-2013	28
Gambar	4.4.	Perkembangan Produksi Kedelai (Ton) Tahun 2003-2013	29
Gambar	4.5.	Perkembangan Produksi Kacang Tanah (Ton) Tahun 2003-2013	30
Gambar	4.6.	Perkembangan Produksi Ubi Kayu (Ton) Tahun 2003-2013	31
Gambar	4.7.	Perkembangan Produksi Ubi Jalar (Ton) Tahun 2003-2013	32
Gambar	4.8.	Luas Areal Irigasi yang Dikelola Menurut Jenis Irigasi (Ha) Tahun 1972-2013	34
Gambar	4.9.	Luas Areal Irigasi Sederhana (Ha) Tahun 1975-2013	34
Gambar	4.10.	Persentase Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Tahun 2013	36
Gambar	4.11.	Produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 2004-2013	41
Gambar	4.12.	Populasi Ternak Sapi (Ekor) Tahun 1961-2013	46
Gambar	4.13.	Populasi Ternak Kuda (Ekor) Tahun 1961-2013	46
Gambar	4.14.	Populasi Ternak Kambing (Ekor) Tahun 1969-2013	47
Gambar	4.15.	Populasi Ternak Domba (Ekor) Tahun 1969-2013	47
Gambar	4.16.	Populasi Ternak Ayam Buras (Ekor) Tahun 1969-2013	48
Gambar	4.17.	Populasi Ternak Ayam Itik (Ekor) Tahun 1969-2013	48
Gambar	4.18.	Pemotongan Ternak Besar dan Kecil (Ekor) Tahun 1961-2013	49
Gambar	4.19.	Pemotongan Ternak Unggas (Ekor) Tahun 1969-2013	50
Gambar	4.20.	Produksi Penangkapan Ikan di Laut (Ton) Tahun 1959-2013	51
Gambar	4.21.	Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton) Tahun 1959-2013	51
Gambar	4.22.	Produksi Budidaya Ikan Tambak (Ton) Tahun 1969-2013	52
Gambar	4.23.	Produksi Budidaya Ikan Kolam (Ekor) Tahun 1969-2013	52
Gambar	5.1.	Pekembangan Produksi Gas Alam Cair (LNG) PT. Arun NGL. Co Tahun 1980-2012	55
Gambar	5.2.	Pekembangan Produksi Kondensat PT. Arun NGL. Co Tahun 1980-2012	55
Gambar	5.3.	Perkembangan Produksi Listrik (000 KWh) Tahun 1968-2013	56
Gambar	5.4.	Perkembangan Listrik Terjual (ribu KWh) Tahun 1968-2013	56
Gambar	5.5.	Pekembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 1968-2013	57
Gambar	5.6.	Produksi Potensial dan Produksi Efektif Air Minum (liter/detik) Tahun 1997-2013	57
Gambar	6.1.	Jumlah Industri Kecil Tahun 1981-1998	61
Gambar	6.2.	Jumlah Industri Besar Sedang Tahun 1998-2013	61
Gambar	6.3.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Tahun 1981-1998	62

Gambar	7.1.	Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan (Ribu USD) Tahun 1959-2013	69
Gambar	7.2.	Nilai Ekspor Berdasarkan Sektor (Ribu USD) Tahun 2009-2013	70
Gambar	7.3.	Persentase Ekspor Aceh Berdasarkan Negara Tujuan (%) Tahun 2009-2013	70
Gambar	7.4.	Persentase Impor Aceh Berdasarkan Pelabuhan (%) Tahun 2013	71
Gambar	8.1.	Inflasi Kota Banda Aceh (%) Tahun 1980-2013	75
Gambar	8.2.	Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar, dan Nilai Tukar Petani Tahun 2008-2013	78
Gambar	8.3.	Indeks yang diterima Petani (IT) menurut Sub sektor Tahun 2008-2013	79
Gambar	9.1.	Perkembangan Panjang Jalan yang Diaspal (Km) Tahun 1969 – 2012	83
Gambar	9.2.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Rusak/Rusak Berat (%) Tahun 1998 – 2013	84
Gambar	9.3.	Perkembangan Jumlah Sepeda Motor (Unit) Tahun 1972 – 2012	87
Gambar	9.4.	Jumlah Penumpang yang Naik dan Turun pada Pelabuhan (Orang) Tahun 2009 – 2013	88
Gambar	9.5.	Perkembangan Kedatangan Pesawat Domestik pada Bandara Sultan Iskandar Muda (Unit) Tahun 1977 – 2013	90
Gambar	9.6.	Banyaknya Sambungan Telepon Otomatis Tahun 1982 - 2007	94
Gambar	9.7.	TPK Hotel Bintang (%) Tahun 2009-2013	95
Gambar	9.8.	TPK Hotel Non Bintang (%) Tahun 2009-2013	95
Gambar	9.9.	Rata-Rata Lama Menginap di Hotel Bintang dan Non Bintang (Hari)	95
Gambar	10.1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah) Tahun 1973-2013	100
Gambar	10.2.	Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 1975-2013	101
Gambar	10.3.	Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Sektor Dengan Migas (%) Tahun 1969-2013	102
Gambar	10.4.	Kontribusi PDRB Aceh Menurut Kelompok Sektor Tanpa Migas (%) Tahun 1975-2013	103
Gambar	10.5.	Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran (%) Tahun 1969-2013	104
Gambar	10.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (%) Tahun 2013	107
Gambar	11.1.	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah (Rp) Tahun 1982 - 2013	111
Gambar	11.2.	Jumlah Pengeluaran Pendapatan Daerah (Rp) Tahun 1982 - 2013	112
Gambar	11.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Tahun 1982-2013	114
Gambar	11.4.	Banyaknya Koperasi (Unit) Tahun 1969 - 2013	121
Gambar	11.5.	Nilai Koperasi (Juta Rupiah) Tahun 1969 - 2013	122
Gambar	12.1.	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 1956-2013	126
Gambar	12.2.	Pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 1961-2010	127
Gambar	12.3.	Perkembangan TFR Tahun 1971-2010	127
Gambar	12.4.	Perkembangan ASFR Tahun 1971-2010	128
Gambar	12.5.	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Tahun 1971 – 2010	129
Gambar	12.6.	IMR dan e0 Tahun 1971 – 2010	129
Gambar	12.7.	Piramida Penduduk Tahun 2010	130
Gambar	12.8.	Piramida Penduduk Tahun 2013	130

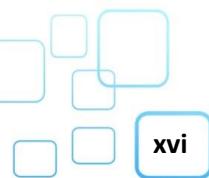
Gambar	12.9.	Angka Beban Ketergantungan Tahun 2010 dan 2013	130
Gambar	12.10.	Peta Kepadatan Penduduk Tahun 1956	131
Gambar	12.11.	Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2013	131
Gambar	12.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 1971 – 2013	134
Gambar	12.13.	Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur Tahun 1971 dan 2013	135
Gambar	12.14.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 1971-2013	136
Gambar	12.15.	Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Ter tinggi Tahun 1971 dan 2013	137
Gambar	12.16.	Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 1971 dan 2013	138
Gambar	12.17.	Upah Minimum Provinsi Tahun 1971 – 2013	139
Gambar	13.1.	Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran Tahun 1992 – 2013	145
Gambar	13.2.	Persentase Anak Usia 2 – 4 Tahun yang Pernah Disusui Tahun 1994 – 2013	146
Gambar	13.3.	Persentase Anak Usia 2 – 4 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 – 2013	146
Gambar	13.4.	Persentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2004	147
Gambar	13.5.	Persentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2013	147
Gambar	13.6.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (%) Tahun 1971-2013	150
Gambar	13.7.	Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Sedang Diduduki Tahun 2013	152
Gambar	13.8.	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SD, SLTP dan SLTA Tahun 2012	152
Gambar	13.9.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Umum Tahun 1971-2012	153
Gambar	13.10.	Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang Tahun 2005 – 2013	155
Gambar	13.11.	Persentase Pengeluaran Per Kapita Barang Pangan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1981-2013	155
Gambar	13.12.	Persentase Pengeluaran Per Kapita Barang Nonpangan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1981-2013	156
Gambar	13.13.	Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita Sehari Tahun 1987-2013	156
Gambar	13.14.	Persentase Pengeluaran Perkapita Menurut Kelompok Barang Tahun 2005-2013	157
Gambar	13.15.	Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari Tahun 1987-2013	157
Gambar	13.16.	Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari Menurut Daerah Tahun 1987-2013	157
Gambar	13.17.	Garis Kemiskinan Tahun 2005-2013	159
Gambar	13.18.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2005-2013	159
Gambar	13.19.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1993-2013	160
Gambar	13.20.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Tahun 1999-2013	160
Gambar	13.21.	Distribusi Pendapatan Tahun 1984-2013	161
Gambar	13.22.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1990-2013	163
Gambar	14.1.	Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Tahun 1995 - 2013	167
Gambar	14.2.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Minum Ledeng Tahun 1995 – 2013	167
Gambar	14.3.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Jamban Sendiri Tahun 1995 – 2013	168
Gambar	14.4.	Persentase Rumah Tangga mempunyai Lantai Bukan Tanah Tahun 1995 – 2013	168
Gambar	14.5.	Persentase Rumah Tangga Mempunyai Rumah dengan Luas Lantai >50 m ² Tahun 1995 – 2013	169



Daftar Lampiran

Lampiran	4.1.	Produksi Hasil Hutan Non Kayu Tahun 1959-2013	173
Lampiran	6.1.	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang menurut Kabupaten/Kota Tahun 1998-2013	176
Lampiran	6.2.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang menurut Kabupaten/Kota Tahun 1998-2013	177
Lampiran	8.1.	Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013	179
Lampiran	9.2.	Panjang Jalan Propinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1998 - 2013	182
Lampiran	9.3.	Panjang Jalan Nasional Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1998 - 2013	184
Lampiran	9.4.	Jumlah Penumpang yang Turun (Debarkasi) di Pelabuhan (Orang) Tahun 2009 - 2013	186
Lampiran	9.5.	Jumlah Penumpang yang Naik (Embarkasi) di Pelabuhan (Orang) Tahun 2009 - 2013	187
Lampiran	9.6.	Jumlah Bongkar Barang Pada Pelabuhan (Ton) Tahun 2009 - 2013	188
Lampiran	9.7.	Jumlah Muat Barang Pada Pelabuhan (Ton) Tahun 2009 - 2013	189
Lampiran	9.8.	Jumlah Surat yang Tercatat Melalui Kantor Pos Tahun 1985 - 2007	190
Lampiran	9.9.	Jumlah Pengiriman dan Penerimaan Wesel Pos Melalui Kantor Pos Tahun 1986 - 2007	191
Lampiran	9.10.	Jumlah Pengiriman dan Penerimaan Pos Paket Melalui Kantor Pos Tahun 1985 - 2007	194
Lampiran	9.11.	Jumlah Pelanggan Telepon Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1988 - 2007	196
Lampiran	9.12.	Jumlah Sambungan Telepon Otomatis Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1985 - 2007	198
Lampiran	9.13.	Jumlah Kapasitas Telepon Otomatis Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1985 - 2007	200
Lampiran	10.1.	PDRB Provinsi Aceh ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	202
Lampiran	10.2.	PDRB Provinsi Aceh ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	204
Lampiran	10.3.	PDRB Kabupaten Simeulue ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	206
Lampiran	10.4.	PDRB Kabupaten Simeulue ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	208
Lampiran	10.5.	PDRB Kabupaten Aceh Singkil ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	210
Lampiran	10.6.	PDRB Kabupaten Aceh Singkil ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	212
Lampiran	10.7.	PDRB Kabupaten Aceh Selatan ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	214
Lampiran	10.8.	PDRB Kabupaten Aceh Selatan ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	216
Lampiran	10.9.	PDRB Kabupaten Aceh Tenggara ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	218
Lampiran	10.10.	PDRB Kabupaten Aceh Tenggara ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	220
Lampiran	10.11.	PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	222

Lampiran	10.12.	PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	224
Lampiran	10.13.	PDRB Kabupaten Aceh Tengah ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	226
Lampiran	10.14.	PDRB Kabupaten Aceh Tengah ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	228
Lampiran	10.15.	PDRB Kabupaten Aceh Barat ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	230
Lampiran	10.16.	PDRB Kabupaten Aceh Barat ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	232
Lampiran	10.17.	PDRB Kabupaten Aceh Besar ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	234
Lampiran	10.18.	PDRB Kabupaten Aceh Besar ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	236
Lampiran	10.19.	PDRB Kabupaten Pidie ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	238
Lampiran	10.20.	PDRB Kabupaten Pidie ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	240
Lampiran	10.21.	PDRB Kabupaten Bireuen ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	242
Lampiran	10.22.	PDRB Kabupaten Bireuen ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	244
Lampiran	10.23.	PDRB Kabupaten Aceh Utara ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	246
Lampiran	10.24.	PDRB Kabupaten Aceh Utara ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	248
Lampiran	10.25.	PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	250
Lampiran	10.26.	PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	252
Lampiran	10.27.	PDRB Kabupaten Gayo Lues ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	254
Lampiran	10.28.	PDRB Kabupaten Gayo Lues ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	256
Lampiran	10.29.	PDRB Kabupaten Aceh Tamiang ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	258
Lampiran	10.30.	PDRB Kabupaten Aceh Tamiang ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	260
Lampiran	10.31.	PDRB Kabupaten Nagan Raya ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	262
Lampiran	10.32.	PDRB Kabupaten Nagan Raya ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	264
Lampiran	10.33.	PDRB Kabupaten Aceh Jaya ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	266
Lampiran	10.34.	PDRB Kabupaten Aceh Jaya ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	268
Lampiran	10.35.	PDRB Kabupaten Bener Meriah ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	270
Lampiran	10.36.	PDRB Kabupaten Bener Meriah ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	272
Lampiran	10.37.	PDRB Kabupaten Pidie Jaya ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	274
Lampiran	10.38.	PDRB Kabupaten Pidie Jaya ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	276
Lampiran	10.39.	PDRB Kota Banda Aceh ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	278
Lampiran	10.40.	PDRB Kota Banda Aceh ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	280
Lampiran	10.41.	PDRB Kota Sabang ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	282
Lampiran	10.42.	PDRB Kota Sabang ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	284
Lampiran	10.43.	PDRB Kota Langsa ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	286
Lampiran	10.44.	PDRB Kota Langsa ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	288
Lampiran	10.45.	PDRB Kota Lhokseumawe ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	290
Lampiran	10.46.	PDRB Kota Lhokseumawe ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	292
Lampiran	10.47.	PDRB Kota Subulussalam ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	294
Lampiran	10.48.	PDRB Kota Subulussalam ADHK (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	296
Lampiran	11.1.	Jumlah Koperasi Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012	298
Lampiran	11.2.	Jumlah Koperasi Tidak Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012	299



Lampiran	11.3.	Jumlah Anggota Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013	300
Lampiran	12.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Tahun 1956 – 2013	301
Lampiran	12.2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Antar Sensus Tahun 1961 – 2010	302
Lampiran	12.3.	ASFR dan TFR Tahun 1971 – 2010	303
Lampiran	12.4.	IMR dan e0 Tahun 1971 – 2010	304
Lampiran	12.5.	IMR dan e0 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2013	305
Lampiran	12.6.	Angka beban Ketergantungan Tahun 2010 dan 2013	306
Lampiran	12.7.	IMR dan e0 Kabupaten/Kota Tahun 2010	307
Lampiran	12.8.	Angka Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2013	308
Lampiran	12.9.	Kepadatan Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1956	309
Lampiran	13.1.	Persentase Bayi Dan Penolong Persalinan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013	310
Lampiran	13.2.	Persentase Anak Usia 2-4 Tahun Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013	311
Lampiran	13.3.	Persentase Balita Yang Sudah Mendapat Imunisasi Dan Jenis Imunisasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013	316
Lampiran	13.4.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2003	321
Lampiran	13.5.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2004	322
Lampiran	13.6.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2005	323
Lampiran	13.7.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2006	324
Lampiran	13.8.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2007	325
Lampiran	13.9.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2008	326
Lampiran	13.10.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2009	327
Lampiran	13.11.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2010	328
Lampiran	13.12.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2011	329
Lampiran	13.13.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2012	330
Lampiran	13.14.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio Tahun 2013	331
Lampiran	13.15.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2012	332
Lampiran	13.16.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005-2012	333
Lampiran	13.17.	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005-2012	334
Lampiran	13.18.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013	335
Lampiran	13.19.	Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013	336
Lampiran	13.20.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013	337
Lampiran	13.21.	Kemampuan Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013	338
Lampiran	13.22.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013	339
Lampiran	14.1.	Persentase Rumah Tangga Mempunyai Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2006-2013	340

SEJARAH

Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, kali pertama diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9.

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kukuh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "Seuramo Mekkah" (Serambi Mekah). Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut "Perang Sabil" ini

berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir, Twk. Muhd. Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di Tanah Aceh.

Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (Nederlansch Oost-Indie) dalam bentuk propinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945. Dalam jaman perang kemerdekaan, sumbangsih dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno memberikan julukan sebagai "Daerah Modal" pada daerah Aceh.

Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah Keresidenan dari Propinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan Keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status pada masa revolusi kemerdekaan. Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutardaja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer, namun Keresidenan masih tetap dipertahankan.

Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin.

Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai kembali negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Pada Akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 Propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status "Daerah Istimewa" dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal

ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan alam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh".



LAMBANG ACEH

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 4/1961 tanggal 17 Januari 1961 telah menetapkan suatu Piagam Daerah Istimewa Aceh yang diberi nama "Piagam Pantja Tjita" dan pada tanggal 9 Februari 1961 bertempat di halaman Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh telah dilangsungkan upacara peresmian Piagam Panca Cita sebagai lambang Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor 39/1961 tanggal 20 Mei 1961 yang berintikan 5 (lima) unsur dan sifat sebagai berikut:

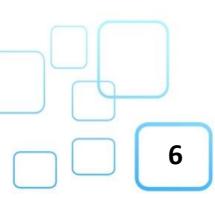


1. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berusaha dengan penuh daya upaya untuk menciptakan keadilan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan segenap lapisan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berusaha dengan penuh daya upaya untuk memadu bakat dan sifat kepahlawanan sejati di dalam dada segenap lapisan rakyat.
3. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan penuh daya upaya ke arah tercapainya kemakmuran yang merata bagi segenap lapisan rakyat.
4. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berusaha dengan penuh daya upaya untuk memupuk suasana kerukunan di dalam pergaulan hidup segenap lapisan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah yang meliputi segenap lapisan rakyat.

Lambang Panca Cita berbentuk segi lima yang mengisyaratkan falsafah hidup rakyat dan Pemerintah Daerah, mempunyai arti:

1. Dacing melambangkan: Keadilan
2. Rencong melambangkan: Kepahlawanan
3. Padi, Lada, Kapas dan Cerobong melambangkan: Kemakmuran
padi: bahan pangan pokok, lada: kekayaan utama Aceh di masa lampau, kapas: bahan sandang utama, cerobong: industrialisasi
4. Kubah Mesjid melambangkan: Keagamaan/Kerukunan
5. Kitab & Kalam Melambangkan: Kesejahteraan (Kesejahteraan yang menjadi idaman & tujuan kita hendaklah berlandaskan ilmu & pengetahuan).

Warna Dasar Putih pertanda kemurnian, kuning pertanda kejayaan, dan hijau pertanda kesejahteraan dan kemakmuran.



GEOGRAFIS

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2'' - 06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6'' - 98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 761 mukim, dan 6.464 gampong atau desa.

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.



Tabel 2.1.
Luas Provinsi Aceh Menurut Penggunaan Lahan, Tahun 2013

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.401 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha.



<http://media.nationalgeographic.co.id>

Penggunaan	Luas (Ha)	Percentase (%)
(1)	(2)	(3)
Perkampungan	125 439	2,21
Industri	3 928	0,07
Pertambangan	198 000	3,49
Persawahan	397 512	7,00
Pertanian tanah kering semusim	139 049	2,45
Kebun	305 624	5,38
Perkebunan		
- Perkebunan besar	200 680	3,53
- Perkebunan rakyat	800 401	14,10
Padang rumput, alang-alang, semak	232 023	4,09
Hutan (lebat, belukar, sejenis)	2 270 080	39,99
Perairan Darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau,rawa)	206 741	3,64
Tanah Terbuka, Tandus, Rusak	8 433	0,15
Lainnya	789 171	13,90
Total	5 677 081	100,00

Sumber: Aceh Dalam Angka

Tabel 2.2.
Kondisi Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Banda Aceh Tahun 2013

Kedua iklim di Propinsi Aceh adalah iklim tropis. Hal ini berhubungan dengan posisinya yang terletak di sekitar garis katulistiwa. Musim kemarau terjadi pada sekitar bulan April sampai bulan September, sedangkan musim penghujan terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, namun demikian curah hujan terjadi sepanjang tahun. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Nopember sampai bulan Februari. Suhu udara rata-rata antara $22^{\circ} - 35^{\circ}$ Celcius dengan kelembaban nisbi udara antara 73 – 87 persen.

Penggunaan	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm)	Kelembaban (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	23,1	283,3	84
Februari	23,0	136,1	84
Maret	23,2	89,7	83
April	23,5	106,2	83
Mei	23,3	131,1	81
Juni	23,3	167,2	74
July	22,3	83,8	73
Agustus	22,2	40,4	77
September	22,0	164,6	74
Okttober	22,3	56,6	82
Nopember	22,2	149,8	86
Desember	22,8	214,8	87
Rata-rata	22,8	135,3	80,7

Sumber: Stasiun Meteorologi Blang Bintang Banda Aceh

Kabupaten/Kota	Ibukota	Banyaknya		
		Kecamatan	Mukim	Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Simeulue	Sinabang	10	29	138
Aceh Singkil	Singkil	11	16	116
Aceh Selatan	Tapaktuan	18	43	260
Aceh Tenggara	Kutacane	16	51	385
Aceh Timur	Idi	24	53	511
Aceh Tengah	Takengon	14	18	295
Aceh Barat	Meulaboh	12	32	322
Aceh Besar	Kota Jantho	23	68	604
Pidie	Sigli	23	94	727
Bireuen	Bireuen	17	75	609
Aceh Utara	Lhoksukon	27	67	852
Aceh Barat Daya	Blangpidie	9	20	132
Gayo Lues	Blangkejeren	11	25	136
Aceh Tamiang	Karang Baru	12	27	213
Nagan Raya	Suka Makmue	10	30	222
Aceh Jaya	Calang	9	21	172
Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	10	11	232
Pidie Jaya	Meureudu	8	34	222
Banda Aceh	Banda Aceh	9	17	90
Sabang	Sabang	2	7	18
Langsa	Langsa	5	6	66
Lhokseumawe	Lhokseumawe	4	9	68
Subulussalam	Subulussalam	5	8	74
Jumlah		289	761	6.464

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota	Jumlah		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Rumah Tangga	Penduduk	
(1)	(2)	(3)	(4)
Simeulue	20 145	83 173	46
Aceh Singkil	24 903	110 706	60
Aceh Selatan	48 970	210 071	50
Aceh Tenggara	43 747	186 083	45
Aceh Timur	87 994	393 135	72
Aceh Tengah	46 900	185 733	42
Aceh Barat	46 247	187 459	68
Aceh Besar	87 793	383 477	132
Pidie	99 656	398 446	126
Bireuen	95 779	413 817	230
Aceh Utara	130 035	556 556	207
Aceh Barat Daya	30 335	133 191	71
Gayo Lues	20 827	84 511	15
Aceh Tamiang	62 929	264 420	125
Nagan Raya	38 178	149 596	42
Aceh Jaya	22 660	85 908	22
Bener Meriah	33 935	131 999	69
Pidie Jaya	36 194	140 769	148
Banda Aceh	60 033	249 282	4 451
Sabang	8 355	32 191	264
Langsa	35 027	157 011	773
Lhokseumawe	41 188	181 976	1 189
Subulussalam	15 469	72 414	62
Jumlah/Total	1 137 299	4 791 924	84

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.3.
Nama-Nama Ibukota Kabupaten/Kota, Banyaknya Kecamatan, Mukim, dan Gampong/Desa Tahun 2013

Provinsi Aceh dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah administratif. Saat ini terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

Untuk pemerintahan di bawah kabupaten/kota, selain memiliki kecamatan dan gampong (wilayah setingkat desa) berdasarkan Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 dibentuk Mukim yang berkedudukan langsung dibawah camat dan wilayahnya terdiri atas beberapa gampong. Hingga saat ini Provinsi Aceh memiliki 289 kecamatan, 761 mukim dan 6.464 gampong.

Wilayah dengan jumlah perangkat administratif paling banyak adalah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 27 kecamatan, 67 mukim dan 852 gampong.

Tabel 2.4.
Jumlah Rumahtangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013

Provinsi Aceh dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah administratif dan saat ini terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

Untuk pemerintahan di bawah kabupaten/kota, selain memiliki kecamatan dan gampong (wilayah setingkat desa) berdasarkan Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 dibentuk Mukim yang berkedudukan langsung dibawah camat dan wilayahnya terdiri atas beberapa gampong. Hingga saat ini Provinsi Aceh memiliki 289 kecamatan, 761 mukim dan 6.464 gampong.

Wilayah dengan jumlah perangkat administratif paling banyak adalah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 27 kecamatan, 67 mukim, dan 852 gampong.

PEMERINTAHAN

Pemerintahan di Aceh tidak terlepas dari perkembangan sejarah Pemerintahan Zaman Kerajaan, Zaman Hindia Belanda, Zaman Jepang, dan Zaman Kemerdekaan.

1. Zaman Kerajaan

a. Pemerintahan Gampong

Pemerintahan “Gampong” (desa) merupakan tingkat pemerintahan yang terendah dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh 4 orang anggota Badan Penasehat yang dinamakan “TUHA PEUT”. Untuk urusan-urusan keagamaan dipimpin seorang “Teungku Meunasah”. Segala urusan masyarakat, keagamaan dan pemerintahan di “Gampong” selalu dijalankan atas dasar saling pengertian antara “Keuchik” dan “Teungku meunasah”. Keberadaan kedua pemimpin tersebut dianggap sebagai Bapak dan Ibu dari keluarga Gampong oleh rakyat. Walaupun keberadaan mereka termasuk pemimpin informal, namun cukup disegani dan dihormati anggota masyarakat.

b. Pemerintahan Mukim

Satu “Mukim” meliputi beberapa “Gampong” dan dipimpin oleh “Imuem Rakyat”, dalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dikenal dengan sebutan Imuem Mukim

c. Pemerintahan Uleebalang

Pemerintahan Uleebalang merupakan pemerintahan tingkat ketiga yang dipimpin oleh seorang Uleebalang. Dalam menjalankan pemerintahan ia dibantu oleh suatu Majelis Penasehat yang terdiri dari cerdik-pandai, alim ulama dan “Ureueng-ureueng patot” (orang-orang patut). Kecuali dalam soal-soal kecil, ia selalu harus mendengarkan pendapat dan nasehat Majelis Penasehat sebelum suatu keputusan diambil dan dijalankan.

Disamping menjadi Kepala Kepolisian dalam wilayahnya, “Uleebalang” juga menjadi Ketua Pengadilan (pengadilan Uleebalang), dengan seorang “Kadhi” sebagai wakilnya dan beberapa orang Ulama dan cerdik-pandai sebagai anggota.

Perkara-perkara yang diadili terutama pada tingkat banding (lanjutan).

d. Pemerintahan Panglima Sagoe

Jabatan “Panglima Sagoe” atau Panglima Sogi hanya terdapat di Aceh Besar saja dan diadakan semenjak pemerintahan Ratu Nurul Alam (1676-1678) yakni Panglima Sagoe XXVI Mukim, Panglima Sagoe XXV Mukim dan Panglima Sagoe XXII Mukim.

Jabatan tersebut merupakan “Federatie-hoofd” yang mengurus hal-hal yang mengenai kepentingan bersama dari “Uleebalang-uleebalang” dalam “Sagoe” yang bersangkutan. Bilamana negara berada dalam keadaan bahaya atau keadaan perang, “Panglima Sagoe” menjadi kepala pemerintahan sipil dan militer dalam wilayahnya dan semua “Uleebalang” dan “Imuem” yang berdiri sendiri itu menjadi bawahan langsung Panglima Sagoe. Pada tingkat Panglima Sagoe ini juga terdapat Majelis Penasehat dan Badan Pengadilan.

e. Pemerintahan Pusat (Tingkat Kerajaan)

Pimpinan tertinggi Pemerintah Pusat Kerajaan berada di tangan Sultan. Dalam menjalankan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa badan dan pejabat yaitu

(1) Majelis Musyawarah

Majelis Musyawarah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (Wazir) sebagai wakil ketua (Ketuanya adalah Sultan sendiri) dan beberapa orang menteri sebagai anggota. Majelis ini membahas soal-soal yang penting dan keputusan-keputusannya dijalankan oleh atau atas nama Sultan.

(2) Pengadilan Sultan

Pengadilan Sultan diketuai oleh Sultan sendiri dan Malikul Adil sebagai wakil ketua dengan beberapa orang ulama dan cerdik-pandai sebagai anggota. Pengadilan ini merupakan tingkat pengadilan tertinggi yang mengadili perkara-perkara besar dan perkara-perkara banding.

(3) Badan Kepolisian

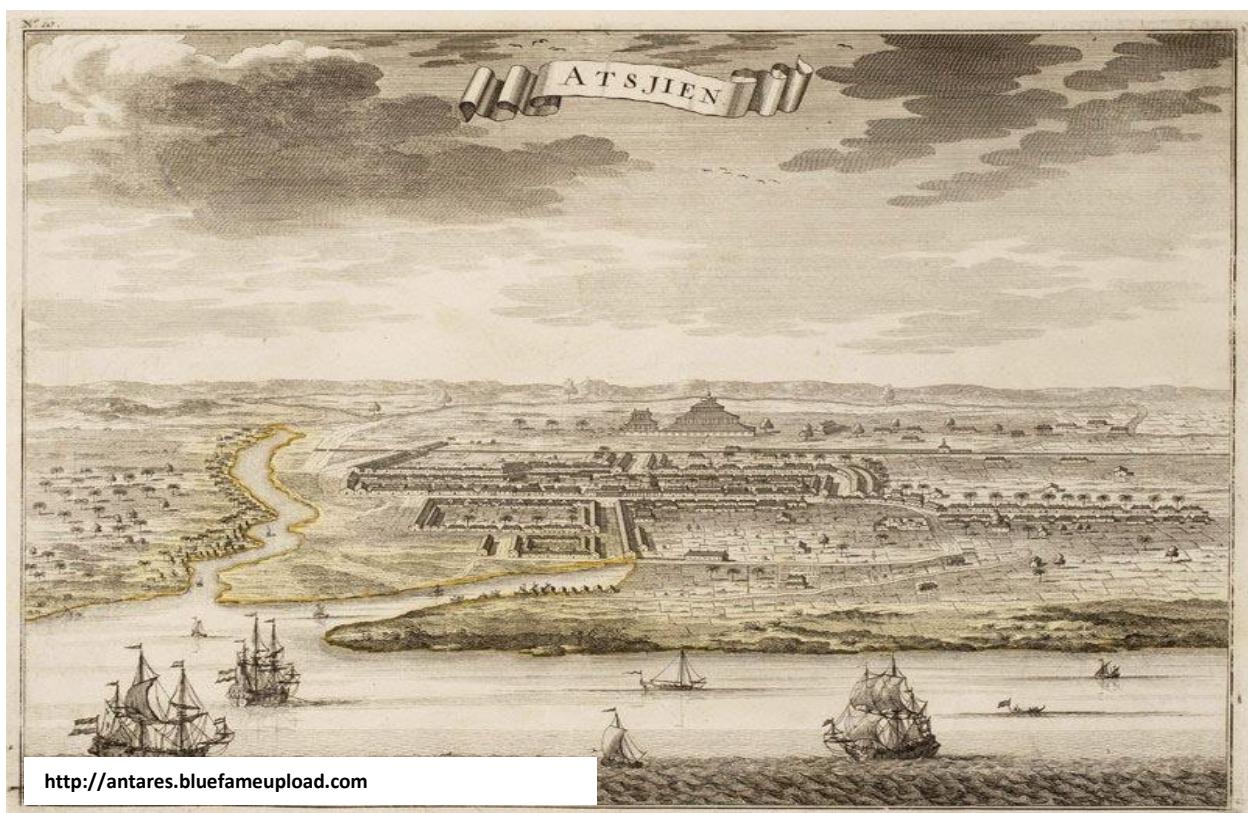
Badan Kepolisian dipimpin oleh Sultan sendiri dan wakil ketuanya bergelar “Teuku Rama Setia”.

(4) Urusan Angkatan Perang (darat dan laut)

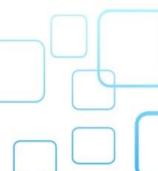
Pimpinan angkatan perang, baik angkatan darat maupun angkatan laut berada langsung ditangan Sultan dan dibantu oleh seorang Laksamana atau lebih dikenal sebagai wakil kepala balatentara. Khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatan Raja beserta keluarganya diserahkan kepada seorang Panglima Kerajaan yang bergelar “Panglima Kaway”.

(5) Urusan Sekretariat (Administrasi)

Untuk mengatur dan mengendalikan urusan-urusan sekretariat atau administrasi Kerajaan diangkat dua orang pejabat yang masing-masing bergelar “Teuku Keureukon Katibulmuluk Sri Indrasura” dan “Teuku Keureuekon Katibulmuluk Sri Indramuda”.



<http://antares.bluefameupload.com>



2. Zaman Hindia Belanda (1905-1942)

Meskipun perang Aceh telah dianggap berakhir, namun pemerintah Hindia Belanda belum sepenuhnya mampu menguasai keadaan karena pemberontakan-pemberontakan dan perlawanan rakyat masih terus berlangsung berlarut-larut seperti halnya api dalam sekam.

Setelah Belanda menguasai daerah Aceh maka kesultanan di Aceh dihapuskan. Sebelum tahun 1918 di Kutaradja (sekarang Banda Aceh) ditempatkan seorang “Geoverneur van Aceh en’ On Derhoorigheden” dan tahun 1918 diganti oleh seorang Geoverneur (Civil Geoverneur). Dengan terbentuknya “Geoverneur Sumatera” Aceh dijadikan karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Karesidenan Aceh merupakan suatu daerah administratif yang wilayah-wilayahnya dibedakan dalam dua corak, yaitu:

- “Zelfbestuursgebied” atau daerah-daerah “Zelfbestuursgebied” yang terdapat di luar “Afdeling” Aceh Besar atau “Onder-Afdeling” Singkil.
- “Recgtsreekbestuursgebied” atau “Gouvernementsgebied”, yaitu daerah-daerah yang dikuasai langsung yakni “Afdeling” Aceh Besar dan “Onder-Afdeling” Singkil.

Karesidenan Aceh dibagi atas beberapa Afdeling yang dikepalai oleh seorang Asisten-resident, dan Afdeling-afdeling dibagi lagi atas beberapa “Onder-Afdeling” yang dikepalai oleh seorang “Controleur”, yang semuanya terdiri dari pamong-praja bangsa Belanda.

Seluruh wilayah karesidenan Aceh dibagi dalam empat “Afdeling” dan 22 “Onder-Afdeling” yaitu:

- a. Afdeling Aceh Besar, ibukotanya Kutaraja. Terbagi atas empat Onder-Afdeling :
 - 1). Onder-afdeling Kutaraja, ibukotanya Kutaraja.
 - 2). Onder-afdeling Seulimeum, ibukotanya Seulimeum
 - 3). Onder-afdeling Lho’nga, ibukotanya Lho’nga
 - 4). Onder-afdeling Sabang, ibukotanya Sabang
- b. Afdeling Eskust van Aceh, ibukotanya Meulaboh. Terbagi atas enam Onder-afdeling :
 - 1). Onder-afdeling Meulaboh, ibukotanya Meulaboh
 - 2). Onder-afdeling Calang, ibukotanya Calang
 - 3). Onder-afdeling Tapaktuan, ibukotanya Tapaktuan

- 4). Onder-afdeling ZA Landscappen, ibukotanya adalah Bakongan
- 5). Onder-afdeling Singkil, ibukotanya Singkil
- 6). Onder-afdeling Simeulue, ibukotanya Simeulue

- c. Afdeling Nordkust van Aceh, ibukotanya Sigli. Terbagi atas enam Onder-afeling :
 - 1). Onder-afdeling Sigli, ibukotanya Sigli
 - 2). Onder-afdeling Lameulo, ibukotanya Lameulo (Kota Bakti)
 - 3). Onder-afdeling Meureudu, ibukotanya Meureudu
 - 4). Onder-afdeling Bireuen, ibukotanya Bireuen
 - 5). Onder-afdeling Takengon, ibukotanya Takengon
 - 6). Onder-afdeling Lhokseumawe, ibukotanya Lhokseumawe
- d. Afdeling Ooskust van Aceh, ibukotanya Langsa. Terbagi atas enam Onder-afdeling :
 - 1). Onder-afdeling Langsa, ibukotanya Langsa
 - 2). Onder-afdeling Idi, ibukotanya Idi
 - 3). Onder-afdeling Lhoksukon, ibukotanya Lhoksukon
 - 4). Onder-afdeling Tamiang, ibukotanya Kualasimpang
 - 5). Onder-afdeling Tanah Alas, ibukotanya Kutacane
 - 6). Onder-afdeling Gayo Lues dan Serbajadi, ibukotanya Blangkejeren

Selanjutnya Onder-afdeling itu dibagi atas distrik-distrik yang untuk Gouvernementsgebied dikenal dengan nama Uleebalang Schaap dan Zelfsandige Imuemschaap dan di daerah-daerah Bestuursgebied dikenal dengan nama daerah Landschap. Distrik dibagi atas Mukim dan selanjutnya dibagi atas Gampong.



3. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Dalam zaman pendudukan Jepang sistem pemerintahan Belanda pada umumnya masih diteruskan. Hanya saja nama-nama daerah diganti dengan nama dalam bahasa Jepang dan kedudukan pembesar-pembesar diganti oleh pembesar-pembesar Jepang.

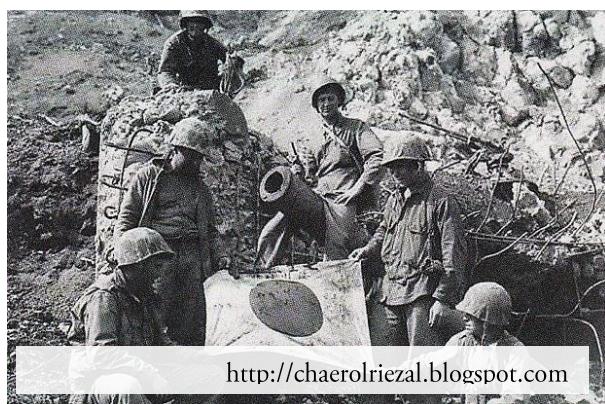
Karesidenan diganti dengan nama Syuu dan dikepalai oleh Syun Tyokaan yang dijabat oleh seorang pembesar Jepang.

Afdeling menjadi Bunsyu dikepalai oleh Bunsyutyo, juga pembesar Jepang. Onder-afdeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guntyo yang dijabat oleh orang Indonesia kecuali di tempat terpencil seperti Sabang, Sinabang, Singkil dan Kutacane ditempatkan seorang Tyuzai kikan, juga berkebangsaan Jepang.

Wilayah Zelfbestuurder, Uleebalang, dan Zelfstandige Imuemschaap dinamakan Son dan dikepalai oleh Sontyo. Mukim menjadi Ku dan dikepalai oleh Kutyo. Gampong diganti nama Kumi dan dikepalai ole Kumityo.

Diantara perubahan-perubahan yang diadakan Jepang antara lain :

- Kekuasan Kepolisian dipisahkan dari Pamongpraja dan oleh Keimubutyo dan untuk Syo dikepalai oleh Keimubutyo dan untuk Bunsyo dikepalai oleh Keumubutyo. Disamping polisi umum diadakan pula polisi bersenjata (Tokubetsu).
- Dalam bidang pengadilan dikeluarkan Syuurei nomor 10 Syowa dan 19 Inchi gatsyo yang menyederhanakan susunan pengadilan dengan menghapus badan-badan pengadilan yang beranekaragam pada masa Hindia Belanda.



4. Zaman Kemerdekaan

a. Periode 1945-1950

Wilayah Aceh tidak pernah dapat diduduki dan dikuasai oleh Belanda, justru itu setiap ketetapan dan peraturan pemerintah dapat dijalankan dengan mudah di daerah ini. Dalam masa perjuangan fisik (1945-1949) Aceh merupakan daerah modal perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan antara lain bahwa Indonesia terbagi dalam delapan propinsi, yakni Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sumatera, Propinsi Kalimantan, Propinsi Sulawesi, Propinsi Maluku dan Propinsi Sunda Kecil.

Setiap propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Sebagai Gubernur Propinsi Sumatera ditetapkan Mr. T. Mohd. Hasan. Wilayah propinsi dibagi lagi atas keresidenan yang dikepalai seorang Residen. Dalam Propinsi Sumatera Aceh merupakan Keresidenan Pertama yang dipimpin T. Nyak Arief dan diganti oleh T. Chik M. Daudsyah. Untuk kelancaran roda pemerintahan di Sumatera tanggal 28 April 1947 dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Sumatera sebagai daerah otonom.

Sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah keresidenan pemerintah mulai melaksanakan beberapa perubahan :

- a) Daerah Landschaap diganti namanya dengan Negeri (sekarang Kecamatan) dan dilakukan pemilihan Dewan Pemerintah Negeri (Bestuur Komisie) yang terdiri dari 5 orang.
- b) Onder-afdeling diubah menjadi Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah
- c) Afdeling diubah menjadi Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak
- d) Untuk membantu Kepala Daerah dibentuk Komiter Nasional Derah pada tingkat Keresidenan, Luhak dan Wilayah.

Aceh mempunyai sembilan wakil dalam Dewan Perwakilan Sumatera yang dilantik pada tanggal 17 April 1946 di Bukittinggi. Sutikno Patmo Sumarto terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Sumatera yang beranggotakan lima orang.

Mengingat situasi negara yang semakin gawat akibat peningkatan kegiatan Belanda, maka dengan Keputusan

Wakil Presiden No.3/BKP/U/47 tanggal 26 Agustus 1947, daerah Keresidenan Aceh, kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer dengan Jenderal Mayor Tgk.M. Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer.

Pada tanggal 15 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga propinsi otonom yakni Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan.

Propinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Untuk melaksanakan pemerintahan dibentuk Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera yang bertanggungjawab kepada Dewan Menteri atau Menteri.

Mr. T Mohd Hasan diangkat menjadi Ketua Komisariat yang berkedudukan di Bukittinggi, sedangkan Mr. SM Amin diangkat sebagai Gubernur Sumatera Utara yang dilantik oleh Presiden di Kutaradja pada tanggal 15 Juni 1948. Dewan perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang beranggotakan 45 orang mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 12 Desember 1948 di Tapaktuan yang antara lain memutuskan :

1. Kutaradja ditetapkan sebagai ibukota sementara Propinsi Sumatera Utara
2. Memilih lima orang anggota badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara
3. Memakai Undang-undang No. 22 tahun 1948 sebagai dasar Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1948 No. 23/Pem/PDRI Gubernur Sumatera Utara Mr. SM Amin diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Sedangkan kekuasaan sipil dan militer untuk Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo dipegang oleh Gubernur Militer Tgk M Daud Beureueh.

Dalam setiap Pemerintah Sipil di setiap Keresidenan dijalankan oleh Dewan Pertahanan atas nama dan bertanggungjawab kepada Gubernur Militer.

Dewan Pemerintah Daerah Aceh berkedudukan di Kutaraja. Dewan ini diketuai oleh Residen Aceh TM Daudsyah dengan anggota-anggota yang terdiri dari M. Nur El Ibrahimy, M. Yunan Nasution, Yahya Siregar dan Amelz yang juga sebagai anggota Badan eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

Pada akhir 1949 dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/des/WK.P.M/49 tanggal 17 Desember 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan dibentuk menjadi Propinsi tersendiri (Propinsi Aceh yang pertama) yang wilayahnya meliputi Keresidenan Aceh dahulu ditambah dengan sebagian dari daerah Kabupaten Langkat yang berada di luar daerah "Negara Bagian Sumatera Timur".

Propinsi Aceh ini adalah bagian dari Negara Republik Indonesia yang pada waktu itu merupakan salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Tgk. M Daud Beureueh yang sebelumnya adalah Gubernur Militer Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo diangkat sebagai Gubernur Propinsi Aceh yang baru dibentuk ini.

Setelah terbentuknya Propinsi Aceh yang pertama, maka dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum bertingkat dan demokratis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1946.

Gubernur Propinsi Aceh Tgk. M Daud Beureueh menjadi Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dan Tgk Abdul Wahab menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sejalan dengan itu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan pemerintah dan dewan perwakilan pada tingkat Propinsi dan Kabupaten disesuaikan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948.

b. Periode 1950-1955

Kemudian dalam rangka kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950 dan pernyataan bersama tanggal 20 Juli 1950, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 yang menetapkan bahwa daerah Republik Indonesia Serikat terbagi atas sepuluh propinsi administratif. Propinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur dahulu merupakan salah satu diantaranya. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai daerah otonom yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Dengan perkembangan yang terakhir ini, maka Aceh kembali menjadi Keresidenan Administratif yang dikepalai oleh seorang Residen.

Peleburan Propinsi Aceh ini bertentangan dengan keinginan rakyat Aceh yang berakibat pada timbulnya pergolakan dan

ketidakstabilan baik di bidang sosial politik maupun pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan meletusnya peristiwa Aceh pada tanggal 21 September 1953. Pergolakan ini mengakibatkan semua kegiatan ekonomi dan pemerintahan, serta kehidupan kemasyarakatan tidak berjalan dengan baik.

c. Periode 1956-2001

Untuk mengatasi kekalutan tersebut dan setelah melalui pembicaraan di DPR, dikeluarkan Undang-undang No. 24 tahun 1956 yang menetapkan kembali daerah Aceh sebagai propinsi.

Sehubungan dengan pembentukan kembali Propinsi Aceh maka pada tanggal 27 Januari 1957 dilantik Gubernur Propinsi Aceh beserta anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Dalam waktu yang bersamaan, dilakukan serah terima pemerintahan dari Gubernur Sumatera Utara Sutan Kumala Pontas kepada Gubernur Propinsi Aceh Ali Hasymi. Kemudian dimulailah usaha penyusunan dan pembentukan organisasi pemerintah daerah baik berupa dinas-dinas otonom, maupun pengangkatan pejabat dan pegawai.

Walaupun Aceh telah menjadi salah satu daerah propinsi tersendiri namun gejolak sosial masih berkelanjutan terutama menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Pemerintah Pusat mengirim Mr. Hardi, Wakil Perdana Menteri I untuk mengadakan musyawarah dengan berbagai pihak dalam rangka penyelesaian gejolak sosial tersebut (lebih dikenal dengan Missi Hardi). Missi Hardi ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan otonomi yang lebih luas bagi Propinsi Aceh yang dituangkan dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/MISSI/1959. Keputusan tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 16 Mei 1959 Dewan Swatantra Tingkat I Aceh menjadi "Daerah Istimewa Aceh".

d. Periode 2001-2009

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no.

18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan alam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" (NAD) menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

e. Periode 2009-2014

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada dasar umum penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kekhususan yaitu dimasukkannya dasar ke-Islaman. Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.

1. DPRA dan DPRK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Jumlah anggota DPRA adalah $1\frac{1}{4}$ kali lebih banyak dari jumlah anggota DPRD Provinsi lainnya dari yang ditetapkan undang-undang.

DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi. DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih membentuk 5 (lima) komisi.

Tugas dan wewenang DPRA antara lain:

- o membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
- o memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;

Tugas dan wewenang DPRK antara lain adalah membentuk Qanun Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

2. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman, serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam Qanun Aceh. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati/Wakil Walikota. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota.

Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur antara lain dalam pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Wakil Bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota antara lain dalam:

- o pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam;
- o pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- o pemberdayaan adat;
- o pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;

3. Pemerintahan Mukim dan Gampong

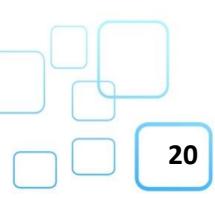
Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Mukim yang dibantu oleh Tuha Peuet Mukim atau nama lain. Imeum Mukim dipilih melalui Musyawarah Mukim yang tata cara pemilihannya diatur dengan Qanun Aceh. Ketentuan organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain. Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet atau nama lain. Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur dengan Qanun Aceh. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan gampong dilakukan dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat Pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.



<http://atjehhacker.blogspot.com/>





PERTANIAN

Terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian Provinsi Aceh dari sektor pertanian ke sektor industri, tidak membuat sektor pertanian kehilangan perannya. Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian di Provinsi Aceh. Menurut hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), terdapat sekitar 644.851 rumah tangga pertanian dari 1.137.299 seluruh RT di Aceh, atau 56,70 persen dari jumlah rumah tangga menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Namun gambaran ini tidak sertamerta membenarkan pendapat bahwa pembangunan di sektor pertanian mengalami kemajuan yang pesat atau malahan sebaliknya masih mengalami kendala. Informasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk memberikan keterangan yang lebih rinci mengenai ciri maupun kegiatan serta tingkat kesejahteraan petani.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mengembangkan fungsi dan tugas menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan lain sebagainya, melakukan penyuluhan bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan menjaga agar tanah tetap subur serta memperoleh hasil panen yang terus meningkat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui ujung tombaknya di lapangan melakukan bimbingan bagaimana cara mengolah lahan, cara menanam padi, menyiangi dan pemupukan.

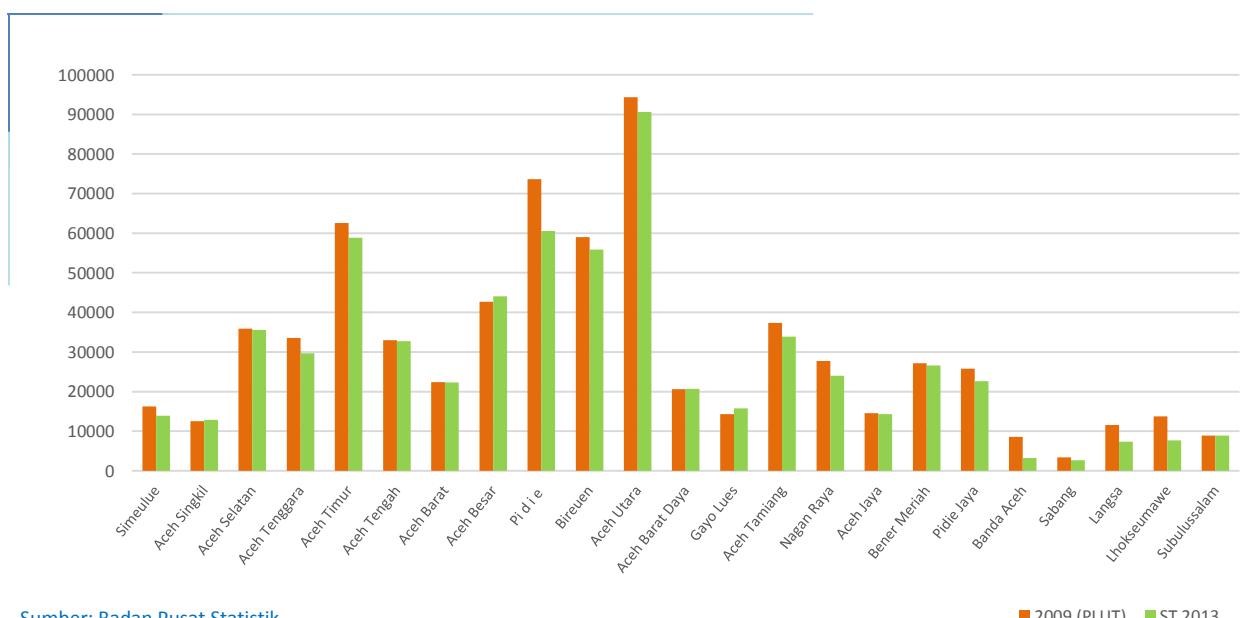
Disamping itu sesuai dengan visi dan misi untuk dapat mengolah lahan dengan baik, harus ditunjang oleh tenaga yang handal. Untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat petani, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

Perkembangan Rumah Tangga Pertanian dan Luas Lahan yang Dikuasai

Rumah Tangga Pertanian

Jumlah rumah tangga pertanian di Provinsi Aceh hasil PLUT Tahun 2009 dan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST'13) terjadi penurunan sebesar 7,80 persen atau dari 699.370 rumah tangga pada tahun 2009 menjadi 644.851 rumah tangga pada tahun 2013. Sebagian besar jumlah RT pertanian mengalami penurunan di kabupaten/kota di Aceh, kecuali Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Subulussalam. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gayo Lues sebesar 10,32%, yaitu dari 14.306 RT pertanian pada tahun 2009 menjadi 15.783 RT pertanian pada tahun 2013. Sedangkan peningkatan terkecil terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dari 20.576 rumah tangga pada tahun 2009 menjadi 20.666 rumah tangga pada tahun 2013 atau peningkatannya hanya 0,44 persen.

Gambar 4.1.
Jumlah Rumahtangga Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

■ 2009 (PLUT) ■ ST 2013

Tabel 4.1.
Jumlah Rumah Tangga Pertanian Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 1983-2013

Kabupaten/Kota	ST 1983	ST 1993	2009 (PLUT)	ST 2013	Pertumbuhan 2009-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Simeulue	-	-	16.210	13.935	(14,03)
2.Aceh Singkil	-	-	12.508	12.889	3,05
3.Aceh Selatan	43.125	55.812	35.871	35.567	(0,85)
4.Aceh Tenggara	23.931	3.125	33.538	29.684	(11,49)
5.Aceh Timur	54.994	90.421	62.548	58.847	(5,92)
6.Aceh Tengah	30.573	40.786	32.961	32.714	(0,75)
7.Aceh Barat	48.905	67.307	22.357	22.334	(0,10)
8.Aceh Besar	35.057	38.730	42.685	44.053	3,20
9.Pidie	58.650	70.566	73.670	60.586	(17,76)
10.Bireuen	-	-	59.046	55.830	(5,45)
11.Aceh Utara	98.685	126.698	94.357	90.658	(3,92)
12.Aceh Barat Daya	-	-	20.576	20.666	0,44
13.Gayo Lues	-	-	14.306	15.783	10,32
14.Aceh Tamiang	-	-	37.315	33.878	(9,21)
15.Nagan Raya	-	-	27.712	23.993	(13,42)
16.Aceh Jaya	-	-	14.567	14.338	(1,57)
17.Bener Meriah	-	-	27.147	26.616	(1,96)
18.Pidie Jaya	-	-	25.819	22.623	(12,38)
19.Banda Aceh	853	675	8.593	3.236	(62,34)
20.Sabang	1.852	816	3.399	2.687	(20,95)
21.Langsa	-	-	11.584	7.338	(36,65)
22.Lhokseumawe	-	-	13.721	7.667	(44,12)
23.Subulussalam	-	-	8.880	8.929	0,55
Total	396.625	494.936	699.370	644.851	(245,31)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Luas Lahan yang Dikuasai

Sensus Pertanian tahun 2013 juga mengumpulkan data tentang luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian. Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, pada tahun 2009 terlihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan antara 10.000-19.999 m² mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 151.551 rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2013 rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan antara 2.000- 4.999 m² yang lebih dominan yaitu sebanyak 162.850 rumah tangga. Kelompok luas lahan 1.000-1.999 m² dan 2.000-4.999 m² adalah kelompok yang mengalami peningkatan jumlah rumah tangga pertanian, sedangkan kelompok penguasaan lahan lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009.

Tabel 4.2.
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan Yang Dikuasai Tahun 2009 dan 2013

Golongan Luas Lahan (m ²)	2009	2013	Pertumbuhan	
			Absolut	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<1.000	70.979	52.194	(18.785)	(26,47)
1.000-1.999	53.699	68.505	14.806	27,57
2.000-4.999	131.613	162.850	31.237	23,73
5.000-9.999	138.734	130.940	(7.794)	(5,62)
10.000-19.999	151.551	137.689	(13.862)	(9,15)
20.000-29.999	75.751	51.941	(23.810)	(31,43)
≥30.000	77.043	40.732	(36.311)	(47,13)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa golongan luas lahan antara 2.000–4.999 m² merupakan golongan luas lahan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di tahun 2013. Pada tahun 2009 tercatat jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan antara 2.000–4.999 m² adalah sebanyak 131.613 rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 23,73 persen, yaitu menjadi sebanyak 162.850 rumah tangga.

Pengguna Lahan

Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan ternyata masih mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Aceh. Dari sebanyak 644.851 rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Aceh, sebesar 98,90% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (637.778 rumah tangga). Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 1,10%, atau sebanyak 7.073 rumah tangga.

Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 5.000 m²) dan rumah tangga petani nongurem (rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lebih dari atau sama dengan 5.000 m² lahan). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan masih didominasi oleh rumah tangga petani nongurem. Dari sebanyak 637.778 rumah tangga pertanian pengguna lahan di Provinsi Aceh, sebesar 56,61 persen (361.049 rumah tangga) merupakan rumah tangga petani nongurem. Sedangkan rumah tangga petani gurem tercatat sebesar 43,39 persen, atau sebanyak 276.729 rumah tangga.

Tabel 4.3.
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2013

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan					Rumah Tangga Petani Gurem			
	2009	2013	Pertumbuhan		2009	2013	Pertumbuhan		
			Absolut	%			Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.Simeulue	15.964	13.622	(2.342)	(14,67)	1.577	3.074	1.497	94,93	
2.Aceh Singkil	11.553	12.035	482	4,17	3.060	2.872	(188)	(6,14)	
3.Aceh Selatan	35.171	35.089	(82)	(0,23)	12.483	11.600	(883)	(7,07)	
4.Aceh Tenggara	33.394	29.668	(3.726)	(11,16)	5.414	5.718	304	5,62	
5.Aceh Timur	62.106	58.191	(3.915)	(6,30)	21.046	26.211	5.165	24,54	
6.Aceh Tengah	32.904	32.638	(266)	(0,81)	3.222	4.016	794	24,64	
7.Aceh Barat	21.942	21.920	(22)	(0,10)	6.585	6.852	267	4,05	
8.Aceh Besar	42.390	43.732	1.342	3,17	21.837	27.827	5.990	27,43	
9.Pidie	73.083	60.065	(13.018)	(17,81)	27.543	34.856	7.313	26,55	
10.Bireuen	58.492	55.437	(3.055)	(5,22)	31.151	36.246	5.095	16,36	
11.Aceh Utara	93.983	90.091	(3.892)	(4,14)	40.704	52.025	11.321	27,81	
12.Aceh Barat Daya	20.405	20.500	95	0,47	6.807	8.766	1.959	28,78	
13.Gayo Lues	14.303	15.774	1.471	10,28	2.794	3.657	863	30,89	
14.Aceh Tamiang	37.083	33.581	(3.502)	(9,44)	10.234	12.635	2.401	23,46	
15.Nagan Raya	27.539	23.876	(3.663)	(13,30)	7.351	5.247	(2.104)	(28,62)	
16.Aceh Jaya	14.437	14.211	(226)	(1,57)	3.945	3.394	(551)	(13,97)	
17.Bener Meriah	27.147	26.608	(539)	(1,99)	3.494	3.825	331	9,47	
18.Pidie Jaya	25.626	22.472	(3.154)	(12,31)	10.429	13.754	3.325	31,88	
19.Banda Aceh	8.282	2.858	(5.424)	(65,49)	8.034	2.618	(5.416)	(67,41)	
20.Sabang	3.230	2.474	(756)	(23,41)	2.078	1.217	(861)	(41,43)	
21.Langsa	10.706	6.764	(3.942)	(36,82)	7.863	4.197	(3.666)	(46,62)	
22.Lhokseumawe	12.926	7.305	(5.621)	(43,49)	9.600	5.142	(4.458)	(46,44)	
23.Subulussalam	8.788	8.867	79	0,90	1.572	980	(592)	(37,66)	
Total	691.454	637.778	(53.676)	(7,76)	248.823	276.729	27.906	11,22	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Padi

Luas Tanam

Luas penanaman padi dari tahun 1969 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun ada pada tahun-tahun tertentu yang luas tanamnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 1969 tercatat luas tanam sebesar 210.892 hektar dan tahun 2013 telah mencapai 397.887. Jika dilihat dari jenis padi yang ditanam setiap tahunnya, padi ladang hanya kurang dari 11 persen dari luas padi keseluruhan sedangkan sisanya adalah padi sawah. Perkembangan luas penanaman padi tahun 1969-2013 secara lengkap disajikan pada Tabel 4.4..

Luas Panen

Luas panen padi dari tahun 1969 sampai tahun 2013 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dilihat dari jenisnya, padi ladang berfluktuasi sangat tinggi dibanding dengan padi sawah yang rata-rata mengalami peningkatan luas panen setiap tahunnya.

**Tabel 4.4.****Luas Penanaman Padi Menurut Jenisnya (Hektar)
Tahun 1969-2013**

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	191.301	19.591	210.892
1970	216.120	20.092	236.212
1971	208.490	23.623	232.113
1972	170.551	20.313	190.864
1973	212.110	22.332	234.442
1974	216.975	21.830	238.805
1975	210.536	19.627	230.163
1976	220.048	25.724	245.772
1977	225.306	24.651	249.957
1978	225.448	25.173	250.621
1979	226.875	16.050	242.925
1980	226.665	15.970	242.635
1981	261.647	12.203	273.850
1982	250.679	13.260	263.939
1983	265.956	10.385	276.341
1984	244.974	9.681	254.655
1985	278.944	7.500	286.444
1986	277.070	8.531	285.601
1987	281.376	6.140	287.516
1988	284.233	7.193	291.426
1989	294.888	6.588	301.476
1990	313.633	6.724	320.357
1991	302.796	9.909	312.705
1992	319.249	6.762	326.011
1993	271.317	11.698	283.015
1994	335.385	9.434	344.819
1995	336.133	14.140	350.273
1996	337.832	11.086	348.918
1997	384.487	6.025	390.512
1998	321.279	9.051	330.330
1999	350.189	6.635	356.824
2000	293.392	5.659	299.051
2001	276.626	1.771	278.397
2002	351.106	4.003	355.109
2003	330.298	2.455	332.753
2004	310.003	3.406	313.409
2005	345.291	3.587	348.878
2006	316.387	4.474	320.861
2007	380.095	3.256	383.351
2008	314.490	2.593	317.083
2009	365.363	8.833	374.196
2010	359.645	4.614	364.259
2011	400.917	4.159	405.076
2012	431.277	7.578	438.855
2013	388.881	9.006	397.887

Tabel 4.5.**Luas Panen Padi Menurut Jenisnya (Hektar)
Tahun 1969-2013**

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	203.868	20.055	223.923
1970	200.712	19.246	219.958
1971	198.970	18.605	217.575
1972	202.240	19.246	221.486
1973	206.610	21.339	227.949
1974	209.125	20.985	230.110
1975	203.799	18.563	222.362
1976	216.345	24.673	241.018
1977	219.930	24.106	244.036
1978	205.458	24.339	229.797
1979	212.954	15.644	228.598
1980	210.156	15.319	225.475
1981	227.266	11.867	239.133
1982	250.609	10.414	261.023
1983	254.101	13.526	267.627
1984	258.179	11.386	269.565
1985	260.550	7.524	268.074
1986	274.152	7.628	281.780
1987	274.690	7.491	282.181
1988	288.387	8.311	296.698
1989	292.550	7.343	299.893
1990	306.665	7.733	314.398
1991	299.453	6.211	305.664
1992	318.834	11.208	330.042
1993	314.887	8.702	323.589
1994	322.759	6.282	329.041
1995	328.846	10.407	339.253
1996	339.785	8.483	348.268
1997	328.123	9.438	337.561
1998	346.990	7.759	354.749
1999	351.148	8.669	359.817
2000	331.009	5.756	336.765
2001	293.323	1.889	295.212
2002	311.062	4.069	315.131
2003	364.943	2.693	367.636
2004	367.537	3.431	370.968
2005	334.049	3.844	337.893
2006	316.912	3.877	320.789
2007	357.269	3.448	360.717
2008	326.678	2.431	329.109
2009	352.006	7.369	359.375
2010	347.727	4.554	352.281
2011	375.860	4.826	380.686
2012	381.429	6.374	387.803
2013	411.455	7.728	419.183

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Produksi

Produksi padi dari tahun 1969 sampai tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Tahun 1969 tercatat produksi padi sebesar 646.755 ton GKG (*Gabah Kering Giling*). Sedangkan tahun 2013 produksi padi telah mencapai 1.956.939 ton.

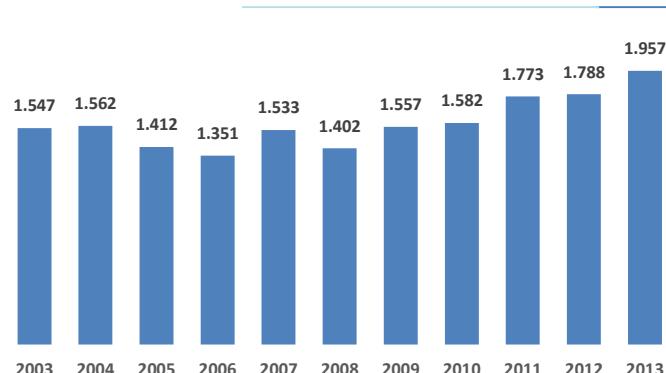
Tabel 4.6.
Luas Penanaman Padi Menurut Jenisnya (Hektar)
Tahun 1969-2013

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	598.565	48.190	646.755
1970	613.941	45.563	659.504
1971	605.448	43.608	649.056
1972	598.235	44.633	642.868
1973	639.059	48.395	687.454
1974	699.270	44.967	744.237
1975	548.851	38.150	587.001
1976	718.186	57.870	776.056
1977	726.760	52.693	779.453
1978	655.395	57.056	712.451
1979	730.781	35.897	766.678
1980	781.693	30.501	812.194
1981	891.437	22.868	914.305
1982	929.206	19.754	948.960
1983	952.782	25.629	978.411
1984	979.015	21.292	1.000.307
1985	988.266	13.837	1.002.103
1986	1.060.825	13.157	1.073.982
1987	1.073.207	13.457	1.086.664
1988	1.080.450	15.673	1.096.123
1989	1.132.663	15.385	1.148.048
1990	1.183.501	16.316	1.199.817
1991	1.209.390	12.561	1.221.951
1992	1.293.314	25.183	1.318.497
1993	1.280.038	19.661	1.299.699
1994	1.315.662	13.874	1.329.536
1995	1.345.629	22.445	1.368.074
1996	1.400.425	18.703	1.419.128
1997	1.360.971	21.934	1.382.905
1998	1.422.995	17.160	1.440.155
1999	1.459.726	18.986	1.478.712
2000	1.392.026	12.555	1.404.581
2001	1.242.373	4.239	1.246.612
2002	1.305.401	8.764	1.314.165
2003	1.541.506	5.993	1.547.499
2004	1.554.528	7.555	1.562.083
2005	1.403.141	8.508	1.411.649
2006	1.342.137	8.611	1.350.748
2007	1.525.604	7.765	1.533.369
2008	1.396.814	5.474	1.402.288
2009	1.539.449	17.410	1.556.859
2010	1.571.040	11.351	1.582.391
2011	1.760.657	12.304	1.772.961
2012	1.772.982	15.304	1.788.286
2013	1.937.890	19.049	1.956.939

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Tahun 1984 merupakan awal dari produksi padi yang mencapai angka diatas satu juta ton. Hasil penghitungan sementara produksi tertinggi telah dicapai pada tahun 2013 merupakan keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh petani dengan paduan berbagai program kebijakan pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan.

Gambar 4.2.
Perkembangan Produksi Padi (000 Ton) Tahun 2003-2013



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

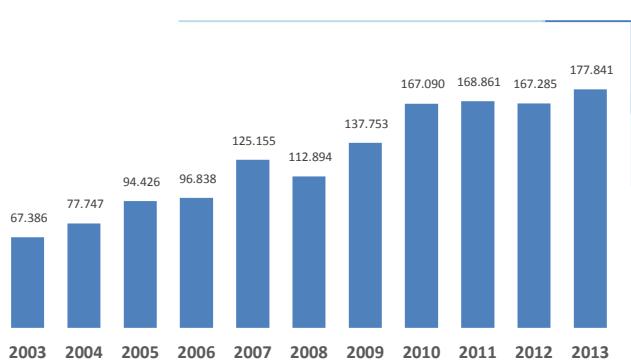


Jagung

Perkembangan luas tanam tanaman jagung dari tahun 1969-2013 menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Tahun 1969 realisasi penanaman tanaman jagung mencapai 2.973 hektar. Sedangkan tahun 2013 telah mencapai 47.160 hektar.

Seiring dengan meningkatnya luas tanam, juga menyebabkan meningkatnya luas panen jagung dari tahun ke tahun. Tahun 1969 tercatat luas panen sebesar 5.000 hektar dan tahun 2013 sebesar 44.099 hektar yang merupakan luas panen tertinggi dalam kurun waktu tahun 1969-2013. Luas panen jagung juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun walaupun ada tahun-tahun tertentu yang mengalami penurunan luas panen dibanding tahun sebelumnya. Adanya perbedaan luas tanam dengan luas panen setiap tahun disebabkan karena adanya tanaman akhir tahun sebelumnya yang dipanen pada tahun yang bersangkutan. Disamping itu juga disebabkan karena adanya tanaman jagung yang dipanen muda dan tanaman yang puso (rusak), baik puso karena organisme pengganggu tanaman (*OPT*) maupun akibat bencana alam.

**Gambar 4.3.
Perkembangan Produksi Jagung (Ton)
Tahun 2003-2013**



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Secara keseluruhan, adanya tren meningkatnya produksi dari tahun 1969-2013, disamping dipengaruhi oleh luas panen juga disebabkan oleh diterapkannya pola intensifikasi terutama pada 20 tahun terakhir, sehingga telah meningkatkan rata-rata produksi per hektar (produktivitas) tanaman jagung tersebut. Pada Gambar 4.3. dapat dilihat trend produksi tanaman jagung dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Produktivitas tertinggi tanaman jagung terjadi pada tahun 2011 dan 2013 yaitu 4,03 ton per hektar.

Tabel 4.7.

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Tahun 1961-2013

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961		1.170	748	0,64
1962		1.167	1.239	1,06
1963		2.300	1.700	0,74
1964		3.671	2.805	0,76
1965		4.556	5.364	1,18
1966		3.256	2.644	0,81
1967		3.139	2.561	0,82
1968		4.236	3.563	0,84
1969	2.973	5.000	4.000	0,80
1970	1.878	1.928	1.580	0,82
1971	4.027	3.100	3.405	1,10
1972	4.456	4.738	4.031	0,85
1973	4.218	4.017	3.481	0,87
1974	5.822	5.426	4.786	0,88
1975	6.700	5.102	5.071	0,99
1976	5.455	4.320	4.195	0,97
1977	4.333	4.086	3.878	0,95
1978	3.300	2.557	2.391	0,94
1979	5.441	2.950	2.631	0,89
1980	4.463	2.821	2.858	1,01
1981	3.766	2.581	2.917	1,13
1982	5.968	4.256	4.767	1,12
1983	5.102	3.849	4.988	1,30
1984	7.700	5.463	6.883	1,26
1985	10.760	6.003	7.744	1,29
1986	16.413	13.112	17.754	1,35
1987	16.088	12.169	17.408	1,43
1988	18.546	13.101	22.986	1,75
1989	18.889	11.829	23.293	1,97
1990	28.103	27.854	52.110	1,87
1991	24.179	17.023	28.246	1,66
1992	15.160	15.217	27.108	1,78
1993	20.810	17.941	38.924	2,17
1994	13.105	13.105	28.578	2,18
1995	33.090	20.639	44.921	2,18
1996	40.813	19.677	45.566	2,32
1997	41.270	25.312	58.679	2,32
1998	41.741	29.000	65.660	2,26
1999	31.434	30.545	74.449	2,44
2000	21.967	15.576	36.642	2,35
2001	28.110	20.605	51.232	2,49
2002	25.527	23.874	60.105	2,52
2003	26.067	25.188	67.386	2,68
2004	33.364	25.748	77.747	3,02
2005	36.227	29.517	94.426	3,20
2006	36.283	29.583	96.838	3,27
2007	43.172	36.774	125.155	3,40
2008	45.075	34.164	112.894	3,30
2009	45.064	39.731	137.753	3,47
2010	48.993	43.885	167.090	3,81
2011	49.429	41.853	168.861	4,03
2012	51.788	43.675	167.285	3,83
2013	47.160	44.099	177.841	4,03

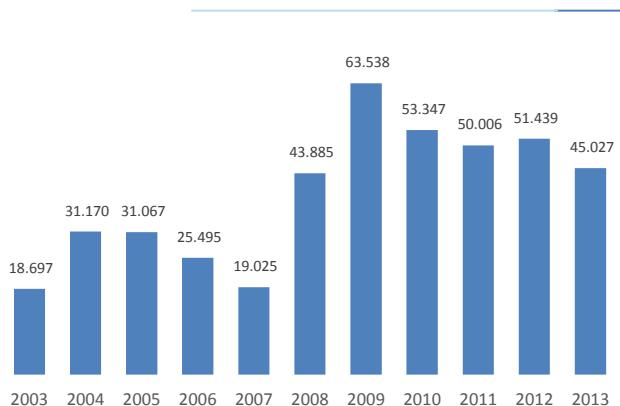
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Kedelai

Luas tanam tanaman kedelai dari tahun 1969-2013 sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 1987-1995, kemudian menunjukkan kecenderungan penurunan menjelang tahun 2013. Namun selama sepuluh tahun terakhir, ditengah-tengah upaya mengurangi jumlah impor komoditi ini, justru luas tanam tanaman kedelai terus menurun. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2003 yaitu seluas 14.854 ha.

Seiring dengan luas tanam, luas panen tanaman kedelai juga menurun mulai dari tahun 2001. Perkembangan produksi kedelai mulai tahun 1961-2013 berfluktuasi namun menunjukkan penurunan. Tahun 1993 merupakan puncak produksi kedelai selama hampir 40 tahun yaitu sebesar 190.220 ton kedelai biji kering. Tahun 2002 terjadi penurunan produksi secara drastis yaitu menjadi sebesar 21.522 ton. Perkembangan tanaman kedelai tahun 1961-2013 secara lengkap disajikan pada Tabel 4.8.

Gambar 4.4.
Perkembangan Produksi Kedelai (Ton)
Tahun 2003-2013



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990)
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)



<http://ews.kemendag.go.id/>

Tabel 4.8.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai Tahun 1961-2013

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961		1.300	707	0,54
1962		1.688	1.007	0,60
1963		1.200	800	0,67
1964		3.309	1.931	0,58
1965		4.100	2.513	0,61
1966		3.307	1.929	0,58
1967		2.602	1.540	0,59
1968		2.635	1.576	0,60
1969	1.692	3.500	2.450	0,70
1970	972	1.047	676	0,65
1971	751	669	500	0,75
1972	2.502	2.669	2.020	0,76
1973	4.715	4.470	3.018	0,68
1974	5.012	4.353	3.125	0,72
1975	8.275	3.561	2.582	0,73
1976	9.125	3.886	2.813	0,72
1977	7.281	6.460	4.942	0,77
1978	8.100	8.427	6.084	0,72
1979	17.824	17.320	14.081	0,81
1980	15.509	17.911	13.845	0,77
1981	21.123	23.445	16.552	0,71
1982	28.405	25.452	20.311	0,80
1983	38.294	35.497	32.430	0,91
1984	51.177	44.515	43.892	0,99
1985	67.898	53.866	51.334	0,95
1986	84.160	95.989	91.286	0,95
1987	103.675	101.052	102.402	1,01
1988	117.679	108.212	103.343	0,96
1989	123.432	118.807	118.120	0,99
1990	159.689	170.269	154.035	0,90
1991	216.223	183.260	186.198	1,02
1992	205.044	180.628	166.820	0,92
1993	209.485	171.093	190.220	1,11
1994	210.782	160.421	182.205	1,14
1995	209.408	116.604	144.935	1,24
1996	135.361	79.057	100.004	1,26
1997	74.730	71.252	90.517	1,27
1998	105.700	75.804	92.915	1,23
1999	83.091	85.846	106.480	1,24
2000	55.050	58.906	71.576	1,22
2001	49.979	51.022	63.127	1,24
2002	20.562	17.208	21.522	1,25
2003	14.854	14.519	18.697	1,29
2004	25.914	24.325	31.170	1,28
2005	23.825	24.189	31.067	1,28
2006	20.725	19.638	25.495	1,30
2007	16.743	14.743	19.025	1,29
2008	51.431	32.898	43.885	1,33
2009	44.734	45.110	63.538	1,41
2010	46.219	37.469	53.347	1,42
2011	41.009	35.370	50.006	1,41
2012	44.638	35.599	51.439	1,44
2013	41.276	30.579	45.027	1,47

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

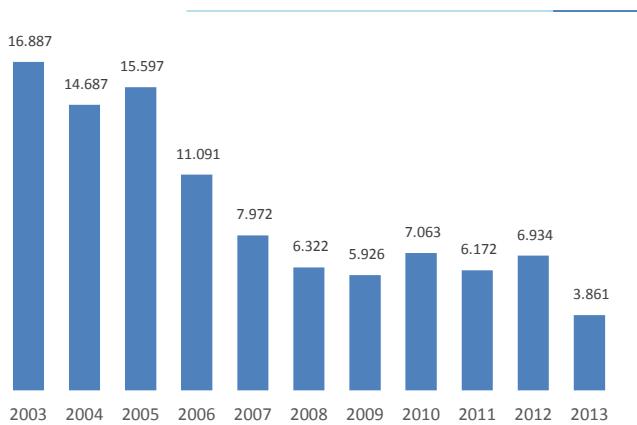
Kacang Tanah

Luas penanaman kacang tanah tahun 1969-2013 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Tahun 1969 tercatat penanaman kacang tanah seluas 1.621 hektar dan tahun 2013 seluas 3.130 hektar. Sedangkan tahun 1995 sebesar 30.771 hektar yang merupakan puncak penanaman tanaman kacang tanah selama hampir empat dasawarsa.

Berfluktuatifnya luas tanam juga mengakibatkan berfluktuatifnya luas panen dan produksi tanaman kacang tanah. Tahun 1995 juga merupakan puncak luas panen dan produksi komoditi ini, dengan luas panen 30.601 hektar telah menghasilkan 32.517 ton kacang tanah biji kering.

Untuk produktivitas tanaman kacang tanah tahun 1961 tercatat 0,58 ton per hektar, sedangkan tahun 2013 telah mencapai 1,24 ton per hektar. Namun produktivitas tertinggi telah dicapai pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,27 ton per hektar.

**Gambar 4.5.
Perkembangan Produksi Kacang Tanah (Ton)
Tahun 2003-2013**



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990)
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)



<http://www.acehonline.info/>

**Tabel 4.9.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Kacang Tanah Tahun 1961-2013**

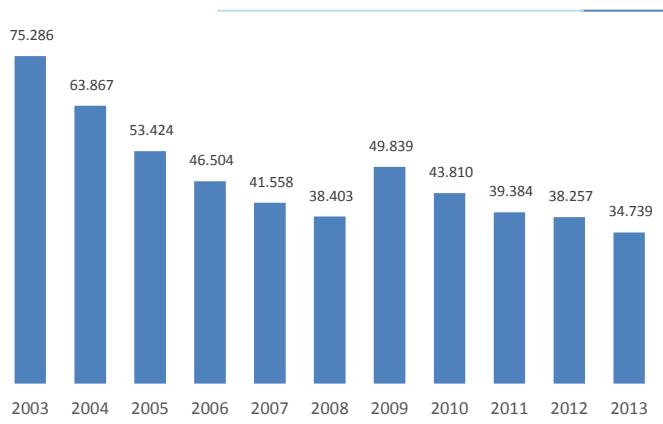
Tahun (1)	Luas Tanam (ha) (2)	Luas Panen (ha) (3)	Produksi (Ton) (4)	Produktivitas (Ton/ha) (5)
1961		1.456	845	0,58
1962		1.902	1.196	0,63
1963		1.700	1.550	0,91
1964		3.324	2.012	0,61
1965		2.696	1.846	0,68
1966		2.076	928	0,45
1967		1.599	1.258	0,79
1968		1.775	1.511	0,85
1969	1.621	3.500	2.800	0,80
1970	1.187	1.412	1.134	0,80
1971	1.174	1.130	1.180	1,04
1972	3.774	3.852	3.651	0,95
1973	2.243	2.035	1.893	0,93
1974	3.101	2.902	2.560	0,88
1975	4.377	3.053	2.461	0,81
1976	4.678	4.197	4.084	0,97
1977	6.207	5.361	4.755	0,89
1978	4.960	5.163	4.616	0,89
1979	6.783	6.324	4.357	0,69
1980	6.987	8.415	5.916	0,70
1981	10.131	11.132	9.139	0,82
1982	10.289	8.850	7.806	0,88
1983	10.268	10.061	10.663	1,06
1984	14.179	13.469	13.792	1,02
1985	13.540	11.222	12.355	1,10
1986	16.949	17.426	21.016	1,21
1987	18.128	14.070	16.336	1,16
1988	20.491	16.557	19.703	1,19
1989	18.941	16.922	19.304	1,14
1990	23.507	26.703	27.886	1,04
1991	19.243	18.374	22.100	1,20
1992	15.464	20.310	22.117	1,09
1993	17.899	16.756	19.056	1,14
1994	18.939	18.939	23.380	1,23
1995	30.771	30.601	32.517	1,06
1996	29.438	19.704	22.639	1,15
1997	18.522	16.936	20.288	1,20
1998	13.269	8.091	9.513	1,18
1999	8.163	9.131	11.124	1,22
2000	6.737	7.453	9.179	1,23
2001	4.748	4.355	5.047	1,16
2002	6.114	6.190	7.377	1,19
2003	12.336	14.239	16.887	1,19
2004	13.512	12.363	14.687	1,19
2005	11.351	12.984	15.597	1,20
2006	10.475	9.249	11.091	1,20
2007	5.345	6.582	7.972	1,21
2008	5.306	5.214	6.322	1,21
2009	5.443	4.707	5.926	1,26
2010	6.411	5.579	7.063	1,27
2011	5.071	4.999	6.172	1,23
2012	5.236	5.681	6.934	1,22
2013	3.130	3.117	3.861	1,24

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990)
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Ubi Kayu

Ubi kayu termasuk salah satu komoditi palawija andalan di Provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi ubi kayu dari tahun 1961 hingga tahun 2013. Tahun 1961 tercatat produksi sebesar 12.483 ton sedangkan tahun 2013 sebesar 34.739 ton.

Gambar 4.6.
Perkembangan Produksi Ubi Kayu (Ton)
Tahun 2003-2013



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)



Tabel 4.10.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Tahun 1961-2013

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961		1.020	12.483	12,24
1962		2.367	21.671	9,16
1963		2.580	28.700	11,12
1964		2.302	42.680	18,54
1965		4.868	77.075	15,83
1966		4.408	62.172	14,10
1967		2.365	26.931	11,39
1968		2.035	35.123	17,26
1969	1.622	2.286	32.278	14,12
1970	1.474	1.215	21.168	17,42
1971	1.496	1.324	21.196	16,01
1972	3.739	3.493	48.041	13,75
1973	3.449	3.093	45.329	14,66
1974	3.355	2.649	38.146	14,40
1975	3.881	3.190	43.703	13,70
1976	3.791	3.414	47.113	13,80
1977	2.776	3.582	36.895	10,30
1978	2.545	2.398	24.939	10,40
1979	3.229	2.292	22.920	10,00
1980	3.663	3.788	39.395	10,40
1981	3.436	3.353	33.195	9,90
1982	4.620	4.053	43.772	10,80
1983	5.544	4.600	50.600	11,00
1984	6.299	6.471	69.887	10,80
1985	6.661	5.377	61.298	11,40
1986	8.294	8.206	96.010	11,70
1987	7.227	6.963	81.413	11,69
1988	8.850	5.663	66.242	11,70
1989	10.625	6.946	85.187	12,26
1990	7.540	6.582	82.447	12,53
1991	7.645	7.543	90.589	12,01
1992	9.842	8.431	103.407	12,27
1993	6.017	5.904	73.122	12,39
1994	5.654	5.654	70.288	12,43
1995	5.329	5.690	69.571	12,23
1996	5.392	4.795	59.782	12,47
1997	6.435	6.532	81.427	12,47
1998	9.241	5.477	66.543	12,15
1999	4.514	5.503	67.670	12,30
2000	4.752	5.293	65.208	12,32
2001	3.536	3.605	44.387	12,31
2002	3.988	4.269	52.126	12,21
2003	6.100	6.098	75.286	12,35
2004	4.865	5.180	63.867	12,33
2005	4.362	4.316	53.424	12,38
2006	3.589	3.754	46.504	12,39
2007	3.510	3.351	41.558	12,40
2008	3.359	3.093	38.403	12,42
2009	3.784	3.910	49.839	12,75
2010	3.335	3.084	43.810	14,21
2011	2.922	3.085	39.384	12,77
2012	3.149	2.974	38.257	12,86
2013	2.898	2.725	34.739	12,75

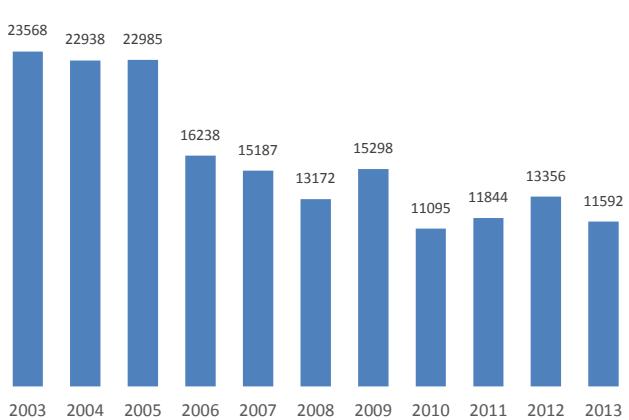
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan komoditi palawija yang belum banyak diusahakan oleh para petani dibanding komoditi palawija lainnya selama lebih dari 40 tahun. Ini terlihat dari luas penanaman tanaman ubi jalar yang masih dibawah lima ribu hektar setiap tahunnya dan sangat berfluktuatif.

Untuk produksi tanaman ubi jalar dari tahun 1961-2013 telah mencapai puncaknya pada tahun 1992 yaitu sebesar 37.558 ton. Hal ini disebabkan luas panen yang mencapai 4.033 hektar dengan produktivitas sebesar 9,31 ton per hektar. Tabel 4.11 menyajikan perkembangan tanaman ubi jalar secara lengkap.

Gambar 4.7.
Perkembangan Produksi Ubi Jalar (Ton)
Tahun 2003-2013



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

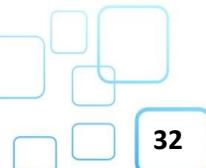


<http://acehfame.com/>

Tabel 4.11.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Ubi Jalar Tahun 1961-2013

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961		767	5.053	6,59
1962		1.358	8.970	6,61
1963		1.850	12.720	6,88
1964		1.393	12.033	8,64
1965		2.038	16.492	8,09
1966		1.556	12.159	7,81
1967		1.295	9.904	7,65
1968		1.473	11.187	7,59
1969	1.804	3.500	28.000	8,00
1970	1.314	1.262	11.943	9,46
1971	1.176	1.115	9.318	8,36
1972	2.637	2.554	19.274	7,55
1973	2.291	2.121	19.931	9,40
1974	2.554	1.964	26.318	13,40
1975	3.631	2.575	26.522	10,30
1976	2.674	1.679	14.943	8,90
1977	1.438	2.180	18.094	8,30
1978	1.131	1.180	9.912	8,40
1979	1.746	1.131	9.614	8,50
1980	1.549	1.465	11.866	8,10
1981	1.533	1.410	12.126	8,60
1982	1.664	1.571	14.139	9,00
1983	2.251	1.877	17.268	9,20
1984	2.599	2.594	23.087	8,90
1985	2.564	2.200	20.240	9,20
1986	1.981	2.264	21.734	9,60
1987	2.156	2.232	21.417	9,60
1988	3.021	2.346	22.330	9,52
1989	-	2.528	21.584	8,54
1990	2.327	2.713	25.119	9,26
1991	4.037	3.517	32.436	9,22
1992	4.165	4.033	37.558	9,31
1993	4.168	3.040	27.808	9,15
1994	4.194	3.215	32.918	10,24
1995	4.375	3.633	32.195	8,86
1996	3.066	2.834	26.784	9,45
1997	3.067	3.220	31.345	9,73
1998	4.029	2.750	26.401	9,60
1999	2.652	3.459	33.697	9,74
2000	2.275	2.545	24.594	9,66
2001	1.741	1.725	16.695	9,68
2002	1.853	1.776	17.285	9,73
2003	2.599	2.394	23.568	9,84
2004	2.440	2.338	22.938	9,81
2005	2.202	2.330	22.985	9,86
2006	1.647	1.661	16.238	9,78
2007	1.504	1.542	15.187	9,85
2008	1.356	1.325	13.172	9,94
2009	1.497	1.519	15.298	10,07
2010	1.237	1.101	11.095	10,08
2011	1.171	1.137	11.844	10,42
2012	1.331	1.264	13.356	10,57
2013	1.085	1.093	11.592	10,61

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)



Tabel 4.12.
Perkembangan Produksi
Tanaman Buah-buahan Tahun 1959-2013

Tahun	Mangga	Jeruk	Pepaya	Pisang	Nenas	Rambutan	Alpukat	Duku	Durian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1969	3.258	8.098	12.345	85.990	2.041	2.957	21.491	7.863	15.880
1970	2.763	8.112	12.827	93.970	1.868	6.805	21.491	4.997	18.683
1971	3.793	1.527	14.012	342.993	2.105	9.453	11.507	9.472	50.325
1972	4.268	6.930	20.082	93.163	3.840	8.597	18.490	7.129	28.496
1973	4.752	7.315	20.312	105.103	4.164	8.814	18.384	7.658	76.288
1974	4.267	6.339	17.577	104.259	4.921	6.413	18.400	7.083	27.622
1975	4.036	6.094	15.695	92.127	3.916	6.201	18.640	8.528	19.985
1976	5.772	7.174	15.451	106.876	4.217	7.131	18.800	10.615	2.260
1977	4.252	6.601	18.918	110.667	3.435	5.291	21.528	9.481	24.959
1978	4.680	6.476	20.625	108.200	4.882	6.633	18.721	7.239	27.816
1979	4.848	8.260	18.655	88.314	1.583	4.229	12.290	4.966	22.732
1980	5.587	7.365	17.424	76.525	5.510	5.253	10.868	6.092	27.745
1981	5.065	11.771	8.933	92.634	1.247	6.370	3.647	5.347	19.639
1982	2.856	10.876	5.163	55.294	946	2.296	3.968	1.914	10.131
1983	3.028	9.864	4.822	59.171	679	2.398	2.669	2.204	10.437
1984	3.254	9.436	3.938	51.089	2.151	2.813	2.592	1.899	9.780
1985	4.759	8.147	3.450	44.005	895	3.811	2.183	3.760	13.780
1986	4.380	9.193	4.046	36.415	1.584	7.166	2.087	3.249	14.934
1987	7.038	25.093	2.928	38.403	1.498	8.322	1.140	6.232	30.521
1988	4.255	9.195	3.851	44.659	1.275	5.218	2.051	3.132	13.759
1989	7.870	9.314	4.210	41.667	1.054	8.519	396	2.901	895
1990	12.468	7.679	4.306	35.061	998	6.446	892	4.167	15.719
1991	6.398	9.448	6.216	35.992	917	7.041	804	3.727	14.724
1992	8.154	13.293	5.500	27.894	619	5.663	8.154	3.840	59.154
1993	8.633	13.431	7.380	33.755	664	6.978	2.675	4.403	7.380
1994	9.030	13.148	7.692	42.057	1.620	13.047	2.030	4.828	57.812
1995	6.975	16.697	7.091	3.759	1.131	15.643	2.023	5.283	51.025
1996	7.082	19.234	6.206	40.603	2.881	22.979	4.160	4.379	45.074
1997	8.304	10.766	3.328	20.956	5.768	17.226	1.859	4.103	20.166
1998	6.678	9.853	9.081	33.200	1.944	9.255	1.553	3.655	7.564
1999	4.546	9.956	4.981	32.274	1.030	4.323	1.647	5.749	5.749
2000	6.633	17.074	3.386	28.076	552	4.426	1.442	2.552	6.946
2001	7.904	13.834	5.363	26.491	747	8.439	1.452	3.742	11.807
2002	9.120	32.191	7.538	27.833	726	9.412	2.512	4.473	28.422
2003	11.701	31.486	7.926	88.682	4.146	20.681	2.525	7.732	31.315
2004	12.796	20.258	8.275	63.694	501	36.181	2.632	13.246	43.282
2005	12.911	11.395	6.399	48.930	415	45.831	2.955	5.595	39.387
2006	32.677	22.999	13.395	32.358	695	37.671	5.239	5.782	57.120
2007	25.347	20.873	9.016	38.228	710	38.847	5.700	38.847	29.442
2008	15.212	14.389	4.293	29.327	982	14.911	1.386	7.431	8.732
2009	22.422	19.242	8.652	61.133	973	20.864	4.024	5.074	14.893
2010	21.281	21.238	10.349	70.704	1.010	13.519	5.091	4.413	15.192
2011	27.053	20.885	14.830	68.989	845	28.099	7.462	6.651	27.044
2012	39.465	18.502	12.535	62.661	545	30.159	4.231	5.267	37.203
2013	25.898	18.902	10.164	50.485	495	24.121	6.557	5.507	15.784

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan (1969-1990),
BPS Provinsi Aceh (1991-2013)

Tahun	Jenis Irigasi		
	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana
(1)	(2)	(3)	(4)
1972	-	29.190	87.644
1973		Not Available	
1974	-	16.395	-
1975	-	20.331	91.071
1976	-	29.119	84.655
1977	-	29.119	84.655
1978	-	32.894	85.395
1979	-	32.894	85.395
1980	-	32.894	85.395
1981	-	60.457	63.730
1982	-	86.249	69.715
1983	-	75.433	78.802
1984	-	74.152	81.580
1985	6.854	90.124	117.185
1986	7.630	65.815	140.718
1987	8.550	63.181	140.653
1988	8.750	63.269	140.515
1989	8.750	63.269	140.515
1990	12.139	98.679	101.975
1991	12.139	98.679	101.975
1992	18.722	94.196	109.781
1993	81.766	63.456	88.983
1994	90.000	63.233	92.854
1995	89.342	94.679	69.823
1996	95.980	117.610	139.552
1997	99.668	60.866	132.092
1998	96.899	58.015	71.805
1999	96.899	58.015	71.808
2000	96.899	58.015	71.808
2001	96.899	58.015	71.808
2002	96.899	58.015	71.808
2003	96.899	58.015	71.808
2004	96.683	44.230	74.026
2005	96.683	44.230	74.027
2006	96.683	44.230	74.027
2007	96.683	44.230	74.027
2008	96.683	44.230	74.027
2009	137.044	44.610	74.063
2010	138.235	44.610	74.063
2011	206.711	44.610	74.063
2012	141.490	44.610	74.063
2013	141.490	44.610	74.063

Sumber: Aceh Dalam Angka (1972-2014)

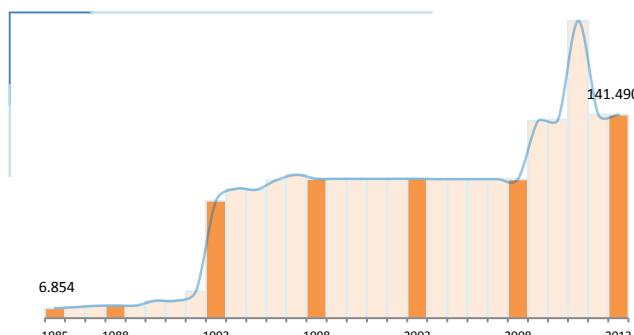
Areal irigasi sederhana memiliki luas yang cenderung sama untuk beberapa tahun. Pada tahun 1975 luasnya mencapai 91.071 hektar kemudian dalam rentang waktu 38 tahun luas areal irigasi sederhana ini menjadi 74.063 hektar atau mengalami sedikit penurunan sekitar 18,68 persen.

Tabel 4.13.
Luas Areal Irigasi yang Dikelola Menurut Jenis Irigasi (Ha)
Tahun 1972-2013

Pengembangan areal irigasi secara umum bertujuan untuk mendukung upaya meningkatkan kemandirian di bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan utama dalam sub sektor irigasi adalah untuk melanjutkan kegiatan operasi serta pemeliharaan seluruh jaringan irigasi baik pengembangan irigasi teknis, semi teknis maupun sederhana. Dalam kegiatan operasionalnya, kegiatan bidang pengairan ini ditujukan untuk menunjang sektor-sektor lain seperti peningkatan produksi pangan.

Selama periode 1985-2013 jumlah areal irigasi terus berkembang. Pada tahun 1985 tercatat sebanyak 6.854 hektar areal persawahan yang diairi oleh irigasi teknis dan saat ini di tahun 2013 jumlah areal irigasi teknis meningkat hingga mencapai 141.490 hektar.

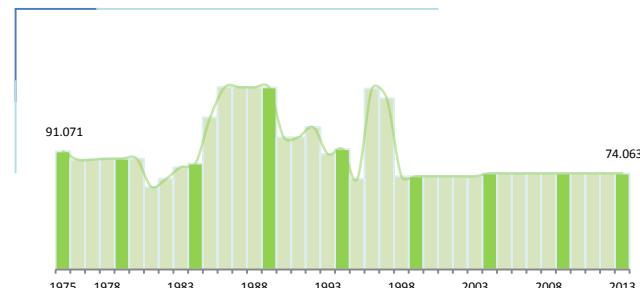
Gambar 4.8.
Luas Areal Irigasi yang Dikelola Menurut Jenis Irigasi (Ha)
Tahun 1972-2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1972-2014)

Untuk areal irigasi semi teknis luasnya pun kian meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 1972 luasnya sebesar 29.190 hektar berkembang menjadi 44.610 hektar pada tahun 2013. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 41 tahun telah terjadi pertumbuhan luas areal irigasi semi teknis sebesar 52,83 persen.

Gambar 4.9.
Luas Areal Irigasi Sederhana (ha) Tahun 1975-2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1975-2014)

PERKEBUNAN

Sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar, khususnya untuk tanaman perkebunan. Di Provinsi Aceh dapat dijumpai sedikitnya 23 jenis komoditi perkebunan yang banyak diusahakan diantaranya karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala, pinang, kapuk, kakao, jambu mete, kemiri, lada, sagu, aren cassiavera, gambir, nilam, tembakau, tebu, kunyit, jahe, dan sereh wangi. Dari 23 komoditi yang ada di Provinsi Aceh 6 komoditi menjadi unggulan daerah yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, dan pinang.

Karet

Tanaman karet merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh. Luas tanaman karet perkebunan rakyat dari tahun 1969 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1969 luas tanaman karet perkebunan rakyat sebesar 30.626 hektar dan pada tahun 2013 telah mencapai 132.486 hektar. Tahun 2007 merupakan awal dari luas tanaman karet perkebunan rakyat yang mencapai angka diatas seratus ribu hektar.

Luas tanaman karet perkebunan besar dari tahun 1978-2013 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 1978 tercatat luas tanaman karet perkebunan besar sebesar 20.130 hektar dan tahun 2013 sebesar 19.955 hektar. Sedangkan tahun 1989 sebesar 38.648 hektar yang merupakan luas tanaman karet perkebunan besar terbesar selama hampir 35 tahun terakhir.

Produksi tanaman karet perkebunan rakyat dari tahun 1969 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 1969 produksi tanaman karet perkebunan rakyat sebesar 9.620 ton dan tahun 2013 mencapai 75.375 ton.



<http://diliputnews.com/>

Tabel 4.14.
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Karet
Tahun 1969 - 2013

Tahun	Luas Tanaman (Ha)		Produksi (Ton)	
	Karet Perkebunan Rakyat	Karet Perkebunan Besar	Karet Perkebunan Rakyat	Karet Perkebunan Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	30.626	-	9.620	-
1970	33.433	-	8.305	-
1971	28.368	-	8.551	-
1972	27.124	-	7.832	-
1973	18.912	-	8.395	-
1974	19.308	-	8.858	-
1975	19.444	-	7.940	-
1976	19.516	-	7.301	-
1977	22.227	-	7.463	-
1978	20.930	20.130	9.467	5.639
1979	20.040	20.020	8.568	5.458
1980	19.698	20.459	10.132	5.166
1981	27.242	21.506	8.955	5.479
1982	29.507	18.939	10.359	5.540
1983	31.017	18.120	10.658	5.306
1984	31.707	18.340	12.405	5.295
1985	35.520	25.485	12.374	4.729
1986	26.394	24.232	13.444	4.508
1987	39.155	37.826	14.442	6.323
1988	39.828	38.099	16.979	7.649
1989	41.240	38.648	17.416	9.642
1990	45.340	38.429	14.863	12.179
1991	62.657	27.390	22.901	8.941
1992	63.345	28.794	30.920	10.242
1993	72.621	30.169	36.211	11.417
1994	81.545	32.865	38.226	17.359
1995	87.216	28.942	40.322	14.657
1996	84.766	36.622	41.577	16.450
1997	84.822	28.554	42.291	15.846
1998	86.851	18.289	39.881	18.974
1999	87.596	26.479	43.747	17.733
2000	90.039	27.256	60.940	28.420
2001	91.143	24.771	56.025	27.410
2002	90.506	24.771	90.506	13.898
2003	84.900	23.766	59.246	15.593
2004	90.724	24.142	89.379	9.849
2005	91.251	23.930	55.677	9.849
2006	93.228	23.930	58.320	14.660
2007	102.988	23.590	56.113	7.031
2008	106.253	23.590	64.919	7.031
2009	109.104	-	63.603	-
2010	112.214	23.912	61.509	9.988
2011	122.660	21.631	69.972	17.435
2012	126.319	23.359	72.483	889.144
2013	132.486	19.955	75.375	913.826

Sumber : Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Tahun	Luas Tanaman (ha)		Produksi (Ton)	
	Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	Kelapa Sawit Perkebunan Besar	Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	Kelapa Sawit Perkebunan Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1976	21.488	-	23.233	-
1977	21.931	-	27.600	-
1978	22.317	-	31.238	-
1979	22.421	-	41.224	-
1980	22.502	-	52.522	-
1981	1.882	23.187	23.187	62.598
1982	2.698	29.554	25.269	69.856
1983	-	29.839	-	68.445
1984	-	32.691	-	87.875
1985	-	38.422	-	90.801
1986	-	39.891	-	92.434
1987	-	55.851	-	96.830
1988	-	63.045	-	99.044
1989	-	74.517	-	115.806
1990	9.451	77.811	595.875	122.377
1991	12.559	76.417	1.720.942	128.770
1992	20.732	83.393	49.457	136.316
1993	22.436	96.348	58.037	147.884
1994	27.415	111.811	84.606	188.841
1995	32.146	119.757	84.784	228.001
1996	35.971	139.051	142.244	249.291
1997	39.721	146.486	139.033	227.516
1998	45.596	161.286	245.899	245.899
1999	51.589	162.968	285.662	285.662
2000	53.747	177.844	307.409	307.409
2001	56.836	161.580	298.973	298.973
2002	39.031	161.580	355.412	228.865
2003	41.099	-	353.007	-
2004	77.108	179.774	410.762	-
2005	82.356	179.774	484.863	260.204
2006	89.199	171.905	589.700	191.101
2007	92.297	173.370	607.639	-
2008	90.790	173.370	581.575	-
2009	140.442	-	181.634	-
2010	148.246	195.919	160.352	1.551.750
2011	183.369	182.627	165.711	407.242
2012	194.639	174.009	310.766	4.759.790
2013	198.246	194.984	355.366	1.633.310

Tabel 4.15.
Luas Tanaman dan Produksi
Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Tahun 1976 - 2013

Sumber: Aceh Dalam Angka (1976-2014)

Kelapa Sawit

Iklim di Aceh sangat cocok bagi pengembangan kelapa sawit; panas, lembab dan curah hujan yang tinggi, tanah basah dengan kondisi tanah yang berawa. Kondisi ini sangat menunjang tanaman kelapa sawit sebagai salah satu komoditi unggulan daerah di Provinsi Aceh.

Perkembangan luas tanaman kelapa sawit baik yang diusahakan oleh rakyat maupun yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat dari tahun 1976 sampai tahun 2013 rata-rata pertumbuhan luas tanaman sebesar 6,19 persen per tahun, sedangkan untuk tanaman kelapa sawit perkebunan besar dari tahun 1981 sampai tahun 2013 rata-rata pertumbuhan luas tanaman sebesar 6,88 persen per tahun. Perkembangan luas tanaman kelapa sawit secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Apabila dilihat secara keseluruhan produksi kelapa sawit yang dihasilkan di Provinsi Aceh pada tahun 2013, sebanyak 82 persen berasal dari perkebunan besar dan 18 persen berasal dari perkebunan rakyat. Dari angka-angka ini dapat disimpulkan bahwa produksi kelapa sawit di Provinsi Aceh sebagian besar berasal dari perkebunan besar yang dimiliki oleh swasta nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta asing.

Gambar 4.10.
Persentase Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Tahun 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka 2014

Tabel 4.16.

Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kelapa Perkebunan Rakyat dan Kelapa Hibrida Tahun 1969-2013

Kelapa dan Kelapa Hibrida

Perkembangan luas tanaman kelapa dari tahun 1969 sampai tahun 1987 masih dibawah satu juta hektar. Tahun 1988 merupakan awal dari luas tanaman kelapa yang mencapai angka diatas satu juta hektar. Luas panen tahun 2013 mengalami penurunan sebesar persen dari 107.394 hektar menjadi 103.076 hektar. Sedangkan untuk luas tanaman tertinggi dicapai pada tahun 1994/1995 sebesar 122.611 hektar.

Luas tanaman kelapa hibrida dari tahun 1990 sampai tahun 2012 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Tahun 2002 mencapai luas 5831 hektar dan semakin berkurang sampai tahun 2012 hanya sebesar 930 hektar.

Perkembangan produksi tanaman kelapa dari tahun 1969-2013 terlihat fluktuatif dengan luas tanaman tertinggi diatas satu juta hektar pada tahun 1983 yaitu sebesar 122.599 hektar. Luas tanaman terendah pada tahun 1973 sebesar 38.603 hektar. Hal yang berbeda pada tanaman kelapa hibrida dimana produksi dari tahun 1990-2013 semakin menurun. Pada tahun 1990 produksi kelapa hibrida mencapai 4.350 ton dan tahun 2012 menjadi 829 ton. Luas tanaman dan produksi tanaman kelapa dan kelapa hibrida dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tahun	Luas Tanaman (Ha)		Produksi (Ton)	
	Kelapa Perkebunan Rakyat	Kelapa Hibrida	Kelapa Perkebunan Rakyat	Kelapa Hibrida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	38.992	-	55.486	-
1970	71.405	-	62.186	-
1971	73.257	-	59.354	-
1972	73.257	-	58.036	-
1973	76.839	-	38.603	-
1974	79.391	-	49.957	-
1975	80.808	-	52.172	-
1976	82.067	-	62.131	-
1977	84.247	-	64.201	-
1978	85.819	-	64.588	-
1979	85.819	-	64.365	-
1980	86.459	-	69.940	-
1981	89.852	-	70.317	-
1982	88.436	-	65.376	-
1983	91.923	-	122.599	-
1984	95.357	-	57.229	-
1985	95.477	-	63.854	-
1986	96.889	-	67.210	-
1987	99.685	-	49.933	-
1988	100.350	-	54.555	-
1989	101.201	-	56.855	-
1990	104.142	3.244	60.512	4.350
1991	110.749	3.476	75.615	4.004
1992	120.085	4.045	80.193	4.101
1993	122.389	4.247	77.542	4.624
1994	122.611	5.092	86.733	4.901
1995	122.611	4.762	90.496	3.533
1996	120.116	4.464	84.305	3.471
1997	120.754	4.759	86.263	3.674
1998	112.697	4.702	79.899	3.519
1999	111.948	4.817	91.738	3.574
2000	115.469	5.271	95.594	3.779
2001	118.164	2.923	92.777	3.856
2002	111.138	5.831	75.606	3.902
2003	110.829	5.813	74.743	3.699
2004	108.564	5.239	74.369	3.413
2005	107.345	4.407	65.902	1.994
2006	107.851	4.422	65.318	2.089
2007	108.415	3.873	63.787	1.786
2008	108.573	3.865	66.333	1.215
2009	101.751	2.209	56.875	1.134
2010	102.294	1.656	65.735	3.440
2011	106.542	929	62.926	841
2012	107.394	930	59.766	829
2013	103.076	-	55.434	-

Sumber : Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1969	32.788	10.815
1970	32.280	13.148
1971	29.975	11.002
1972	29.975	10.324
1973	31.292	10.272
1974	31.677	9.932
1975	31.741	9.114
1976	32.223	14.415
1977	32.327	14.502
1978	32.997	15.837
1979	34.929	18.511
1980	43.219	24.571
1981	49.050	23.581
1982	55.314	27.210
1983	59.368	36.541
1984	59.429	22.586
1985	59.815	24.062
1986	59.760	30.244
1987	57.739	40.681
1988	59.760	34.535
1989	61.679	35.024
1990	62.681	35.208
1991	95.712	43.430
1992	95.079	39.470
1993	96.400	45.414
1994	91.902	49.409
1995	97.777	49.768
1996	97.659	42.503
1997	97.709	40.302
1998	94.885	38.208
1999	99.434	39.922
2000	101.186	41.535
2001	98.543	40.919
2002	98.362	40.025
2003	97.894	33.895
2004	97.816	37.382
2005	100.263	35.012
2006	100.327	37.498
2007	108.813	46.943
2008	109.116	47.124
2009	118.612	50.190
2010	120.526	47.805
2011	121.094	53.950
2012	121.845	54.314
2013	123.764	48.282

Sumber : Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Tabel 4.17.
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kopi
Perkebunan Rakyat Tahun 1969-2013

Sumber : Aceh Dalam Angka

Kopi

Kondisi alam Aceh yang subur, dipadu cuaca yang mendukung, menjadikan tanaman kopi berkembang menjadi komoditas yang bermutu tinggi dan menguntungkan. Komoditi kopi merupakan salah satu komoditi andalan Provinsi Aceh yang dikenal sejak zaman Belanda (1908). Perkebunan kopi Aceh dibudidayakan dan dikelola oleh perkebunan rakyat dengan pendekatan tradisional dan sederhana. Untuk melihat perkembangan luas areal dan produksi kopi Aceh dapat disajikan pada Tabel 4.17.

Dari data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi kopi Provinsi Aceh dari tahun 1998 sampai tahun 2006 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mulai tahun 2002 sampai 2006 produksi kopi Aceh cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proses produksi yang tidak maksimal karena kondisi daerah yang tidak stabil. Namun mulai tahun 2007 sampai 2012 produksi kopi mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai angka 54.314 ton pada tahun 2012. Pada tahun 2013 produksi kopi di Provinsi Aceh mengalami penurunan lagi menjadi 48.282 ton.



<http://musbir.blogspot.com/>

Tabel 4.18.
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kakao
Tahun 1969-2013

Kakao

Perkembangan tanaman kakao sangat pesat di Provinsi Aceh. Jika dilihat dari yang mengusahakan perkembangan luas tanaman kakao perkebunan rakyat lebih tinggi dibanding luas tanaman kakao perkebunan besar. Pada tahun 1986 luas tanaman kakao perkebunan rakyat sebesar 802 hektar dan meningkat menjadi 102.034 hektar ditahun 2013. Sedangkan untuk luas tanaman kakao perkebunan besar tahun 1982 sebesar 139 hektar dan di tahun 2013 meningkat menjadi 1.062 hektar.

Produksi tanaman kakao dari tahun 1986 sampai 2013 terus mengalami peningkatan. Produksi tanaman kakao perkebunan rakyat periode 2002-2013 mencapai angka diatas sepuluh ribu ton dengan produksi tertinggi mencapai angka 37.250 ton di tahun 2011. Berbeda halnya dengan tanaman kakao perkebunan rakyat, tanaman kakao perkebunan besar di Provinsi Aceh dari tahun 1982-2013 perkembangannya berfluktuasi. Selama sepuluh tahun terakhir ini produksi kakao sangat rendah dan puncak terendah mencapai 92 ton di tahun 2013.

Tahun	Luas Tanaman (Ha)		Produksi (Ton)	
	Kakao Perkebunan Rakyat	Kakao Hibrida	Kakao Perkebunan Rakyat	Kakao Hibrida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1982		139		10.167
1983		139		9.342
1984		130		13.814
1985		191		10.797
1986	802	192	29	24.079
1987	1.155	824	89	28.841
1988	2.765	1.582	187	42.066
1989	3.850	1.528	789	73.091
1990	5.791	2.686	907	83.740
1991	9.775	4.065	1.721	101.103
1992	12.610	5.065	3.275	110.799
1993	13.369	4.662	4.095	483
1994	15.291	3.946	5.935	600
1995	15.136	4.046	7.321	1.214
1996	15.887	4.046	8.235	1.223
1997	16.155	3.879	9.580	1.179
1998	14.388	3.881	9.171	1.821
1999	15.599	3.879	9.182	1.138
2000	18.571	3.979	1.377	1.377
2001	16.328	3.522	1.168	1.377
2002	17.179	3.522	10.911	10.911
2003	19.313	4.016	11.780	11.780
2004	24.491	4.080	11.269	1.590
2005	32.295	4.014	14.522	1.590
2006	34.228	4.014	14.454	1.590
2007	46.428	3.674	17.705	1.598
2008	49.778	3.674	18.987	1.598
2009	75.131	-	26.466	-
2010	81.533	3.651	29.677	2.641
2011	87.481	2.031	37.250	344
2012	99.428	1.062	36.661	459
2013	102.034	1.062	34.795	92

Sumber : Aceh Dalam Angka

Tahun	Luas Tanaman (Ha)		Produksi (Ton)	
	Cengkeh Perkebunan Rakyat	Tembakau Perkebunan Rakyat	Cengkeh Perkebunan Rakyat	Tembakau Perkebunan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	5.702	3.097	1.172	3.015
1970	7.769	5.235	1.460	3.516
1971	7.717	3.160	561	2.220
1972	9.366	5.235	1.228	3.546
1973	9.550	4.458	1.240	3.022
1974	10.255	5.406	1.382	3.282
1975	13.022	4.970	1.812	2.591
1976	15.294	5.947	2.975	3.289
1977	15.831	5.120	3.187	2.910
1978	16.001	3.010	1.702	2.192
1979	16.211	3.333	2.236	2.459
1980	17.983	3.855	1.869	2.823
1981	26.218	4.481	4.170	1.436
1982	27.294	3.397	2.899	4.709
1983	32.845	2.414	7.182	1.372
1984	34.957	2.948	5.127	1.665
1985	31.823	8.801	3.996	3.305
1986	35.087	8.390	4.977	4.173
1987	44.075	8.789	5.299	3.860
1988	34.529	5.028	6.347	2.465
1989	35.490	2.678	5.946	1.583
1990	34.937	2.934	4.992	1.734
1991	40.336	7.011	3.491	3.345
1992	37.068	6.796	4.110	1.521
1993	33.995	5.067	2.935	1.563
1994	33.301	3.069	2.595	794
1995	31.754	2.293	2.063	469
1996	30.921	3.019	2.114	831
1997	29.235	2.053	1.546	279
1998	30.240	688	795	139
1999	28.034	571	1.342	126
2000	27.422	884	1.454	130
2001	27.299	642	1.528	269
2002	24.802	576	3.249	133
2003	24.823	1.184	3.151	488
2004	24.322	998	3.581	422
2005	22.987	1.076	1.857	446
2006	23.167	975	1.942	461
2007	22.165	836	2.114	230
2008	22.257	836	2.159	219
2009	22.117	943	714	316
2010	22.609	1.103	1.505	656
2011	22.071	941	1.435	951
2012	22.786	1.501	2.885	349
2013	21.366	2.262	3.379	1.983

Sumber : Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Tabel 4.19.
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Cengkeh
Perkebunan Rakyat dan Tembakau Perkebunan Rakyat
Tahun 1969-2013

Sumber : Aceh Dalam Angka

Cengkeh dan Tembakau

Perkembangan luas tanaman cengkeh terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 1969-2013, luas tanaman cengkeh mengalami pertumbuhan rata-rata 3,05 persen per tahun. Hal yang berbeda kita temukan pada tanaman tembakau, luas tanaman tembakau menunjukkan kecenderungan yang menurun. Selama periode 1969-2013 luas tanaman tembakau rata-rata mengalami penyusutan sebesar 0,71 persen setiap tahunnya.

Selama sepuluh tahun terakhir produksi tanaman cengkeh fluktuatif. Tahun 2009 produksi cengkeh hanya mencapai 714 ton dan merupakan produksi terkecil selama sepuluh tahun terakhir, pada tahun 2013 produksi cengkeh meningkat menjadi 3.379 ton.

Seiring dengan menurunnya luas tanaman tembakau menyebabkan produksinya pun semakin menurun. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 produksi tembakau kurang dari seribu ton, namun di tahun 2013 produksi tembakau meningkat menjadi 1.983 ton.



<http://atalamba.blogspot.com>

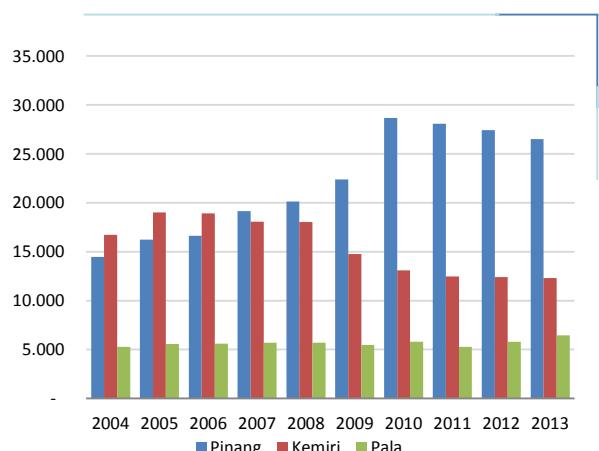
Tabel 4.20.
Luas Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton)
Tahun 1969-2013

Tanaman Pinang, Kemiri dan Pala

Perkembangan luas tanaman pinang dari tahun 1969-2013 berfluktuasi. Pada awal tahun 1970 luas tanaman pinang mencapai 32.526 hektar, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai tahun 2001 dan baru meningkat lagi di atas angka tiga puluh ribu hektar pada tahun 2002.

Berbeda halnya dengan tanaman pinang, luas tanaman kemiri dan pala terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 1982-2013, luas tanaman kemiri mengalami pertumbuhan rata-rata 4,17 persen tiap tahunnya. Begitu juga dengan luas tanaman pala, selama periode 1969-2013 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode tersebut pertumbuhan luas tanaman pala rata-rata mencapai 4,78 persen per tahun.

Gambar 4.11.
Produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton)
Tahun 2004-2013



Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Dilihat dari grafik dapat diketahui produksi tanaman pinang selama sepuluh tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Tahun 2004 produksi tanaman pinang sebesar 14.467 ton dan tahun 2013 telah mencapai 26.518 ton.

Hal berbeda terjadi dengan tanaman pinang, produksi tanaman kemiri selama sepuluh tahun terakhir ini mengalami penurunan dari 16.723 ton pada tahun 2004 menjadi 12.302 ton pada tahun 2013. Sedangkan untuk produksi tanaman pala selama sepuluh tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan yang berarti.

Tahun	Pinang Perkebunan Rakyat	Kemiri Perkebunan Rakyat	Pala Perkebunan Rakyat
(1)	(3)	(4)	(5)
1969	32.526		2.709
1970	32.526		2.794
1971	32.526		2.895
1972	32.526		3.558
1973	29.984		3.848
1974	15.466		4.168
1975	15.055		4.419
1976	13.630		4.692
1977			4.747
1978			4.705
1979			5.145
1980			4.940
1981			4.865
1982	14.367	5.597	4.801
1983	14.738	5.635	4.917
1984	13.787	5.643	5.036
1985	13.439	5.765	5.058
1986	12.867	6.530	5.188
1987	14.032	6.530	5.297
1988	14.155	6.538	5.425
1989	14.200	10.863	6.295
1990	14.304	11.621	6.499
1991	17.099	15.435	8.627
1992	17.850	20.408	8.910
1993	17.783	23.914	13.836
1994	19.402	24.639	12.704
1995	19.757	24.061	12.268
1996	20.080	21.430	11.852
1997	20.711	23.590	11.313
1998	19.867	22.417	9.812
1999	23.368	22.971	9.847
2000	27.439	23.645	11.046
2001	26.039	23.713	11.049
2002	33.413	22.944	11.269
2003	35.471	23.003	12.298
2004	34.102	22.607	13.452
2005	34.620	26.795	14.431
2006	34.698	26.659	15.727
2007	35.320	24.385	17.773
2008	35.235	24.387	17.577
2009	37.896	21.656	20.258
2010	42.058	21.079	20.512
2011	42.184	20.557	21.522
2012	41.065	20.271	21.031
2013	38.053	19.858	21.104

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

Tahun	Pinang Perkebunan Rakyat	Kemiri Perkebunan Rakyat	Pala Perkebunan Rakyat
(1)	(3)	(4)	(5)
1969	9.201		573
1970	9.201		577
1971	9.201		580
1972	7.250		853
1973	10.242		685
1974	10.349		801
1975	10.291		1.439
1976	8.439		687
1977			1.673
1978			1.606
1979			1.665
1980			1.867
1981			1.857
1982	9.783	3.183	2.170
1983	10.039	33.348	2.164
1984	9.532	34.235	2.147
1985	9.408	33.854	2.026
1986	9.521	5.272	2.108
1987	6.114	5.573	2.618
1988	6.204	2.505	2.681
1989	6.221	2.380	2.736
1990	6.194	2.896	2.774
1991	8.107	2.921	3.211
1992	8.708	3.410	3.451
1993	8.815	4.347	6.890
1994	15.509	16.376	6.587
1995	16.894	16.785	5.362
1996	17.603	14.591	7.852
1997	17.978	15.116	8.729
1998	17.909	11.300	7.096
1999	18.845	16.033	6.867
2000	20.290	16.671	5.281
2001	21.699	17.809	5.281
2002	16.889	16.243	4.950
2003	17.135	16.288	4.218
2004	14.467	16.723	5.274
2005	16.222	19.015	5.565
2006	16.642	18.914	5.618
2007	19.157	18.082	5.707
2008	20.137	18.019	5.709
2009	22.396	14.758	5.459
2010	28.657	13.080	5.785
2011	28.076	12.472	5.261
2012	27.439	12.393	5.790
2013	26.518	12.302	6.451

Tabel 4.21.
Produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat, Kemiri Perkebunan Rakyat dan Pala Perkebunan Rakyat (Ton)
Tahun 2004-2013



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

Tabel 4.22.
Luas Tanaman Lada Perkebunan Rakyat Nilam
Perkebunan Rakyat, Kapuk Perkebunan Rakyat, Tebu
Perkebunan Rakyat (Ha) Tahun 1970-2013

Tanaman Lada, Nilam, Kapuk, dan Tebu

Tanaman lada, nilam, kapuk dan tebu tidak begitu banyak dibudidayakan di Provinsi Aceh. Selama periode 1970 - 2013 perkembangan luas tanaman lada, nilam, dan kapuk berfluktuasi, hal ini disebabkan karena teknik pembudidayaan tanaman masih menggunakan cara tradisional.

Luas tanaman tebu selama sepuluh tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 luas tanaman tebu mencapai angka 11.921 hektar dan merupakan luas areal tanaman tebu terluas yang pernah diusahakan di Provinsi Aceh selama 43 tahun terakhir ini.



Tahun	Lada Perkebunan Rakyat	Nilam Perkebunan Rakyat	Kapuk Perkebunan Rakyat	Tebu Perkebunan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1970	584	100	844	1.649
1971	540	500	930	816
1972	584	500	922	816
1973	1.020	1.376	862	1.202
1974	405	876	405	1.162
1975	411	525	411	946
1976	1.132	497	419	1.073
1977	-	262		1.569
1978	-	635		1.417
1979	140	2.110		1.734
1980	130	1.785		1.223
1981	87	910		1.638
1982	222	1.921		1.817
1983	226	3.474		2.420
1984	226	3.109	1.836	2.277
1985	160	2.855	1.123	2.090
1986	241	2.627	1.155	2.131
1987	362	6.353	2.335	2.251
1988	504	6.450	2.540	2.179
1989	673	5.183	2.738	2.326
1990	696	6.038	2.910	2.464
1991	776	5.762	4.392	3.531
1992	1.001	3.415	17.850	3.417
1993	1.056	3.850	4.223	3.778
1994	1.117	3.397	4.693	3.875
1995	1.114	3.932	4.361	3.981
1996	1.099	4.811	4.693	3.976
1997	1.074	6.262	4.732	4.206
1998	842	7.421	4.237	3.931
1999	866	4.387	4.289	3.915
2000	782	4.662	4.155	3.871
2001	824	4.040	4.251	3.874
2002	877	2.941	3.714	3.709
2003	1.014	2.641	3.043	5.825
2004	971	2.162	2.748	3.166
2005	1.050	1.652	2.714	2.739
2006	1.105	2.483	2.715	3.283
2007	1.020	3.144	2.629	6.040
2008	1.025	3.782	2.619	6.342
2009	1.022	4.246	1.795	6.706
2010	921	2.866	1.729	8.326
2011	897	3.859	1.774	9.727
2012	848	3.848	1.726	9.777
2013	861	2.650	1.646	11.921

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

Tahun	Lada Perkebunan Rakyat	Nilam Perkebunan Rakyat	Kapuk Perkebunan Rakyat	Tebu Perkebunan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1970	120	5	155	1.465
1971	110	20	155	725
1972	136	122	123	1.807
1973	189	121	122	5.263
1974	238	81	146	2.657
1975	272	47	138	1.067
1976	267	53	139	4.990
1977	-	41		10.934
1978	-	17		8.330
1979	36	136		2.257
1980	32	261		5.763
1981	14	50		6.935
1982	14	206		5.651
1983	8	350		11.402
1984	14	228	903	11.020
1985	11	249	340	8.824
1986	14	86	451	8.123
1987	33	372	1.236	151
1988	49	365	1.298	764
1989	62	321	1.335	396
1990	83	358	1.352	450
1991	113	296	1.935	1.298
1992	154	188	8.708	1.411
1993	181	269	1.520	11.051
1994	235	179	1.653	11.432
1995	274	378	1.593	14.430
1996	285	189	1.755	14.292
1997	280	184	1.705	14.492
1998	236	319	1.601	15.484
1999	253	263	2.110	15.645
2000	189	253	1.928	30.099
2001	147	266	2.164	35.436
2002	163	283	1.925	24.707
2003	448	166	1.714	1.010
2004	151	143	1.343	884
2005	162	83	1.321	9.474
2006	176	88	1.140	14.417
2007	252	115	1.235	15.180
2008	253	139	1.227	16.726
2009	274	612	869	33.393
2010	204	213	522	50.040
2011	261	253	499	54.667
2012	286	2.283	501	37.860
2013	257	4.368	469	18.595

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

Tabel 4.23.
Produksi Lada Perkebunan Rakyat Nilam Perkebunan Rakyat, Kapuk Perkebunan Rakyat, Tebu Perkebunan Rakyat (Ton) Tahun 1970-2013



<http://seputaraceh.com/>

Kehutanan

Hutan Aceh memiliki karakteristik berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara biofisik, struktur penyusun, fungsi maupun peruntukannya. Sebagian besar dipengaruhi faktor-faktor edafis maupun klimatis.

Wilayah pesisir Aceh merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan barat serta wilayah Ekosistem Leuser di bagian selatan, tengah dan tenggara Aceh meliputi 13 kabupaten/Kota.

Berdasarkan Tabel 4.25 terlihat bahwa produksi kayu gergajian lima tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat tinggi. Pada tahun 2009 produksi mencapai 3,10 juta m³ dan tahun 2013 turun menjadi 5,50 ribu m³.

Selain produksi kayu olahan, produksi hasil hutan nonkayu juga banyak di terdapat di Provinsi Aceh. Hasil hutan non kayu yang paling banyak di Aceh adalah rotan. Selama lima tahun terakhir produksi rotan di Provinsi Aceh semakin berkurang.



Tabel 4.24.
Produksi Hasil Hutan Non-Kayu Tahun 1990 - 2013

Tahun	Rotan Manau (Batang)	Rotan Saga (Kg/Ton)	Rotan Semambo (Batang)	Rotan Tabu (Batang)	Rotan Campuran (Kg/Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990	-	-	-	-	-
1991	57.642	15.213	145.010	-	115.686
1992	-	-	-	-	-
1993	40.018	-	292.083	-	227.215
1994	-	-	-	-	-
1995	-	-	-	-	-
1996	282.243	8.600	665.180	-	267.571
1997	-	-	-	-	-
1998	41.851	23.590	216.173	-	458.410
1999	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	126.385
2001	198.093	-	8.750	-	-
2002	74.480	-	7.520	300.000	-
2003	268.000	10.000	665.200	5.000	185.500
2004	512.000	120	790.000	100	-
2005	132.500	17.500	297.500	189.047	-
2006	100.500	-	-	180.500	-
2007	50.000	9	14.000	-	29
2008	30.000	8	14.000	-	-
2009	132.558	4	54.000	54.282	-
2010	15.550	-	-	-	-
2011	6	9	4	-	-
2012	8	3	3.073	-	-
2013	11.251	148	153.507	-	-

Sumber : Aceh Dalam Angka

Tabel 4.25.
Produksi Kayu Olahan Hasil Hutan Tahun 1989 - 2013

Tahun	Kayu Gergajian (M ³)	Kayu Lapis (M ³)	Block Board (M ³)	Moulding (M ³)	Chips (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990	-	-	-	-	-
1991	65.558	111.670	5.656	20.979	292.517
1992	-	-	-	-	-
1993	67.543	137.079	7.323	-	-
1994	-	-	-	-	-
1995	-	-	-	-	-
1996	47.436	99.383	4.244	39.612	318.371
1997	-	-	-	-	-
1998	43.889	109.687	5.058	60.375	245.810
1999	-	-	-	-	-
2000	101.118	13.473	-	11.200	-
2001	30.849	-	-	6.827	-
2002	88.447.815	-	-	-	55.585.970
2003	25.198.396	-	-	-	70.499.140
2004	16.780	-	-	-	-
2005	20.945	-	-	-	-
2006	20.945	-	-	-	-
2007	3.727.306	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	3.104.394	-	-	-	-
2010	1.633	-	-	-	-
2011	644	-	-	-	-
2012	2.888	-	-	-	-
2013	5.499	-	-	-	-

Sumber : Aceh Dalam Angka

Tabel 4.26.
Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (Ekor)
Tahun 1961-2013

Tahun	Sapi Perah	Sapi	Kerbau	Kuda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961	-	150.234	127.666	4.630
1962	-	152.487	129.580	4.699
1963	-	154.774	131.524	1.769
1964	-	160.648	137.368	4.840
1965	-	165.704	140.815	5.113
1966	-	156.368	174.242	6.802
1967	-	160.277	178.598	6.970
1968	-	172.610	190.765	6.973
1969	-	196.760	225.699	6.963
1970	-	200.650	239.650	7.090
1971	-	239.300	259.640	6.583
1972	-	288.550	279.930	9.153
1973	-	304.388	309.389	8.561
1974	-	325.854	329.023	9.090
1975	-	322.347	330.591	11.932
1976	-	326.930	342.687	10.948
1977	-	295.389	314.389	14.011
1978	-	307.455	326.064	14.934
1979	-	317.118	339.520	15.279
1980	-	330.480	355.190	15.934
1981	-	342.789	380.995	14.627
1982	-	350.465	384.176	14.781
1983	-	328.561	398.524	15.086
1984	-	371.024	412.670	16.542
1985	-	384.191	433.940	16.589
1986	-	395.727	453.898	16.621
1987	-	416.465	397.766	16.799
1988	-	380.675	351.073	12.078
1989	-	386.500	356.267	7.704
1990	-	392.412	361.540	7.800
1991	-	415.267	362.132	6.931
1992	354	451.344	369.087	6.934
1993	46	531.255	393.286	5.057
1994	46	558.063	408.781	7.997
1995	151	523.754	420.572	8.841
1996	153	602.460	430.091	9.292
1997	155	680.476	433.994	9.843
1998	158	696.108	411.510	3.244
1999	67	697.304	401.286	3.343
2000	55	698.489	391.334	3.440
2001	61	699.956	393.369	3.347
2002	67	700.866	395.414	3.446
2003	74	703.659	403.288	3.353
2004	28	623.823	336.522	2.761
2005	28	673.144	357.381	3.296
2006	28	666.101	349.023	2.773
2007	33	639.828	297.136	3.117
2008	32	641.093	280.662	3.243
2009	35	669.996	290.772	3.362
2010	41	671.086	297.212	3.366
2011	31	462.840	131.494	2.495
2012	28	505.171	164.294	2.314
2013	25	404.221	111.950	1.744

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
(Aceh Dalam Angka 1961-2014)

PETERNAKAN

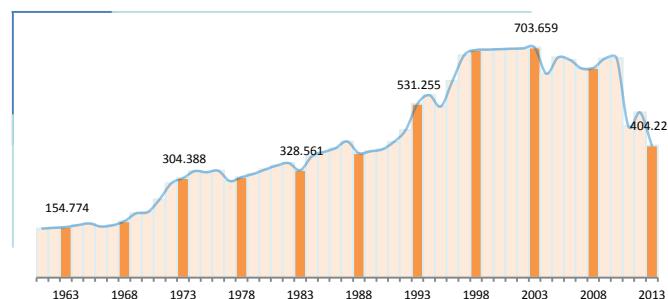
Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda

Jumlah populasi ternak besar selama kurun waktu tahun 1961 sampai dengan 2013 memperlihatkan angka yang variatif. Populasi sapi perah lebih cenderung menunjukkan pertumbuhan negatif selama periode tertentu sedangkan ternak sapi menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel disamping dapat dilihat populasi sapi perah pada tahun 1992 mencapai angka tertinggi yaitu sebanyak 354 ekor dan menurun menjadi 25 ekor saja pada tahun 2013 atau turun sebesar 92 persen selama kurang lebih 21 tahun.

Berbeda halnya dengan sapi perah, jumlah sapi potong justru kian meningkat tiap tahunnya. Selama periode 1961-2003 pertumbuhan populasi ternak sapi mengalami kenaikan sebesar 368,38 persen atau sebanyak 150.234 ekor pada tahun 1961 naik menjadi 703.659 ekor pada tahun 2003. Namun demikian pertumbuhan ini juga disertai dengan penurunan jumlah populasi ternak sapi selama periode 2003-2013 yaitu sebesar minus 42,55 persen.

Gambar 4.12.

Populasi Ternak Sapi (Ekor) Tahun 1961-2013



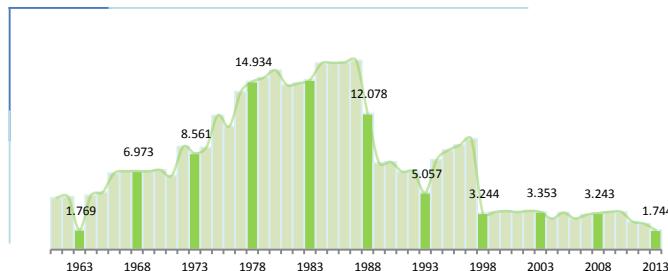
Sumber :

Selama periode 1961-2003 jumlah populasi kerbau mengalami peningkatan sebesar 215,89 persen, kemudian dalam kurun waktu 2003-2013 terjadi penurunan populasi ternak kerbau hingga mencapai 72,24 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Kemudian populasi ternak kuda jika dilihat dari segi jumlah masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sapi dan kerbau. Jumlah ternak kuda mencapai angka tertinggi pada periode 1977-1987 yaitu lebih dari 14 ribu ekor. Sedangkan di tahun 2000-an populasinya justru sangat menurun hingga

Gambar 4.13.

Populasi Ternak Kuda (Ekor) Tahun 1961-2013



Sumber :

Tabel 4.27.
Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak (Ekor)
Tahun 1961-2013

Tahun	Kambing	Domba	Babi
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	-	-	12.348
1962	-	-	12.453
1963	-	-	12.640
1964	-	-	-
1965	-	-	13.670
1966	-	-	4.670
1967	-	-	3.060
1968	-	-	2.550
1969	209.705	31.600	4.454
1970	213.820	32.175	4.520
1971	207.270	39.080	6.372
1972	242.714	67.817	4.460
1973	274.967	84.992	5.883
1974	300.331	99.247	8.502
1975	299.734	98.412	8.435
1976	323.309	111.205	8.465
1977	278.788	109.610	9.506
1978	265.282	104.655	12.208
1979	255.210	114.543	6.388
1980	278.294	116.683	6.112
1981	303.675	127.775	7.606
1982	317.628	131.685	10.732
1983	316.901	139.732	9.716
1984	347.772	141.227	9.913
1985	365.835	148.808	9.830
1986	384.257	156.248	9.750
1987	398.864	162.060	9.255
1988	381.114	91.242	13.048
1989	375.245	91.222	11.799
1990	388.897	94.269	11.857
1991	403.334	100.400	2.032
1992	474.871	103.941	1.657
1993	506.043	107.214	1.661
1994	556.829	116.503	1.725
1995	577.633	120.084	508
1996	602.137	128.462	459
1997	644.654	140.738	322
1998	662.019	139.185	443
1999	622.501	122.026	461
2000	626.983	119.963	154
2001	634.883	121.067	113
2002	636.044	121.624	143
2003	660.884	129.724	105
2004	558.735	123.070	-
2005	673.213	140.467	-
2006	696.519	138.839	224
2007	675.879	134.577	227
2008	957.426	157.081	333
2009	807.506	193.852	302
2010	746.475	164.251	414
2011	566.837	141.976	3.265
2012	581.676	163.542	4.194
2013	655.650	157.111	4.065

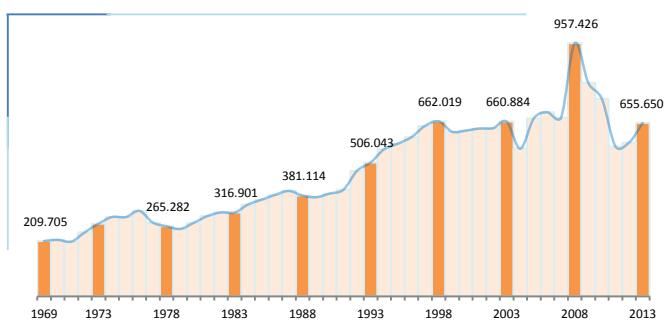
Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
(Aceh Dalam Angka 1961-2014)

Populasi Ternak Kambing, Domba dan Babi

Populasi ternak kambing secara umum mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya, hanya di beberapa tahun tertentu saja jumlahnya sedikit menurun. Selama periode 1969-2008 perkembangan jumlah populasi ternak kambing sangat pesat. Sebanyak 209 ribu ekor kambing pada tahun 1969 meningkat sebesar 356,56 persen pada tahun 2008 atau sebanyak 957 ribu ekor. Sedangkan penurunan populasi ternak kambing terjadi selama periode 2008-2013 yaitu menurun hingga 31,52 persen.

Gambar 4.14.

Populasi Ternak Kambing (Ekor) Tahun 1969-2013

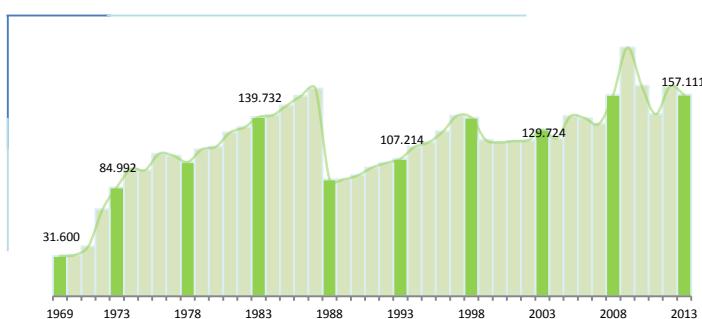


Sumber :

Berdasarkan tabel 4.27. terlihat perkembangan jumlah ternak domba mengalami pertumbuhan positif selama periode 1969-1987. Dalam kurun waktu tersebut pertumbuhan populasi ternak domba yang hanya berjumlah 31.600 ekor pada tahun 1969 melonjak naik hingga 162.060 ekor pada tahun 1987. Kemudian jumlahnya sedikit menurun pada tahun 1988 hingga 1990 menjadi 90 ribuan ekor. Pertumbuhan positif kembali terjadi pada periode 1991-2013 yaitu sebesar 56,49 persen.

Gambar 4.15.

Populasi Ternak Domba (Ekor) Tahun 1969-2013



Sumber :

Berbeda halnya dengan populasi babi di Provinsi Aceh, perkembangannya semakin mengalami penurunan dari masa ke masa. Pada tahun 1961 jumlahnya mencapai 12.348 ekor akan tetapi pada tahun 1995 mengalami penurunan drastis hingga jumlahnya menjadi 508 ekor. Kemudian pada periode 1995-2010 populasi ternak babi hanya berkisar dibawah lima ratus ekor, selanjutnya pada tahun 2013 populasinya sedikit meningkat sehingga berjumlah 4.065 ekor.

Tabel 4.28.
Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor)
Tahun 1969-2013

Tahun	Ayam Buras	Itik	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	1.220.401	656.072	-	-
1970	1.411.940	665.300	-	-
1971	2.142.860	903.570	-	-
1972	3.085.934	1.317.841	-	-
1973	4.253.909	1.796.920	-	-
1974	4.401.918	1.930.641	-	-
1975	4.450.763	2.015.929	-	-
1976	4.808.079	2.173.609	-	38.261
1977	2.967.056	1.405.073	-	45.720
1978	3.614.857	1.490.769	-	58.145
1979	3.875.818	1.312.319	-	66.308
1980	4.154.059	1.921.799	-	74.475
1981	4.381.154	2.004.544	-	76.815
1982	5.038.441	2.361.689	-	106.987
1983	5.326.365	2.471.675	-	101.121
1984	6.853.913	2.531.200	-	115.858
1985	7.280.224	2.788.087	-	127.409
1986	7.717.037	2.927.517	-	133.777
1987	8.094.497	3.044.100	-	99.183
1988	10.381.744	2.435.582	39.333	103.180
1989	9.229.940	2.342.666	53.379	159.173
1990	9.645.287	2.436.373	57.650	175.090
1991	10.163.262	2.281.485	152.378	43.825
1992	10.284.909	2.682.848	169.095	46.003
1993	12.134.232	2.533.446	119.651	65.806
1994	12.705.464	2.803.066	195.689	80.077
1995	13.642.803	3.137.202	545.397	168.460
1996	15.106.539	3.225.970	911.611	183.920
1997	15.157.846	3.399.178	1.108.100	213.375
1998	19.263.264	3.512.566	1.089.663	228.727
1999	15.914.184	3.292.047	951.548	260.640
2000	16.192.682	3.314.103	965.155	245.592
2001	17.511.361	3.336.510	978.957	257.356
2002	17.721.490	3.358.861	992.956	47.300
2003	21.179.961	3.391.451	993.333	79.944
2004	17.317.378	2.891.079	1.042.534	89.904
2005	16.484.558	2.900.481	1.293.647	129.796
2006	12.644.023	2.543.545	1.211.126	179.869
2007	11.125.945	2.594.754	1.399.808	137.950
2008	8.904.869	2.596.927	1.346.308	181.887
2009	7.999.520	2.709.545	1.836.413	232.364
2010	7.799.480	2.670.611	3.011.946	30.638
2011	6.010.575	2.328.878	3.085.271	267.741
2012	6.065.665	2.328.054	2.959.212	266.174
2013	6.054.553	2.271.247	3.041.218	243.270

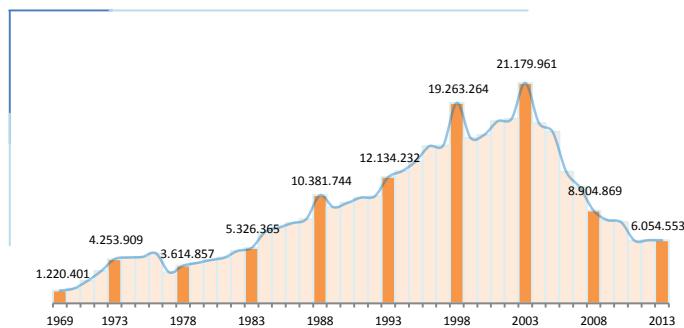
Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
(Aceh Dalam Angka 1961-2014)

Populasi Ternak Unggas

Ternak ayam buras merupakan populasi ternak unggas yang berkembang paling baik di Provinsi Aceh. Pada tahun 1969 jumlah populasi ayam buras mencapai 1,22 juta ekor. Kemudian jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya hingga puncaknya pada tahun 2003 populasi tersebut melesit tajam mencapai 21,18 juta ekor atau naik melebihi tiga puluh kali lipat selama kurun waktu 34 tahun. Namun demikian peningkatan ini juga disertai dengan penurunan jumlah populasi ayam buras pada periode 2003-2013, dimana selama sepuluh tahun terakhir ini penurunannya mencapai 71,41 persen.

Gambar 4.16.

Populasi Ternak Ayam Buras (Ekor) Tahun 1969-2013



Sumber :

Populasi ternak itik juga memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. Perkembangan jumlahnya pun cenderung lebih stabil sebagaimana terlihat pada gambar 4.28. Pada tahun 1969 populasi ternak itik sejumlah enam ratus ribu ekor menjadi satu juta ekor lebih di tahun 1972. Kemudian selama kurun waktu 40 tahun yaitu 1973 hingga 2013 mengalami peningkatan sebesar 26,40 persen.

Gambar 4.17.

Populasi Ternak Ayam Itik (Ekor) Tahun 1969-2013



Sumber :

Jika dibandingkan dengan ayam buras maka jumlah ayam ras pedaging dan ayam ras petelur relatif lebih kecil. Berdasarkan tabel 4.28. terlihat perkembangan ayam ras pedaging jauh lebih meningkat daripada ayam ras petelur. Peningkatannya lebih dari tujuh puluh kali lipat selama periode 1988-2013 yaitu sebanyak 39 ribu ekor ayam ras pedaging pada tahun 1988 melonjak hingga angka 2 juta ekor lebih pada tahun 2013. Adapun populasi ayam ras petelur juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 1976-2013. Akan tetapi peningkatannya hanya berkisar enam kali lipat dari populasi awal di tahun 1976.

Gambar 4.29.

Pemotongan Ternak Besar dan Kecil Menurut Jenis Ternak
(Ekor) Tahun 1961-2013

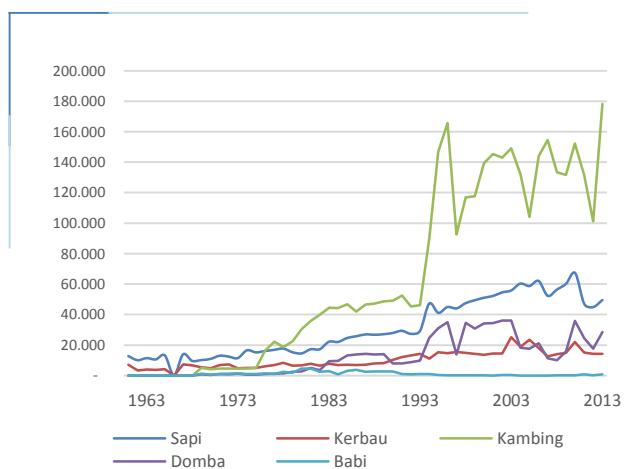
Pemotongan Ternak Besar dan Ternak Kecil

Selama periode 1961-2013 pemotongan ternak terus mengalami peningkatan. Akan tetapi di beberapa tahun juga terdapat penurunan jumlah pemotongan ternak sehingga bentuk kurva terlihat begitu beragam. Pemotongan ternak kambing merupakan pemotongan ternak kecil yang pertumbuhannya paling pesat dibandingkan ternak lain. Hal ini terlihat pada gambar 4.18. dimana angkanya menempati urutan teratas. Pemotongan ternak kambing mengalami peningkatan yang paling besar pada tahun 1996 dan 2013 hingga diatas 160 ribu ekor ternak yang dipotong. Jika dibandingkan dengan tahun 1969 jumlahnya hanya berkisar 4 ribu ekor lebih, berarti telah terjadi peningkatan sebesar lebih dari tiga puluh enam kali lipat pada tahun 2013.

Kemudian pemotongan ternak sapi menjadi urutan kedua terbanyak setelah ternak kambing. Setiap tahunnya rata-rata pemotongan ternak sapi mengalami peningkatan terlebih selama periode 1961-2010 pertumbuhannya hingga mencapai 430,15 persen selama kurun waktu 49 tahun. Akan tetapi pada tahun 2010-2013 terjadi pertumbuhan negatif dalam pemotongan ternak sapi atau menurun hingga 26,35 persen.

Gambar 4.18.

Pemotongan Ternak Besar dan Kecil (Ekor) Tahun 1961-2013



Sumber :

Pemotongan ternak kerbau selama periode 1961-2013 mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, dimana selama kurun waktu 52 tahun perkembangannya hanya mencapai dua kali lipat atau sebanyak 7 ribuan ekor pada tahun 1961 naik menjadi 14 ribuan pada tahun 2013.

Adapun pemotongan ternak domba selama periode 1969-2013 yang paling banyak berada pada tahun 2000-an dimana angka tertinggi mencapai 36 ribu ekor ternak yang dipotong dalam setahun.

Lain halnya dengan pemotongan ternak babi, perkembangannya cenderung mengalami penurunan. Pemotongan ternak ini tidak lebih dari lima ribu ekor dalam setahun selama kurun waktu 1969-2013. Ini dimungkinkan karena jumlah populasi ternak babi di Provinsi Aceh yang memang tidak terlalu banyak.

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
(Aceh Dalam Angka 1961-2014)

Tabel 4.30.
Pemotongan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 1969-2013

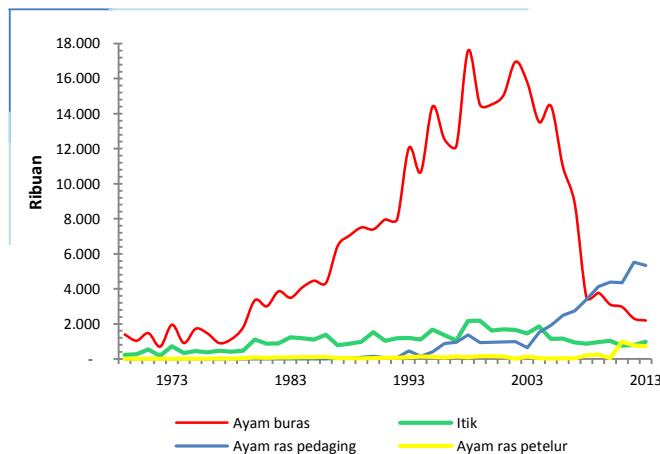
Tahun	Ayam Buras	Itik	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	1.391.429	220.004	-	-
1970	1.035.714	271.250	-	-
1971	1.467.092	541.294	-	-
1972	698.571	182.508	-	-
1973	1.952.840	713.767	-	-
1974	902.669	346.416	-	-
1975	1.720.001	449.997	-	-
1976	1.445.714	378.751	-	-
1977	896.058	466.439	-	22.861
1978	1.122.473	408.095	-	15.919
1979	1.798.435	462.218	-	43.516
1980	3.351.443	1.096.360	-	73.239
1981	3.001.089	869.933	-	55.452
1982	3.855.480	893.005	-	88.235
1983	3.485.777	1.226.454	-	83.428
1984	4.077.753	1.170.887	-	95.583
1985	4.461.735	1.104.634	-	91.971
1986	4.335.321	1.381.673	-	110.369
1987	6.470.730	782.590	33.712	47.751
1988	7.044.593	875.517	34.761	51.138
1989	7.503.899	979.447	83.099	29.611
1990	7.388.978	1.532.873	137.363	49.203
1991	7.958.179	1.035.626	72.752	56.440
1992	7.960.023	1.175.843	75.895	58.089
1993	12.042.182	1.188.941	452.751	103.594
1994	10.664.004	1.114.071	149.933	129.100
1995	14.405.985	1.670.041	398.615	122.711
1996	12.527.306	1.355.566	881.823	84.824
1997	12.139.001	1.043.221	958.733	143.464
1998	17.604.325	2.168.267	1.365.865	102.020
1999	14.506.179	2.177.054	930.048	160.324
2000	14.530.836	1.622.874	946.695	150.341
2001	15.068.477	1.697.563	963.641	140.989
2002	16.961.324	1.646.001	982.697	-
2003	15.767.708	1.444.978	640.668	140.989
2004	13.515.552	1.845.829	1.520.953	42.802
2005	14.426.989	1.145.311	1.911.822	10.691
2006	10.974.084	1.164.072	2.486.493	48.606
2007	8.868.840	932.629	2.733.478	33.079
2008	3.496.004	859.770	3.394.513	206.799
2009	3.766.774	952.687	4.124.289	249.218
2010	3.099.326	1.037.546	4.383.725	42.759
2011	2.963.480	751.795	4.357.552	984.793
2012	2.302.270	794.846	5.510.827	775.611
2013	2.189.235	974.788	5.334.269	719.625

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan (Aceh Dalam Angka 1961-2014)

Pemotongan Ternak Unggas

Pemotongan ternak unggas di Provinsi Aceh selama kurun waktu 1969 hingga 2013 mengalami perkembangan yang cukup besar. Selama periode tersebut pemotongan ayam buras mengalami pertumbuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan unggas lainnya. Puncaknya adalah pada tahun 1998 pemotongan ayam buras mencapai angka diatas 17 juta ekor. Kemudian periode 1998-2013 perkembangan jumlah pemotongan ayam buras semakin merosot. Hingga pada tahun 2013 pemotongan ternak ini hanya berkisar 2 juta ekor atau mengalami penurunan sebesar 87,56 persen.

Gambar 4.19.
Pemotongan Ternak Unggas (Ekor) Tahun 1969-2013



Sumber :

Perkembangan pemotongan ternak itik relatif lebih stabil. Selama periode 1969-213 peningkatan jumlah pemotongan ternak itik mencapai empat kali lipat. Hanya di beberapa tahun terlihat sedikit penurunan kemudian diselingi dengan kenaikan kembali jumlah pemotongannya.

Adapun pemotongan ternak ayam ras pedaging mengalami lonjakan yang cukup besar pada tahun 2013. Sebanyak 33.712 ekor ayam ras pedaging pada tahun 1987 melesit jauh hingga 5,33 juta ekor ayam yang dipotong selama tahun 2013 atau berkisar seratus lima puluh kali lipat peningkatan jumlah pemotongan ayam ras pedaging dalam kurun waktu 26 tahun.

Jumlah pemotongan ayam ras petelur tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pemotongan ternak lainnya. Selama tahun 1977 pemotongan ternak ayam ras petelur sebanyak 22.861 ekor kemudian meningkat hingga 719.625 ekor pada tahun 2013.

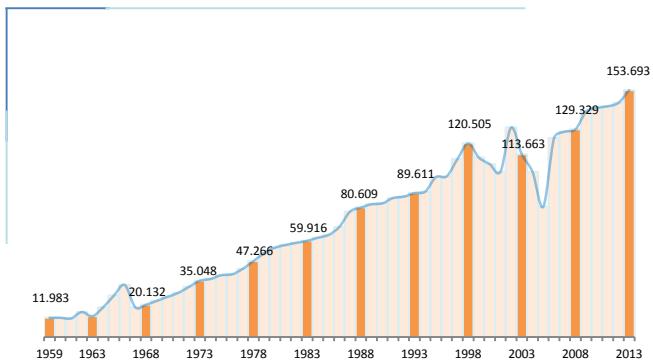
Tabel 4.31.
Produksi Penangkapan Ikan (Ton)
Tahun 1959-2013

Perikanan

Produksi penangkapan ikan laut dalam kurun waktu 1959-2013 menunjukkan pertumbuhan positif. Selama periode 1959-1998 pertumbuhannya meningkat hingga sepuluh kali lipat. Kemudian periode 1998-2005 produksi penangkapan ikan mengalami penurunan menjadi 81.162 ton di tahun 2005 atau sebesar minus 32,65 persen. Akan tetapi produksi ini kembali meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai 89,37 persen atau sebanyak 153.693 ton.

Gambar 4.20.

Produksi Penangkapan Ikan di Laut (Ton) Tahun 1959-2013

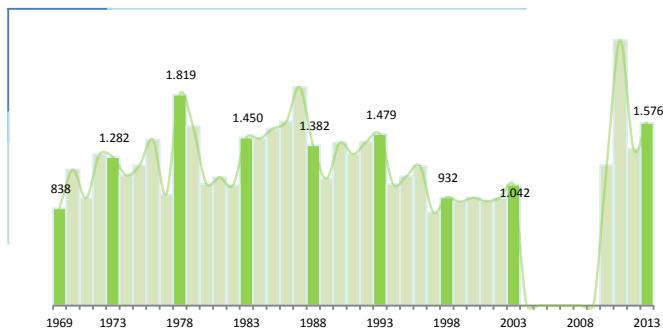


Sumber :

Berbeda halnya dengan kondisi penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum menunjukkan produksi yang lebih kecil yaitu tidak mencapai dua ribu ton per tahunnya, kecuali di tahun 2012 dimana produksinya melejit naik. Selama periode 1969-1978 produksi penangkapan ikan di perairan umum menunjukkan peningkatan sebesar 117,06 persen. Kemudian selama masa 1978-1988 terjadi penurunan produksi sebesar 24,02 persen, yang kembali menurun pada tahun 2003 sebesar 24,60 persen atau dari 1.382 ton pada tahun 1988 menjadi 1.042 ton pada tahun 2003. Puncaknya pada tahun 2012 dimana produksi saat itu adalah yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu lebih dari dua ribu ton dalam setahun.

Gambar 4.21

Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton)
Tahun 1959-2013



Tahun	Laut	Perairan Umum
(1)	(2)	(3)
1959	11.983	-
1960	11.983	-
1961	11.580	-
1962	15.562	-
1963	13.017	-
1964	18.541	-
1965	25.825	-
1966	32.410	-
1967	18.468	-
1968	20.132	-
1969	22.554	838
1970	25.068	1.172
1971	27.528	925
1972	31.282	1.302
1973	35.048	1.282
1974	36.170	1.124
1975	38.498	1.208
1976	39.044	1.431
1977	42.456	959
1978	47.266	1.819
1979	52.263	1.548
1980	55.651	1.050
1981	57.328	1.106
1982	58.675	1.037
1983	59.916	1.450
1984	61.839	1.440
1985	63.610	1.526
1986	68.539	1.587
1987	78.102	1.885
1988	80.609	1.382
1989	82.676	1.095
1990	83.223	1.404
1991	86.564	1.305
1992	87.410	1.413
1993	89.611	1.479
1994	90.548	1.046
1995	99.600	1.114
1996	100.064	1.204
1997	110.817	804
1998	120.505	932
1999	111.691	895
2000	107.663	929
2001	102.824	900
2002	130.429	929
2003	113.663	1.042
2004	102.721	-
2005	81.162	-
2006	123.884	-
2007	127.837	-
2008	129.329	-
2009	140.405	-
2010	142.697	1.212
2011	143.680	2.290
2012	145.834	1.352
2013	153.693	1.576

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan
(Aceh Dalam Angka 1970-2014)

Tabel 4.32
Populasi Budidaya Ikan di (Ton)
Tahun 1969-2013

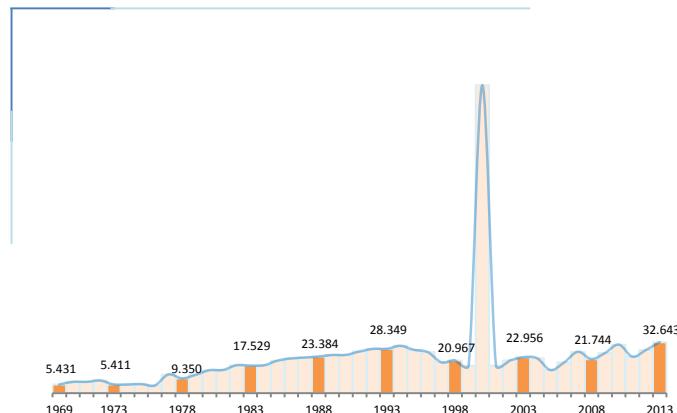
Tahun	Tambak	Kolam	Sawah	Jaring Apung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969	5.431	88	708	-
1970	7.123	139	106	-
1971	7.124	351	1	-
1972	7.968	200	125	-
1973	5.411	-	-	-
1974	5.385	101	94	-
1975	5.672	62	64	-
1976	4.771	44	64	-
1977	11.878	140	64	-
1978	9.350	454	199	-
1979	11.644	324	219	-
1980	14.603	266	151	-
1981	14.756	378	172	-
1982	17.818	387	445	-
1983	17.529	424	410	-
1984	17.736	397	434	-
1985	20.776	705	478	-
1986	22.196	884	303	-
1987	22.747	892	773	-
1988	23.384	956	582	-
1989	24.384	1.590	1.688	-
1990	24.453	1.668	1.284	-
1991	26.609	1.945	1.835	-
1992	28.332	1.951	3.005	-
1993	28.349	2.490	2.381	-
1994	30.272	4.310	2.932	10
1995	27.702	4.117	3.080	16
1996	26.264	4.443	3.524	9
1997	19.684	2.104	1.823	23
1998	20.967	1.190	2.762	66
1999	17.620	1.588	2.599	46
2000	197.945	1.477	2.537	160
2001	17.620	1.588	2.599	46
2002	197.945	1.477	2.537	160
2003	22.956	2.153	2.457	165
2004	22.375	9.138	3.250	1.760
2005	14.685	8.728	28.583	347
2006	19.596	8.727	3.263	389
2007	26.450	6.305	4	484
2008	21.744	9.643	1.774	417
2009	25.694	9.839	2.058	124
2010	31.075	14.093	792	555
2011	23.314	14.637	1.089	239
2012	27.620	10.986	1.082	224
2013	32.643	12.752	934	480

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan
(Aceh Dalam Angka 1970-2014)

Kemudian produksi budidaya sawah tidak kalah pentingnya dengan budidaya ikan lainnya. Dimana pertumbuhan terus terjadi setiap tahun hingga produksinya berada pada jumlah yang tertinggi di tahun 2005 yaitu sebesar 28.583 ton dan pada tahun 2007 berada di angka terendah yaitu hanya 4 ton saja. Pembudidayaan ikan dengan jaring apung belum banyak dilakukan di Aceh. Akan tetapi pada tahun 1994 telah mulai dilakukan walaupun produksinya hanya 10 ton. Kemudian sedikit demi sedikit mengalami peningkatan hingga pada tahun 2013 produksinya mencapai 480 ton.

Pembudidayaan ikan pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu budidaya ikan air payau (tambak) dan budidaya air tawar yang meliputi kolam dan sawah. Budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di wilayah Aceh sebagaimana terlihat pada tabel 4.32. Adapun produksi budidaya tambak pada tahun 1969 sebesar 5.431 ton sedangkan produksi yang paling tinggi berada pada tahun 2000 yang mencapai 197.945 ton. Kemudian pada tahun 2001-2013 produksi budidaya tambak kembali stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 85,26 persen.

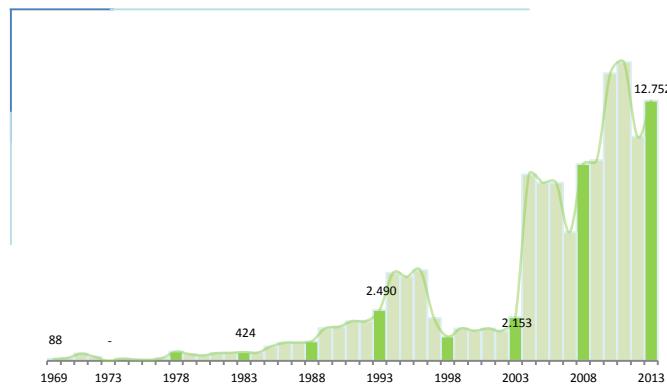
Gambar 4.22.
Produksi Budidaya Ikan Tambak (Ton) Tahun 1969-2013



Sumber :

Produksi budidaya kolam juga terus mengalami pertumbuhan yang baik. Selama periode 1969-2013 peningkatan yang terlihat cukup besar karena rentang tahun yang cukup jauh. Dalam kurun waktu 44 tahun tersebut terjadi perkembangan produksi sebanyak 88 ton di tahun 1969 melambung naik pada tahun 2013 menjadi 12.752 ton atau meningkat lebih dari seratus kali lipat.

Gambar 4.23.
Produksi Budidaya Ikan Kolam (Ekor) Tahun 1969-2013



Sumber :

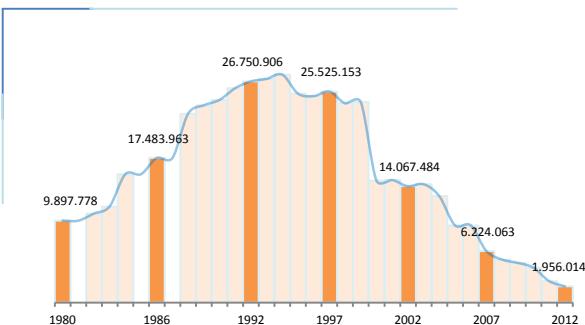
LISTRIK, GAS, DAN AIR

Sektor pertambangan dan energi di Provinsi Aceh mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 1980-an hingga 1990-an, akan tetapi kemajuan ini juga diiringi oleh penurunan di beberapa tahun terakhir.

Produksi Migas

Sektor migas terutama Gas Alam Cair (LNG) dan kondensat yang dihasilkan oleh PT. Arun NGL. Co sangatlah berperan dalam perekonomian Aceh. Selama kurun waktu 32 tahun yaitu 1980 hingga 2012 produksi migas memiliki jumlah yang cukup variatif. Perkembangan produksi LNG pada periode 1980-1999 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2000 hingga 2012 produksinya mengalami penurunan yang relatif besar.

Gambar 5.1.
Pekembangan Produksi Gas Alam Cair (LNG)
PT. Arun NGL. Co Tahun 1980-2012



Sumber: Aceh Dalam Angka (1980-2013)

Jika pada tahun 1980 produksi LNG sebanyak 9,90 juta meter kubik, maka pada tahun 1994 produksi gas alam cair ini mencapai puncaknya sebesar 27,57 juta meter kubik atau meningkat sebesar 178,55 persen selama kurang lebih 14 tahun.

Sementara itu pada tahun 2000 mulai terlihat penurunan produksi (sebagaimana Gambar 5.1), dimana pada periode 1997-2002 terlihat produksi yang menurun hingga 44,89 persen. Kemudian kurun waktu 2002-2007 terus mengalami penurunan produksi LNG hingga mencapai minus 55,76 persen. Hingga di tahun 2012 angka ini masih memperlihatkan pertumbuhan negatif sebesar 68,57 persen atau sebanyak 6,22 juta meter kubik pada tahun 2007 menjadi 1,96 juta meter kubik pada tahun 2012.

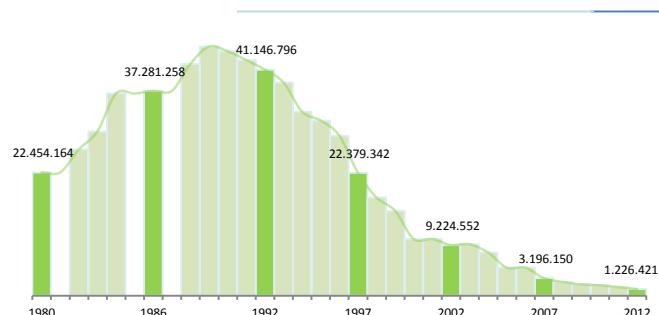
Produksi kondensat selama periode 1980-1990 memiliki jumlah yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 1980 produksi kondensat sebanyak 22,45 juta barrel naik menjadi 44,50 juta di tahun 1990 atau meningkat sebesar 98,18 persen dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan periode selanjutnya jumlah produksinya terus menurun tiap tahun hingga menjadi 1,23 juta barrel pada tahun 2012.

Tabel 5.1.
Perkembangan Produksi Gas Alam Cair dan Kondensat
PT. Arun NGL Co. Tahun 1980-201

Tahun	Gas Alam Cair / LNG (m³)	Kondensat (Barrel)
(1)	(2)	(3)
1980	9.897.778	22.454.164
1981	<i>Not Available</i>	
1982	10.755.607	26.615.433
1983	11.622.537	29.915.143
1984	15.522.160	36.802.133
1985	<i>Not Available</i>	
1986	17.483.963	37.281.258
1987	<i>Not Available</i>	
1988	22.841.227	42.209.729
1989	23.862.509	45.357.329
1990	24.504.000	44.500.000
1991	25.925.691	42.886.072
1992	26.750.906	41.146.796
1993	27.050.625	38.818.931
1994	27.570.548	33.492.310
1995	25.269.280	31.891.187
1996	24.970.444	29.154.098
1997	25.525.153	22.379.342
1998	24.096.892	17.870.331
1999	24.259.488	15.459.482
2000	14.751.040	10.307.130
2001	14.821.473	10.332.836
2002	14.067.484	9.224.552
2003	14.309.099	9.374.944
2004	12.875.597	7.857.508
2005	9.340.583	5.108.894
2006	9.340.583	5.108.894
2007	6.224.063	3.196.150
2008	5.192.521	2.511.720
2009	4.790.922	2.068.082
2010	4.212.914	1.908.076
2011	2.588.156	1.571.217
2012	1.956.014	1.226.421
2013	-	-

Sumber: Aceh Dalam Angka (1968-2014)

Gambar 5.1.
Pekembangan Produksi Kondensat
PT. Arun NGL. Co Tahun 1980-2012



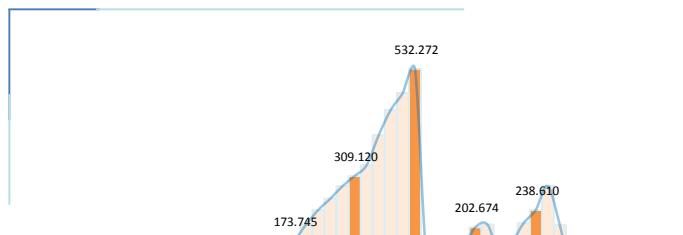
Sumber: Aceh Dalam Angka (1980-2013)

Tabel 5.2.
Perkembangan Perusahaan Listrik Negara
Tahun 1968-2013

Tahun	Produksi Listrik (000 kWh)	Jumlah Langganan	Listrik Terjual (000 kWh)	Nilai Penjualan (000 Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1968	8.832	8.426	-	39.942
1969	10.796	8.469	8.800	100.165
1970	13.140	8.640	10.459	119.984
1971	14.218	8.736	11.023	124.774
1972	15.195	9.164	11.862	134.465
1973	17.321	10.331	13.301	163.968
1974/1975	18.988	11.869	14.834	234.323
1975/1976	21.351	12.963	19.650	402.783
1976/1977	24.842	14.029	19.362	587.735
1977/1978	28.925	15.709	23.052	717.856
1978/1979	34.924	18.596	25.671	819.034
1979/1980	42.077	22.894	31.380	1.018.124
1980/1981	52.253	27.851	37.432	1.967.786
1981/1982	63.472	33.033	45.455	1.530.864
1982/1983	70.905	38.694	62.750	4.308.445
1983/1984	84.726	45.340	63.268	5.763.948
1984/1985	97.515	54.152	64.707	7.547.780
1985/1986	106.247	68.813	72.121	8.351.635
1986/1987	124.035	90.046	89.679	10.164.555
1987/1988	146.528	113.796	103.584	11.761.254
1988/1989	173.745	136.019	123.928	14.146.292
1989/1990	208.766	156.244	153.928	21.292.953
1990/1991	238.812	180.548	177.384	23.856.207
1991/1992	262.158	201.637	197.039	28.724.748
1992/1993	288.117	228.981	224.529	33.361.515
1993/1994	309.120	260.639	249.980	40.764.722
1994	331.799	290.341	269.943	44.496.720
1995	394.078	334.206	324.977	56.095.660
1996	446.688	378.636	372.185	65.188.215
1997	481.984	441.911	423.541	75.913.456
1998	532.272	493.450	464.779	101.602.518
1999	126.286	526.094	475.400	109.364.444
2000	150.633	565.468	506.310	130.515.072
2001	157.396	583.294	511.888	152.170.946
2002	163.061	601.300	494.772	208.635.313
2003	202.674	624.353	577.554	306.769.615
2004	208.461	660.749	701.485	368.742.634
2005	147.193	665.957	698.932	306.769.615
2006	170.101	726.001	839.233	454.999.608
2007	211.376	819.919	997.357	550.481.088
2008	238.610	900.042	1.149.698	688.685.534
2009	288.325	938.994	1.276.452	786.264.684
2010	206.987	987.027	1.491.936	929.737.238
2011	104.821	1.050.139	1.579.768	1.044.837.514
2012	93.723	1.082.218	1.755.068	1.168.559.517
2013	74.113	1.127.469	1.815.030	1.329.291.874

Sumber: Aceh Dalam Angka (1968-2014)

Gambar 5.2.
Perkembangan Produksi Listrik (000 KWh) Tahun 1968-2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1968-2014)

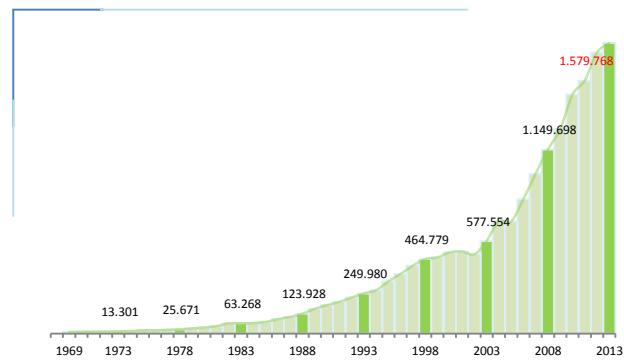
Perkembangan Listrik

Perkembangan listrik negara wilayah Aceh selama kurun waktu 1968-2013 memiliki angka yang cukup beragam. Hingga tahun 1998 perkembangan produksi listrik terus mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada tahun 1968-1978 produksi listrik meningkat sebesar 295,43 persen. Kemudian periode 1978-1988 peningkatannya pun masih positif yaitu mencapai 397,49 persen. Puncak pertumbuhan positif dari produksi listrik tersebut adalah pada kurun waktu 1988-1998 sebanyak 173.745 ribu kWh pada tahun 1988 meningkat menjadi 532.272 ribu kWh pada tahun 1998.

Kemudian periode 1998-2008 terjadi penurunan produksi listrik sebesar 55,17 persen, dan pada tahun 2013 produksinya menjadi 74.113 ribu kWh atau turun sebesar 68,94 persen selama kurun waktu lima tahun (2008-2013).

Jumlah pelanggan listrik PLN pada periode 1968-2013 secara keseluruhan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama kurun waktu 45 tahun tersebut, jumlah langganan sebanyak 8.426 orang pada tahun 1968 menjadi 1,13 juta orang pelanggan pada tahun 2013 atau meningkat lebih dari seratus kali lipat. Selain itu nilai penjualan juga mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Jika pada 1968 hanya menghasilkan 39 juta rupiah, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,33 triliun rupiah.

Gambar 5.3.
Perkembangan Listrik Terjual (ribu KWh) Tahun 1968-2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1968-2014)

Tabel 5.3.
Perkembangan Perusahaan Air Minum
Tahun 1997-2013

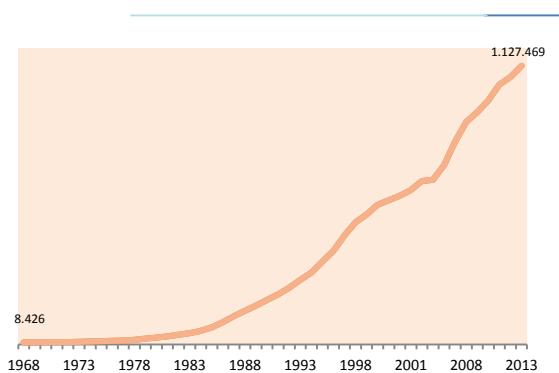
Air Minum

Produksi air minum yang dihasilkan oleh PDAM Provinsi Aceh selama periode 1997-2013 memiliki angka yang variatif sebagaimana terlihat pada kurva di bawah (Gambar 5.5). Sebanyak 1.342 liter/detik produksi potensial air minum pada tahun 1997 meningkat hingga 2.370 liter/detik pada tahun 2005 atau sebanyak 76,60 persen. Sedangkan pada tahun 2013 produksi air tersebut menurun menjadi 1.836 liter/detik. Begitu pula dengan produksi efektif air minum selama tahun 1997-2005 mengalami sedikit kenaikan sebesar 42,86 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 1.212 liter/detik atau minus 18,11 persen selama kurun waktu 2005-2013.

Tahun (1)	Produksi Potensial (liter/detik) (2)	Produksi Efektif (liter/detik) (3)	Efektifitas (%) (4)
			77
1997	1.342	1.036	77
1998	1.253	845	67
1999	1.335	881	65
2000	1.910	1.152	60
2001	1.887	1.152	61
2002	2.141	1.304	61
2003	2.171	1.316	61
2004	1.865	1.236	66
2005	2.370	1.480	62
2006	<i>Not Available</i>		
2007	1.444	1.151	79
2008	1.444	1.151	79
2009	<i>Not Available</i>		
2010	1.379	877	64
2011	1.926	1.632	85
2012	1.537	1.024	67
2013	1.836	1.212	69

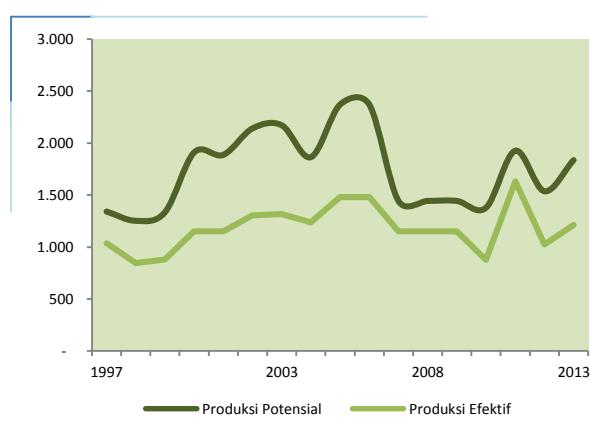
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5.4.
Pekembangan Jumlah Pelanggan Listrik
Tahun 1968-2013

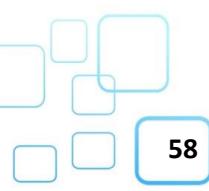


Sumber: Aceh Dalam Angka (1968-2014)

Gambar 5.5.
Produksi Potensial dan Produksi Efektif Air Minum
(liter/detik) Tahun 1997-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

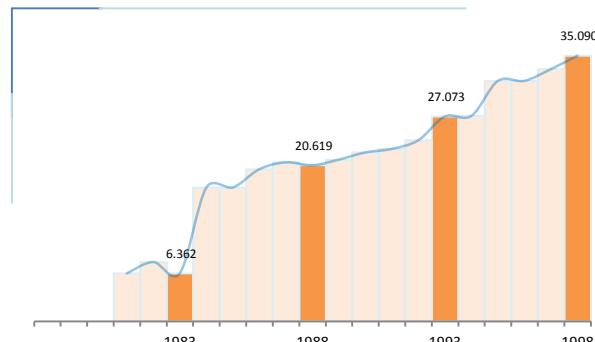


INDUSTRI

Industri Kecil

Keadaan perusahaan industri pada tahun 1981 hingga 1998 terlihat peningkatan untuk beberapa jenis usaha industri baik industri dasar, aneka industri maupun industri kecil. Jumlah industri kecil pada tahun 1981 tercatat sekitar 6.300 unit usaha, kemudian pada tahun 1998 jumlahnya bertambah hingga mencapai lebih dari 35 ribu usaha. Dengan demikian selama kurun waktu 17 tahun tersebut telah terjadi peningkatan cukup besar yaitu 453,73 persen.

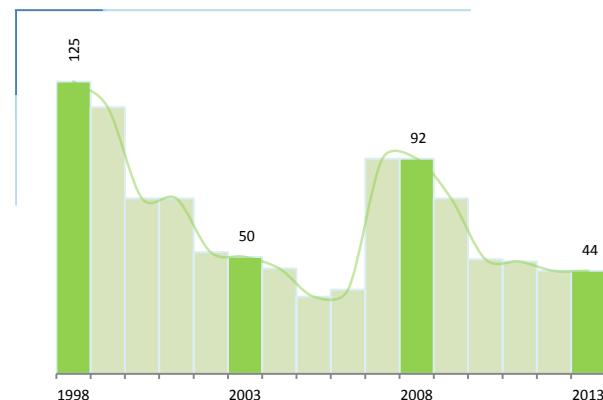
Gambar 6.1.
Jumlah Industri Kecil Tahun 1981-1998



Sumber : Aceh Dalam Angka (1981-1998)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat perkembangan positif untuk periode pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahunan. Pada periode 1983-1988 memperlihatkan peningkatan sebanyak 224,10 persen, periode selanjutnya tetap meningkat akan tetapi sedikit lebih kecil yaitu sekitar 31,30 persen. Sedangkan periode 1993-1998 hanya meningkat 29,61 persen. Pada periode tahun 1998-2003 terlihat penurunan yang cukup tajam yaitu minus 60 persen. Sedangkan periode 2003-2008 terjadi peningkatan positif sebesar 84 persen. Selanjutnya periode terakhir 2008-2013 terjadi penurunan kembali yaitu sekitar minus 52,17 persen.

Gambar 6.2.
Jumlah Industri Besar Sedang Tahun 1998-2013



Sumber : Aceh Dalam Angka (1998-2014)

Tabel 6.1.
Keadaan Perusahaan Industri Menurut Jenis Industri
Tahun 1981-1998

Tahun	Industri Dasar	Aneka Industri	Industri Kecil
(1)	(2)	(3)	(4)
1981	5	138	6.337
1982	5	386	7.844
1983	5	29	6.362
1984	6	36	17.681
1985	6	36	17.681
1986	9	35	20.100
1987	9	39	21.006
1988	14	45	20.619
1989	15	55	21.367
1990	17	63	22.317
1991	19	65	22.781
1992	20	80	23.931
1993	24	102	27.073
1994	28	130	27.143
1995	25	167	31.769
1996	25	167	31.769
1997	29	182	33.325
1998	33	189	35.090

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 6.2.
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Perusahaan
Industri Besar Sedang Tahun 1998-2013

Tahun	Industri Besar/Sedang	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
1998	125	14.760
1999	114	15.822
2000	75	10.521
2001	75	10.521
2002	52	7.815
2003	50	6.234
2004	45	6.267
2005	33	5.397
2006	36	5.604
2007	92	9.546
2008	92	9.546
2009	75	8.116
2010	49	6.905
2011	48	7.911
2012	44	7.566
2013	44	9.109

Sumber : Aceh Dalam Angka (1998-2014)

Tabel 6.3.
Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Jenjang
Menurut Persebaran di Kabupaten/Kota
Tahun 1998 & 2013

No	Kabupaten/ Kota	1998	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Simeulue	-	-
02	Aceh Singkil	-	2.283
03	Aceh Selatan	892	82
04	Aceh Tenggara	26	-
05	Aceh Timur	5.859	-
06	Aceh Tengah	260	238
07	Aceh Barat	1.845	1.026
08	Aceh Besar	1.406	-
09	Pidie	64	-
10	Bireuen	-	109
11	Aceh Utara	3.766	1.192
12	Aceh Barat Daya	-	-
13	Gayo Lues	-	-
14	Aceh Tamiang	-	1.080
15	Nagan Raya	-	2.331
16	Aceh Jaya	-	43
17	Bener Meriah	-	-
18	Pidie Jaya	-	76
19	Banda Aceh	406	42
20	Sabang	236	63
21	Langsa	-	130
22	Lhokseumawe	-	131
23	Subulussalam	-	283
Total		14.760	9.109

Sumber : Aceh Dalam Angka (1998 dan 2014)

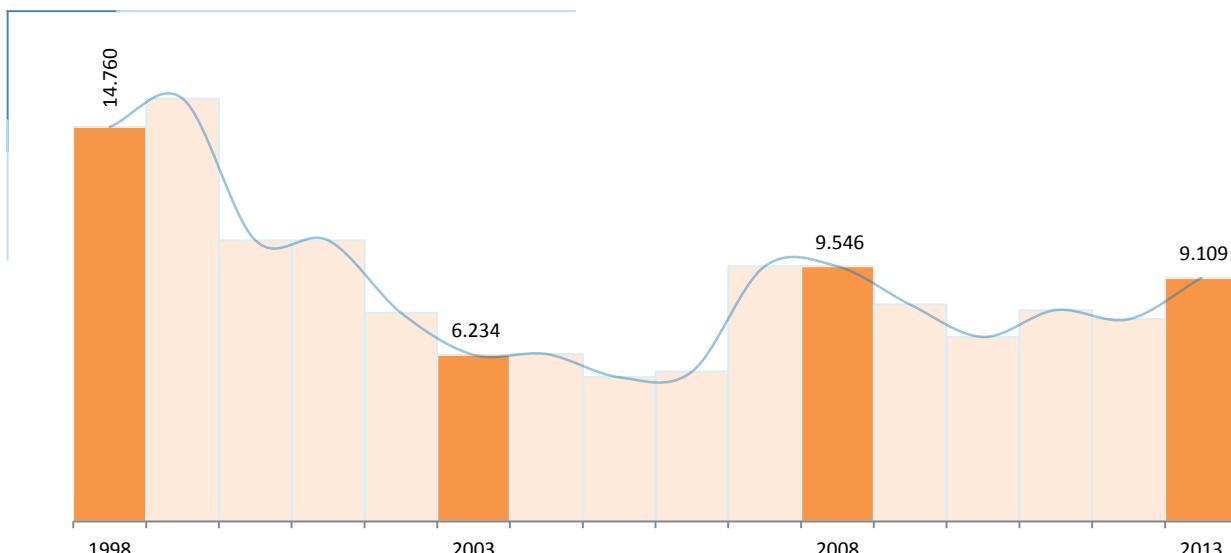
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Usaha industri merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta memberikan bukti yang konkret dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri ada kalanya mengalami peningkatan, tetapi pada periode tertentu juga mengalami penurunan. Pada tahun 1998 dan 1999 jumlah tenaga kerja perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) menunjukkan angka tertinggi, yaitu diatas 14 ribu orang pekerja. Sedangkan pada tahun 2003 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 6 ribuan orang atau menurun sebesar 57,76 persen. Sehingga pada tahun 1998-2003 merupakan periode yang mengalami pertumbuhan negatif dalam penyerapan tenaga kerja.

Tahun 2008 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan positif sebesar 53,13 persen terjadi pada periode 2003-2008. Kemudian seterusnya jumlah tenaga kerja menempati kurva yang cenderung stabil dengan pertumbuhan negatif pada periode 2008-2013 yaitu sekitar minus 4,58 persen.

Selama periode tahun 1998 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sekitar 38,29 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun telah terjadi penurunan jumlah perusahaan industri besar sedang (sebagaimana tabel dan gambar 4.3.2) yang diikuti oleh penurunan jumlah tenaga kerja.

Gambar 6.3.
Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang
Tahun 1998-2013



Sumber : Aceh Dalam Angka (1998-2014)

Industri Besar Sedang Menurut Subsektor

a. Jumlah Perusahaan Industri

Perusahaan industri besar sedang terbagi menjadi beberapa subsektor berdasarkan klasifikasi industri pengolahan. Selama tahun 1998-2003, industri kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya memiliki jumlah perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan subsektor lainnya. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun tersebut jumlahnya kian menurun tiap tahunnya. Sebanyak 51 perusahaan pada tahun 1998 menjadi 12 perusahaan di tahun 2003 atau persentasenya mengalami penurunan sebanyak 76,47 persen.

Kemudian jumlah perusahaan industri makanan, minuman dan tembakau juga menempati urutan teratas dengan kondisi yang sama setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah perusahaan. Adapun penurunannya mencapai 51,61 persen atau sebanyak 31 perusahaan pada tahun 1998 menjadi 15 perusahaan pada tahun 2003. Untuk periode selanjutnya tahun 2003-2009 perusahaan industri yang mendominasi adalah industri makanan, minuman dan tembakau, dengan pertumbuhan mencapai 100 persen yaitu 15 perusahaan pada tahun 2003 naik menjadi 30 perusahaan pada tahun 2008.

Kemudian pada periode 2010-2013 klasifikasi industri pengolahan mengalami sedikit perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa subsektor yang sebelumnya merupakan satu kelompok industri menjadi terpisah sehingga menjadi subsektor sendiri, diantaranya industri makanan dengan minuman menjadi terpisah, kertas dan barang dari kertas dengan percetakan, furnitur dengan pengolahan lainnya.

Pada tahun 2010 hingga 2013 industri makanan memiliki jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan subsektor lain. Sebanyak 25 perusahaan di tahun 2010 meningkat menjadi 28 perusahaan pada tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen. Adapun barang galian bukan logam mengalami kondisi yang sebaliknya atau penurunan jumlah perusahaan pada periode yang sama yaitu sekitar minus 50 persen, dari 8 perusahaan menjadi 4 perusahaan saja di tahun 2013 (lihat tabel 4.3.5).

Tabel 6.4.
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 1998-2009

Subsektor	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Makanan, Minuman dan Tembakau	31	31	22	22		15	15		16	37	37	30
Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	14	13	12	12		7	6		5	12	12	7
Kayu Bambu, Rotan, Rumput dan Sejenisnya	51	42	24	24		12	9		2	6	6	3
Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	5	3	2	2		-	1		1	2	2	5
Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	14	14	7	7		7	5		7	9	9	3
Barang-Barang Galian Bukan Logam	6	7	5	5		5	5		2	16	16	19
Barang-Barang dari Logam	4	4	3	3		2	4		3	10	10	3
Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	-	-	-	-		1	-		-	-	-	2
Furnitur dan Pengolahan Lainnya	-	-	-	-		1	-		-	-	-	3
Total	125	114	75	75	-	50	45	-	36	92	92	75

Sumber : Aceh Dalam Angka (1998-2010)

Tabel 6.5.
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 2010-2013

Subsektor	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	25	28	27	28
Minuman	2	2	2	2
Tekstil dan Pakaian Jadi	-	3	3	5
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	-	1	1	-
Kertas dan Barang dari Kertas	1	-	-	-
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	1	-	-
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	2	5	5	3
Barang Galian Bukan Logam	8	6	5	4
Industri Logam Dasar	4	-	-	-
Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	1	-	-	-
Furniture	1	1	-	-
Pengolahan Lainnya	4	-	-	1
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1	1	1	1
Total	49	48	44	44

Sumber : Aceh Dalam Angka (2011-2014)

Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi untuk beberapa subsektor jumlah tenaga kerja justru mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Pada tahun 1998 sektor Industri kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya, Industri makanan, minuman dan tembakau serta Industri Kimia dan Barang dari bahan kimia menempati urutan teratas dalam hal penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi untuk periode 10 tahunan, Industri makanan, minuman dan tembakau menyerap tenaga kerja paling besar sekitar 41,27 persen selama tahun 1998-2008. Sedangkan industri kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya mengalami penurunan yang cukup tajam dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 96,37 persen atau 5,5 ribu orang pada tahun 1998 menjadi 199 orang di tahun 2008 (lihat tabel 4.3.6).

Tabel 6.6.
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Subsektor Tahun 1998-2009

Subsektor	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Makanan, Minuman dan Tembakau	3.501	3.790	1.805	1.805		1.440	2.263		3.588	4.946	4.946	5.132
Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	635	495	467	467		217	212		170	637	637	383
Kayu Bambu, Rotan, Rumput dan Sejenisnya	5.490	6.158	2.879	2.879		919	821		64	199	199	116
Kertas dan Barang dari Kertas	1.219	1.397	1.472	1.472	Not Available	-	169	Not Available	46	1.151	1.151	1.359
Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, Karet	2.786	3.013	3.029	3.029		3.183	2.325		1.583	1.605	1.605	277
Barang-Barang Galian Bukan Logam	963	829	759	759		350	344		52	532	532	494
Barang-Barang dari Logam	166	140	110	110		73	133		101	476	476	99
Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	-	-	-	-		31	-		-	-	-	120
Furnitur dan Pengolahan Lainnya	-	-	-	-		21	-		-	-	-	136
Total	14.760	15.822	10.521	10.521		6.234	6.267		5.604	9.546	9.546	8.116

Sumber : Aceh Dalam Angka (1998-2010)

Tabel 6.7.

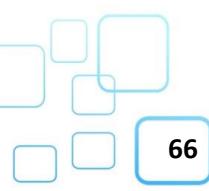
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang
Menurut Subsektor Tahun 2010-2013

Pada tahun 2009 industri makanan, minuman dan tembakau kembali menempati urutan teratas dalam hal penyerapan tenaga kerja yaitu mencapai 5,1 ribu orang (tabel 4.3.6). Begitu pula untuk periode tahun 2010-2013 dimana beberapa subsektor telah mengalami perubahan klasifikasi industri pengolahan, kelompok industri makanan menyerap kurang lebih 4,9 ribu tenaga kerja di tahun 2010 dan mengalami peningkatan selama tahun 2013. Peningkatan tersebut relatif tinggi hingga mencapai 50,08 persen pada tahun 2013.

Sementara itu perkembangan jumlah tenaga kerja juga meningkat di subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia selama tahun 2010-2013. Pertumbuhannya mencapai angka tertinggi hingga mencapai 2.823 persen atau sebanyak 44 orang pada tahun 2010 menjadi 1,3 ribu orang pada tahun 2013. Keadaan berkebalikan terhadap industri barang galian bukan logam dimana terjadi pertumbuhan negatif dalam penyerapan tenaga kerja yaitu turun sebanyak 59,41 persen pada tahun 2013.

Subsektor	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	4.878	6.669	5.683	7.321
Minuman	101	124	124	131
Tekstil dan Pakaian Jadi	-	464	121	224
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	-	71	22	-
Kertas dan Barang dari Kertas	28	-	-	-
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	38	-	-
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	44	273	1.417	1.286
Barang Galian Bukan Logam	239	201	170	97
Industri Logam Dasar	1.329	-	-	-
Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	21	-	-	-
Furniture	29	42	-	-
Pengolahan Lainnya	176	-	-	20
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	60	29	29	30
Total	6.905	7.911	7.566	9.109

Sumber : Aceh Dalam Angka (2011-2014)



PERDAGANGAN

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pola dan arus perdagangan internasional diperlukan data statistik ekspor dan impor, baik berupa barang maupun jasa.

Tabel 7.1 menunjukkan nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan provinsi Aceh tahun 1959-2013. Terlihat bahwa nilai ekspor menunjukkan tren yang terus naik sejak tahun 1959, demikian juga impor yang dimulai sejak tahun 1965 menunjukkan aktivitas yang terus semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Aceh semakin aktif melakukan perdagangan dengan luar negeri.

Apabila dihitung sejak tahun 1959 sampai dengan 2013 nilai komoditi yang diekspor dari Provinsi Aceh ke negara lain sebesar 72,98 miliar USD. Sedangkan nilai impor sejak tahun 1965 sampai dengan 2013 sebesar 4,82 miliar USD. Neraca perdagangan yang dihasilkan sejak tahun 1959 sampai dengan 2013 sebesar 63,16 miliar USD, artinya dari aktivitas perdagangan luar negeri yang dilakukan selama kurun waktu 55 tahun dapat memberikan devisa kepada Provinsi Aceh sebesar 63,16 miliar.

Neraca perdagangan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 7.1, dimana nilainya selalu positif yang berarti neraca perdagangan setiap tahun selalu mengalami surplus. Akan tetapi, selama kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Selama kurun waktu tahun 1959 sampai dengan tahun 2013, neraca perdagangan memiliki rata-rata surplus sebesar 1,24 miliar USD setiap tahunnya.

Tabel 7.1.
Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan (Ribu USD) Tahun 1959-2013

Tahun (1)	Ekspor (2)	Impor (3)	Neraca Perdagangan (4)
1959	42.344		42.344
1960	22.448		22.448
1961	16.995		16.995
1962	20.566		20.566
1963	8.319		8.319
1964	5.680		5.680
1965	11.030	942	10.088
1966	9.239	601	8.638
1967	7.823	395	7.428
1968	11.164	358	10.806
1969	8.790	1.223	7.567
1970	13.090	1.399	11.691
1971	11.530	2.207	9.323
1972	12.621	1.772	10.849
1973	12.818	3.445	9.373
1974	26.051	2.180	23.871
1975	24.595	84	24.511
1976	30.224	7.585	22.639
1977	55.940	3.399	52.541
1978	212.732	1.602	211.130
1979	893.454	23.704	869.750
1980	1.898.583	21.361	1.877.222
1981	2.264.687	60.377	2.204.310
1982	2.576.382	450.507	2.125.875
1983	2.366.940	427.571	1.939.369
1984	2.761.165	151.330	2.609.835
1985	2.864.827	251.560	2.613.267
1986	1.965.204	185.707	1.779.497
1987	2.111.074	341.848	1.769.226
1988	2.151.487	317.146	1.834.341
1989	2.474.917	164.536	2.310.381
1990	2.979.073	88.059	2.891.014
1991	3.107.077	168.203	2.938.874
1992	3.039.019	115.842	2.923.177
1993	2.894.770	257.177	2.637.593
1994	2.479.931	101.929	2.378.002
1995	2.562.374	75.031	2.487.343
1996	2.579.270	112.462	2.466.808
1997	2.654.301	123.897	2.530.404
1998	2.059.087	128.861	1.930.226
1999	1.780.913	73.020	1.707.893
2000	1.806.083	70.319	1.735.764
2001	666.739	120.368	546.371
2002	1.571.114	23.851	1.547.263
2003	1.704.621	51.533	1.653.088
2004	1.812.364	52.999	1.759.365
2005	2.072.415	18.414	2.054.001
2006	2.032.791	36.212	1.996.579
2007	1.854.235	30.648	1.823.587
2008	2.234.131	384.237	1.849.894
2009	1.138.019	115.718	1.022.301
2010	1.359.251	38.388	1.320.863
2011	1.483.591	114.045	1.369.546
2012	1.257.399	85.316	1.172.083
2013	962.970	11.130	951.840

Gambar 7.1.
Nilai Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan (Ribu USD) Tahun 1959-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik

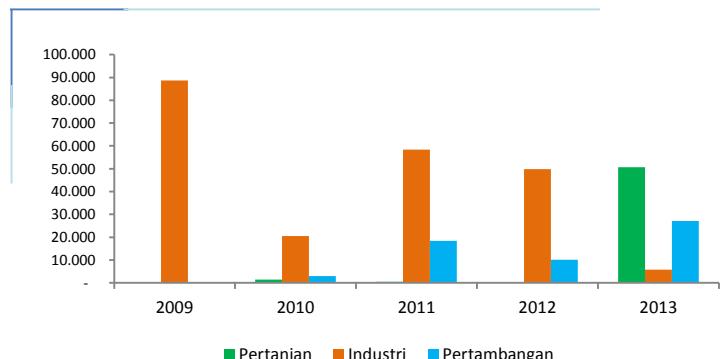
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 7.2.**Nilai Ekspor Aceh Berdasarkan Komoditi (Ribu USD)**

Tahun 2009-2013

Tahun	Pertanian	Industri	Pertambangan	Migas	Total Ekspor
2009	192	88.658	12	1.049.157	1.138.019
2010	1.465	20.479	2.999	1.334.308	1.359.251
2011	384	58.429	18.445	1.406.333	1.483.591
2012	139	49.855	10.161	1.197.244	1.257.399
2013	50.694	5.838	27.079	879.359	962.970

Sumber : Badan Pusat Statistik

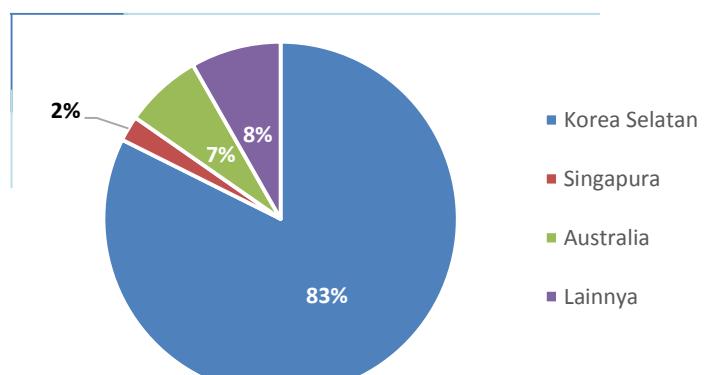
Gambar 7.2.**Nilai Ekspor Aceh Berdasarkan Sektor (Ribu USD) Tahun 2009-2013**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 7.3.**Nilai Ekspor Aceh Berdasarkan Pelabuhan (Ribu USD) Tahun 2009-2013**

Negara	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blang Lancang (Arun)	1.034.977	1.326.272	1.406.333	1.197.244	831.714
Krueng Geukeuh	87.829	22.961	58.852	49.812	7
Susoh	14	-	-	5.166	-
Meulaboh	23	1.392	17.698	3.530	23.375
Ulee Lheue	-	-	8	1.507	71.359
Lainnya	15.176	8.626	700	140	36.515
Total Ekspor	1.138.019	1.359.251	1.483.591	1.257.399	962.970

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 7.3.**Persentase Ekspor Aceh Berdasarkan Negara Tujuan (%) Tahun 2009-2013**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai ekspor menurut komoditi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditunjukkan Tabel 7.2. Terlihat bahwa ekspor Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir didominasi oleh komoditi migas, dimana komoditi migas selalu berkisar di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan perdagangan internasional yang sangat besar terhadap komoditi migas. Apabila komoditi migas dihilangkan dari struktur ekspor, maka nilai ekspor Provinsi Aceh maksimal hanya sebesar 10 persen dari nilai ekspor yang sekarang ada. Sehingga perlu adanya diversifikasi komoditi ekspor non migas untuk mengantisipasi habisnya migas.

Gambar 7.2 menunjukkan nilai ekspor Provinsi Aceh tanpa komoditi migas, terlihat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 nilai ekspor nonmigas tertinggi disumbangkan dari sektor industri, namun pada tahun 2013 sektor industri justru memberikan kontribusi terkecil pada nilai ekspor non migas. Pada tahun tersebut ekspor nonmigas didominasi oleh sektor pertanian. Sumbangan sektor pertanian bukan tidak mungkin akan mengantikan peran migas mengingat sektor pertanian adalah sektor yang terbarukan. Dengan dukungan dan kebijakan dari pemerintah yang baik akan dapat mendorong produksi pertanian sehingga dapat mengantikan peran migas yang semakin menipis bahkan hampir habis. Sementara itu sektor pertambangan walaupun juga mengalami pertumbuhan yang positif, namun tetap dibatasi dengan ketersediaannya di alam, dimana suatu saat akan habis.

Pelabuhan Blang Lancang menjadi pelabuhan dengan nilai muat terbesar di Provinsi Aceh. Komoditi yang dimuat di pelabuhan tersebut adalah komoditi migas. Pelabuhan Blang Lancang menjadi pelabuhan tersibuk di Aceh karena nilai komoditi yang dimuat pada pelabuhan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dibandingkan pelabuhan lainnya yang hanya melakukan aktifitas bongkar muat komoditi non migas, namun perlu diperhatikan kembali apabila komoditi migas di Provinsi Aceh telah habis, maka perlu adanya alih fungsi pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan bongkar muat komoditi non migas.

Berdasarkan Gambar 7.3 terlihat bahwa negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh menuju ke Negara Korea Selatan. Share negara tersebut terhadap total ekspor Provinsi Aceh sebesar 83 persen, sedangkan sisanya secara berurut diekspor ke negara Australia sebesar 7 persen, Singapura sebesar 2 persen, dan negara lainnya sebesar 8 persen. Komoditi yang diekspor ke negara Korea Selatan didominasi oleh komoditi migas.

Berbeda dengan ekspor, impor Provinsi Aceh justru didominasi oleh sektor non migas. Terlihat dari Tabel 7.4 di samping bahwa pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 nilai impor Provinsi Aceh tidak pernah lebih dari 10 persen dari total impor. Namun hanya pada tahun 2013 kontribusi impor migas cukup besar yaitu 53,91 persen atau lebih dari setengah total impor. Apabila dilihat nilai absolut impor memang cukup kecil dibandingkan dengan nilai ekspor. Namun melihat kecenderungan yang ada dimana migas Aceh yang semakin habis dan beralih menjadi impor migas, maka bukan tidak mungkin neraca perdagangan akan menjadi surplus atau dengan kata lain Provinsi Aceh akan sangat tergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Impor menuju Provinsi Aceh banyak dibongkar di pelabuhan Krueng Raya, Malahayati sebesar 46 persen dari seluruh impor. Komoditi yang dibongkar pada pelabuhan tersebut seluruhnya merupakan komoditi migas. Sedangkan komoditi non migas dibongkar di pelabuhan lainnya seperti di pelabuhan Langsa sebesar 30 persen, pelabuhan Meulaboh sebesar 13 persen, pelabuhan Lhoknga sebesar 3 persen, dan pelabuhan Krueng Geukeuh sebesar 1 persen. Selain di pelabuhan Krueng Raya, Malahayati, bongkar komoditi migas juga dilakukan di pelabuhan Meulaboh walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Produk yang masuk menuju Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi dari negara Singapura sebanyak 126,53 juta USD, kemudian disusul dari negara Tiongkok sebesar 122,64 juta USD. Apabila melihat tabel 1.5 di samping, terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan impor yang cukup drastis sebesar 86,95 persen. Nilai ini menjadi nilai terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

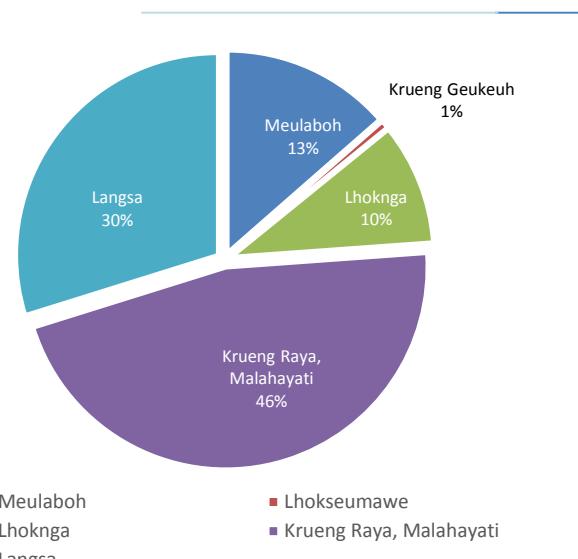
Impor Provinsi Aceh pada tahun 2013 didominasi dari negara Singapura sebesar 8,7 juta USD. Nilai ini sebesar 78,17 persen dari total impor. Negara pengimpor selanjutnya adalah Malaysia sebesar 1,23 juta USD atau sebesar 11,09 persen. Pada tahun 2013, komoditi terbesar yang diimpor berupa komoditi migas yang berasal dari negara Singapura sebesar 5,06 juta USD.

Tabel 7.4.
Nilai Impor Aceh Berdasarkan Komoditi (Ribu USD)
Tahun 2009-2013

Tahun	Pertanian	Pertambangan	Migas	Industri	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009	473	23.609	6.906	84.730	115.718
2010	11.174	7.391	3.591	16.232	38.388
2011	25.796	5.271	3.658	79.320	114.045
2012	16.226	2.304	5.063	61.723	85.316
2013	81	1.080	6.000	3.969	11.130

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 7.4.
Percentase Impor Aceh Berdasarkan Pelabuhan (%)
Tahun 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 7.5.
Impor Migas Aceh Berdasarkan Negara (Ribu USD)
Tahun 2009-2013

Negara	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tiongkok	2.708	12.334	63.929	43.002	665
Singapura	72.275	4.925	18.722	21.905	8.701
Thailand	1.188	4.812	11.049	13.906	530
Vietnam	-	7.052	15.497	3.819	-
Malaysia	27.840	7.573	4.534	2.070	1.234
Lainnya	11.707	1.692	314	614	-
Total Impor	115.718	38.388	114.045	85.316	11.130

Sumber : Badan Pusat Statistik

INFLASI DAN HARGA

Inflasi

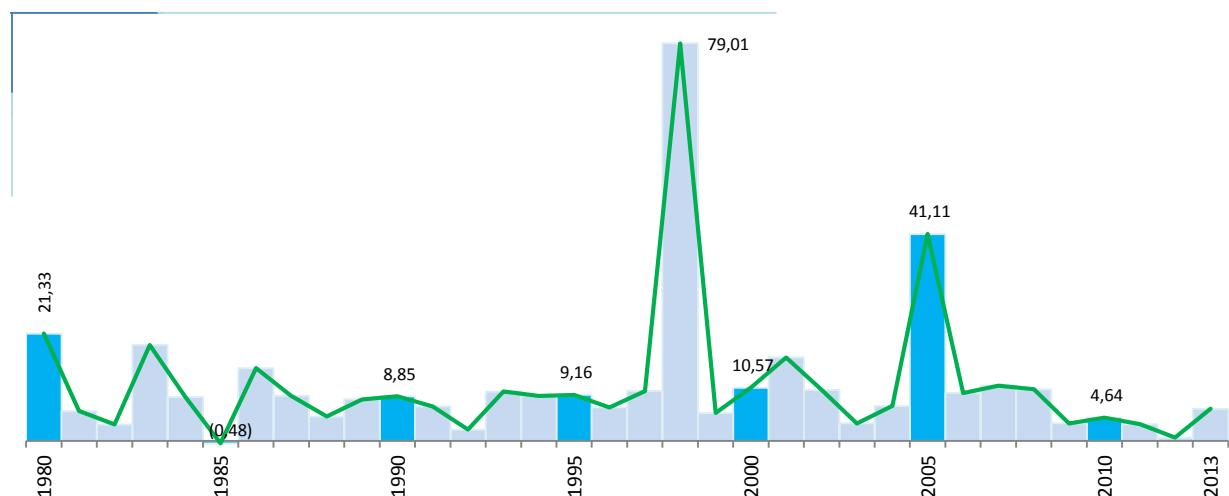
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Tingkat inflasi sebagai salah satu indikator perekonomian terus mendapat perhatian dari pemerintah melalui tim pengendali inflasinya. Bila dibandingkan selama 34 tahun, inflasi kota Banda Aceh tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 79,01 persen.

Hal ini disebabkan pada pertengahan tahun 1997 perekonomian Indonesia terpuruk akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Dampaknya berbagai kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Fenomena ini dapat dilihat dari melonjaknya inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 1998 mencapai 79,01 persen, Kota Lhokseumawe 79,66 persen dan Nasional sebesar 77,63 persen.

Pada tahun 2005, perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri khususnya di Provinsi Aceh mengalami perkembangan dengan kenaikan signifikan. Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang melanda Aceh sangat signifikan mempengaruhi fluktuasi harga di Provinsi Aceh terutama di Kota Banda Aceh. Sebagai gambaran, untuk Kota Banda Aceh, Laju Inflasi yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) naik menjadi sebesar 41,11 persen, meningkat tajam apabila dibandingkan dengan Laju Inflasi tahun 2004 yang hanya sebesar 6,97 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah terjadi di Kota Banda Aceh dalam 10 tahun terakhir

Grafik 8.1.

Inflasi Kota Banda Aceh (%) Tahun 1980-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.1.
Inflasi Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 1980 - 2013

Tahun	INFLASI UMUM (%)			
	Banda Aceh	Lhokseumawe	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	21,33	21,25	-	15,97
1981	5,94	6,20	-	7,09
1982	3,26	16,87	-	9,69
1983	19,06	12,84	-	11,46
1984	8,74	5,86	-	8,76
1985	-0,48	2,93	-	4,31
1986	14,47	18,54	-	8,83
1987	8,95	9,18	-	8,90
1988	4,85	10,62	-	5,47
1989	8,25	6,19	-	5,97
1990	8,85	10,12	-	9,53
1991	6,87	8,42	-	9,52
1992	2,24	5,15	-	4,94
1993	9,83	9,49	-	9,77
1994	8,97	13,27	-	9,24
1995	9,16	11,16	-	8,64
1996	6,66	3,45	-	6,47
1997	9,90	8,44	-	11,05
1998	79,01	79,66	-	77,63
1999	5,57	6,61	4,98	2,01
2000	10,57	8,73	9,59	1,94
2001	16,60	11,67	14,03	12,55
2002	10,14	10,99	10,55	10,03
2003	3,50	4,53	4,03	
2004	6,97	7,36	7,08	6,40
2005	41,11	17,57	34,88	17,11
2006	9,54	11,47	9,98	6,60
2007	11,00	4,18	9,41	6,59
2008	10,27	13,78	11,92	11,06
2009	3,50	3,96	3,72	2,78
2010	4,64	7,19	5,86	6,96
2011	3,32	3,55	3,43	3,79
2012	0,66	0,39	0,22	1,79
2013	6,39	8,27	7,31	8,38

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.2.
Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2013 dan Januari sd Juni 2014 (2012 = 100)

Tahun	Kota	Kelompok Pengeluaran							
		Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	Transpor & komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	Banda Aceh	11.82	5.05	2.86	-0.82	2.90	4.33	10.85	6.39
	Lhokseumawe	18.39	2.75	2.60	0.25	2.26	4.64	10.81	8.27
	Meulaboh	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aceh	15.04	3.94	2.73	-0.36	2.63	4.49	10.83	7.31
	Nasional	11.35	7.45	6.22	0.52	3.70	3.91	15.36	8.38
Januari	Banda Aceh	4.98	0.08	2.00	0.80	0.13	0.41	0.68	1.85
2014	Lhokseumawe	5.89	0.57	2.40	0.59	0.36	0.23	0.24	2.42
	Meulaboh	0.57	1.34	4.45	2.07	1.57	2.21	0.91	2.67
	Aceh	4.76	0.68	2.71	1.32	0.57	0.86	0.56	2.23
	Nasional	2.77	0.72	1.01	0.55	0.72	0.28	0.20	1.07
Februari	Banda Aceh	-2.15	0.15	-0.21	0.44	0.00	0.33	0.04	-0.45
2014	Lhokseumawe	-3.19	0.08	-0.04	0.35	0.00	0.27	0.07	-0.88
	Meulaboh	-5.22	0.44	-0.97	1.10	0.37	0.63	0.61	-1.28
	Aceh	-3.51	0.26	-0.36	0.73	0.10	0.40	0.18	-0.84
	Nasional	0.36	0.43	0.17	0.57	0.28	0.17	0.15	0.26
Maret	Banda Aceh	-3.43	0.40	0.26	0.41	0.10	0.86	0.10	-0.52
2014	Lhokseumawe	-3.02	0.40	0.07	-0.06	0.00	0.00	0.07	-0.77
	Meulaboh	-3.87	0.82	0.28	-0.08	0.13	0.54	0.21	-0.73
	Aceh	-3.44	0.59	0.21	0.06	0.08	0.51	0.12	-0.65
	Nasional	-0.44	0.43	0.16	0.08	0.41	0.14	0.24	0.08
April	Banda Aceh	-1.82	0.01	0.15	-0.41	0.33	0.30	1.02	-0.15
2014	Lhokseumawe	-1.50	1.22	0.85	-0.36	0.21	0.17	0.00	-0.01
	Meulaboh	-0.75	0.06	-0.07	0.55	1.31	0.20	0.08	-0.06
	Aceh	-1.37	0.32	0.28	0.06	0.58	0.23	0.57	-0.08
	Nasional	-1.09	0.45	0.25	-0.25	0.61	0.24	0.20	-0.02
Mei	Banda Aceh	3.91	0.00	0.13	0.15	0.08	0.05	-0.01	0.86
2014	Lhokseumawe	3.29	0.45	0.23	1.07	-0.07	-0.07	0.22	1.16
	Meulaboh	-0.57	0.06	0.96	2.62	0.03	-0.06	0.22	0.42
	Aceh	2.30	0.14	0.37	1.57	0.02	-0.02	0.10	0.80
	Nasional	-0.15	0.35	0.23	0.12	0.41	0.07	0.21	0.16
Juni	Banda Aceh	1.06	0.23	0.14	1.31	0.04	-0.02	0.02	0.40
2014	Lhokseumawe	-0.55	0.09	0.14	2.57	0.12	0.00	0.39	0.17
	Meulaboh	0.23	0.00	0.55	-0.16	-0.02	1.10	0.19	0.20
	Aceh	0.28	0.10	0.25	0.91	0.04	0.31	0.14	0.27
	Nasional	0.99	0.32	0.38	0.30	0.36	0.08	0.21	0.43
July	Banda Aceh	3.97	0.31	0.25	3.00	0.19	1.10	0.04	1.23
2014	Lhokseumawe	3.70	0.12	0.68	2.02	0.45	0.52	-0.77	1.34
	Meulaboh	5.13	0.15	1.29	5.32	0.00	2.77	0.10	2.41
	Aceh	4.93	-2.18	-0.04	-0.18	-0.67	0.79	-0.62	0.73
	Nasional	1.94	1.00	0.45	0.85	0.39	0.45	0.88	0.93
Agustus	Banda Aceh	-1.28	-0.01	0.43	-0.48	0.25	0.00	1.36	0.06
2014	Lhokseumawe	-0.18	0.21	0.76	-0.03	0.00	1.29	0.36	0.27
	Meulaboh	1.35	0.88	-0.30	0.11	0.02	-0.66	2.23	0.68
	Aceh	-0.64	0.17	0.43	-0.27	0.15	0.29	1.19	0.21
	Nasional	0.36	0.52	0.73	0.23	0.33	1.58	-0.12	0.47
September	Banda Aceh	0.84	0.30	0.81	-0.46	0.13	0.00	0.19	0.47
2014	Lhokseumawe	0.47	0.07	1.63	0.45	0.99	0.19	-0.88	0.50
	Meulaboh	-0.02	0.97	1.12	-0.51	0.06	3.60	0.29	0.58
	Aceh	0.63	0.32	1.10	-0.19	0.37	0.52	-0.10	0.49
	Nasional	-0.17	0.51	0.77	-0.17	0.29	0.68	-0.24	0.27
Oktober	Banda Aceh	0.45	-0.02	0.85	-0.07	0.29	0.00	0.19	0.38
2014	Lhokseumawe	0.76	0.40	1.21	-0.02	0.00	0.00	-0.36	0.53
	Meulaboh	2.01	0.59	0.86	-0.05	0.26	0.23	-0.18	0.82
	Aceh	0.73	0.19	0.96	-0.05	0.20	0.03	-0.01	0.48
	Nasional	0.25	0.46	0.18	0.15	0.15	0.27	0.23	0.47
November	Banda Aceh	1.76	0.03	0.61	-0.50	0.10	0.00	4.15	1.28
2014	Lhokseumawe	2.10	0.15	1.55	-0.22	0.01	0.03	5.15	1.60
	Meulaboh	2.14	0.01	0.42	-0.37	0.35	0.00	5.09	1.08
	Aceh	1.91	0.06	0.87	-0.40	0.10	0.01	4.56	1.35
	Nasional	2.15	0.71	0.49	-0.08	0.43	0.08	4.29	1.50

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi

Kebijakan Otonomi Daerah (Otoda) dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya Otoda diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Otoda adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota/provinsi terhadap kabupaten/kota/provinsi lain. Pengumpulan data IKK dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia.

Mulai tahun 2010 Indeks Kemahalan Konstruksi menggunakan IKK salah satu ibukota provinsi sebagai acuan yakni Kota Samarinda di Propinsi Kaltim (Samarinda = 100). Jika dibandingkan dengan Kota Samarinda yang menjadi kota acuan Indeks Kemahalan Konstruksi, maka Kabupaten Nagan Raya memiliki angka indeks tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh yang mencapai 119,46. Sedangkan Kota Subulussalam memiliki angka indeks terendah sebesar 75,83.

Tabel 8.3.3
Indeks Kemahalan Konstruksi
Tahun 2003 - 2014

Tahun	IKK
(1)	(2)
2003	96.27
2004	-
2005	119.10
2006	143.51
2007	163.60
2008	197.60
2009	221.00
2010	92.45
2011	92.56
2012	91.23
2013	91.61
2014	93.54

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.4.
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)
Simeulue	112.83
Aceh Singkil	106.38
Aceh Selatan	89.93
Aceh Tenggara	91.98
Aceh Timur	101.12
Aceh Tengah	103.33
Aceh Barat	100.28
Aceh Besar	91.00
Pidie	92.18
Bireuen	101.25
Aceh Utara	108.34
Aceh Barat Daya	96.46
Gayo Lues	89.12
Aceh Tamiang	96.75
Nagan Raya	119.46
Aceh Jaya	98.82
Bener Meriah	99.66
Pidie Jaya	93.21
Banda Aceh	102.26
Sabang	99.30
Langsa	93.06
Lhokseumawe	105.71
Subulussalam	75.83

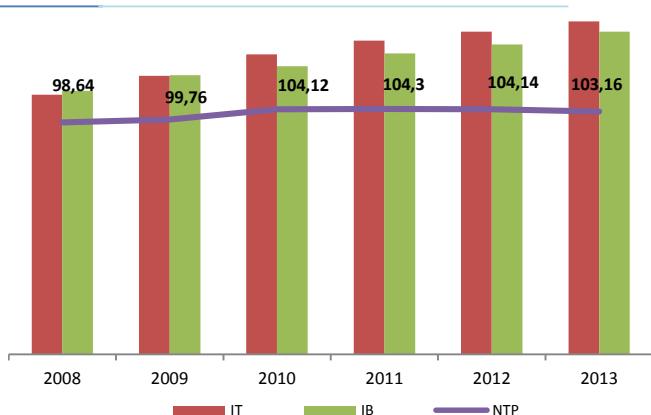
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.5.
Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar, dan
Nilai Tukar Petani Tahun 2008-2013

Tahun	Indeks Yang Diterima Petani (IT)	Indeks yang Dibayar Petani (IB)	Nilai TuKar Petani (NTP)
	(1)	(2)	(3)
2008	110.38	111.99	98.64
2009	118.42	118.70	99.76
2010	127.51	122.45	104.12
2011	133.38	127.88	104.30
2012	137.16	131.71	104.14
2013	141.46	137.13	103.16

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 8.2.
Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar, dan
Nilai Tukar Petani Tahun 2008-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.6.
Indeks Yang Diterima Petani (IT) Menurut Sub Sektor
Tahun 2008-2013

Tahun	IT Sub Sektor Tanaman Pangan	IT Sub Sektor Hortikultura	IT Sub Sektor Perkebunan Rakyat	IT Sub Sektor Peternakan	IT Sub Sektor Perikanan	IT Gabungan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	106.66	110.81	117.78	109.87	110.40	110.38
2009	120.89	117.81	123.08	115.89	116.02	118.42
2010	132.04	126.97	142.16	120.36	121.87	127.51
2011	140.61	132.53	149.96	123.56	127.22	133.38
2012	150.72	133.41	149.47	127.21	128.46	137.16
2013	156.69	137.33	153.17	130.73	129.26	141.46

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh Tahun 2008-2013

Sejak Januari 2008, tahun dasar NTP mengalami perubahan yaitu dari tahun 1993 ($1993=100$) menjadi tahun 2007 ($2007=100$), dengan tahun dasar ini diharapkan tingkat keakuratan NTP mendekati keadaan di lapangan. Tabel 4.10.1 menunjukkan indeks yang diterima, indeks yang dibayar, dan nilai tukar petani tahun 2008 sampai dengan 2013. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2008 dan 2009 indeks NTP kurang dari 100, yang artinya rata-rata petani tidak mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya. Hal ini terlihat dari nilai indeks yang dibayar petani (ib) lebih besar dibandingkan dengan indeks yang diterima petani (It). Namun sejak tahun 2010, kondisi petani berangsur membaik, hal ini terlihat dari nilai indeks NTP yang selalu lebih besar dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata petani mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya.

Laju pertumbuhan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 4,37 persen. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 indeks NTP mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dan 0,94 persen, namun walaupun begitu indeks NTP masih lebih besar dari 100.

Indeks NTP dibagi dalam beberapa subsektor antara lain subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Tabel 4.10.2 di samping menunjukkan indeks yang diterima petani menurut sub sector di Provinsi Aceh tahun 2008 sampai dengan 2013.

Indeks yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks yang diterima petani sejak tahun 2008 sebesar 110,38. Indeks tersebut terus naik hingga tahun 2013 sebesar 141,46. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perkembangan harga atas hasil produksi petani.

Pada tahun 2008 indeks yang diterima petani subsektor perkebunan rakyat lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya yaitu sebesar 117,78, artinya perkembangan harga hasil dari subsektor perkebunan rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya. Sedangkan yang terendah berasal dari petani subsektor tanaman rakyat sebesar 106,66. Sementara itu secara rata-rata indeks yang diterima petani tahun 2008 sebesar 110,38.

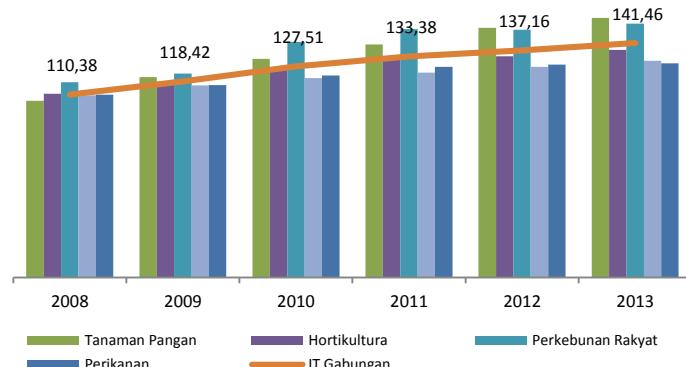
Perkembangan indeks yang diterima petani pada tahun 2013 berbeda dibandingkan tahun 2008 dimana indeks yang diterima subsektor tanaman pangan menjadi tertinggi diantara subsektor yang lain.

Selanjutnya indeks yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Seperti halnya indeks yang diterima petani, indeks yang dibayar petani juga mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, dimana pada tahun 2008 rata-rata indeks yang dibayar petani hanya sebesar 111,99, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 137,13.

Apabila dilihat menurut subsektor, maka subsektor perikanan memiliki nilai yang dibayar terendah dibandingkan lainnya, sedangkan indeks dibayar tertinggi pada subsektor perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan proses produksi di rumah tangga perikanan lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi di rumah tangga perkebunan.

Gambar 8.3.
Indeks yang diterima Petani (IT) menurut Sub sektor Tahun 2008-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 8.7.
Indeks yang dibayar Petani (IB) menurut Sub Sektor Tahun 2008-2013

Tahun	IB Sub Sektor Tana-man Pangan	IB Sub Sektor Horti-kultura	IB Sub Sektor Perkebu-nan Rakyat	IB Sub Sektor Peaterna-kan	IB Sub Sektor Perikanan	IB Gabun-gan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	111.91	111.26	113.92	112.05	111.25	111.99
2009	119.25	118.75	121.77	117.58	117.21	118.70
2010	123.62	123.19	125.46	120.86	120.02	122.45
2011	130.20	129.22	130.97	125.38	124.48	127.88
2012	134.77	133.41	134.90	128.21	128.53	131.71
2013	141.21	139.15	140.43	132.61	130.22	137.13

Sumber : Badan Pusat Statistik

Transportasi Darat

Prasarana Jalan

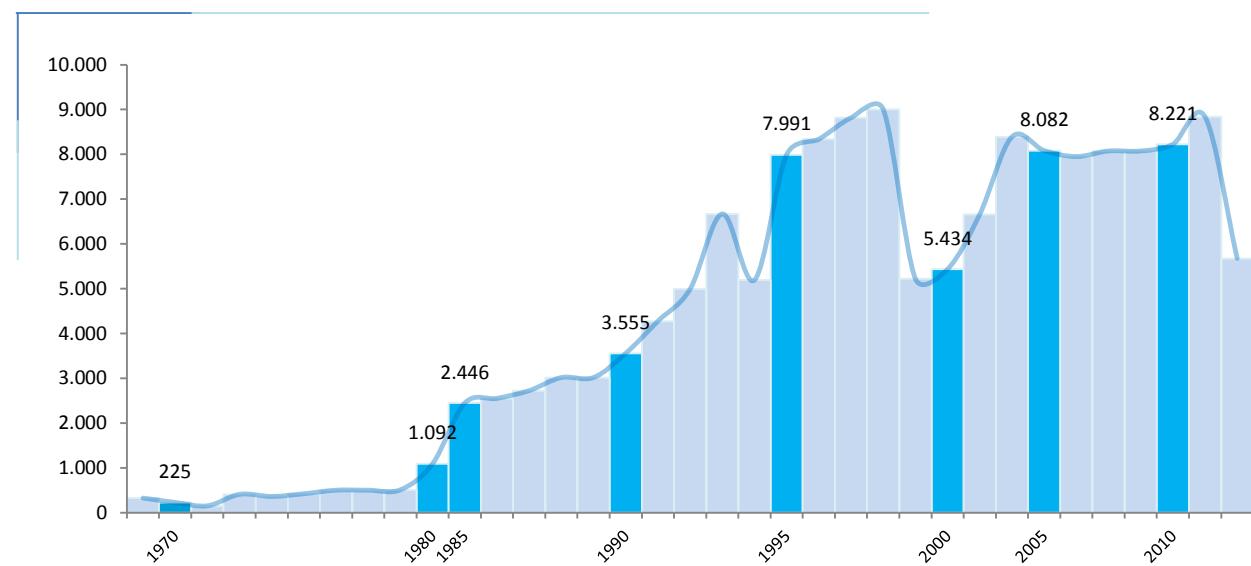
Tabel 9.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)
Tahun 1969-2012

Panjang jalan di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun fluktuatif namun cenderung menunjukkan kenaikan, baik jalan yang diaspal maupun tidak diaspal. Hal ini terlihat pada tahun 1969 jalan yang diaspal di Provinsi Aceh sepanjang 322,02 kilometer, kemudian meningkat menjadi 1.091,77 kilometer pada tahun 1980 dan terus meningkat hingga tahun 2011 menjadi 8.835,97 kilometer, terjadi peningkatan sepanjang 8.513,95 kilometer sejak tahun 1969. Namun, pada tahun 2012 terjadi penurunan kembali menjadi 5.674,84 kilometer.

Panjang jalan jenis permukaan kerikil pada tahun 1969 adalah 569,90 kilometer, terus meningkat hingga tahun 2012 menjadi 6.292,83 kilometer, terjadi peningkatan sepanjang 5.722,93 kilometer. Secara total panjang jalan di provinsi Aceh juga cenderung semakin meningkat, hal ini terlihat jumlah panjang jalan tahun 1969 adalah 1.678,57 kilometer menjadi 17.214,93 kilometer pada tahun 2012, terjadi peningkatan sepanjang 15.536,36 kilometer.

Panjang jalan jenis permukaan aspal cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini diikuti dengan meningkat pula jenis permukaan jalan dari kerikil, selain itu jenis permukaan tanah juga terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan pembukaan jalan-jalan baru dan jalan tembus di Provinsi Aceh.

Gambar 9.1
Perkembangan Panjang Jalan yang Diaspal (Km)
Tahun 1969 – 2012



Sumber : Aceh Dalam Angka

Sumber : Aceh Dalam Angka

Tahun	Kondisi Jalan			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak/ Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998	770,18	550,76	1.190,32	2.511,26
1999	752,00	338,26	950,37	2.040,63
2000	741,68	348,28	1.393,89	2.483,85
2001	706,45	619,88	468,96	1.795,29
2002	373,49	1.126,92	1.010,85	2.511,26
2003	458,19	997,85	1.029,25	2.485,29
2004	221,43	671,58	808,81	1.701,82
2005	445,44	698,44	388,44	1.532,32
2006	385,21	612,38	704,23	1.701,82
2007	447,47	636,08	618,27	1.701,82
2008	447,47	636,08	618,27	1.701,82
2010	820,08	547,63	445,62	1.813,33
2011	820,08	547,63	445,62	1.813,33
2012	722,27	510,09	338,14	1.570,50
2013	722,27	510,09	338,14	1.570,50

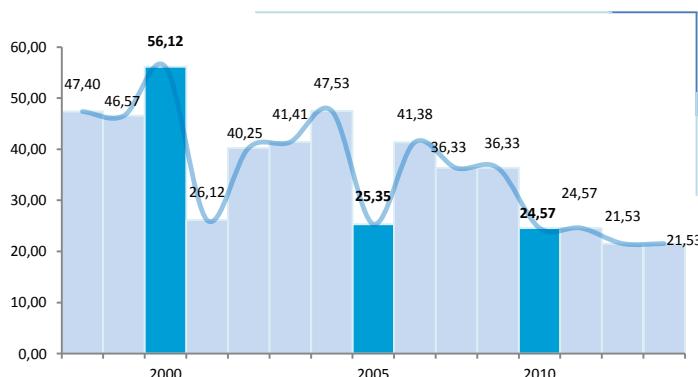
Tabel 9.2.
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan (Km)
Tahun 1998 - 2013

Sumber : Aceh Dalam Angka

Panjang jalan menurut status jalan dibagi menjadi jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara/nasional. Jaringan jalan umum tersebut pembinaannya dilakukan oleh Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota), Tingkat I (Provinsi), dan Departemen Pekerjaan Umum Pusat. Panjang jalan provinsi tahun 1998 adalah 2.511,26 kilometer, namun menurun menjadi 1.570,50 kilometer di tahun 2013. Jalan dengan kondisi baik berfluktuatif dari tahun 1998 hingga 2013, begitu juga dengan jalan kondisi sedang dan rusak/rusak berat. Namun, terlihat bahwa jalan kondisi sedang pada tahun 2013 masih cukup panjang yaitu sebesar 46,00 persen dan kondisi rusak/rusak berat sebesar 21,53 persen dari total panjang jalan provinsi tahun 2013.

Persentase Panjang Jalan Kondisi Rusak/Rusak Berat (%)
Tahun 1998 – 2013

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013



Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa panjang jalan dengan kondisi rusak/rusak berat pada tahun 1969 sebesar 47,40 persen, kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi 56,12 persen. Pada tahun 2005 jalan dengan kondisi rusak/rusak berat berkurang menjadi 25,35 persen dan berkurang lagi pada tahun 2010 menjadi 24,57 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan infrastruktur jalan menjadi lebih baik sehingga panjang jalan dengan kondisi rusak/rusak berat dapat terus berkurang. Namun diantara tahun 2000 ke 2005 terjadi peningkatan persentase jalan rusak/rusak berat, juga terdapat diantara tahun 2005 – 2010, hal itu dapat dikarenakan adanya pembukaan jalan baru atau pembangunan jalan tembus.

Tabel 9.3.
Panjang Jalan Nasional Menurut Kondisi Jalan (Km)
Tahun 1994 - 2013

Bila dilihat jalan nasional yang ada di Provinsi Aceh, jumlah panjang jalan tahun 1994 adalah 3.171,76 kilometer, kemudian naik turun hingga tahun 2000, namun meningkat kembali di tahun 2004 menjadi 1.782,78 kilometer dan menjadi 1.803,33 km pada tahun 2010 hingga 2013.

Jalan nasional dengan kondisi baik berfluktuatif dari tahun 1994 hingga 2013, namun paling rendah adalah pada tahun 2004 dimana hanya 127,45 kilometer, sedangkan jalan kondisi sedang sangat tinggi yaitu 1.107,41 kilometer dan kondisi rusak/rusak parah sepanjang 547,84 kilometer, hal ini berkaitan dengan adanya bencana gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004, namun terus diperbaiki menjadi lebih baik hingga

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Setelah Indonesia merdeka, pembangunan terus dilaksanakan di segala bidang, sehingga terlihat kemajuan pembangunan yang dicapai dalam segala sektor. Salah satunya yaitu pembangunan jalan raya di seluruh daerah yang juga terus dilakukan demi lancarnya arus transportasi melalui jalan darat sekaligus pendukung lancarnya transportasi melalui udara dan laut. Seiring dengan pembangunan jalan tersebut, kendaraan bermotor pun terus mengalami perkembangan pesat baik dalam hal teknologi maupun jumlahnya. Perkembangan jumlah kendaraan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan. Meningkatnya jaringan jalan sampai ke pelosok desa memungkinkan berkembangnya perusahaan/usaha angkutan baik penumpang maupun barang.

**Tabel 9.4.
Nama Terminal Bus Tahun 2013**

No.	Nama Terminal	Lokasi	Kapasitas (Unit)	Luas Tanah (m ²)	Type
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terminal Banda Aceh	Banda Aceh	50 - 100	40.089	A
2	Terminal Sigli	Pidie	50 - 100	94.393	A
3	Terminal Lhokseumawe	Lhokseumawe	50 - 100	30.238	A
4	Terminal Langsa	Langsa	50 - 100	2.829	A
5	Terminal Meulaboh	Aceh Barat	50 - 100	7.220	A
6	Terminal Bireuen	Bireuen	25 - 50	8.226	B
7	Terminal Lhoksukon	Aceh Utara	25 - 50	3.864	B
8	Terminal Panton Labu	Aceh Utara	25 - 50	16.264	B
9	Terminal Kuala Simpang	Aceh Tamang	25 - 50	12.463	B
10	Terminal Takengon	Aceh Tengah	25 - 50	15.456	B
11	Terminal Nagan Raya	Nagan Raya	25 - 50	1.490	B
12	Terminal Calang	Aceh Jaya	25 - 50	3.513	B
13	Terminal Subulussalam	Subulussalam	25 - 50	5.860	B
14	Terminal Kutacane	Aceh Tenggara	25 - 50	74.930	B
15	Terminal Sare	Aceh Besar	< 25	29.361	C
16	Terminal Bereuneun	Pidie	< 25	5.047	C
17	Terminal Jeunib	Bireuen	< 25	2.032	C
18	Terminal Matang Glp. Dua	Bireuen	< 25	33.372	C
19	Terminal Geudong	Aceh Utara	< 25	1.836	C
20	Terminal Idi Rayeuk	Aceh Timur	< 25	3.560	C
21	Terminal Ujung Deh	Gayo Lues	< 25	17.520	C
22	Terminal Piulo Sarok	Aceh Singkil	< 25	2.490	C
23	Terminal Sinabang	Simeulue	< 25	1.779	C
24	Terminal Tapaktuan	Aceh Selatan	< 25	3.298	C
25	Terminal Kota Fajar	Aceh Selatan	< 25	3.870	C
26	Terminal Blang Pidie	Aceh Barat Daya	< 25	2.524	C
27	Terminal Lawepakam	Aceh Tenggara	< 25	5.632	C

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Tahun	Jenis Kendaraan				
	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Beban	Sepeda Motor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1972	1.932	655	2.555	8.927	14.069
1973	2.099	719	2.665	11.512	16.995
1974	2.177	751	2.740	15.194	20.862
1975	2.447	795	3.467	19.983	26.692
1976	2.762	864	3.733	27.535	34.894
1977	3.097	1.079	6.030	35.740	45.946
1978	3.447	1.376	6.631	43.618	55.072
1979	4.021	1.689	7.128	50.053	62.891
1980	2.228	2.135	8.403	62.487	75.253
1981	2.137	2.854	18.255	73.683	96.929
1982	2.811	2.973	10.838	82.710	99.332
1983	3.340	3.324	11.359	92.082	110.105
1984	2.928	3.514	11.847	97.630	115.919
1985	6.090	4.389	12.271	99.506	122.256
1986	9.122	2.432	12.806	107.136	131.496
1987	11.126	1.179	14.432	112.724	139.461
1989	13.028	955	11.595	78.854	104.432
1990	17.179	1.311	16.178	119.330	153.998
1991	11.817	3.659	18.425	140.103	174.004
1992	11.628	826	16.878	147.996	177.328
1993	7.811	882	13.959	149.380	172.032
1994	15.551	1.284	16.943	206.657	240.435
1995	10.710	1.115	15.417	166.409	193.651
1996	12.506	909	12.601	170.137	196.153
1997	9.590	993	17.080	134.215	161.878
1998	19.210	1.678	20.540	169.568	210.996
1999	29.234	2.865	29.078	300.893	362.070
2000	33.663	3.602	32.569	200.774	270.608
2001	27.722	11.109	32.324	332.171	403.326
2002	38.839	18.997	39.455	405.071	502.362
2003	44.069	19.555	42.240	493.970	599.834
2004	57.352	28.872	51.517	592.810	730.551
2005	63.254	33.884	54.371	634.188	785.697
2006	68.984	39.656	57.563	696.874	863.077
2007	86.801	51.812	87.856	1.235.894	1.462.363
2008	87.142	59.103	87.991	1.388.223	1.622.459
2009	89.914	62.293	88.532	1.568.661	1.809.400
2010	96.534	62.553	90.013	1.701.788	1.950.888
2011	100.684	62.668	95.235	1.924.863	2.183.450
2012	116.389	62.866	99.230	2.146.078	2.424.563

Sumber :

Perkembangan jumlah bus di Provinsi Aceh berfluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 1972 bus berjumlah 655 unit, tahun 1980 menjadi sebanyak 2.135 unit, kemudian tahun 1990 menurun menjadi 1.311 unit dan tahun 2000 meningkat lagi menjadi 3.602 unit, pada tahun 2010 jumlah bus meningkat tajam menjadi 62.553 unit atau meningkat sebesar 1.636,62 persen. Untuk naik dan turunnya penumpang bus tersebut, hingga tahun 2013 terdapat 27 terminal bus pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan rincian lengkap dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 9.5.
Jumlah Kendaraan Bermotor Dirinci Menurut Jenis (Unit)
Tahun 1972 – 2012

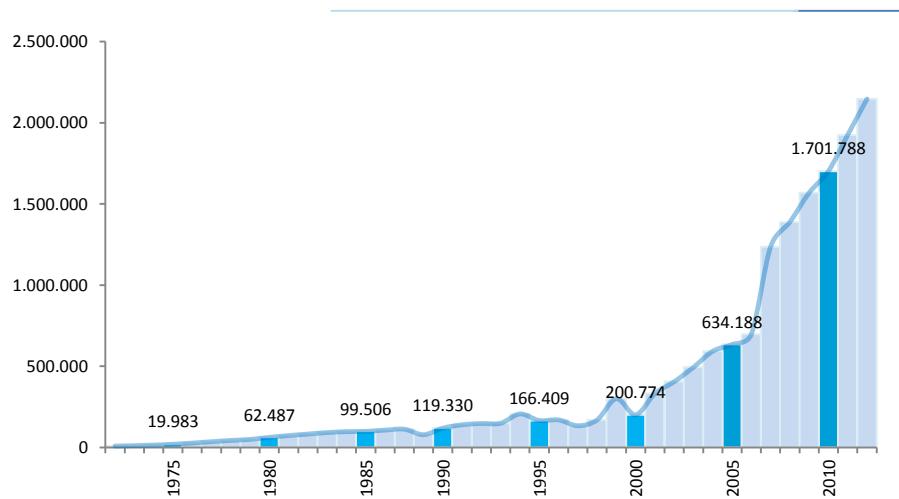
Sumber :

1. Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepolisian RI Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka)
2. Kortlantas POLRI, data diolah (Publikasi Statistik Transportasi)

Kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan/transportasi darat yang memungkinkan arus lalu lintas orang maupun barang antar daerah menjadi lebih cepat. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil penumpang, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor cenderung menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 1972 mobil penumpang hanya berjumlah 1.932 unit, bus berjumlah 655 unit, mobil beban berjumlah 2.555 unit dan sepeda motor sebanyak 8.927 unit, sehingga jumlah kendaraan bermotor pada tahun 1972 berjumlah sebanyak 14.069 unit. Pada tahun 1980 jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi 75.253 unit, tahun 1990 berjumlah 153.998 unit. Sejak tahun 2000 hingga 2012 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat tajam, hal ini terlihat dari jumlah kendaraan bermotor tahun 2000 adalah sebanyak 270.608 unit kemudian pada tahun 2005 menjadi 785.697 unit atau meningkat sebesar 190,35 persen dibandingkan tahun 2000, jumlah kendaraan bermotor tahun 2010 meningkat menjadi 1.950.888 unit atau meningkat sebesar 148,30 persen dibandingkan tahun 2005, kemudian pada tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Aceh sebanyak 2.424.563 unit dengan rincian 116.389 unit mobil penumpang, 62.866 unit bus, 99.230 unit mobil beban dan 2.146.078 unit sepeda motor.

Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang lebih banyak dimiliki daripada jenis kendaraan bermotor lainnya, selain karena relatif lebih murah juga lebih praktis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Perkembangan jumlah sepeda motor juga cenderung meningkat dari tahun 1972 hingga 2012. Pada tahun 1972, jumlah sepeda motor adalah sebanyak 8.927 unit, meningkat pada tahun 1980 menjadi 62.487 unit, tahun 1990 menjadi 119.330 unit kemudian tahun 2000 menjadi 200.774 unit dan terus meningkat hingga tahun 2010 menjadi sebanyak 1.701.788 unit atau mengalami peningkatan sebesar 747,61 persen bila dibandingkan dengan tahun 2000.



Gambar 9.3.
Perkembangan Jumlah Sepeda Motor (Unit) Tahun 1972 – 2012

Sumber : Aceh Dalam Angka

Transportasi Laut

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas lautan 2/3 wilayah Indonesia dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95.181 km, serta memiliki 17.480 pulau yang mempunyai potensi ekonomi pada jasa transportasi laut (pelayaran) yang sangat besar, karena sudah tidak dapat dielakkan lagi bahwa transportasi laut (kapal) merupakan sarana transportasi utama guna menjangkau dan menghubungkan pulau-pulau di wilayah nusantara sehingga menciptakan koneksi antar pulau di Indonesia. Selain itu transportasi laut juga berperan dalam berbagai bidang seperti bidang sosial budaya, politik, geografis, perekonomian serta bidang pertahanan keamanan. Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta pembangunan di pulau-pulau maka harus ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut yang cukup berkapasitas, andal dan tersedia setiap waktu bila dibutuhkan.

Tabel 9.6.
Nama Pelabuhan Tahun 2013

Sumber : Dinas Perhubungan, Informasi, dan Telekomunikasi Aceh

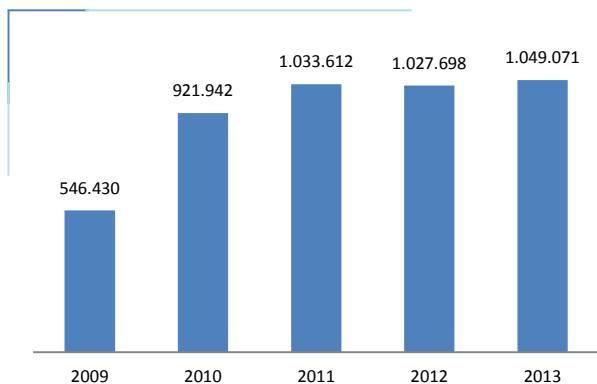
No. (1)	Nama Pelabuhan (2)	Lokasi (3)	Tahun Pembangunan (4)	Panjang Dermaga (Meter) (5)	Keterangan (6)
1	Pelabuhan Sinabang	Simeulue	1997	121 x 15	Pelabuhan Umum
2	Pelabuhan Singkil	Aceh Singkil	1995	Tahap Konstruksi	Pelabuhan Umum
3	Pelabuhan Tapaktuan	Aceh Selatan	1992	100 x 15	Pelabuhan Umum
4	Pelabuhan Kuala Idi	Aceh Timur	1981	35 x 10	Pelabuhan Umum
5	Pelabuhan Meulaboh	Aceh Barat	2006	92 x 25	Pelabuhan Umum
6	Pelabuhan Malahayati	Aceh Besar	1975	100 x 16	Pelabuhan Umum
7	Pelabuhan Susoh	Aceh Barat Daya	1977	35 x 8	Pelabuhan Umum
8	Pelabuhan Calang	Aceh Jaya	1987	Tahap Konstruksi	Pelabuhan Umum
9	Pelabuhan Ulee Lheue	Banda Aceh	2000	8 Ha	Pelabuhan Umum
10	Pelabuhan Sabang	Sabang	1991	180 x 25	Pelabuhan Umum
11	Pelabuhan Kuala Langsa	Langsa	1989	150 x 15	Pelabuhan Umum
12	Pelabuhan Lhoknga	Aceh Besar	-	-	Pelabuhan Khusus
13	Pelabuhan Krueng Geukeuh	Aceh Utara	1986	267,5 x 25	Pelabuhan Khusus

Tahun	Dalam Negeri		Luar Negeri	
	Naik	Turun	Naik	Turun
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
2009	273.353	273.077	-	-
2010	464.048	457.894	528	528
2011	504.479	529.133	2.299	2.299
2012	518.749	508.949	1.703	1.703
2013	525.736	523.335	5.290	4.375

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Gambar 9.4.

Jumlah Penumpang yang Naik dan Turun pada Pelabuhan (Orang) Tahun 2009 – 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Tabel 9.8

**Bongkar – Muat Barang pada Pelabuhan (Ton)
Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Dalam Negeri		Luar Negeri	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	534.392	185.859	11.255	73.569
2010	1.248.449	34.804.490	497.257	39.394.578
2011	1.853.894	1.446.130	276.000	2.792.173
2012	2.149.907	1.468.355	406.646	2.834.331
2013	2.240.861	139.637.558	155.721	39.679.983

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Tabel 9.7.

**Jumlah Penumpang yang Naik dan Turun pada Pelabuhan (Orang)
Tahun 2009 – 2013**

Sumber :

Dari Tabel 4.7 di atas, jumlah penumpang dalam negeri yang naik maupun yang turun pada pelabuhan penumpang di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2013. Tahun 2009 penumpang yang naik berjumlah 273.353 orang, meningkat menjadi 525.736 orang di tahun 2013. Penumpang yang naik pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,35 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012. Penumpang yang turun pada tahun 2009 sebanyak 273.077 orang. Pada tahun 2013 penumpang yang turun sebanyak 523.335 orang, mengalami peningkatan sebesar 2,83 persen bila dibandingkan tahun 2012.

Pada tahun 2009 tidak ada penumpang luar negeri yang naik ataupun turun pada pelabuhan penumpang di Provinsi Aceh, namun tahun 2010 terdapat penumpang yang naik dan turun masing-masing 528 orang, tahun 2011 terdapat masing-masing 2.299 orang, sebanyak masing-masing 1.703 orang di tahun 2012, dan pada tahun 2013 masing-masing sebanyak 5.290 orang penumpang luar negeri yang naik dan turun.

Kegiatan bongkar dan muat barang di pelabuhan menunjukkan salah satu kegiatan perekonomian suatu daerah, baik ekspor maupun impor. Pada tahun 2009, kegiatan bongkar barang pada pelayaran dalam negeri adalah sebesar 534.392 ton dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2013 menjadi sebesar 2.240.861 ton. Sedangkan kegiatan muat barang tahun 2009 sebesar 185.859 ton dan tahun 2013 meningkat tajam yaitu sebesar 139.637.558 ton.

Pada pelayaran luar negeri, kegiatan bongkar dan muat barang berfluktuatif dari tahun 2009 hingga 2013. Bongkar barang pada tahun 2009 adalah sebesar 11.255 ton dan muat barang sebesar 73.569 ton, sedangkan tahun 2013 meningkat dengan bongkar sebesar 155.721 ton dan muat sebesar 39.679.983 ton. Disini terlihat bahwa ekspor barang melalui pelabuhan di Provinsi Aceh ke luar negeri lebih besar dibandingkan impor, muat barang tahun 2013 terbanyak terdapat pada pelabuhan Tapaktuan dan Krueng Geukueh.

Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari suatu bandar udara ke bandar udara yang lain. Biasanya pesawat mengangkut penumpang, namun barang-barang yang sifatnya segar, relatif ringan dan bernilai tinggi juga diangkut oleh jasa angkutan udara. Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang ada sebagai suatu negara kepulauan. Oleh karena itu, angkutan udara mempunyai peranan penting dalam memperkokoh kehidupan berpolitik, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan & pertahanan. Sebagai pendukung dan pendorong pertumbuhan sektor-sektor lain serta pemicu pertumbuhan wilayah, peranan transportasi udara selalu mendapat perhatian untuk terus dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kebutuhan pelayanan jasa angkutan udara. Keberadaan bandar udara sebagai prasarana transportasi udara memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian wilayah

baik regional maupun nasional, terutama dalam memberikan kemudahan mobilitas bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat. Moda transportasi udara mempunyai karakteristik kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain.

Di Provinsi Aceh memiliki 11 bandar udara (bandara) yang mendukung kegiatan masyarakat. Bandara yang pertama kali ada di Provinsi Aceh adalah Sultan Iskandar Muda yang dibangun pada tahun 1943 oleh pemerintah Jepang dengan nama bandara Blang Bintang. Mengingat semakin besarnya minat masyarakat yang bepergian menggunakan transportasi udara baik penumpang maupun barang maka bandara inipun terus dikembangkan hingga pada tahun 2010 sampai sekarang melayani penerbangan dari dan menuju luar negeri. Pada bandara ini juga melakukan penerbangan pemberangkan jamaah haji dari Provinsi Aceh. Nama bandara yang ada di Provinsi Aceh dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.9.

**Tabel 9.9.
Nama Bandar Udara
Tahun 2013**

No.	Nama Bandar Udara	Lokasi	Tahun Berdiri	Panjang Landasan Pacu (Meter)	Jenis Penerbangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sultan Iskandar Muda	Aceh Besar	1943	3.000 x 45	Domestik dan Internasional
2	Maimun Saleh	Sabang	1997	1.850 x 30	Domestik
3	Malikussaleh	Aceh Utara	-	1.850 x 30	Domestik
4	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya	1976	1.800 x 30	Domestik
5	Lasikin	Simeulue	1977	1.400 x 30	Domestik
6	T. Cut Ali	Aceh Selatan	-	1.270 x 23	Domestik
7	Kuala Batee	Aceh Barat Daya	-	1.200 x 23	Domestik
8	Alas Leuser	Aceh Tenggara	-	1.450 x 23	Domestik
9	Hamzah Fansuri	Aceh Singkil	2005	1.200 x 23	Domestik
10	Rembele	Bener Meriah	1999	1.450 x 23	Domestik
11	Point "A" - Lhoksukon	Aceh Utara	-	817 x 23	Khusus

Sumber : Dinas Perhubungan, Informasi, dan Telekomunikasi Aceh

Tahun	Domestik		Luar Negeri	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1977	449	449		
1978	958	958		
1979	1.147	1.147		
1980	1.164	1.164		
1981	1.644	1.644		
1982	1.552	1.552		
1983	1.365	1.365		
1984	1.374	1.374		
1985	951	951		
1986	945	945		
1987	910	909		
1988	752	751		
1989	602	602		
1990	567	567		
1991	561	561		
1992	548	548		
1993	483	482		
1994	668	668		
1995	722	722		
1996	726	726		
1997	771	771		
1998	563	563		
1999	434	434		
2000	983	983		
2001	481	482		
2002	1.560	1.560		
2003	1.503	1.500		
2004	1.405	1.405		
2005	11.938	12.015		
2006	2.391	2.391		
2007	2.516	2.521		
2008	2.773	2.775		
2009	3.091	3.088		
2010	2.461	2.463	421	423
2011	2.407	2.400	561	465
2012	2.482	2.789	503	497
2013	3.155	3.160	540	535

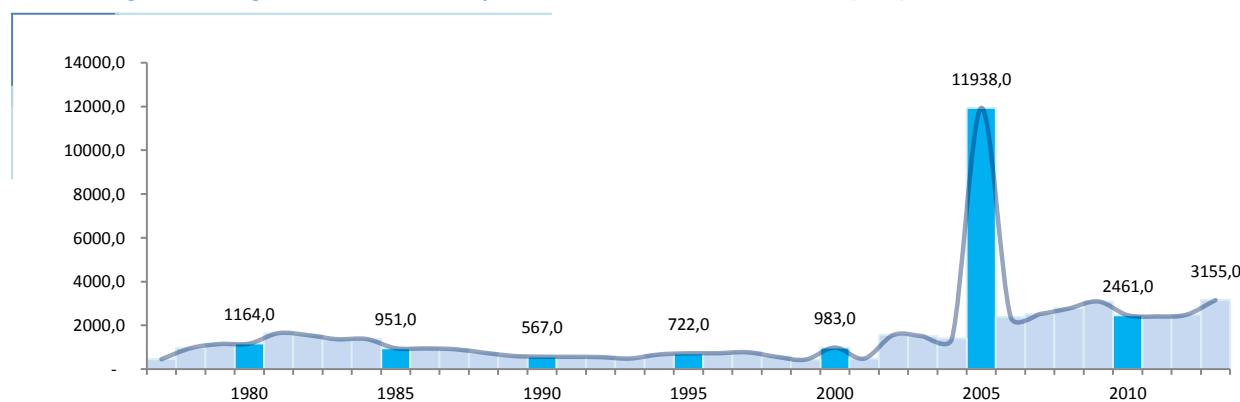
Tabel 9.10.
Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat pada Bandara Sultan Iskandar Muda (Unit)
Tahun 1977 - 2013

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Bandara Sultan Iskandar Muda merupakan bandara terbesar dan memiliki aktivitas tertinggi di Provinsi Aceh. Dari tahun 1977 hingga 2013 jumlah pesawat yang datang dan berangkat di bandara tersebut berfluktuatif. Tahun 1977 jumlah pesawat yang datang dan berangkat masing-masing sebanyak 449 unit, tahun 1980 meningkat menjadi 1.164 unit, namun pada tahun 1985 dan 1990 menurun lagi menjadi 951 dan 567 unit. Tahun 1995 kembali meningkat dengan jumlah kedatangan dan berangkat masing-masing sebanyak 722 unit dan terus meningkat hingga tahun 2013 berjumlah 3.155 unit pesawat datang dan 3.160 unit pesawat berangkat. Jumlah pesawat yang datang dan berangkat paling banyak terdapat pada tahun 2005 yaitu berjumlah 11.938 unit pesawat berangkat dan 12.015 unit pesawat datang. Hal ini bersamaan dengan terjadinya bencana gempa dan tsunami di Provinsi Aceh yang menyebabkan banyak relawan atau pihak-pihak lain yang datang untuk mengevakuasi korban dan melihat lokasi bencana.

Sejak tahun 2010, Bandara Sultan Iskandar Muda melayani penerbangan rute luar negeri yaitu ke Kuala Lumpur, Penang, Jeddah dan lain-lain. Jumlah pesawat yang datang pada tahun 2010 adalah sebanyak 421 unit dan berangkat sebanyak 423 unit. Tahun 2013 sudah semakin meningkat dengan jumlah kedatangan sebanyak 540 unit atau meningkat sebesar 28,27 persen dibandingkan tahun 2010 dan pesawat yang berangkat sebanyak 535 unit atau meningkat sebesar 26,48 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 9.5.
Perkembangan Kedatangan Pesawat Domestik pada Bandara Sultan Iskandar Muda (Unit) Tahun 1977 – 2013



Sumber : Dinas Perhubungan, Informasi, dan Telekomunikasi Aceh

Tabel 9.11
Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat pada
Bandara Sultan Iskandar Muda (Orang)
Tahun 1965 – 2013

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Penumpang yang datang dan berangkat pada rute penerbangan domestik dari tahun 1965 hingga 2013 berfluktuatif namun cenderung meningkat. Tahun 1965 jumlah penumpang (datang dan berangkat) adalah 4.561 orang, kemudian pada tahun 1975 jumlah penumpang menjadi sebanyak 22.989 orang. Pada Tahun 1985 jumlah penumpang meningkat lagi menjadi 44.657 orang, begitu juga pada tahun 1995 meningkat menjadi 82.167 orang.

Pada tahun 2005, jumlah penumpang yang datang dan berangkat pada Bandara Sultan Iskandar Muda sebanyak 460.651 orang (231.255 orang datang dan 229.396 orang berangkat). Jumlah penumpang tersebut terus meningkat hingga tahun 2013 berjumlah sebanyak 661.780 orang (322.803 orang datang dan 338.977 orang berangkat), meningkat sebesar 43,66 persen dibandingkan tahun 2005.

Penumpang pada penerbangan internasional ada sejak tahun 2010 hingga sekarang. Jumlah penumpang yang datang tahun 2010 adalah sebanyak 35.220 orang, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2013 berjumlah 49.478 orang atau meningkat sebesar 40,48 persen dibandingkan tahun 2010. Untuk penumpang yang berangkat, pada tahun 2010 berjumlah 35.203 orang dan terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebanyak 46.910 orang, terjadi peningkatan sebesar 33,26 persen dibandingkan tahun 2010.

Tahun	Domestik		Luar Negeri	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
1965	2.213	2.348		
1966	2.823	2.505		
1967	4.062	3.557		
1968	1.720	1.857		
1969	1.644	1.608		
1970	6.440	6.488		
1971	2.947	5.510		
1972	4.682	4.750		
1974	8.823	9.341		
1975	11.254	11.735		
1976	15.233	15.696		
1977	14.961	16.107		
1978	23.611	25.129		
1979	24.627	21.694		
1980	20.934	17.878		
1981	28.323	27.858		
1982	30.222	31.017		
1983	25.077	25.266		
1984	25.103	25.346		
1985	21.828	22.829		
1986	20.466	21.960		
1987	17.901	19.122		
1988	22.105	22.956		
1989	22.935	23.359		
1990	25.724	26.797		
1991	25.708	26.714		
1992	26.468	27.821		
1993	28.623	29.591		
1994	36.153	35.261		
1995	41.568	40.599		
1996	43.512	43.417		
1997	40.069	40.034		
1998	19.181	18.866		
1999	28.064	29.562		
2000	29.950	30.041		
2001	43.423	43.724		
2002	91.073	86.475		
2003	105.186	100.306		
2004	126.363	131.960		
2005	231.255	229.396		
2006	234.927	241.460		
2007	253.937	259.531		
2008	282.512	287.875		
2009	289.351	294.980		
2010	243.756	253.941	35.220	35.203
2011	281.246	285.544	41.463	44.704
2012	301.456	308.038	44.603	44.324
2013	322.803	338.977	49.478	46.910

Pos Dan Telekomunikasi

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan oleh VOC di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengembang peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero).

Dengan berjalananya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kabupaten/kota. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki Kantorpos online, serta dilengkapi *electronic mobile* pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah proses pengiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. PT. Telkom mempunyai fungsi untuk membangun dan mengembangkan serta mengusahakan telekomunikasi untuk umum. Fungsi dalam arti seluas-luasnya yaitu mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat demi menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Berbagai inovasi dalam bidang teknologi terus dilakukan sehingga masyarakat dengan mudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendapatkan berita lebih cepat dan akurat.

Perkembangan Produksi Benda Pos

Secara keseluruhan produksi benda pos (pengiriman dan penerimaan) di Provinsi Aceh seperti surat tercatat, pos paket, dan wesel baik dalam negeri maupun luar negeri menunjukkan pola yang bervariasi. Pada tahun 1981 jumlah surat tercatat dalam negeri sebanyak 249.664 unit yang kemudian meningkat menjadi 415.913 unit di tahun 1990 dan semakin meningkat di tahun 1995 menjadi 686.017 unit, namun sejak tahun 1996 jumlah surat tercatat dalam negeri menurun dan tahun 2005 menurun drastis menjadi 35.547 dikarenakan akhir tahun 2004 terjadi musibah gempa dan tsunami di Provinsi Aceh yang merusak banyak infrastruktur dan menelan banyak korban jiwa. Pada tahun 2007 jumlah surat tercatat dalam negeri kembali meningkat menjadi 301.562 unit. Untuk surat tercatat luar negeri pada tahun 1981 berjumlah sebanyak 5.336 unit, paling banyak terdapat pada tahun 1992 yaitu sebanyak 66.603 unit dan paling sedikit terdapat pada tahun 2006 yaitu sebanyak 1.936. Pada tahun 2007 jumlah surat tercatat luar negeri berjumlah 5.290, menurun sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 1981.

Pos paket yang dikirim dan diterima di dalam negeri berjumlah 33.804 paket di tahun 1981, pada tahun 1985 menurun menjadi 24.485 paket kemudian meningkat lagi di tahun 1990 menjadi 32.283 paket. Jumlah pos paket tersebut naik turun hingga tahun 2007 berjumlah sebanyak 48.828 paket. Jumlah pos paket paling banyak adalah tahun 2005 yaitu sebanyak 79.219 paket dan paling sedikit terdapat pada tahun 2000. Pos paket pada pengiriman dan penerimaan dari luar negeri pada tahun 1981 berjumlah 393 paket dan tahun 2007 berjumlah sebanyak 2.659 paket, meningkat sebesar 576,59 persen dibandingkan tahun 1981 namun menurun sebesar 20,56 persen dibandingkan tahun 2006.



Tabel 9.12.
Produksi Pos Menurut Jenis
Tahun 1981 - 2007

Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Untuk wesel pos hanya terdapat di dalam negeri, sejak tahun 1982 hingga 2007 menunjukkan pola yang bervariasi namun sejak tahun 2001 hingga 2007 jumlah penggunaan wesel semakin berkurang. Pada tahun 1982 jumlah wesel pos sebanyak 219.439 kali dan tahun 1990 meningkat menjadi 314.571 kali kemudian tahun 2000 merupakan jumlah paling banyak yaitu 1.203.363 kali, pada tahun 2007 menjadi sebanyak 78.765 kali, jumlah ini menurun sebanyak 64,11 persen dibandingkan tahun 1982.

Tahun	Dalam Negeri			Luar Negeri	
	Surat Tercatat	Pos Paket	Wesel Pos	Surat Tercatat	Pos Paket
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1981	249.664	33.804	*	5.336	393
1982	316.598	35.773	219.439	7.186	360
1983	287.391	29.062	258.596	9.585	636
1984	313.447	27.471	228.207	8.616	567
1985	359.696	24.485	243.090	6.572	398
1986	378.348	25.621	275.821	6.794	414
1987	329.430	16.554	249.993	11.659	532
1988	378.962	16.643	263.099	8.375	537
1989	342.800	21.458	318.036	7.222	722
1990	415.913	32.283	314.571	13.417	469
1991	478.328	22.614	704.060	8.904	2.655
1992	522.891	23.980	342.947	66.603	314
1993	524.639	34.886	358.965	9.402	452
1994	468.062	40.226	381.432	25.767	362
1995	686.017	46.642	378.373	54.865	758
1996	597.205	53.919	348.552	43.809	819
1997	*	*	*	*	*
1998	*	*	*	*	*
1999	341.318	*	267.629	23.910	*
2000	158.086	9.222	1.203.363	7.195	218
2001	668.125	43.865	197.643	40.472	269
2002	139.928	31.797	144.581	14.322	570
2003	163.715	30.796	149.055	23.105	1.242
2004	58.852	62.082	118.571	45.865	366
2005	35.547	79.219	78.734	15.361	537
2006	35.427	47.800	63.767	1.936	2.347
2007	301.562	48.828	78.765	5.290	2.659

Tabel 9.13.
Jumlah Kantor Kapasitas Sentral, Pelanggan, Kapasitas,
dan Sambungan Telepon Otomatis
Tahun 1982 - 2007

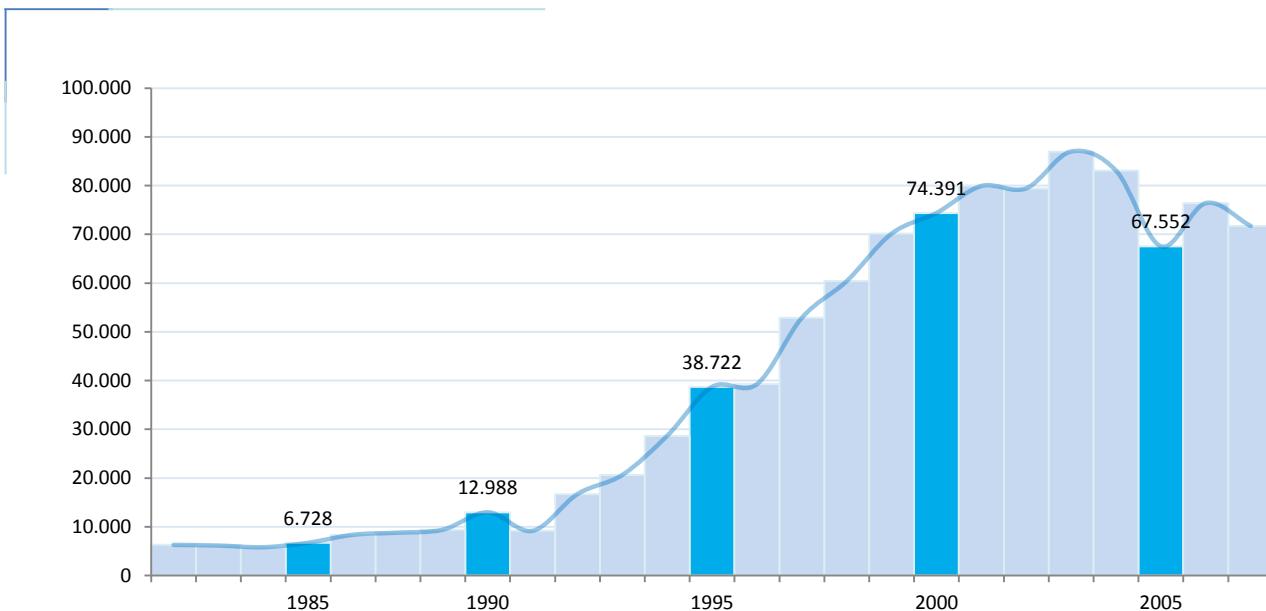
Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi harus dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan, demi terselenggara arus berita, informasi, dan data baik lingkup nasional maupun internasional yang jelas, lancar dan cepat. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan.

Salah satu alat telekomunikasi yang sejak dulu banyak digunakan adalah telepon. Dari tahun 1982 hingga 2007 jumlah kapasitas dan sambungan telepon otomatis di Provinsi Aceh cenderung meningkat walaupun jumlah kantor sentral tidak meningkat secara signifikan. Tahun 1982 jumlah kapasitas yang disediakan adalah 7.400 unit dengan sambungan otomatis sebanyak 6.300 unit. Pada tahun 1990 jumlah kantor sentral di Provinsi Aceh sebanyak 29 unit memiliki kapasitas sebanyak 17.606 unit dengan sambungan otomatis 12.988 unit dan pelanggan sebanyak 14.829 pelanggan.

Tahun	Kantor	Pelanggan	Kapasitas		Sambungan Otomatis
			(3)	(4)	
(1)	(2)				
1982	*	*	7.400	6.300	
1983	*	*	8.400	6.166	
1984	*	*	8.400	5.823	
1985	*	*	8.400	6.728	
1987	*	*	9.296	8.376	
1988	30	10.806	9.396	8.807	
1989	29	11.834	10.396	9.412	
1990	29	14.829	17.606	12.988	
1991	26	11.447	13.336	9.188	
1992	27	17.638	21.574	16.723	
1993	30	20.533	33.292	20.651	
1994	31	27.874	36.629	28.686	
1995	35	38.722	55.741	38.722	
1996	36	37.650	57.268	39.291	
1997	33	50.990	79.536	52.875	
1998	36	60.424	81.284	60.424	
1999	37	67.052	87.144	70.159	
2000	37	71.100	87.456	74.391	
2001	40	76.165	92.196	79.930	
2002	36	75.319	89.470	79.445	
2003	39	85.755	90.812	86.996	
2004	40	90.853	86.122	83.063	
2005	33	69.454	83.422	67.552	
2006	34	76.417	90.473	76.417	
2007	33	71.736	90.473	71.736	

Gambar 9.6.
Banyaknya Sambungan Telepon Otomatis Tahun 1982 - 2007



Sumber : Aceh Dalam Angka 2013

Tahun 2000 dengan jumlah kantor sentral meningkat menjadi 37 unit, jumlah kapasitas juga meningkat menjadi 87.456, demikian juga jumlah sambungan telepon otomatis meningkat sebesar 447,43 persen dibandingkan tahun 1990 dan pelanggan meningkat menjadi 71.100 pelanggan (sebesar 379,49 persen dibandingkan tahun 1990).

Bila dilihat pada tahun 2005, jumlah kantor sentral, pelanggan, dan sambungan telepon otomatis di Provinsi Aceh jauh menurun dibandingkan tahun 2004, hal ini dikarenakan adanya bencana gempa dan tsunami yang merusak banyak infrastruktur dan rumah serta menelan korban jiwa yang sangat banyak. Namun jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2007 jumlah kantor sentral sebanyak 33 unit dengan kapasitas

PARIWISATA

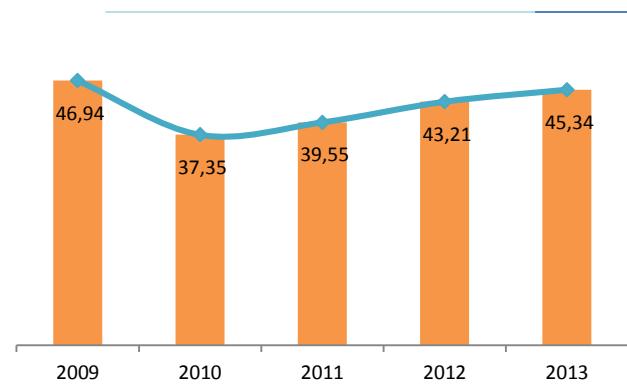
Pengembangan sektor pariwisata saat ini dirasakan semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional. Peranannya tidak hanya dalam meningkatkan penerimaan devisa, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan sektor ekonomi lainnya, seperti sektor angkutan, industri kecil dan rumah tangga, termasuk perhotelan dan akomodasi.

Gambar 1.1 menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di provinsi Aceh kurun waktu 2009 sampai dengan 2013, terlihat bahwa nilai TPK tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 46,94 persen yang artinya adalah terdapat 46,94 persen malam kamar terpakai dari seluruh malam kamar yang tersedia. Namun nilai TPK terendah justru terjadi setahun sesudahnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 37,35 persen. Secara rata-rata TPK hotel bintang di provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 42,48 persen.

Gambar 1.2 menunjukkan TPK hotel non bintang di provinsi Aceh sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan nilai TPK hotel bintang, terlihat bahwa nilai TPK hotel non bintang lebih kecil dibandingkan dengan nilai TPK hotel bintang. Rata-rata TPK hotel non bintang di Aceh selama lima tahun terakhir sebesar 30,65 persen. Nilai ini lebih kecil 11,83 poin dibandingkan rata-rata nilai TPK hotel bintang.

Rata-rata lama menginap di hotel bintang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama menginap di hotel non bintang. Dari gambar 1.3 terlihat bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, rata-rata lama menginap di hotel bintang selalu di atas hotel non bintang. Rata-rata lama menginap di hotel bintang selama lima tahun terakhir sebesar 2,00 malam sedangkan di hotel non bintang sebesar 1,85 malam. Sehingga terdapat selisih rata-rata lama menginap sebesar 0,15 malam

Gambar 9.7.
TPK Hotel Bintang (%) Tahun 2009-2013



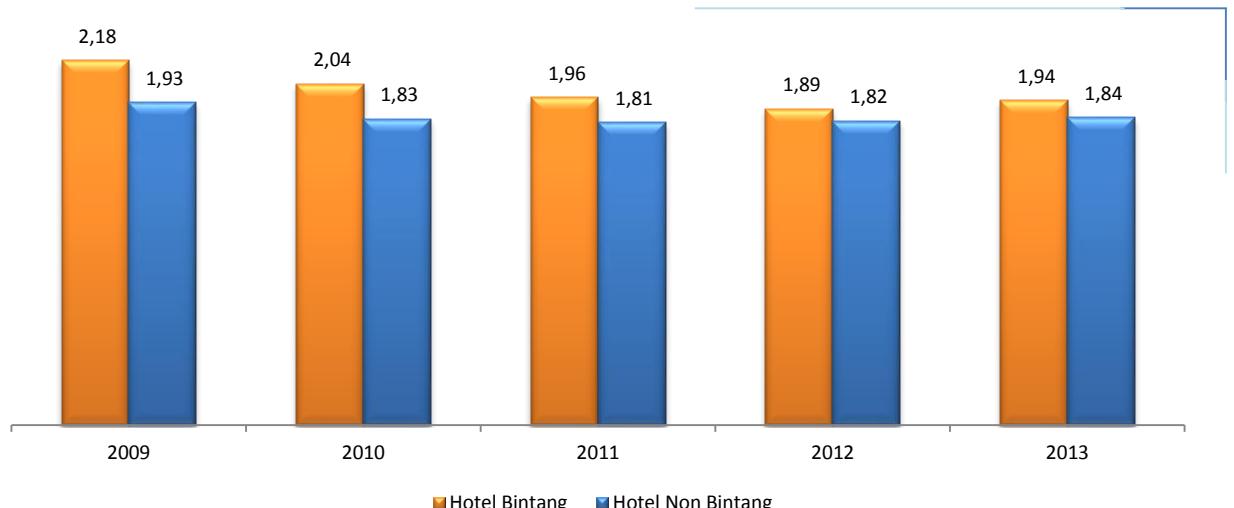
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.8.
TPK Hotel Non Bintang (%) Tahun 2009-2013

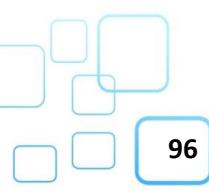


Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 9.9.
Rata-Rata Lama Menginap di Hotel Bintang dan Non Bintang (Hari)
Tahun 2009-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik



NERACA REGIONAL

Neraca Regional merupakan suatu sistem penyajian statistik yang menggambarkan berbagai transaksi antar sektor produksi, faktor produksi, institusi, dan daerah/negara. Transaksi ini mencakup barang dan jasa, finansial, arus modal, arus dana, dan arus pendapatan. Transaksi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, matriks, dan neraca. Neraca Regional menggambarkan data setatistik secara makro dari berbagai sektor.

Pembahasan Neraca Regional dalam publikasi ini mencakup: PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut pengeluaran, dan PDRB per kapita baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Beberapa angka memiliki selisih yang cukup besar karena adanya perubahan tahun dasar, sedangkan nilai tahun sebelumnya tidak dilakukan penyesuaian, terutama untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Yang selama ini telah dilakukan BPS adalah pendekatan produksi yang disajikan menurut lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran yang disajikan menurut komponen pengeluaran, masing-masing atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Dalam penghitungan PDRB tahun 1969, seluruh kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam 11 sektor, kemudian di awal 1980-an pengelompokan dipersempit ke 9 sektor. Pada tahun 1983 pengelompokan diubah kembali ke 11 sektor, dan pada tahun 1993 dikembalikan lagi menjadi 9 sektor hingga sekarang. Pada tahun dasar 2010, kegiatan ekonomi akan dikelompokkan menjadi 17 industri/lapangan usaha.

Pengelompokan kegiatan ekonomi menjadi 11 sektor adalah sebagai berikut:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, Restoran, dan Hotel
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain
9. Sewa Rumah
10. Pemerintahan dan Pertahanan
11. Jasa-jasa.

Pengelompokan kegiatan ekonomi menjadi 9 sektor adalah sebagai berikut:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran,
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Perubahan-perubahan ini terjadi menyesuaikan dengan adanya penyempurnaan SNA 1968 menjadi SNA 1993 sebagai acuan dalam pembuatan neraca nasional maupun neraca regional.

Penghitungan PDRB Provinsi Aceh pertama kali dilakukan dengan menggunakan harga konstan 1969, kemudian diubah ke ADHK 1975, 1983, 1993, dan terakhir menggunakan ADHK 2000. Saat ini BPS sedang dalam proses melakukan perubahan tahun dasar, yaitu dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 dengan menggunakan dasar SNA terbaru, yaitu SNA 2008.

Dalam waktu 44 tahun terakhir, PDRB Aceh, baik ADHB maupun ADHK terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi, selain karena meningkatnya kegiatan ekonomi juga karena adanya kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, dalam perhitungan PDRB telah dilakukan beberapa kali penggantian tahun dasar, dengan perubahan konsep dan definisi. Perubahan cakupan dan konsep definisi ini cenderung meningkatkan nilai PDRB.

Tabel 10.1.
PDRB ADHB dan ADHK Dengan dan Tanpa Migas (Juta Rupiah)
Tahun 1975-2013

Tahun	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1975	192.133,61	192.133,61	160.389,88	160.389,88
1976	243.037,53	221.108,81	217.374,32	196.087,96
1977	292.388,58	231.706,91	268.473,86	209.625,54
1978	428.815,99	305.061,41	307.565,29	214.324,85
1979	904.359,83	448.601,76	415.578,88	225.291,55
1980	1.698.237,53	534.854,67	572.340,30	254.110,31
1981	2.025.622,17	593.950,08	735.185,30	292.783,85
1982	2.358.472,66	628.425,12	922.895,91	322.292,91
1983*)	4.165.739,33	4.165.739,33	1.243.605,35	1.243.605,35
1984	5.204.121,41	5.007.586,31	1.411.513,88	1.299.123,60
1985	5.337.969,77	5.266.331,91	1.660.380,72	1.363.176,75
1986	5.759.950,60	5.406.362,07	1.839.390,29	1.455.344,02
1987	6.244.904,63	5.683.941,17	2.038.828,55	1.479.073,35
1988	6.067.027,48	5.009.734,14	2.292.906,59	1.534.684,37
1989	6.699.284,82	5.418.263,86	2.571.790,49	1.654.807,72
1990	7.237.788,34	5.715.202,50	2.923.136,63	1.772.874,47
1991	7.968.716,19	6.019.859,75	3.404.544,90	1.899.446,62
1992	8.622.555,99	6.271.884,78	3.984.715,24	2.059.908,85
1993*)	10.883.405,37	10.883.405,37	4.826.526,79	4.826.526,79
1994	11.244.014,54	11.026.161,68	5.787.368,46	5.294.948,14
1995	13.091.228,36	11.186.674,11	7.163.976,60	5.756.875,02
1996	14.636.988,48	11.463.291,09	8.232.960,31	6.199.551,39
1997	17.056.027,89	11.444.453,84	9.113.984,69	6.526.730,46
1998	24.956.859,30	10.384.957,54	10.987.616,63	6.149.195,23
1999	26.991.583,12	9.949.895,72	13.629.004,84	6.067.695,42
2000*)	39.501.352,02	39.501.352,02	19.626.691,47	19.626.691,47
2001	37.654.639,41	35.262.979,70	21.230.620,42	19.539.800,56
2002	43.705.666,44	42.338.751,34	24.488.662,91	21.095.274,35
2003	48.619.149,27	44.677.163,21	27.011.582,30	21.875.760,40
2004	50.357.261,98	40.374.282,31	30.149.761,24	22.260.704,22
2005	56.951.612,00	36.287.915,30	35.449.322,01	22.531.791,75
2006	70.786.835,17	36.853.868,67	44.899.256,64	24.267.797,86
2007	71.093.359,41	35.983.090,81	49.718.173,09	26.022.200,97
2008	73.547.550,72	34.097.992,47	54.209.880,05	26.523.093,38
2009	71.986.954,00	32.219.086,32	58.907.781,78	27.574.794,89
2010	79.145.279,10	33.103.082,84	66.005.798,40	29.072.034,52
2011	87.530.417,77	34.704.817,95	73.462.650,54	30.726.190,37
2012	95.074.218,67	36.487.880,08	80.724.754,85	32.591.172,83
2013	103.045.560,96	38.012.966,71	89.108.855,96	34.339.546,40

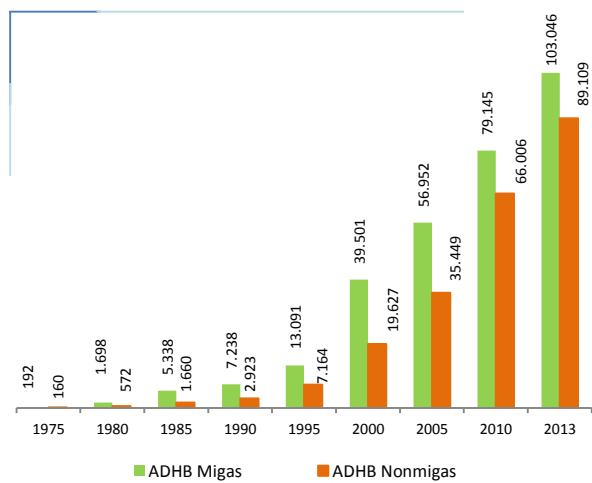
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha, 1975-2013

Nilai PDRB

PDRB Provinsi Aceh mulai dihitung untuk tahun 1969 dengan menggunakan harga dasar tahun 1969. Pada saat dimulainya kebijakan konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I tahun 1969, besarnya PDRB Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 39.826,97 juta rupiah. Lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1974, besaran PDRB Aceh meningkat menjadi 115.643,08 juta rupiah.

Peningkatan ini terjadi secara terus menerus, sehingga secara pasti PDRB Aceh baik ADHB maupun ADHK terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar didukung oleh adanya peningkatan produksi migas. Namun demikian, pada pertengahan tahun 1980-an dan akhir 1990-an produksi migas Aceh sempat mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Aceh selama beberapa tahun menjadi negatif. Hingga pada tahun 2013 PDRB Aceh sudah mencapai 103,05 triliun rupiah.

Gambar 10.1.
PDRB ADHB (Miliar Rupiah) Tahun 1973-2013



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha, 1975-2013

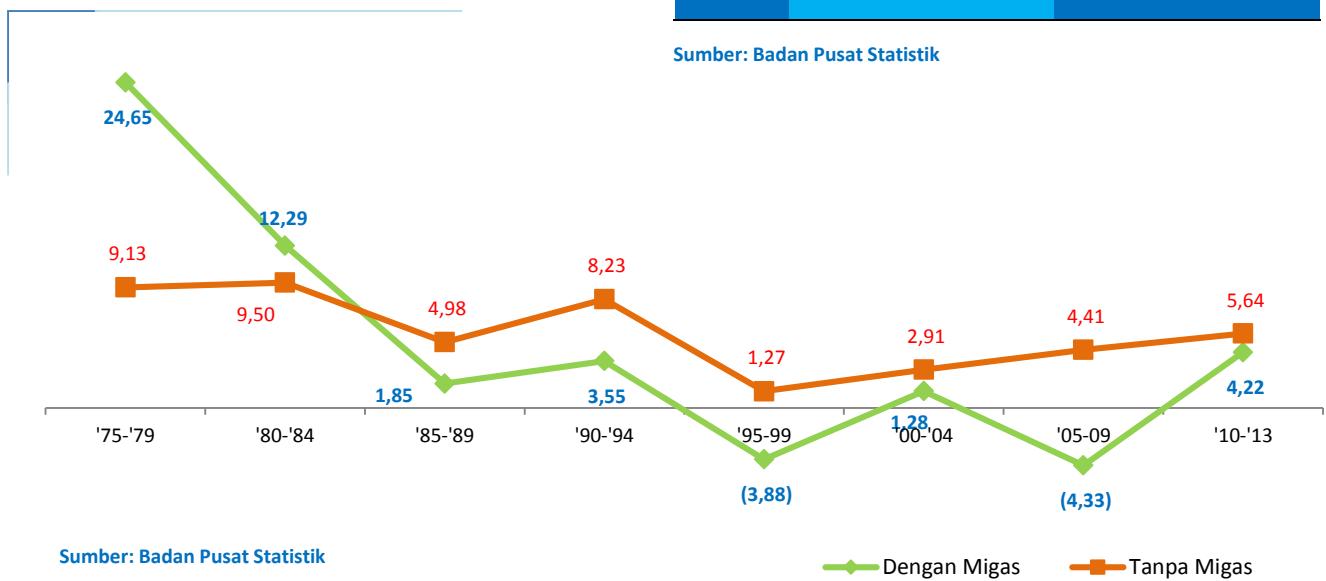
Tabel 10.2.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun 1975-2013

Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal dilakukannya penambangan minyak dan gas di Provinsi Aceh, rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 24,65 persen dengan migas, dan 9,13 persen tanpa migas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh, jika dilihat dalam jangka panjang cenderung mengalami penurunan pada akhir tahun 1980-an dan pada akhir tahun 1990-an. Penurunan ini, tidak hanya terjadi di Aceh, karena pada tahun-tahun tersebut, Indonesia memang sedang dilanda krisis moneter. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 1995-1999 bahkan menurun mencapai -3,88 persen.

Namun demikian, kondisi ini tidak berlangsung lama, sedikit demi sedikit laju pertumbuhan ekonomi Aceh mulai merangkak naik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh selama empat tahun terakhir (2010-2013) mencapai sebesar 5,64 persen tanpa migas, dan 4,22 persen dengan migas. Pada tahun terakhir, 2013, pertumbuhan ekonomi Aceh adalah sebesar 4,18 persen dengan migas, dan 5,36 persen tanpa migas.

Gambar 10.2.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tahun 1975-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

◆ Dengan Migas ■ Tanpa Migas

Tabel 9.3.
Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Sektor
Dengan Migas (%) Tahun 1969-2013

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	60,96	14,81	24,23
1970	60,76	12,03	27,21
1971	61,93	10,60	27,47
1972	61,27	8,73	30,00
1973	63,26	6,71	30,03
1974	62,32	5,74	31,94
1975	64,01	6,11	29,88
1976	62,93	6,35	30,72
1977	61,28	6,84	31,88
1978	67,78	6,36	25,86
1979	79,44	4,41	16,14
1980	84,88	3,45	11,67
1981	83,05	3,66	13,28
1982	80,02	3,80	16,17
1983*)	84,63	4,01	11,36
1984	85,76	3,63	10,62
1985	82,95	4,45	12,60
1986	82,51	4,46	13,03
1987	82,03	4,83	13,13
1988	79,68	5,93	14,40
1989	78,72	6,23	15,05
1990	77,71	6,59	15,70
1991	76,00	7,58	16,42
1992	75,08	7,82	17,09
1993*)	52,31	31,44	16,25
1994	50,12	31,92	17,95
1995	50,65	31,60	17,75
1996	48,68	33,23	18,09
1997	48,41	34,69	16,90
1998	62,18	25,85	11,96
1999	62,40	24,45	13,15
2000*)	48,63	29,24	22,13
2001	44,01	29,70	26,30
2002	49,94	24,99	25,07
2003	50,98	23,99	25,03
2004	49,04	23,86	27,10
2005	49,82	21,44	28,75
2006	53,43	18,18	28,39
2007	47,99	19,02	32,98
2008	45,25	19,92	34,83
2009	39,83	20,68	39,49
2010	39,00	20,27	40,74
2011	38,66	20,39	40,95
2012	37,92	20,61	41,48
2013	36,78	20,29	42,93

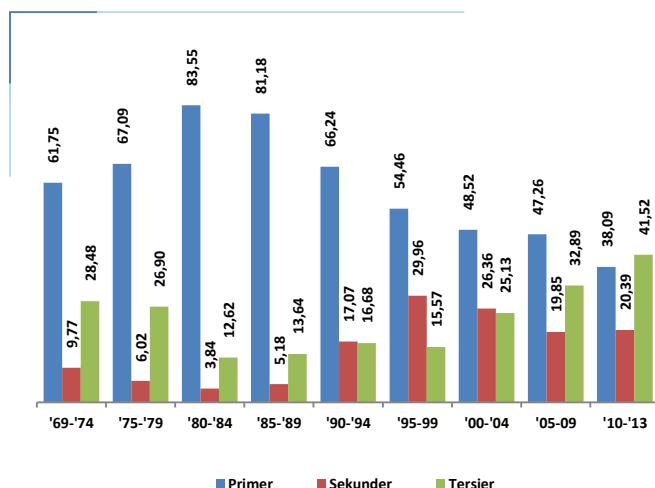
Sumber: Badan Pusat Statistik

Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Provinsi Aceh selama periode 1969-2009 didominasi oleh kelompok sektor primer, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Hingga tahun 1992, kontribusinya bahkan selalu di atas 60 persen, baru mengalami penurunan pada tahun 1993, dimana kontribusinya menjadi sebesar 52,31 persen dan bertahan pada sekitar angka tersebut hingga tahun 1997. Pada tahun 1998-1999 kontribusinya kembali berada di atas 60 persen.

Sejak tahun 2000, peranan kelompok sektor primer mulai mengalami penurunan secara perlahan, yaitu sekitar di atas 40 persen hingga tahun 2008. Sejak tahun 2009 peranannya semakin menurun ke angka 39,83 persen hingga tergeser oleh kelompok sektor tersier di tahun berikutnya yang peranannya semakin meningkat menjadi sebesar 40,74 persen sedangkan peranan sektor primer menurun menjadi 39,00 persen.

Gambar 10.3.
Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Sektor
Dengan Migas (%) Tahun 1969-2013



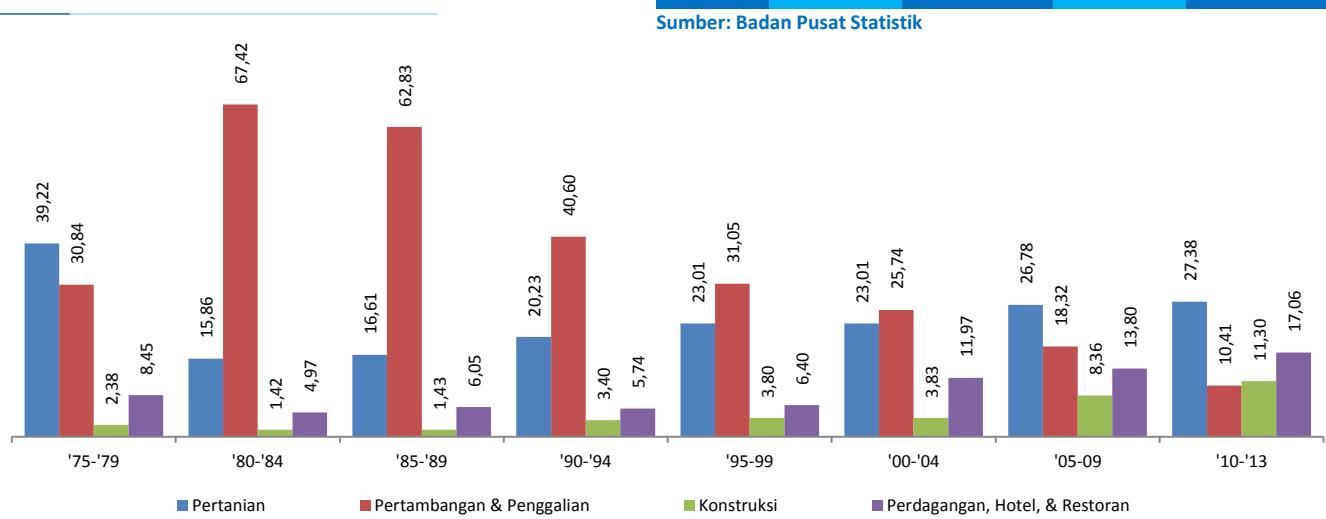
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 10.4.
Kontribusi PDRB Aceh Menurut Kelompok Sektor Tanpa Migas (%)
Tahun 1975-2013

Tahun	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Konstruksi	Perdagangan, Hotel, & Restoran
	(1)	(2)	(3)	(4)
1975	47,35	16,66	2,44	9,81
1976	52,21	10,72	2,60	10,70
1977	52,86	8,41	2,76	11,12
1978	39,23	28,55	2,73	8,50
1979	25,22	54,22	1,95	6,06
1980	18,42	66,45	1,81	4,52
1981	19,18	63,87	2,09	4,48
1982	18,97	61,05	2,02	6,61
1983	14,38	70,25	1,21	4,63
1984	12,80	72,95	0,88	4,22
1985	13,99	68,96	0,92	4,89
1986	14,37	68,15	0,86	4,96
1987	14,60	67,43	0,87	5,22
1988	17,35	62,33	1,39	6,59
1989	16,98	61,74	1,52	6,44
1990	17,89	59,82	1,96	6,44
1991	18,46	57,54	2,00	6,67
1992	21,03	54,05	2,01	6,77
1993	17,51	34,79	3,78	4,72
1994	21,22	28,91	4,50	5,18
1995	22,93	27,72	4,71	5,36
1996	23,06	25,62	5,10	5,55
1997	22,37	26,04	4,66	5,55
1998	23,07	39,12	2,56	4,60
1999	28,86	33,54	2,27	5,47
2000	17,68	30,95	4,43	10,86
2001	21,80	22,20	3,88	13,20
2002	20,86	29,08	4,01	11,89
2003	20,95	30,03	3,85	11,08
2004	24,76	24,28	4,16	11,22
2005	26,69	23,12	3,22	12,44
2006	25,71	27,72	5,94	11,45
2007	25,51	22,48	7,62	12,98
2008	26,37	18,87	8,52	13,90
2009	28,36	11,47	9,50	14,92
2010	27,94	11,06	10,20	15,77
2011	27,45	11,21	10,92	16,50
2012	27,46	10,46	11,31	17,02
2013	27,22	9,56	11,67	17,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 10.4.
Kontribusi PDRB Aceh Menurut Kelompok Sektor Tanpa Migas (%) Tahun 1975-2013



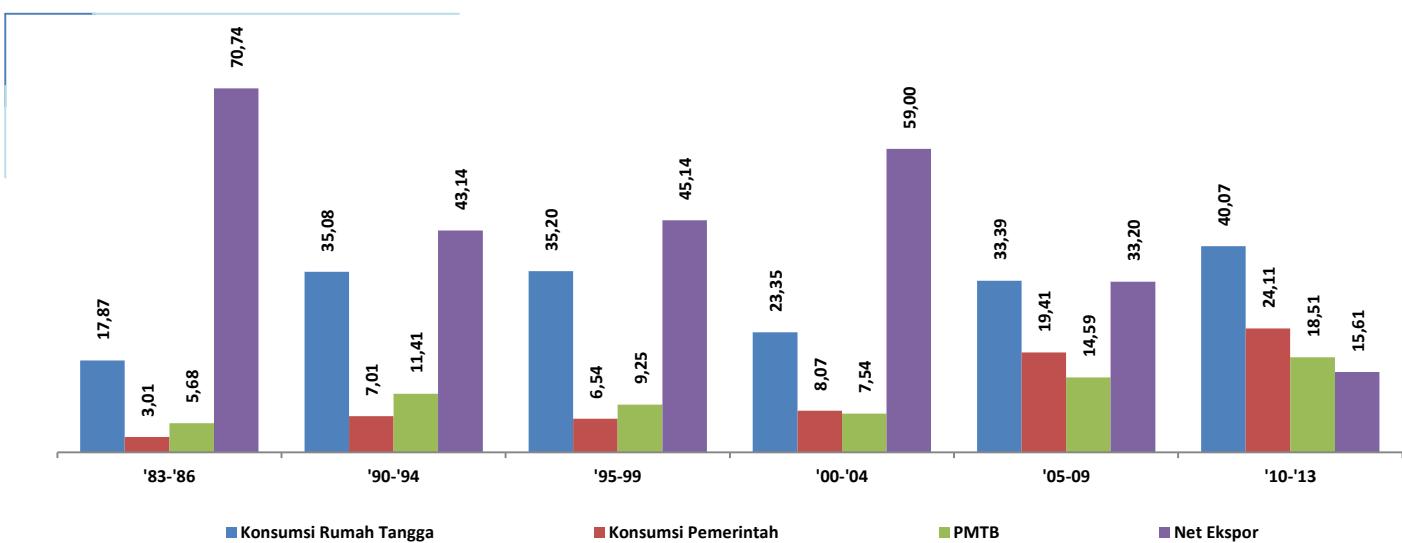
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 10.5.
Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran (%)
Tahun 1969-2013

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	PMTB	Net Ekspor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1983	17,76	3,23	9,80	65,94
1984	17,36	2,82	3,46	73,98
1985	18,19	2,87	5,39	68,96
1986	18,19	3,10	4,07	74,10
1987				
1988				
1989				
1990				
1991				
1992				
1993*)	33,10	6,92	9,98	46,86
1994	37,05	7,10	12,84	39,41
1995	33,89	6,77	11,16	42,95
1996	32,37	7,77	11,35	43,57
1997	32,81	7,40	10,73	44,78
1998	38,51	5,77	7,05	46,49
1999	38,41	4,98	5,98	47,89
2000*)	21,64	3,73	4,71	66,69
2001	25,73	6,11	7,05	59,22
2002	23,11	7,18	11,86	58,49
2003	22,48	9,19	6,90	56,95
2004	23,79	14,13	7,17	53,66
2005	31,15	16,95	11,80	38,18
2006	31,13	16,76	14,61	36,59
2007	32,51	18,99	13,59	37,98
2008	33,39	18,93	15,78	32,27
2009	38,75	25,43	17,17	20,98
2010	39,73	23,40	17,85	17,45
2011	40,46	23,79	18,20	16,13
2012	39,91	24,27	18,73	15,15
2013	40,21	24,98	19,26	13,72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 10.5.
Kontribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran (%)
Tahun 1969-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dengan pendekatan produksi (menurut lapangan usaha), PDRB juga dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Ada 7 komponen dalam PDRB menurut pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dalam penghitungan PDRB menurut pengeluaran tidak dipisahkan antara migas dan nonmigas, sehingga peranan ekspor akan terlihat dominan dalam struktur pengeluaran.

Sejak pertama dilakukan penghitungan PDRB hingga tahun 2007, komponen pengeluaran yang memiliki peranan paling besar adalah Ekspor, yang dalam tabel sudah dikurangi dengan impor (net ekspor). Selama kurun waktu tersebut, peranan net ekspor selalu di atas 35 persen. Seiring dengan menurunnya ekspor migas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sejak tahun 2008, PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan peranan mencapai 40,21 persen pada tahun 2013.

Tabel 10.6.
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Tahun 1975-2013

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah tertentu. PDRB Per Kapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur atau membandingkan kemakmuran penduduk baik antarwilayah maupun antarwaktu.

Perkembangan PDRB per kapita Aceh dari tahun 1975 hingga tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. PDRB per kapita Aceh pada tahun 1975 adalah sebesar 84 ribu rupiah, sedangkan nilai PDRB per kapita tanpa migas adalah sebesar 70 ribu rupiah. Nilai ini terus meningkat sehingga pada tahun 2013 PDRB per kapita Aceh sudah mencapai 21,5 juta rupiah dengan migas dan sebesar 18,6 juta rupiah dengan mengeluarkan migas menurut harga berlaku.

PDRB per kapita Aceh dengan migas pernah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2001, dimana PDRB per kapita menurun dari sebesar 10,05 juta rupiah menjadi 9,15 juta rupiah per tahun. Hal ini terkait dengan adanya konflik di Aceh yang mengakibatkan produksi migas turun pada tahun 2001. Selain karena konflik, produksi migas Aceh juga mulai mengalami penurunan. Penurunan ini mengakibatkan turunnya PDRB per kapita migas pada tahun 2007 dan 2009. Pada tahun-tahun lain produksi migas juga turun, namun karena pertumbuhan ekonomi di sektor lain cukup baik, maka penurunan tersebut dapat tertutupi.

Tahun	Dengan Migas		Nonmigas		
	(1)	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		(2)	(3)		
1975	0,084	0,084	0,070	0,070	
1976	0,104	0,094	0,093	0,084	
1977	0,121	0,096	0,111	0,087	
1978	0,173	0,123	0,124	0,086	
1979	0,354	0,175	0,163	0,088	
1980	0,651	0,205	0,219	0,097	
1981	0,762	0,223	0,276	0,110	
1982	0,862	0,230	0,337	0,118	
1983*)	1,484	1,484	0,443	0,443	
1984	1,843	1,773	0,500	0,460	
1985	1,784	1,760	0,555	0,456	
1986	1,866	1,751	0,596	0,471	
1987	1,977	1,800	0,646	0,468	
1988	1,869	1,544	0,707	0,473	
1989	2,018	1,632	0,775	0,498	
1990	2,119	1,673	0,856	0,519	
1991	2,297	1,735	0,981	0,547	
1992	2,450	1,782	1,132	0,585	
1993*)	3,019	3,019	1,339	1,339	
1994	3,075	3,015	1,583	1,448	
1995	3,389	2,896	1,855	1,490	
1996	3,721	2,914	2,093	1,576	
1997	4,259	2,858	2,276	1,630	
1998	6,125	2,549	2,696	1,509	
1999	6,567	2,421	3,316	1,476	
2000*)	10,053	10,053	4,995	4,995	
2001	9,153	8,571	5,161	4,750	
2002	10,491	10,163	5,878	5,064	
2003	11,525	10,591	6,403	5,186	
2004	12,356	9,906	7,398	5,462	
2005	14,126	9,001	8,793	5,589	
2006	17,042	8,873	10,810	5,843	
2007	16,831	8,519	11,771	6,161	
2008	17,128	7,941	12,625	6,177	
2009	16,498	7,384	13,500	6,319	
2010	17,610	7,365	14,686	6,468	
2011	19,039	7,549	15,979	6,684	
2012	20,255	7,773	17,198	6,943	
2013	21,504	7,933	18,596	7,166	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 10.7.
Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap
PDRB (Persen) Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2013

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2000 (1)	2005 (2)	2010 (3)	2013 (5)
Dengan Migas				
Simeulue	0,41	0,53	0,71	0,74
A. Singkil	0,79	0,80	0,94	1,04
A. Selatan	2,40	2,97	3,16	3,18
A. Tenggara	0,82	1,29	1,95	2,06
A. Timur	4,48	11,18	8,78	7,85
A. Tengah	1,87	2,59	3,51	3,76
A. Barat	2,29	2,62	3,93	3,92
A. Besar	3,86	5,21	7,51	7,65
Pidie	2,66	3,28	5,35	6,30
Bireuen	4,23	5,14	7,57	8,12
A. Utara	36,63	21,55	14,73	12,74
Abdyā	1,27	1,58	1,95	2,09
Gayo Lues	0,65	0,87	1,12	1,14
A. Tamiang	2,78	5,32	3,05	2,95
Nagan Raya	1,77	2,50	3,32	3,37
A. Jaya	0,77	0,71	1,26	1,29
B. Meriah	1,32	1,83	2,33	2,43
Pidie Jaya	1,04	1,27	1,62	1,67
Banda Aceh	3,27	3,81	10,15	11,98
Sabang	0,29	0,40	0,69	0,67
Langsa	1,62	1,99	2,38	2,41
Lhokseumawe	24,30	21,95	13,52	12,14
Subulussalam	0,48	0,60	0,47	0,48
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Nonmigas				
Simeulue	0,89	0,93	0,87	0,85
A. Singkil	1,71	1,41	1,14	1,21
A. Selatan	5,16	5,18	3,82	3,68
A. Tenggara	1,76	2,26	2,36	2,38
A. Timur	6,91	6,57	6,49	6,23
A. Tengah	4,03	4,52	4,25	4,35
A. Barat	4,94	4,58	4,76	4,54
A. Besar	8,32	9,10	9,10	8,85
Pidie	5,72	5,73	6,48	7,29
Bireuen	9,10	8,99	9,17	9,39
A. Utara	12,23	10,66	9,38	8,49
Abdyā	2,72	2,76	2,36	2,42
Gayo Lues	1,39	1,52	1,36	1,32
A. Tamiang	5,01	4,73	3,33	3,11
Nagan Raya	3,82	4,37	4,03	3,90
A. Jaya	1,67	1,25	1,52	1,50
B. Meriah	2,84	3,19	2,82	2,82
Pidie Jaya	2,23	2,22	1,96	1,93
Banda Aceh	7,04	6,65	12,30	13,86
Sabang	0,63	0,69	0,84	0,78
Langsa	3,49	3,48	2,89	2,78
Lhokseumawe	7,38	8,17	8,20	7,78
Subulussalam	1,03	1,06	0,57	0,56
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Peranan PDRB Kabupaten/Kota

Struktur ekonomi tiap kabupaten/kota secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator makro, di antaranya nilai tambah yang dihasilkan, laju pertumbuhan, dan PDRB per kapita. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin luas dan semakin banyak penduduk suatu daerah, maka seharusnya semakin tinggi pula nilai PDRB-nya.

Provinsi Aceh cukup banyak mengalami pemekaran selama kurun waktu tahun 2001-2010, terutama sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Hal ini mempengaruhi ketersediaan data PDRB kabupaten/kota, terutama untuk kabupaten/ kota yang baru terbentuk. Dengan pertimbangan tersebut, maka peranan kabupaten/kota di publikasi ini hanya dibahas sejak tahun 2000.

Dari Tabel 10. 7, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan kontribusi PDRB terbesar pada tahun 2000 baik dengan maupun tanpa migas adalah kabupaten Aceh Utara dengan kontribusi sebesar 36,63 persen dengan migas dan 12,23 persen tanpa migas. Pada tahun 2005, terjadi pergeseran, dimana Kota Lhokseumawe menempati urutan pertama kontribusi dengan migas, yaitu sebesar 21,95 persen, sedangkan tanpa migas masih didominasi oleh Aceh Utara dengan kontribusi sebesar 10,66 persen. Hal ini terkait dengan sudah mulai menurunnya produksi migas di Aceh Utara, namun hasil industri migasnya belum menurun secara berarti pada tahun tersebut.

Sumber: Badan Pusat Statistik

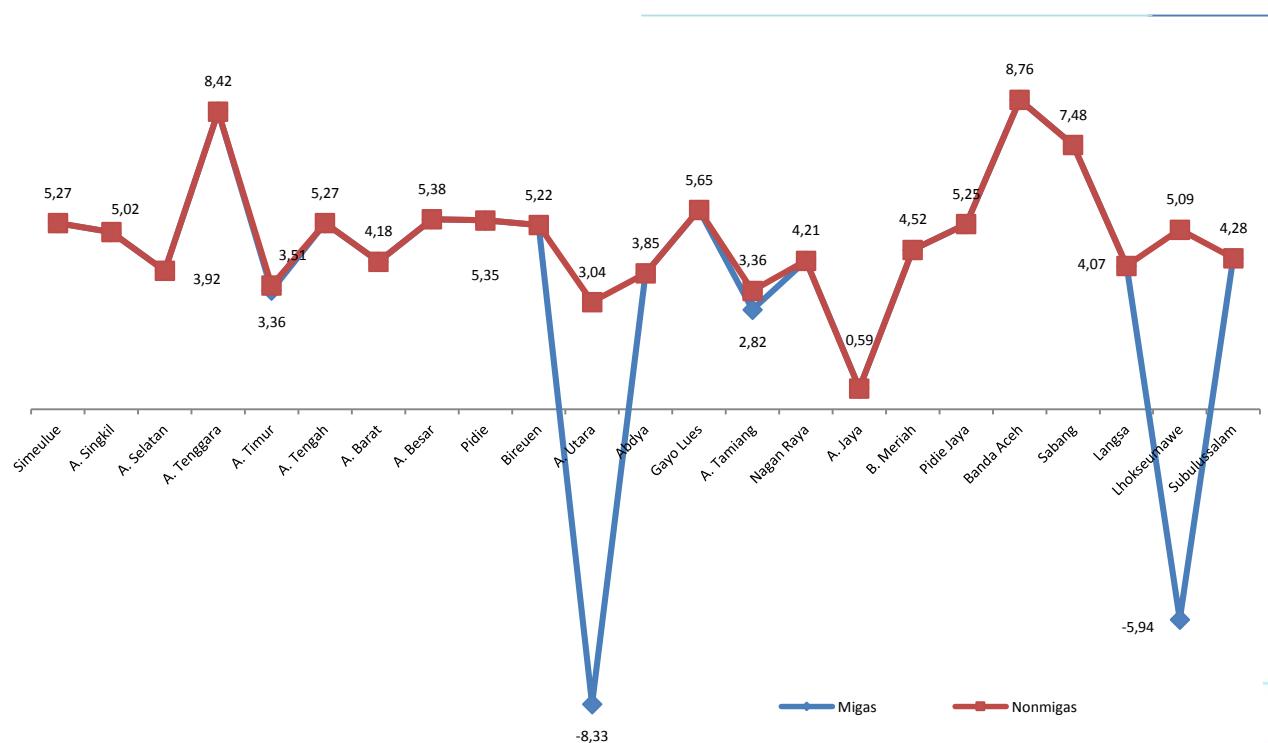
Pada tahun 2010, keadaan ini masih tidak jauh berubah dengan Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe sebagai daerah dengan kontribusi terbesar pada PDRB dengan migas. Namun demikian, dengan mengeluarkan kontribusi migas, maka Banda Aceh menjadi daerah dengan kontribusi PDRB tertinggi terhadap PDRB Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor nonmigas di Aceh, terutama pertanian dan perdagangan, semakin mendominasi dan hampir menggeser peranan migas.

Struktur ekonomi Aceh ini terus mengalami pergeseran, meskipun peringkatnya masih sama, namun Kota Banda Aceh secara perlahan mulai menuju peringkat satu. Hal ini terlihat pada tahun 2013, dimana kontribusi PDRB Banda Aceh dengan migas sudah menempati urutan kedua melewati Kota Lhokseumawe. Demikian pula dengan kontribusi PDRB tanpa migas yang semakin naik meninggalkan Aceh Utara dan Lhokseumawe, yaitu sebesar 13,86 persen pada tahun 2013. Sementara itu Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe posisinya sudah tergantikan oleh Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar yang menempati urutan kedua dan ketiga dalam kontribusi PDRB tanpa migas.

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah daerah yang hanya bertumpu pada sektor migas belum mampu menarik/mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Justru daerah yang sektor industri, konstruksi, dan perdagangannya maju mampu mengejar ketertinggalan dari daerah yang mulai ditinggalkan oleh sektor migas karena sudah mulai memasuki fase penurunan produksi. Tentunya perlu diambil langkah-langkah kreatif dan inovatif agar kondisi ekonomi daerah-daerah yang produksi migasnya mulai menurun tetap atau semakin membaik, bukan justru menurun.

Kemampuan suatu daerah dalam mengejar kemajuan ekonomi dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonominya. Daerah yang sebelumnya terbelakang, namun pertumbuhan ekonominya tinggi, akan dapat menyusul dan beranjak dari ketertinggalannya. Sebaliknya, daerah yang kondisi perekonomiannya cukup baik, namun pertumbuhan ekonominya rendah, atau bahkan negatif, dalam jangka waktu lama akan mengalami ketertinggalan jika kondisi ini dibiarkan berlanjut. Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi selama 13 tahun terakhir adalah Kota Banda Aceh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76 persen dan Kabupaten Aceh Tenggara dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,42 persen. Kota Sabang berada di peringkat ketiga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,48 persen. Sementara itu, kabupaten dengan pertumbuhan terendah adalah Aceh Jaya dan Aceh Utara dengan rata-rata pertumbuhan tanpa migas sebesar 0,59 persen dan 3,04 persen. Bahkan dengan migas rata-rata pertumbuhan Aceh Utara dan Lhokseumawe adalah negatif, yaitu -8,33 persen dan -5,94 persen.

Gambar 10.6.
PDRB ADHB (Miliar Rupiah) Tahun 1973-2013



Tabel 10.8.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
Tahun 2000, 2005, 2010, dan 2013

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2000	2005	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dengan Migas				
Simeulue	2,71	3,41	6,78	8,71
A. Singkil	4,12	4,55	7,03	9,27
A. Selatan	4,71	7,79	11,94	15,75
A. Tenggara	2,12	3,84	8,34	10,87
A. Timur	5,23	18,46	18,64	21,17
A. Tengah	4,43	8,11	15,30	19,90
A. Barat	4,56	8,76	17,32	20,58
A. Besar	5,06	8,83	16,35	19,63
Pidie	2,68	4,67	10,79	15,56
Bireuen	4,53	7,35	14,87	19,02
A. Utara	27,17	21,96	21,26	21,54
Abdyā	4,26	6,87	11,81	15,43
Gayo Lues	3,82	6,06	10,77	13,26
A. Tamang	4,79	11,36	9,25	10,98
Nagan Raya	4,78	10,17	18,21	22,17
A. Jaya	3,04	5,91	12,53	15,09
B. Meriah	4,71	8,65	14,56	18,14
Pidie Jaya	3,03	5,26	9,30	11,92
Banda Aceh	5,67	10,76	34,75	47,26
Sabang	4,27	6,95	17,25	20,60
Langsa	5,11	7,28	12,25	15,03
Lhokseumawe	55,97	71,39	60,40	60,91
Subulussalam	3,72	5,12	5,29	6,92
Nonmigas				
Simeulue	2,71	3,41	6,78	8,71
A. Singkil	4,12	4,55	7,03	9,27
A. Selatan	4,71	7,79	11,94	14,88
A. Tenggara	2,12	3,84	8,34	10,87
A. Timur	3,75	6,21	11,37	13,47
A. Tengah	4,43	8,11	15,30	19,93
A. Barat	4,56	8,76	17,32	20,59
A. Besar	5,06	8,83	16,35	19,63
Pidie	2,68	4,67	10,79	15,56
Bireuen	4,53	7,35	14,87	19,30
A. Utara	4,22	6,22	11,18	12,96
Abdyā	4,26	6,87	11,81	15,44
Gayo Lues	3,82	6,06	10,77	13,26
A. Tamang	4,01	5,79	8,36	9,99
Nagan Raya	4,78	10,17	18,21	22,17
A. Jaya	3,04	5,91	12,53	14,81
B. Meriah	4,71	8,65	14,56	18,14
Pidie Jaya	3,03	5,26	9,30	11,64
Banda Aceh	5,67	10,76	34,75	47,26
Sabang	4,27	6,95	17,25	20,60
Langsa	5,11	7,28	12,25	15,07
Lhokseumawe	7,89	15,21	30,27	36,34
Subulussalam	3,72	5,12	5,29	6,55

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah PDRB per kapita. Dengan membandingkan PDRB per kapita antardaerah, maka akan diketahui mana daerah yang secara rata-rata penduduknya lebih sejahtera, dan mana daerah yang kesejahteraan penduduknya kurang.

Berdasarkan angka PDRB per kapita dengan migas, maka kabupaten/kota dengan rata-rata penduduk paling sejahtera adalah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Penduduk di kedua daerah ini secara rata-rata memiliki pendapatan (PDRB) per kapita sebesar 55,97 juta dan 27,17 juta pada tahun 2000. Pada tahun 2013 PDRB per kapita Aceh Utara mengalami penurunan menjadi sebesar 21,54 juta, sedangkan Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 60,91 juta per tahun.

Dengan mengeluarkan migas, PDRB per kapita tertinggi masih berada di Kota Lhokseumawe, yaitu sebesar 7,89 juta pada tahun 2000, diikuti oleh Banda Aceh sebesar 5,67 juta per tahun. Sedangkan Aceh Utara yang dengan migas menempati urutan kedua, turun ke peringkat 13 dengan PDRB per kapita sebesar 4,22 juta per tahun. Namun demikian, sejak tahun 2006, Kota Banda Aceh mampu mengejar Kota Lhokseumawe dengan PDRB per kapita tertinggi se-Aceh. Hal ini terus bertahan hingga tahun 2013, dimana PDRB per kapita Banda Aceh adalah sebesar 47,26 juta per tahun, sedangkan Lhokseumawe berada di urutan kedua dengan PDRB per kapita sebesar 36,34 juta per tahun.

Tabel 11.1.
Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 1982 - 2013

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

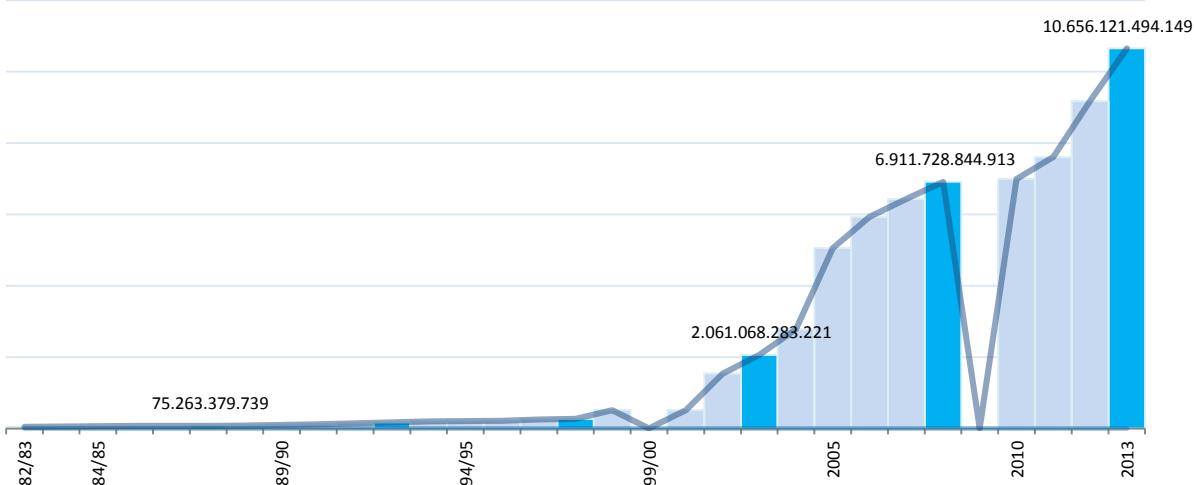
Berdasarkan Tabel 11.1 terlihat bahwa penerimaan pendapatan Provinsi Aceh sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 1982 penerimaan pendapatan Provinsi Aceh hanya sebesar 46,98 miliar dan pada tahun 2013 meningkat pesat menjadi 10,66 triliun.

Penerimaan pendapatan Provinsi Aceh meningkat menjadi satu trilyun rupiah sejak tahun 2002, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2013. Nilai ini akan terus meningkat dikarenakan sejak tahun 2008 Provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat sebesar 3,5 triliun, dimana jumlahnya terus meningkat hingga berakhir pada tahun 2028.

Tahun	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah (Rp)	
	(1)	(2)
1982/1983		46,977,436,314.65
1983/1984		52,948,921,195.32
1984/1985		62,047,989,851.12
1985/1986		70,352,060,992.46
1986/1987		72,641,214,115.35
1987/1988		75,263,379,739.24
1988/1989		83,018,058,642.59
1989/1990		103,980,000,900.00
1990/1991		117,999,275,400.00
1991/1992		146,594,102,724.33
1992/1993		167,837,355,120.00
1993/1994		194,813,982,680.00
1994/1995		205,544,629,499.54
1995/1996		215,115,210,408.50
1996/1997		255,366,479,888.49
1997/1998		269,490,288,513.16
1999		136,734,000,000,00
2000		269,190,000,000,00
2001		515,722,342,603.97
2002		1,537,525,656,577.32
2003		2,061,068,283,221.01
2004		2,782,310,652,124.30
2005		5,055,150,000,000.00
2006		5,932,221,752,296.40
2007		6,431,000,000,000.00
2008		6,911,728,844,913.00
2009		
2010*		6,992,253,904,018.37
2011		7,610,320,147,037.19
2012		9,180,143,048,437.63
2013		10,656,121,494,148.67

Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 11.1.
Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah (Rp)
Tahun 1982 - 2013



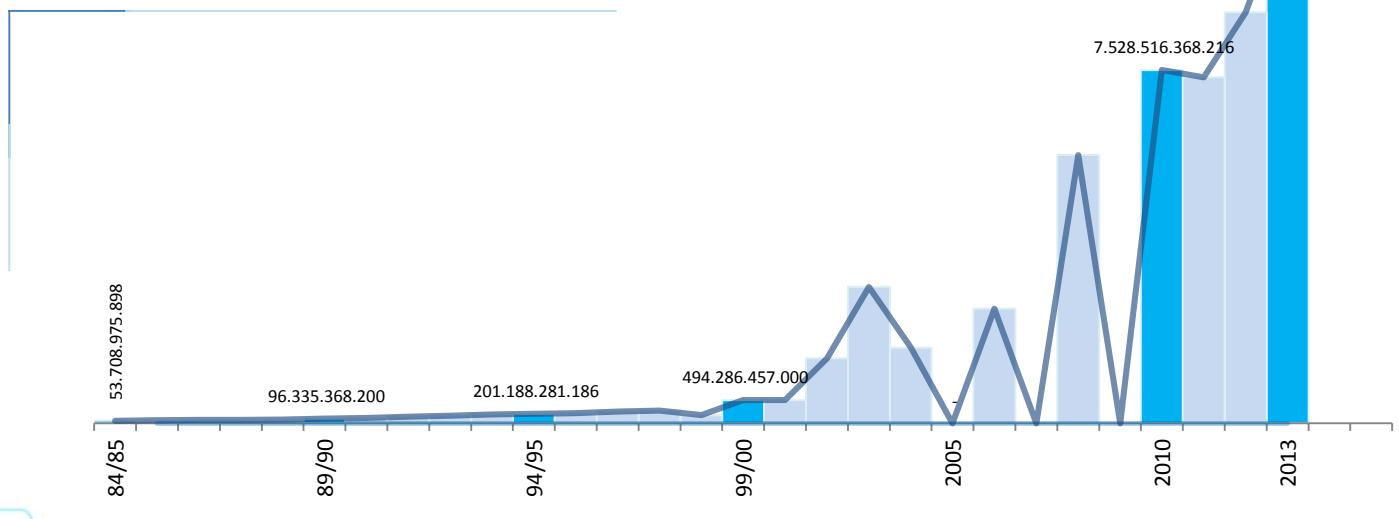
Sumber : Aceh Dalam Angka

Tabel 11.2.
Jumlah Pengeluaran Pendapatan Daerah
Tahun 1982 - 2013

Tahun	Realisasi Pengeluaran Daerah (Rp)
(1)	(2)
1982/1983	42 093 651 674,80
1983/1984	46 667 117 365,20
1984/1985	53 708 975 897,80
1985/1986	62 570 525 263,00
1986/1987	69 055 947 310,50
1987/1988	70 268 204 576,41
1988/1989	77 025 601 200,00
1989/1990	96 335 368 200,00
1990/1991	110 102 936 000,00
1991/1992	141 337 033 026,48
1992/1993	162 390 114 880,00
1993/1994	190 178 382 700,00
1994/1995	201 188 281 185,70
1995/1996	214 176 463 183,24
1996/1997	250 684 605 487,32
1997/1998	267 379 649 052,49
1998/1999	171 702 394 000,00
1999/2000	494 286 457 000,00
2001	494 760 403 266,00
2002	1 384 492 251 119,16
2003	2 906 073 353 682,00
2004	1 610 542 639 743,00
2005 ^{a)}	2 169 779 960 000,00
2006	2 442 721 686 437,00
2007 ^{a)}	3 266 681 087 852 40
2008	5 715 623 665 304,00
2009 ^{a)}	7 642 847 005 194 25
2010	7 528 516 368 216,00
2011	7 374 625 289 279,50
2012	8 757 319 943 552,18
2013	11 217 741 311 905,42

Sumber: Aceh Dalam Angka (1983-2014)
a) www.djpk.depkeu.go.id

Gambar 11.2.
Jumlah Pengeluaran Pendapatan Daerah (Rp)
Tahun 1982 - 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka

Pengeluaran pemerintah atau sering disebut belanja pemerintah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.

Pengeluaran pemerintah berbanding lurus dengan pendapatan pemerintah, dimana semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan tabel di samping, terlihat realisasi pengeluaran pendapatan pemerintah Aceh sejak tahun 1982 sampai dengan 2013. Pada tahun 1982, pengeluaran pemerintah hanya sebesar 42,09 Milliar rupiah, namun pada tahun 2013 meningkat pesat menjadi sebesar 11,22 Trilyun rupiah.

Semakin banyaknya pengeluaran pemerintah, diharapkan akan membuat kesejahteraan rakyat juga turut meningkat. Pembangunan berbagai macam fasilitas publik seperti sarana dan prasarana penunjang transportasi akan membuat distribusi barang keluar dan masuk Provinsi Aceh akan menjadi semakin mudah, hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Aceh. Selain itu masih banyak pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Tabel 11.3.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 1982 - 2013

Tahun	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)
(1)	(2)
1982/1983	5.511.100.359
1983/1984	6.127.364.410
1984/1985	5.873.506.705
1985/1986	6.960.720.063
1986/1987	7.541.055.076
1987/1988	8.877.030.924
1988/1989	8.311.822.300
1989/1990	12.327.960.200
1990/1991	13.867.244.500
1991/1992	17.715.573.955
1992/1993	20.506.333.460
1993/1994	27.112.135.860
1994/1995	32.643.445.000
1995/1996	38.853.832.236
1996/1997	45.209.310.383
1997/1998	44.732.720.006
1999	44.735.873.000
2000	15.356.395.000
2001	48.760.692.590
2002	92.709.500.000
2003	103.532.000.000
2004	198.410.000.000
2005	211.189.000.000
2006	473.226.000.000
2007	587.486.000.000
2008	717.077.000.000
2009	724.090.000.000
2010*	796.949.000.000
2011	804.909.000.000
2012	901.174.000.000
2013	1.309.622.500.493

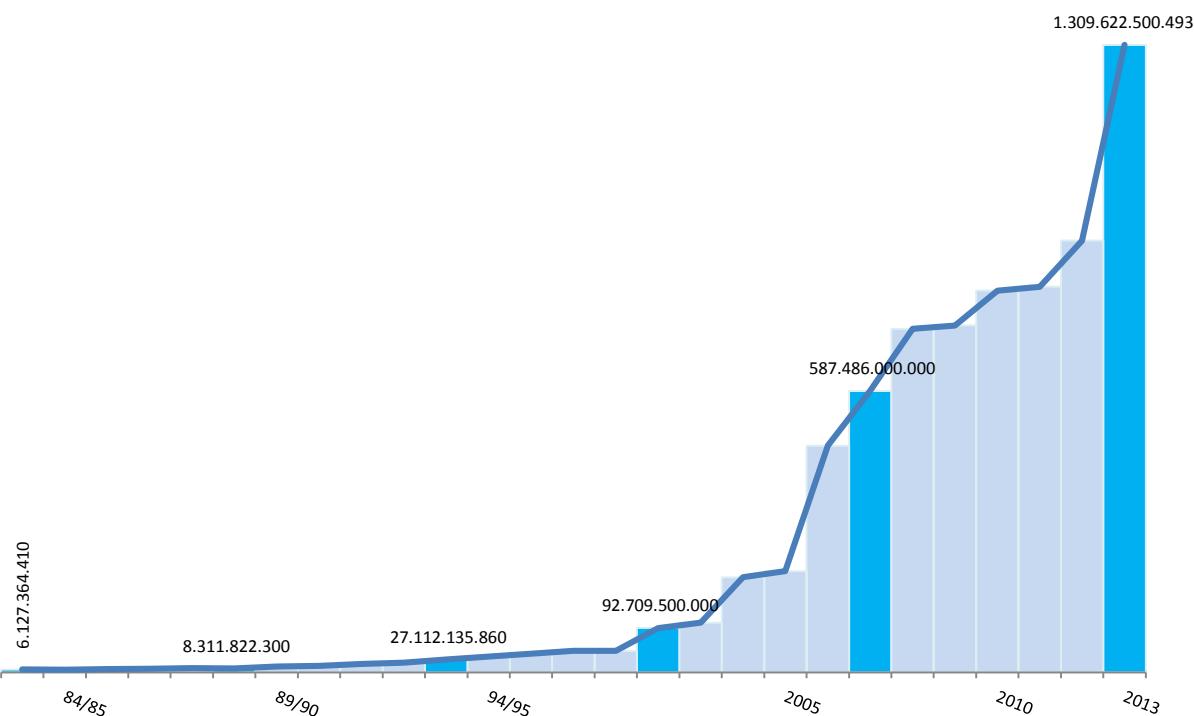
Sumber : Aceh Dalam Angka

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Berdasarkan tabel di samping terlihat bahwa PAD Provinsi Aceh pada tahun 1982 hanya sebesar 5,51 miliar rupiah meningkat pesat pada tahun 2013 sebesar 1,31 triliun rupiah. Sebelum tahun 2013, PAD Provinsi Aceh tidak pernah mencapai satu triliun rupiah.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan Provinsi Aceh, nilai PAD hanya berkisar kurang dari 10 persen dari pendapatan pemerintah. Hal ini berarti sumbangan pendapatan asli daerah masih sangat kecil terhadap total pendapatan pemerintah.

Gambar 11.3.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Tahun 1982 - 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka

Perbankan

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari pembangunan sektor ekonominya. Salah satu sektor ekonomi adalah sektor keuangan yang diperkuat dengan lahirnya perbankan dengan berbagai kegiatan finansialnya. Kemandirian dalam proses pembangunan melalui ketersediaan finansial dalam pembiayaan pembangunan dimaksud merupakan aspek yang krusial. Demi kepentingan ini maka prosedur untuk menciptakan dan memeratakan sumber-sumber dana yang telah dikuasai atau dimiliki serta dari sumber-sumber yang direncanakan.

Melalui berbagai kebijakan di sektor keuangan yang dicanangkan dan dijalankan, diharapkan dapat menutupi aspek pembiayaan pembangunan. Sejak dimulainya era deregulasi di Indonesia yang mulai berlaku dari tanggal 1 Juni 1983, kebijakan di bidang moneter dan perbankan mulai menunjukkan hasil berupa kinerja di sektor keuangan yang perlahan meningkat. Salah satunya ialah melalui kebijakan yang menghilangkan pagu kredit dan pemberlakuan suku bunga pasar. Berbagai paket kebijakan di kemudian hari bermunculan untuk memfasilitasi perkembangan dunia perbankan.

Demi meningkatkan efisiensi operasional perbankan, suatu kebijakan disahkan yang salah satu isinya mengatur kemudahan dalam persyaratan pendirian bank dan kantor bank baru. Paket kebijakan berlaku sejak tanggal 27 Oktober 1988. Kebijakan di bidang moneter, perbankan dan perkreditan diyakini berdampak signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan makro ekonomi.

Secara kedaerahan, potensi sektor perbankan khususnya di Aceh telah tumbuh sejak jaman kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Indonesia Daerah Istimewa Aceh yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 1918. Sempat mengalami penutupan pada jaman penjajahan Jepang, yaitu tanggal 20 Oktober 1942, Bank Indonesia “cabang Aceh” ini kembali memegang kendali aktivitas perbankan pada tanggal 2 Maret 1964.

Kekuatan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dikukuhkan dalam suatu undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999 dan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2009 yang dimandatkan dengan otonomi penuh dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang moneter di Indonesia.

Dari portal resmi Bank Indonesia, dikatakan bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia beritikad pada satu tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan rupiah sebagai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan rupiah ketika disandingkan dengan mata uang asing.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga pilar yang menjadi tiga bidang tugas yang terintegrasi agar kestabilan nilai mata uang dalam negeri dapat terkontrol. Tiga tugas utama bank sentral ini secara ringkas yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelacaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank-bank lainnya. Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil merupakan visi Bank Indonesia (www.bi.go.id, 2014).

Lembaga negara lainnya yang berwenang mengurus jasa keuangan dan perbankan di dalam negeri adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini tentu saja juga bersifat independen yang fungsi, tugas dan wewenangnya berada dalam lingkup pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam hal penyelenggaraan jasa keuangan dan perbankan. Dasar hukum pembentukan OJK adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. Berdirinya lembaga ini menggantikan fungsi dan peran yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia yaitu dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Dalam mengemban tugasnya, lembaga ini mempunyai visi untuk melindungi kepentingan konsumen, sehingga industri jasa keuangan dapat memajukan kesejahteraan umum (www.ojk.go.id, 2014).

Tabel 11.4.
Jumlah Bank dan Kantor Bank
Tahun 1993-2013

Tahun	Jumlah Bank	Jumlah Kantor Bank
(1)	(2)	(3)
1993	19	168
1994	21	189
1995	23	171
1996	24	203
1997	31	214
1998	30	220
1999	35	229
2000	32	224
2001	32	224
2002	32	224
2003	32	224
2004	27	215
2005	36	237
2006	36	243
2007	36	243
2008	27	354
2009	29	365
2010	34	415
2011	34	461
2012	35	475
2013	35	475

Sumber : Bank Indonesia

Kredit Perbankan

Perkembangan Kredit Secara Umum

Pengertian kredit menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-mempinjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam penyaluran kredit terdapat unsur-unsur yang melekat satu sama lain, yaitu unsur kepercayaan, unsur kesepakatan, jangka waktu, unsur resiko, dan unsur balas jasa. Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau "credo/creditum" yang artinya saya percaya. Oleh karena itu, penyaluran kredit dari lembaga keuangan dipastikan telah melalui tahapan analisa kredit yang telah meluluskan pencairan dana atas dasar kepercayaan kepada penerima kredit.

Pengembangan industri perbankan dari masa ke masa didukung dengan kebijakan yang mengarah kepada tercapainya suatu sistem perbankan yang sehat dan menciptakan kestabilan sistem keuangan yang ada. Berlandaskan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit. Sejak tahun 2006, Bank Indonesia membentuk Biro Informasi Kredit yang bertugas menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan sebagai Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Database ini digunakan oleh perbankan dan lembaga nonbank untuk mengkaji kelayakan (kredibilitas) calon penerima kredit. Dengan informasi ini lembaga keuangan menjadi mudah untuk menganalisa pemberian kredit dan memperlancar penyaluran kredit. Fungsi lainnya dari adanya informasi ini adalah membantu lembaga keuangan dalam penerapan manajemen resiko agar terhindar dari kegagalan pembayaran kredit oleh individu penerima dana dan mencegah penipuan (www.bi.go.id, 2014).

Sejak Januari 2014, sebanyak 35 kantor OJK telah diresmikan di seluruh Indonesia dengan harapan pengawasan kinerja perbankan secara menyeluruh dan mencapai visi dan misinya (www.republika.co.id, 2014). Bahkan di Aceh, lembaga otoritas ini telah mengandeng perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Arraniry untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi daerah (economy.okezone.com, 2014).

Perkembangan Jumlah Bank

Sejak dikeluarkannya paket kebijakan yang mempermudah persyaratan pendirian bank dan kantor bank baru, maka pertumbuhan jumlah bank di Aceh dari tahun ke tahun mengalami perubahan ke arah yang positif.

Sebelum tahun 1993, di Aceh hanya beroperasi jenis Bank Umum karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru beroperasi setelah tahun 1993. Pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 jumlah bank dan kantor bank mengalami perkembangan yang relatif tinggi, yaitu terjadi penambahan sebanyak 16 bank dan 61 kantor bank baru yang berdiri di Aceh.

Namun demikian, fluktuasi jumlah bank tidak dapat terhindarkan dari dampak krisis ekonomi yang melanda secara nasional. Hal ini terlihat pada periode tahun 2008-2009, di saat itu terjadi penurunan jumlah bank menjadi 27-29 bank. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, jumlah bank kembali mengalami peningkatan. Kondisi tahun 2013 menunjukkan bahwa di Aceh terdapat sebanyak 35 bank dan 475 kantor bank.

Tabel 11.5.
Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan (Juta Rupiah)
Tahun 1994-2013

Tahun	Bank Umum			Bank Perkreditan Rakyat			Jumlah
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1994	401 187	1 440 507	189 837	1 654	659	2 436	2 036 280
1995	517 928	1 309 531	316 097	2 994	-	-	2 146 550
1996	517 928	1 309 531	316 097	4 760	-	-	2 148 316
1997	530 571	1 866 393	368 805	3 591	578	1 573	2 771 511
1998	583 176	2 683 098	312 889	4 328	513	1 811	3 585 815
1999	492 052	850 920	290 716	8 767	689	2 057	1 645 201
2000	693 662	443 450	435 516	11 748	1 047	2 922	1 588 345
2001	488 245	1 170 546	559 420	13 214	1 196	5 043	2 237 664
2002	738 177	1 881 492	878 078	17 945	1 381	8 116	3 525 189
2003	882 575	1 668 593	989 227	18 502	1 454	9 052	3 569 403
2004	881 099	788 500	1 899 931	16 109	915	5 718	3 592 272
2005	1 169 576	1 059 549	989 227	16 918	1 651	6 356	3 243 277
2006	1 655 596	1 107 916	1 899 164	17 754	2 150	6 485	4 689 065
2007	2 418 570	1 220 297	989 227	17 478	1 970	6 842	4 654 384
2008	3 447 425	1 711 491	1 898 903	55 686	1 839	6 746	7 122 090
2009	4 567 977	1 873 158	989 227	88 118	1 972	3 953	7 524 405
2010	5 792 026	1 757 773	1 897 740	63 894	4 376	7 909	9 523 718
2011	6 845 531	2 499 412	989 227	74 344	8 459	7 617	10 424 590
2012	8 035 788	2 902 301	1 896 516	81 984	10 180	9 133	12 935 902
2013	9 106 525	3 851 938	989 227	97 719	10 211	11 371	14 066 991
2014	8 806 913	3 943 598	1 894 278	97 719	10 211	11 371	14 764 090

Sumber : Bank Indonesia

Selama hampir dua dekade terakhir, jumlah dana kredit yang telah disalurkan oleh bank terus menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 1994 pembiayaan keuangan dalam bentuk kredit oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat hanya mencapai sebesar 2 triliun rupiah. Krisis moneter yang menerpa tidak membendung besarnya dana kredit yang dicairkan. Hal ini terlihat pada tahun 2008-2009 jumlah kredit mencapai lebih dari 7 triliun rupiah.

Bank-bank yang tergolong dalam kategori Bank Umum (Pemerintah dan Swasta Nasional) merupakan penyalur dana kredit yang sangat dominan di Aceh dengan andil lebih dari 98 persen. Sedangkan kelompok BPR hanya mampu merangkul pangsa kredit yang realtif kecil yaitu di bawah 2 persen.

Menurut penggunaanya, nasabah bank di Aceh secara garis besar tergolong kepada penerima kredit untuk modal kerja, investasi, dan untuk konsumsi. Selama kurun waktu tahun 1994-1998, mayoritas penyaluran kredit adalah untuk digunakan sebagai investasi. Sementara untuk periode tahun 2007-2013, penyerapan dana kredit sebagai modal kerja mendominasi distribusi kredit dari perbankan ke masyarakat.

Penyaluran pembiayaan/dana kredit dapat dikelompokkan dalam sektor-sektor perekonomian yang selama ini membentuk perekonomian daerah dan nasional. Sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan dalam kajian penghitungan pertumbuhan ekonomi/PDRB. Tak berbeda dengan kajian tersebut, dalam rekapitulasi kredit perbankan, keempat sektor ekonomi itu juga merupakan sektor yang paling besar nominal penyerapan kreditnya.

Sektor industri pengolahan di Aceh sejak tahun 1994 telah banyak memanfaatkan fasilitas kredit perbankan. Tercatat jumlah kredit pada sektor ini selama periode tahun 1994-1998 telah mencapai kisaran 1-2 triliun rupiah. Berbeda dengan lapangan usaha yang dikategorikan dalam sektor jasa-jasa, selama lima belas tahun terakhir sektor ini belum begitu menggeliat. Terlihat dari alokasi kredit perbankan yang diserap dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010 hanya berkisar 10-400 miliar rupiah. Namun selama kurun waktu tahun 2011-2013, sektor jasa-jasa mulai bangkit. Serapan dana kredit sektor ini dalam waktu tersebut adalah 1,9-2,6 triliun rupiah.

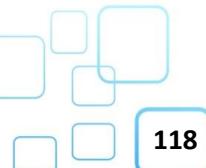
Tabel 4.12.3
Jumlah Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah)
Tahun 1994-2013

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1994	469 993	518	980 519	1 088	129 046	182 023	22 466	57 658	124 658	1 967 969
1995	486 964	359	875 220	1 334	141 183	183 235	40 210	68 720	263 601	2 060 826
1996	494 856	457	775 179	4 244	164 908	239 697	52 822	98 001	317 652	2 147 816
1997	557 837	471	1 206 655	4 806	176 518	276 346	53 954	124 193	370 731	2 771 511
1998	797 348	605	1 923 767	4 264	142 572	241 929	37 525	125 455	313 102	3 586 567
1999	471 305	243	521 089	3 617	45 495	213 149	9 621	87 595	293 087	1 645 201
2000	414 511	294	363 666	3 061	38 196	195 138	6 873	68 357	498 248	1 588 344
2001	419 345	3 872	824 225	3 838	48 688	210 668	7 628	58 638	660 763	2 237 665
2002	356 453	12 200	1 737 589	5 720	57 696	327 846	20 836	86 212	899 964	3 504 516
2003	256 098	12 369	1 655 736	31 479	144 739	311 171	34 150	88 946	1 034 713	3 569 401
2004	158 872	942	916 693	843	186 313	501 726	28 391	162 270	1 932 892	3 888 942
2005	146 922	378	1 019 969	598	308 372	657 653	28 867	131 189	2 426 036	4 719 984
2006	200 499	2 035	1 003 823	18 731	320 093	1 115 369	34 439	198 522	2 931 492	5 825 003
2007	307 141	4 338	1 102 819	13 913	504 378	1 713 105	33 032	323 788	3 887 135	7 889 649
2008	407 135	13 877	971 670	2 393	692 346	2 657 033	47 020	423 050	5 467 936	10 682 460
2009	439 894	31 328	1 035 959	11 691	813 054	3 603 743	60 893	511 971	6 588 694	13 097 227
2010	432 520	67 370	1 645 671	43 975	949 605	3 565 032	58 492	855 404	8 858 361	16 476 430
2011	559 501	132 309	1 682 774	47 897	981 015	3 814 634	148 002	2 061 613	12 043 995	21 471 740
2012	842 040	32 636	2 103 163	133 692	702 912	4 394 559	166 312	2 654 938	12 973 160	24 003 412
2013	1 343 970	163 278	2 876 850	169 873	718 618	5 698 109	123 406	1 972 288	14 178 010	27 244 402

Keterangan:

- 1. Pertanian
- 2. Pertambangan dan Penggalian
- 3. Industri Pengolahan
- 4. Listrik, Gas dan Air
- 5. Konstruksi
- 6. Perdagangan
- 7. Transportasi
- 8. Lembaga Keuangan
- 9. Jasa-jasa

Sumber : Bank Indonesia



b. Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberdayaan ekonomi yang memihak pada kesejahteraan rakyat dan membuka peluang seluas-luasnya akan pemerataan kesempatan berusaha telah diakomodir oleh pemerintah melalui kebijakannya. Salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam undang-undang tersebut telah dipaparkan dengan jelas mengenai kriteria suatu usaha disebut sebagai usaha mikro, usaha kecil sampai dengan usaha menengah. Secara ringkas, ketiga kelompok usaha ini harus berasaskan: kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah adalah dengan mempermudah akses pengusaha pada kelompok ini atas bantuan finansial dari perbankan. Sejak Desember 1973, Bank Indonesia mulai memberlakukan pencairan pendanaan/kredit melalui skim Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Tidak hanya memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk kredit, pemerintah juga memfasilitasi pengusaha kecil dengan berbagai pelatihan teknis untuk semakin mendukung kelancaran usaha/produktivitas.

Tabel 11.7.
Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut Jenis Penggunaan (Jutaan Rupiah) Tahun 1994-2013

Tahun (1)	Bank Umum dan BPR			Jumlah (5)
	Modal Kerja (2)	Investasi (3)	Konsumsi (4)	
1994	252 803	61 765	140 857	455 425
1995	245 472	89 266	205 412	540 150
1996	296 278	135 664	254 102	686 044
1997	332 966	129 443	327 872	790 281
1998	360 587	112 803	270 299	743 689
1999	379 431	87 828	226 551	693 810
2000	221 710	104 058	370 451	696 219
2001	217 149	101 210	406 769	725 128
2002	407 869	46 347	487 838	942 054
2003	507 832	83 977	730 861	1 322 670
2004	701 822	198 613	1 896 333	2 796 768
2005	810 447	133 928	2 416 663	3 361 038
2006	1 317 328	213 169	2 923 266	4 453 763
2007	1 997 187	387 593	3 878 456	6 263 236
2008	3 143 168	475 456	5 459 559	9 078 183
2009	4 005 327	653 680	6 556 848	11 215 855
2010	4 872 193	581 083	8 538 616	13 991 892
2011	4 844 320	1 005 308	*	5 849 628
2012	5 750 109	644 687	*	6 394 796
2013	5 631 593	1 394 344	*	7 025 937

Sumber : Bank Indonesia

Pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, perkembangan penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah secara dominan adalah untuk modal kerja. Hal ini didukung dengan bermunculannya berbagai jenis kredit dengan skim kredit kecil, diantaranya adalah: kredit candak kulak, kredit mini, kredit umum perdesaan, dan lain-lain. Pemerintah kemudian mewajibkan semua bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan batas minimum 20-25 persen dari keseluruhan kredit yang disalurkan oleh bank.

Namun begitu, sampai dengan tahun 2003, total penyaluran kredit tipe ini tercatat masih di bawah 1 triliun rupiah, sudah termasuk kredit untuk penggunaan sebagai modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Jumlah pangsa penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah kemudian tumbuh dari tahun ke tahun. Dengan dominan penyerapan untuk modal kerja dan konsumsi, jumlah total kredit kategori ini telah menembus angka 5 triliun rupiah sejak tahun 2007. Bahkan pada tahun 2009 berhasil membukukan realisasi kredit di atas 10 triliun rupiah, yaitu 11,22 triliun rupiah.

Tabel 11.8.

**Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1994-2013**

Tahun	PMDN (Juta Rupiah)		PMA (US\$ Ribu)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1985	285 012,03	121 719,06	9 286,00	-
1986	77 380,68	434,40	107 514,00	14 060,55
1987	20 749,54	7 624,00	216 000,00	-
1988	252 302,77	6 368,44	50 000,00	-
1989	154 181,03	9 880,14	561 900,00	-
1990	281 590,53	57 458,21	192 000,00	5 164,00
1991	184 464,34	75 493,34	-	-
1992	1 450 122,31	110,50	324,00	-
1993	301 750,18	43 497,81	528 600,00	-
1994	51 354,64	-	22 887,20	1 800,00
1995	300 066,59	107 328,99	1 624 464,00	-
1996	1 842 665,57	763 818,57	520 472,27	444 803,23
1997	495 717,32	122 766,58	762 525,00	286 272,00
1998	4 411 073,00	41 449,00	54 819,40	1 984,60
1999	162 482,72	70 303,00	53 597,47	-
2000	1 146 961,00	996 948,66	1 222 971,10	15 648,32
2001	64 400,00	-	6 020,00	-
2002	1 170,00	-	48 630,00	-
2003	399 105,71	75 572,94	1 482 450,00	-
2004	768 985,22	3 639 692,18	43 733,00	5,00
2005	24 931,00	108 177,99	2 494,00	-
2006	218 623,55	137 500,00	53 475,50	188,57
2007	772 217,89	-	202 185,00	291 620,74
2008	26 000,00	26 000,00	1 483 571,60	445 721,48
2009	42 400,00	79 661,77	419 000,00	159 081,79
2010	1 007 369,39	442 960,51	217 265,42	8 678,81
2011	9 109 836,57	865 668,35	951 131 777,09	318 444,79
2012	3 764 754,63	-	68 383,00	-
2013	4 884 068,50	3 555 676,60	135 792,20	165 101,50

Sumber: Badan Investasi dan Promosi Aceh

Data investasi di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun menunjukkan capaian yang beragam baik dari segi penanaman modal dalam negeri maupun asing. Kondisi keamanan yang kondusif dan iklim usaha yang baik tentu saja dijadikan faktor penimbang bagi para investor ketika melirik Aceh sebagai ladang investasi usaha. Namun, tidak semua rencana realisasi yang telah disetujui oleh pemerintah Aceh dapat terealisasikan dengan maksimal. Bahkan di tahun 2001, 2002, dan 2012 rencana penanaman modal baik PMDN maupun PMA tidak dapat direalisasikan sama sekali.

Penanaman Modal

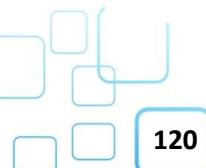
Pelaksanaan program-program pembangunan tidak dapat terpisahkan dari berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan tentu saja sumber daya modal. Modal (*capital*) sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan bersumber dari investasi dari dalam negeri maupun yang sumbernya berasal dari luar negeri/asing.

Pemerintah dalam hal pengaturan penanaman modal telah merumuskan sebuah peraturan/kebijakan melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007. Menurut undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berbeda halnya dengan penanaman modal asing (PMA), yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Secara garis besar, tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari segi bidang usaha, yang diatur menurut undang-undang yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan. Jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.

Demi memastikan kelancaran dan kenyamanan para penanam modal, pemerintah melalui undang-undang juga telah mengatur hak dan kewajiban bagi penanam modal. Para investor berhak mendapat kepastian hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan serta berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kewajiban penanam modal diantaranya adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal serta tentu saja harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

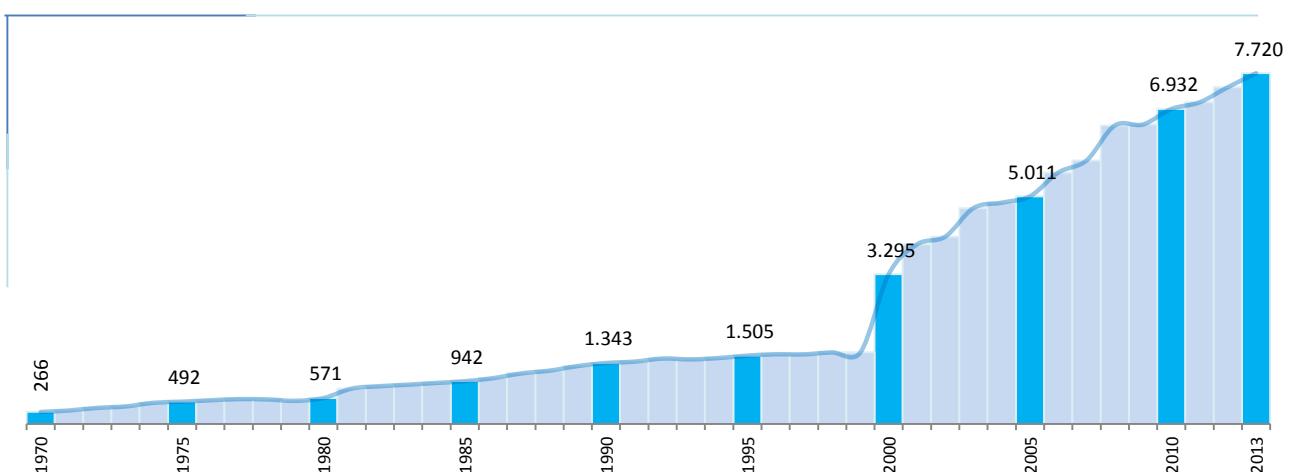


Tabel 11.9.
Banyaknya Koperasi dan Anggota Koperasi
Tahun 1969-2013

Tahun (1)	Banyaknya Koperasi (Unit)		Banyaknya Anggota (Orang) (3)
	(2)	(3)	
1969	216	29 187	
1970	266	33 618	
1971	298	37 134	
1972	356	39 492	
1973	387	43 780	
1974	468	45 228	
1975	492	46 137	
1976	523	48 145	
1977	549	48 446	
1978	542	53 241	
1979	511	50 368	
1980	571	54 620	
1981	779	63 238	
1982	833	81 481	
1983	866	99 398	
1984	905	118 911	
1985	942	120 484	
1986	1 009	126 191	
1987	1 114	133 367	
1988	1 175	177 255	
1989	1 276	205 063	
1990	1 343	217 181	
1991	1 373	230 211	
1992	1 441	239 424	
1993	1 423	247 366	
1994	1 453	306 377	
1995	1 505	356 792	
1996	1 536	370 842	
1997	1 534	271 469	
1998	1 577	278 264	
1999	1 577	278 264	
2000	3 295	404 206	
2001	3 953	428 200	
2002	4 123	424 532	
2003	4 752	703 350	
2004	4 872	423 061	
2005	5 011	441 494	
2006	5 533	450 537	
2007	5 800	485 254	
2008	6 570	494 564	
2009	6 592	505 412	
2010	6 932	528 953	
2011	7 079	458 913	
2012	7 412	498 239	
2013	7 720	500 956	

Sumber: Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Gambar 11.3.
Banyaknya Koperasi (Unit) Tahun 1969 - 2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1969-2014)

Tabel 11.10.

Nilai Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi
Tahun 1969-2013

Tahun	Nilai Usaha (Juta Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1969	3 215	225
1970	5 624	155
1971	6 535	234
1972	8 062	315
1973	11 281	308
1974	15 216	436
1975	14 916	395
1976	15 112	368
1977	17 175	405
1978	16 256	473
1979	15 622	651
1980	21 053	728
1981	40 412	547
1982	57 586	1 083
1983	67 087	1 116
1984	56 186	825
1985	56 096	814
1986	67 716	986
1987	69 569	1 043
1988	58 628	1 459
1989	51 229	1 747
1990	52 797	1 852
1991	55 405	1 907
1992	68 033	1 803
1993	83 429	1 866
1994	49 932	3 347
1995	145 616	3 417
1996	232 876	10 271
1997	260 396	11 635
1998	229 691	7 954
1999	229 691	7 954
2000	254 938	11 376
2001	279 732	11 198
2002	818 518	31 791
2003	485 154	83 269
2004	222 598	16 458
2005	280 689	24 197
2006	838 094	56 829
2007	823 975	163 159
2008	1 054 440	383 343
2009	711 562	52 788
2010	611 010	73 531
2011	601 510	41 242
2012	612 116	34 624
2013	1 553 971	116 858

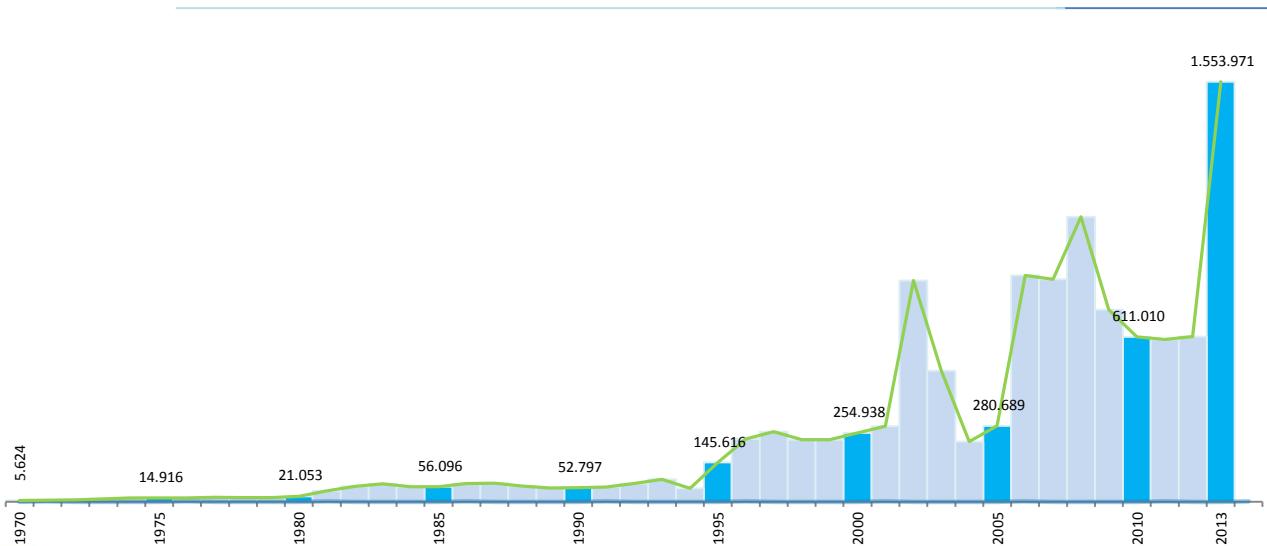
Sumber: Aceh Dalam Angka (1969-2014)

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Semakin tinggi SHU koperasi berarti semakin tinggi pendapatan yang diperoleh koperasi.

SHU terkait dengan nilai usaha yang dikelola koperasi, semakin besar nilai usaha yang dikelola koperasi, maka semakin tinggi pula SHU yang dihasilkan untuk selanjutnya dibagikan ke anggota berdasarkan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota.

Tabel 11.10 menunjukkan perkembangan nilai usaha dan SHU koperasi di Provinsi Aceh sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2013. Terlihat bahwa baik nilai usaha maupun SHU koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan hal yang positif, artinya koperasi semakin dipercaya untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari anggotanya. Nilai usaha terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,55 triliun dengan SHU sebesar 116,89 miliar. Apabila SHU tersebut dibagikan kepada anggota koperasi sebanyak 500.956 anggota, maka rata-rata setiap anggota akan mendapatkan SHU sebesar Rp 233.270.

Tabel 11.4.
Nilai Koperasi (Juta Rupiah)
Tahun 1969 - 2013



Sumber: Aceh Dalam Angka (1969-2014)

KEPENDUDUKAN

Penduduk yang memiliki peran dalam pembangunan dapat dipandang sebagai potensi maupun beban bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan berkualitas dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Sebaliknya, penduduk yang tidak berkualitas dapat menjadi beban bagi pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Aceh diutntut untuk mampu mengelola masalah kependudukan sehingga penduduk yang ada dapat menjadi potensi yang mempercepat arah pembangunan di Provinsi Aceh.

Pembangunan Aceh yang telah berjalan selama 57 tahun sejak tahun 1956 sampai tahun 2013 tentunya juga telah memberikan warna bagi kualitas penduduknya. Keberhasilan pembangunan Aceh akan tercermin dari kehidupan masayarakatnya seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Jumlah Penduduk

Pergerakan penduduk yang dinamis selalu dipengaruhi oleh banyak komponen. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya turut serta dalam mengubah wajah kependudukan suatu wilayah. Aceh sebagai provinsi yang berada di ujung paling barat Indonesia juga mengalami dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Konflik yang berkepanjangan serta bencana alam gempa bumi dan tsunami yang telah meluluh lantakan Aceh juga memberikan dampak terhadap kondisi kependudukannya.

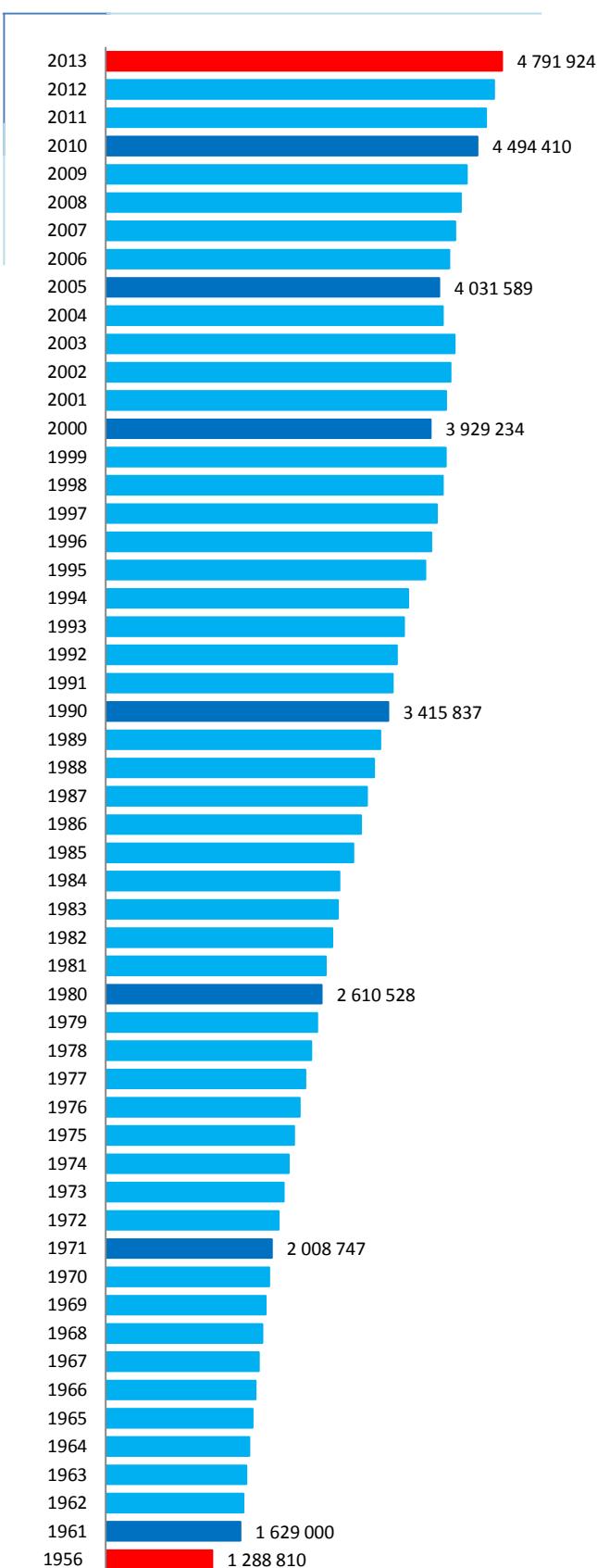
Pergerakan kondisi kependudukan ditandai dengan perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta komposisi dan distribusi penduduk di Provinsi Aceh. Perubahan tersebut juga dipengaruhi pertumbuhan alami penduduk yaitu tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan penduduk masuk akan meningkatkan jumlah penduduk, sebaliknya kematian dan penduduk keluar akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.

Tabel 12.1.
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk
Tahun 1956-2013

Tahun	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1956	-	-	1.288.810	-	23
1961	822.165	806.835	1.629.000	101,90	29
1962	839.830	824.170	1.664.000	101,90	29
1963	857.949	841.951	1.699.900	101,90	30
1964	876.478	860.136	1.736.614	101,90	31
1965	895.428	878.732	1.774.160	101,90	31
1966	914.808	897.750	1.812.558	101,90	32
1967	934.627	917.200	1.851.827	101,90	33
1968	954.897	937.093	1.891.990	101,90	33
1969	975.629	957.437	1.933.066	101,90	34
1970	996.687	978.102	1.974.789	101,90	35
1971	1.011.151	997.596	2.008.747	101,36	35
1972	1.052.041	1.037.937	2.089.978	101,36	37
1973	1.082.870	1.068.354	2.151.224	101,36	38
1974	1.114.334	1.099.396	2.213.730	101,36	39
1975	1.136.322	1.141.468	2.277.790	99,55	40
1976	1.157.111	1.186.193	2.343.304	97,55	41
1977	1.192.852	1.219.282	2.412.134	97,83	42
1978	1.233.889	1.249.149	2.483.038	98,78	44
1979	1.267.242	1.289.401	2.556.643	98,28	45
1980	1.314.905	1.295.623	2.610.528	101,49	46
1981	1.332.726	1.326.607	2.659.333	100,46	47
1982	1.373.662	1.363.628	2.737.290	100,74	48
1983	1.403.647	1.402.843	2.806.490	100,06	49
1984	1.406.450	1.418.035	2.824.485	99,18	50
1985	1.492.606	1.499.595	2.992.201	99,53	53
1986	1.537.370	1.549.998	3.087.368	99,19	54
1987	1.569.828	1.588.175	3.158.003	98,84	56
1988	1.616.291	1.629.055	3.245.346	99,22	57
1989	1.650.241	1.669.851	3.320.092	98,83	58
1990	1.716.994	1.698.843	3.415.837	101,07	60
1991	1.735.920	1.733.850	3.469.770	100,12	61
1992	1.757.710	1.761.812	3.519.522	99,77	62
1993	1.798.970	1.805.788	3.604.758	99,62	63
1994	1.824.465	1.832.613	3.657.078	99,56	64
1995	1.931.200	1.931.600	3.862.800	99,98	68
1996	1.966.900	1.967.100	3.934.000	99,99	69
1997	2.002.200	2.002.400	4.004.600	99,99	71
1998	2.037.300	2.037.600	4.074.900	99,99	72
1999	2.072.500	2.037.600	4.110.100	101,71	72
2000	1.974.567	1.954.667	3.929.234	101,02	69
2001	2.060.427	2.053.573	4.114.000	100,33	72
2002	2.090.220	2.075.820	4.166.040	100,69	73
2003	2.119.593	2.098.893	4.218.486	100,99	74
2004	2.031.849	2.043.750	4.075.599	99,42	72
2005	2.005.763	2.025.826	4.031.589	99,01	71
2006	2.066.187	2.087.386	4.153.573	98,98	73
2007	2.101.415	2.122.418	4.223.833	99,01	74
2008	2.136.058	2.157.857	4.293.915	98,99	76
2009	2.171.388	2.192.089	4.363.477	99,06	77
2010	2.248.952	2.245.458	4.494.410	100,16	79
2011	2.300.441	2.296.867	4.597.308	100,16	81
2012	2.347.002	2.346.932	4.693.934	100,00	83
2013	2.397.194	2.394.730	4.791.924	100,10	84

Sumber : Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus, Proyeksi Penduduk, dan Aceh Dalam Angka

Gambar 12.1.
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tahun 1956-2013



Sumber : Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus,
Proyeksi Penduduk, dan Aceh Dalam Angka

Sejak pertama kali didirikan sampai 57 tahun usianya, jumlah penduduk Provinsi Aceh telah bertambah sekitar 3,5 juta jiwa. Pada saat berdiri di tahun 1956 jumlah penduduk Aceh sebesar 1.288.810 jiwa dan telah berkembang 3,72 kali lipat menjadi 4.791.924 jiwa pada tahun 2013. Dengan demikian selama kurun 57 tahun rata-rata pertumbuhan penduduk Aceh per tahun mencapai 4,77 persen.

Jika diperhatikan lebih lanjut, jumlah penduduk di Provinsi Aceh terus mengalami penambahan dari tahun 1956 sampai 2013. Namun demikian, terdapat tiga kali penurunan jumlah penduduk di Provinsi Aceh yang terjadi pada tahun 2000, 2004 dan 2005. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Aceh mengalami penurunan dikarenakan tahun ini merupakan puncak dari konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia. Banyak penduduk yang menjadi korban konflik sehingga mengakibatkan jumlah penduduk tahun 2000 lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk tahun 1999. Pengurangan jumlah penduduk pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian yang tinggi ditambah dengan perpindahan penduduk keluar Provinsi Aceh untuk mengungsi dari keadaan konflik. Sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 penurunan jumlah penduduk dikarenakan terjadi bencana alam yang amat dahsyat yaitu gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh. Tetapi selain akibat kejadian luar biasa, jumlah penduduk di Provinsi Aceh akan terus semakin bertambah.

Merujuk angka *sex ratio* (rasio jenis kelamin) sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 2013, terlihat *sex ratio* Aceh terendah terjadi pada tahun 1976 dengan *sex ratio* sebesar 97,5 dan tertinggi pada kurun waktu 1961-1970 dengan *sex ratio* sebesar 101,9. Sehingga dapat diartikan pada tahun 1976 perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan sekitar 97 sampai 98 orang penduduk laki-laki dari 100 orang penduduk perempuan dengan kata lain lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Sebaliknya, pada kurun waktu 1961-1970 dari 100 orang perempuan terdapat 101 sampai 102 orang laki-laki atau lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada saat ini *sex ratio* Aceh sebesar 100,1 yang artinya perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2013 relatif sama atau seimbang.

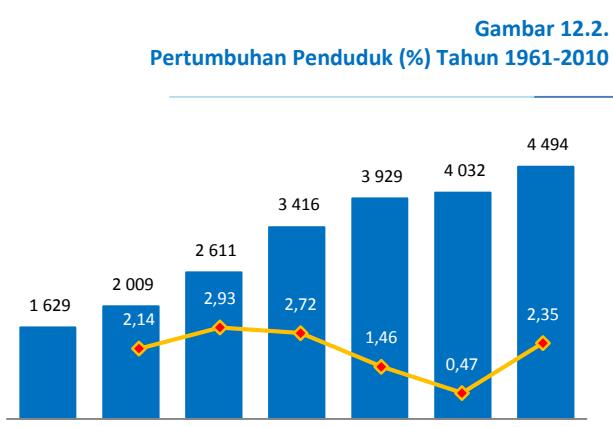
Penambahan jumlah penduduk Aceh akan memberikan dampak pada meningkatkan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun. Dengan luas wilayah sebesar 56.772 km² kepadatan penduduk di Provinsi Aceh pada tahun 1956 sebesar 23 jiwa per km². Seiring dengan bertambahnya waktu, rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Aceh meningkat sehingga mencapai 84 jiwa per km² pada tahun 2013. Berarti, dalam kurun waktu 57 tahun terjadi peningkatan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 61 per Km² di Provinsi Aceh.

Laju Pertumbuhan Penduduk Antar Sensus

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus, Badan Pusat Statistik telah diamanatkan untuk menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sensus Penduduk dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran dengan angka 0, kecuali untuk tahun 1961 dan 1971. Di Indonesia Sensus Penduduk sudah dilaksanakan sebanyak enam kali yaitu Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten Nias, Sensus Penduduk sudah dilaksanakan tujuh kali dimana pada tahun 2005 diselenggarakan Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang khusus dilakukan setelah terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di daerah ini.

Laju pertumbuhan Penduduk Antar Sensus di Provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan data yang selalu menurun. Pada awalnya di kurun waktu 1961-1971 laju pertumbuhan penduduk Aceh sebesar 2,14 persen per tahun yang kemudian naik menjadi 2,93 persen per tahun di kurun waktu 1971-1980. Berturut-turut dari kurun waktu 1980-1990, 1990-2000, 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk Aceh cenderung turun dari 2,72 persen menjadi 1,46 persen dan terakhir 0,47 persen per tahun. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk Aceh kembali meningkat menjadi sebesar 2,35 persen per tahun pada kurun waktu 2005-2010.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1980-2005 dikarenakan keberhasilan program Keluarga Berencana yang telah dicanangkan secara nasional. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak dapat dipertahankan mengingat laju pertumbuhan penduduk Aceh kembali meningkat pada kurun 2005-2010. Oleh sebab itu penting bagi Pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali program pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana (KB) untuk membatasi jumlah kelahiran.



Sumber : Aceh Dalam Angka

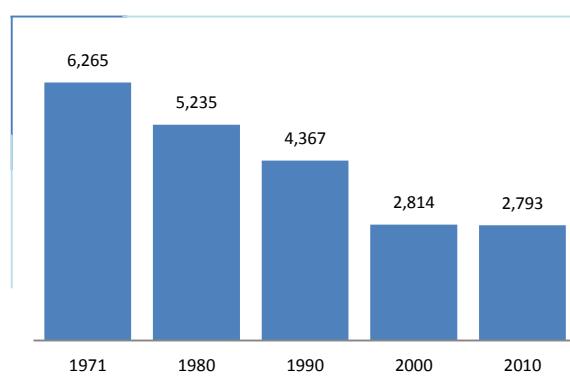
Fertilitas

Dalam dinamika kependudukan, fertilitas atau tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan penduduk secara alamiah. Tingkat kelahiran yang tinggi akan menambah jumlah penduduk sehingga mempercepat laju pertumbuhan penduduk. sebaliknya, tingkat kelahiran yang rendah akan melambatkan laju pertumbuhan penduduk.

Terdapat beberapa ukuran fertilitas antara lain Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate), Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate), dan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate). Dari ketiga ukuran tersebut ASFR dan TFR merupakan ukuran fertilitas yang paling sering digunakan karena dianggap lebih baik angkanya apabila dibandingkan dengan CBR. Ketika CBR hanya menghitung perbandingan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan, ASFR dan TFR sudah memperhitungkan pembandingnya adalah penduduk perempuan berusia 15 – 49 tahun.

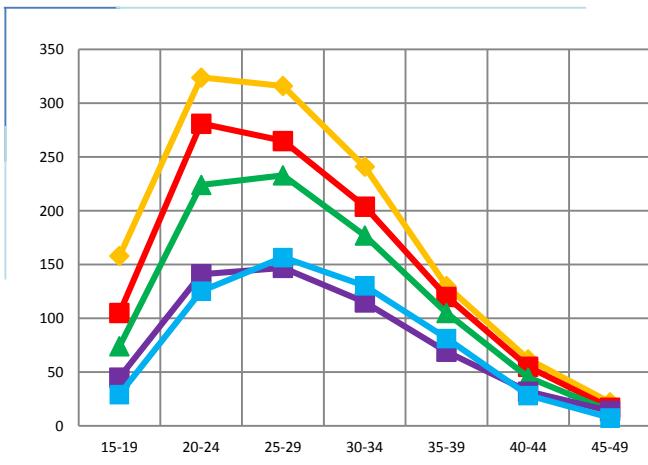
Memperhatikan grafik TFR sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010, TFR Provinsi Aceh mengalami penurunan TFR dari waktu ke waktu. Pada tahun 1971 TFR di Provinsi Aceh sebesar 6,27 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya di Provinsi Aceh pada tahun 1971 sebanyak 6 sampai 7 orang anak. Pada tahun 2010 TFR Provinsi Aceh sebesar 2,79 per 1.000 kelahiran hidup. Sepanjang 39 tahun Aceh mampu menekan angka kelahiran sekitar 3,48 anak per 1.000 kelahiran hidup dari seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Namun demikian, penurunan TFR yang cukup pesat dari tahun 1971 ke tahun 2000 tidak dapat dilanjutkan di tahun 2010. Hal ini tercermin dari angka TFR yang stagnan 2,81 pada tahun 2000 menjadi 2,79 di tahun 2010. Kondisi ini dapat disikapi dengan menggalakkan kembali program Keluarga Berencana yang sudah pernah berhasil dilaksanakan pada kurun waktu sebelum tahun 2000. Pengendalian penduduk menggunakan program Keluarga Berencana terbukti sangat efektif dalam menurunkan TFR sejak tahun 1971 sampai tahun 2000.

Gambar 12.3.
Perkembangan TFR Tahun 1971-2010



Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 12.4.
Perkembangan ASFR Tahun 1971-2010



Sumber : Aceh Dalam Angka

Pernikahan Adat Aceh



Tabel 12.2.
Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 1971 – 2010

Tahun	IMR		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
SP 1971	155	131	143
SP 1980	102	85	93
SP 1990	65	52	58
SP 2000	46	35	40
SP 2010	32	24	28

Sumber : Aceh Dalam Angka

Melihat angka kematian bayi berdasarkan jenis kelamin, baik bayi laki-laki maupun perempuan keduanya mengalami penurunan IMR sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010. Namun demikian, untuk bayi laki-laki IMRnya selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IMR bayi perempuan sejak tahun 1971 sampai dengan 2010. Walaupun Sex Ratio at Birth bayi laki-laki lebih besar dari perempuan (105), tetapi ternyata bayi perempuan lebih mampu bertahan hidup di masa usia kurang dari satu tahun dibandingkan bayi laki-laki, terbukti dengan IMR bayi perempuan yang lebih rendah dibandingkan IMR bayi laki-laki..

Melihat perkembangan ASFR Provinsi Aceh sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 terlihat bahwa kecenderungan tingkat kelahiran semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik ASFR tahun 1971 yang berada pada tingkat paling tinggi dibanding grafik tahun setelahnya yang perlahan-lahan semakin menurun. Penurunan tingkat kelahiran ini harus dapat dipertahankan agar tidak terjadi peningkatan penduduk yang tidak terkendali di masa yang akan datang.

Memperhatikan kelahiran berdasarkan kelompok umur, pada setiap tahun sensus, perempuan kelompok umur 20 – 24 adalah yang paling banyak melahirkan. Hal ini terlihat dari puncak grafik yang berada di kelompok umur perempuan usia 20 – 24 tahun. Namun, pada tahun 2010 puncak grafik telah bergeser ke kelompok umur perempuan usia 25 – 29 tahun. Yang artinya perempuan paling banyak melahirkan di kelompok umur 25 – 29 tahun pada tahun 2010. Pergeseran puncak grafik ASFR menandakan bahwa telah terjadi penundaan usia kehamilan perempuan di Provinsi Aceh yang kemungkinan besar dikarenakan semakin tingginya rata-rata usia perkawinan.

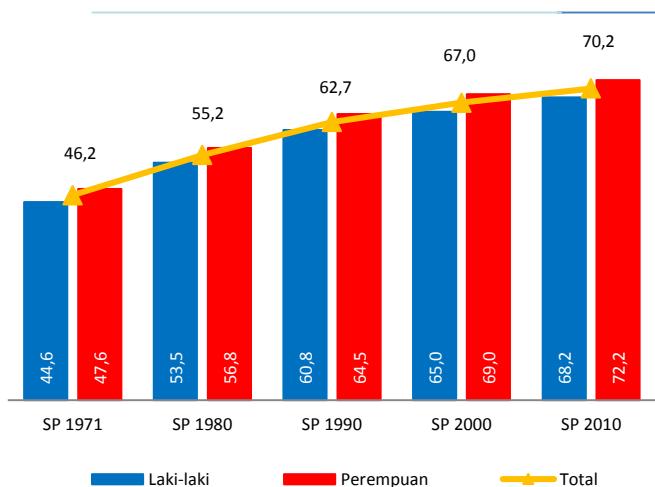
3. Mortalitas

Tingkat kematian merupakan indikator yang dapat menjelesakan kondisi kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kematian maka akan semakin buruk kondisi kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduknya, sebaliknya semakin rendah tingkat kematian maka semakin baik kondisi kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduknya.

Dengan memperhatikan angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) yang terjadi di Aceh sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup besar. Pada tahun 1971 IMR Aceh sebesar 143 bayi di bawah umur satu tahun mengalami kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut dapat ditekan hingga mencapai 28 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini merupakan hal yang menggembirakan karena dapat memberikan gambaran bahwa tingkat kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduk Aceh mengalami peningkatan.

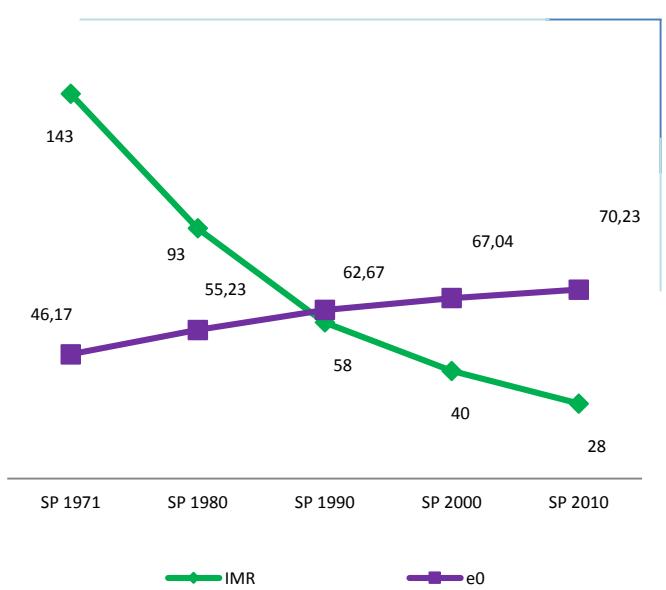


Gambar 12.5.
Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1971 – 2010



Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 12.6.
IMR dan e0 Tahun 1971 – 2010



Sumber : Aceh Dalam Angka

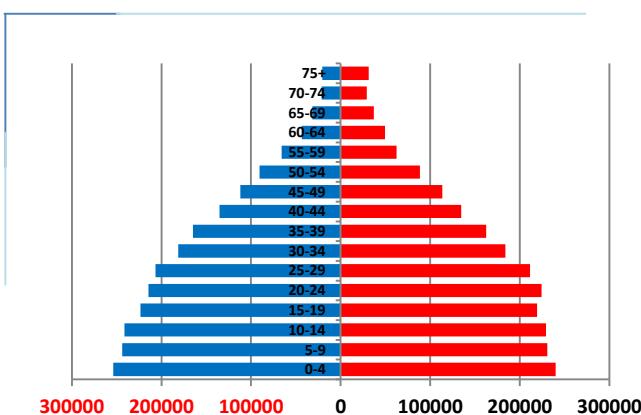
Perbaikan kondisi kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduk di Provinsi Aceh mengakibatkan peningkatan angka harapan hidup penduduknya. Berdasarkan data Sensus Penduduk mulai dari tahun 1971 sampai dengan 2010, terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 24 tahun. Pada tahun 1971 angka harapan hidup penduduk Aceh sebesar 46,2 tahun dan naik menjadi 70,2 tahun pada tahun 2010.

Lebih lanjut, kenaikan angka harapan hidup juga sama-sama dirasakan oleh penduduk perempuan maupun penduduk laki-laki. Angka harapan hidup laki-laki pada tahun 1971 sebesar 44,6 tahun naik menjadi 68,2 tahun pada tahun 2010. Sedangkan untuk perempuan angka harapan hidup pada tahun 1971 sebesar 47,6 tahun naik menjadi 72,2 tahun pada tahun 2010.

Apabila kita bandingkan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa penduduk perempuan lebih tinggi angka harapan hidupnya dibandingkan dengan penduduk laki-laki pada setiap tahun sensus. Hal ini dapat disebabkan karena pada masa kehidupan bayi laki-laki sudah mengalami kematian yang lebih banyak daripada bayi perempuan, sehingga angka harapan hidup bagi laki-laki akan lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup perempuan. Salah satu penyebab biologisnya adalah gen. Perempuan memiliki dua kromosom X sedangkan laki-laki hanya memiliki satu, sehingga pada perempuan cacat bawaan yang terkandung dalam mutasi salah satu kromosom bisa di-cover oleh kromosom yang lain yang mengakibatkan bayi perempuan lebih mampu bertahan hidup dibandingkan bayi laki-laki. Faktor biologis lain yang mempengaruhi adalah hormon estrogen yang dimiliki perempuan menjadi salah satu pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung. Sebaliknya, hormon testosteron yang dimiliki laki-laki membuat mereka cenderung untuk melakukan berbagai aktivitas yang membuat jantung bekerja makin keras. Selain itu, laki-laki lebih banyak memiliki faktor risiko dalam hidupnya, karena pekerjaan laki-laki biasanya lebih berbahaya dibandingkan dengan pekerjaan perempuan.

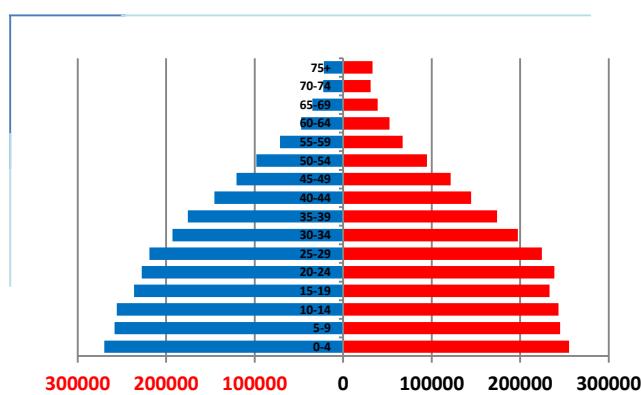
Membandingkan angka kematian bayi dengan angka harapan hidup, terlihat terdapat hubungan terbalik antara angka kematian bayi dengan angka harapan hidup. Semakin rendah angka kematian bayi maka akan semakin tinggi angka harapan hidupnya. Pada tahun 1971 angka kematian bayi sebesar 143 per 1.000 kelahiran hidup menyebabkan angka harapan hidup penduduk Aceh hanya sebesar 46,17 tahun. Sebaliknya penurunan angka kematian bayi pada tahun 2010 yaitu sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup menyebabkan peningkatan angka harapan hidup penduduk Aceh mencapai 70,23 tahun.

Gambar 12.7.
Piramida Penduduk Tahun 2010



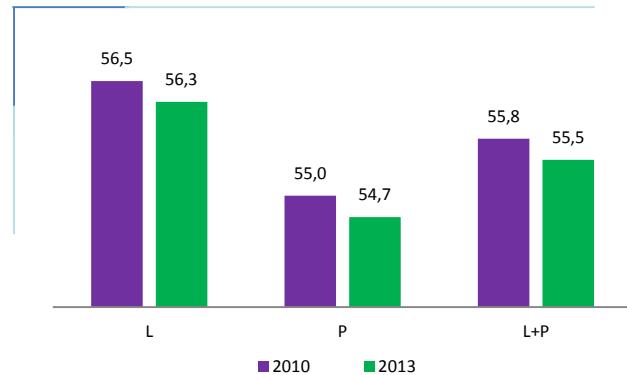
Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 12.8.
Piramida Penduduk Tahun 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 12.9.
Angka Beban Ketergantungan Tahun 2010 dan 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka

Angka beban ketergantungan laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka beban ketergantungan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penduduk perempuan lebih baik dibandingkan potensi penduduk laki-laki. Alasannya, dengan angka beban ketergantungan yang rendah maka jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi sehingga mampu memberi peran dan kontribusi bagi pembangunan

Struktur Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat diperlukan dalam studi kependudukan, karena struktur penduduk mempengaruhi kondisi demografis dan social ekonomi suatu daerah. Membedah struktur penduduk Provinsi Aceh melalui piramida penduduk, terlihat bahwa penduduk di Provinsi Aceh baik pada tahun 2010 maupun pada tahun 2013 didominasi oleh penduduk kelompok umur muda. Hal ini dibuktikan dengan bentuk piramida penduduk yang lebar di kelompok umur muda dan semakin menyempit untuk kelompok umur tua. Piramida penduduk ini keduanya menunjukkan apa yang disebut youth bulge (tonjolan pemuda) yang terjadi di Aceh, yang menekankan pentingnya fokus pada kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak di Provinsi Aceh. Sesuai dengan Piramida Penduduk yang menggambarkan jumlah anak-anak usia 0 – 14 tahun merupakan kelompok usia terbesar dari total jumlah penduduk.

Dari piramida tersebut tercermin bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masa yang akan datang, maka anak-anak di kelompok umur 0 – 14 tahun harus mendapatkan perhatian serius di bidang pendidikan dan kesehatan. Harapannya di masa yang akan datang, penduduk kelompok umur muda ini akan menjadi agen pembangunan yang berkualitas. Sebaliknya, apabila penduduk usia muda ini tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, maka di masa yang akan datang mereka akan menjadi beban bagi pembangunan di daerah.

Melihat angka beban ketergantungan di Provinsi Aceh pada tahun 2010, terlihat bahwa dari 100 orang usia produktif (15 – 64 tahun) harus menanggung 55,8 orang usia tidak produktif (0 – 4 tahun ditambah 65+) dan pada tahun 2013 dari 100 orang usia produktif harus menanggung 55,5 orang usia tidak produktif. Makin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan ciri dari negara berkembang. Pola persebaran penduduk sangat tergantung dari potensi masing-masing daerah. Daerah yang memiliki cukup fasilitas baik sosial, ekonomi, maupun budaya akan menjadi incaran sekelompok penduduk untuk tinggal di daerah tersebut. Oleh karena itu tantangan Pemerintah Aceh untuk dapat mengantisipasi hal tersebut sehingga penumpukan penduduk di suatu daerah dapat dikurangi.

Pada tahun 1956 Provinsi Aceh terbagi menjadi tujuh Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Pidie
3. Kabupaten Aceh Utara
4. Kabupaten Aceh Tengah
5. Kabupaten Aceh Barat
6. Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan peta kepadatan penduduk Provinsi Aceh tahun 1956, terlihat bahwa penduduk di Provinsi Aceh lebih terkonsentrasi di wilayah timur Aceh daripada wilayah tengah, barat, dan selatan. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten dengan penduduk paling padat dengan kepadatan 63 jiwa per km², jauh lebih padat dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang sebesar 23 jiwa per km².

Pada tahun 2013 jumlah kabupaten di Provinsi Aceh telah berkembang menjadi 23 kabupaten/kota yang terdiri dari:

1. Kabupaten Simeulue
2. Kabupaten Aceh Singkil
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kabupaten Aceh Timur
6. Kabupaten Aceh Tengah
7. Kabupaten Aceh Barat
8. Kabupaten Aceh Besar
9. Kabupaten Pidie
10. Kabupaten Bireuen
11. Kabupaten Aceh Utara
12. Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Kabupaten Gayo Lues
14. Kabupaten Aceh Tamiang
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Aceh Jaya
17. Kabupaten Bener Meriah
18. Kabupaten Pidie Jaya
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Sabang
21. Kota Langsa
22. Kota Lhokseumawe
23. Kota Subulussalam

Setelah 57 tahun Aceh didirikan, ternyata pola distribusi penduduknya masih sama. Hal ini dapat dilihat dengan konsentrasi penduduk yang lebih dominan pada wilayah timur Aceh. Pada tahun 2013, kepadatan penduduk di Provinsi Aceh sebesar 84 jiwa per km², dengan Kota Banda Aceh sebagai wilayah terpadat mencapai 4.451 jiwa per km², sedangkan wilayah yang paling tidak padat adalah Kabupaten Gayo Lues dengan kepadatan sebesar 15 jiwa per km².

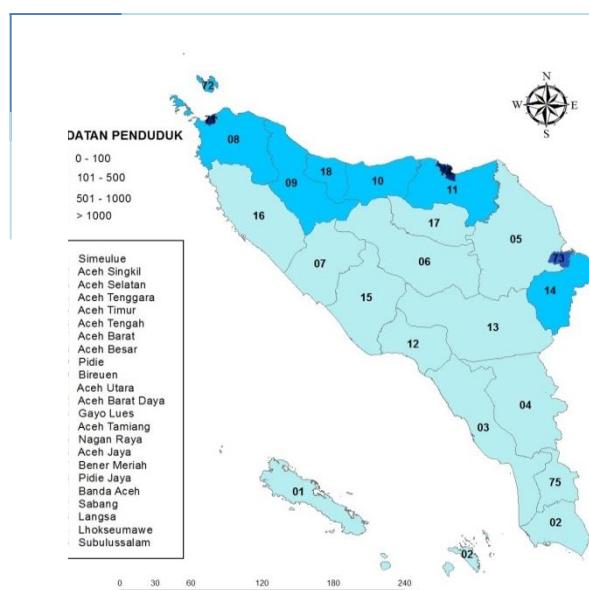
Kondisi ini dapat disikapi oleh pemerintah Aceh dengan melakukan program-program kependudukan yang dapat menyeimbangkan kepadatan penduduk antar wilayah. Jumlah penduduk yang merata di setiap kabupaten/kota dapat mempercepat laju pembangunan di daerah tersebut. Sehingga tidak terdapat lagi ketimpangan pembangunan antara wilayah timur Aceh dengan wilayah barat di Provinsi Aceh.

Gambar 12.10.
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 1956

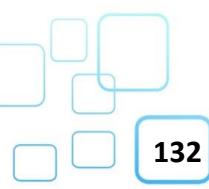


Sumber : Aceh Dalam Angka

Gambar 12.11.
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2013



Sumber : Aceh Dalam Angka



Keadaan Angkatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan perpaduan dari persoalan kependudukan dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, meskipun pertambahan penduduk usia kerja merupakan salah satu konsekuensi pertumbuhan penduduk, tetapi penanganan berbagai macam masalah yang ditimbulkannya tidak hanya melalui kebijakan kependudukan, namun juga mempertimbangkan dan melibatkan faktor ekonomi dan sosial.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Aceh, terjadi peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 1971 – 1998 penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berusia 10 tahun ke atas, sejak tahun 2002 penduduk yang dianggap sebagai usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja akan meningkatkan angkatan kerja yang selanjutnya mempengaruhi pengangguran. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka.

Tabel 12.3.
Penduduk Menurut Kegiatan Utama Tahun 1971-2013

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1971a	644.319	68.565	712.884	1.078.626	1.791.510	9,62	39,79
1980a	832.520	13.896	846.416	959.557	1.805.973	1,64	46,87
1985a	1.091.976	21.505	1.113.481	994.099	2.107.580	1,93	52,83
1990a	1.275.053	36.904	1.311.957	1.152.795	2.464.752	2,81	53,23
1991a	1.331.399	40.630	1.372.029	1.175.441	2.547.470	2,96	53,86
1992a	1.452.849	55.611	1.508.460	1.136.145	2.644.605	3,69	57,04
1993a	1.520.088	73.264	1.593.352	1.125.780	2.719.132	4,60	58,60
1994a	1.461.442	87.801	1.549.243	1.243.037	2.792.280	5,67	55,48
1995a	1.502.875	120.418	1.623.293	1.297.171	2.920.464	7,42	55,58
1996a	1.552.538	106.490	1.659.028	1.286.717	2.945.745	6,42	56,32
1997a	1.578.487	119.223	1.697.710	1.354.123	3.051.833	7,02	55,63
1998a	1.541.024	216.626	1.757.650	1.388.390	3.146.040	12,32	55,87
2002b	1.452.258	149.652	1.601.910	990.322	2.592.232	9,34	61,80
2003b	2.254.155	284.034	2.538.189	1.525.362	4.063.551	11,19	62,46
2004b	1.522.504	156.960	1.679.464	1.018.187	2.697.651	9,35	62,26
2005b	1.541.973	220.241	1.762.214	812.674	2.574.888	12,50	68,44
2006b	1.624.335	189.169	1.813.504	933.799	2.747.303	10,43	66,01
2007b	1.570.761	171.424	1.742.185	1.062.423	2.804.608	9,84	62,12
2008b	1.621.998	171.412	1.793.410	1.179.573	2.972.983	9,56	60,32
2009b	1.732.561	165.361	1.897.922	1.138.837	3.036.759	8,71	62,50
2010b	1.776.254	162.265	1.938.519	1.130.131	3.068.650	8,37	63,17
2011b	1.852.473	148.786	2.001.259	1.136.272	3.137.531	7,43	63,78
2012b	1.798.547	179.944	1.978.491	1.224.473	3.202.964	9,10	61,77
2013b	1.824.586	209.521	2.034.107	1.242.836	3.276.943	10,30	62,07

Catatan : a = penduduk 10 tahun ke atas
b = penduduk 15 tahun ke atas

Sumber : Badan Pusat Statistik

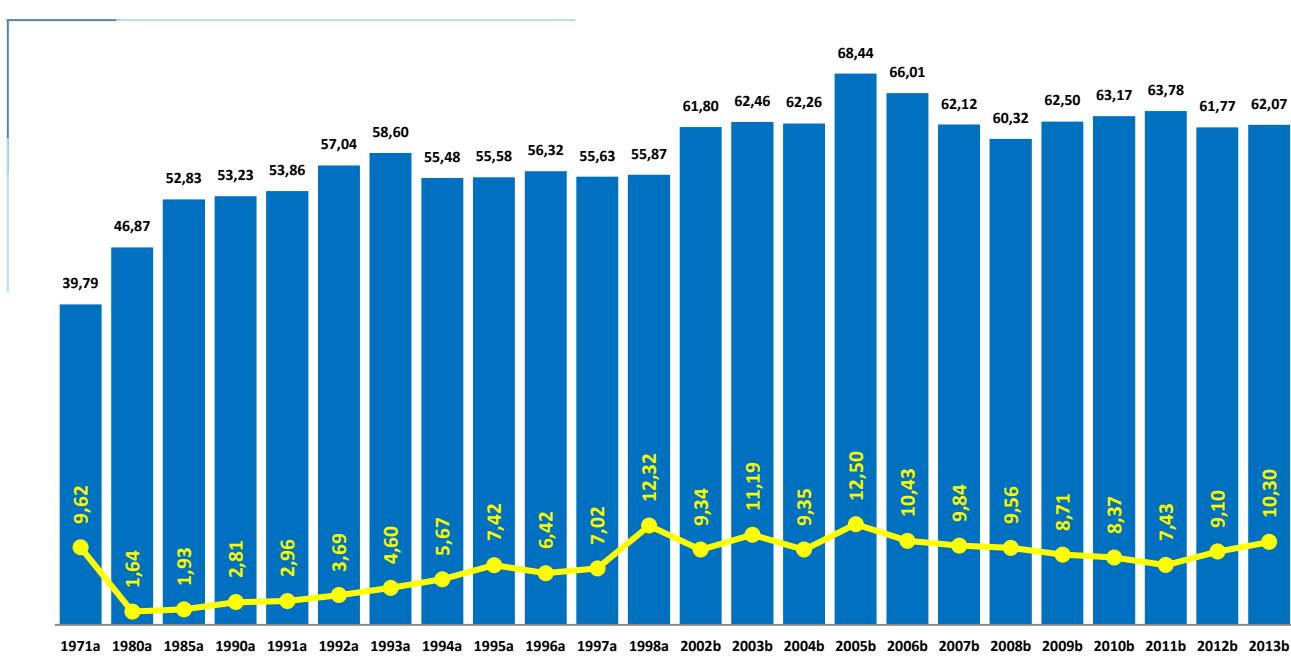
Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk usia kerja yang siap untuk bekerja dan terserap di pasar tenaga kerja, sehingga yang termasuk ke dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sejak tahun 1971 sampai dengan 2013 jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang termasuk sebagai angkatan kerja di Provinsi Aceh sebesar 712.884 jiwa dan meningkat menjadi 1.757.650 jiwa pada tahun 1998. Dengan demikian terjadi peningkatan angkatan kerja usia 10 tahun ke atas rata-rata 5,43 persen per tahun. Kemudian pada tahun 2002 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk sebagai angkatan kerja di Provinsi Aceh sebesar 1.601.910 jiwa bertambah menjadi 2.034.107 jiwa pada tahun 2013. Dengan kata lain rata-rata pertumbuhan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebesar 2,45 persen per tahun.



Gambar 12.12.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 1971 – 2013

Berdasarkan angka Sakernas tahun 1971 – 1998 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi nilai dari 9,62 persen pada tahun 1971 menjadi 12,32 persen pada tahun 1998. Angka pengangguran paling rendah pada periode ini terjadi pada tahun 1980 dengan tingkat pengangguran terbuka hanya sebesar 1,64 persen. Namun sejak tahun 1980 menuju tahun 1998 trend angka pengangguran cenderung meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan angka sebesar 12,32 persen.

Jika pada kurun waktu tahun 1971 – 1998 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh cenderung fluktuatif, maka pada periode tahun 2002 – 2013 angka pengangguran terlihat lebih stabil. Pada tahun 2002 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,34 persen dan pada tahun 2013 menjadi 10,30 persen. Angka pengangguran terendah terjadi pada tahun 2011 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,43 persen. Sedangkan angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,50 persen. Namun demikian, selisih antara TPT tertinggi dan terendah hanya sebesar 5,07 persen. Angka tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan jarak antara TPT tertinggi dan terendah pada periode tahun 1971 – 1998 yang mencapai angka 10,68 persen. Oleh sebab itu dapat dikatakan keadaan ketenagakerjaan pada periode tahun 2002 – 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan ketenagakerjaan pada periode waktu



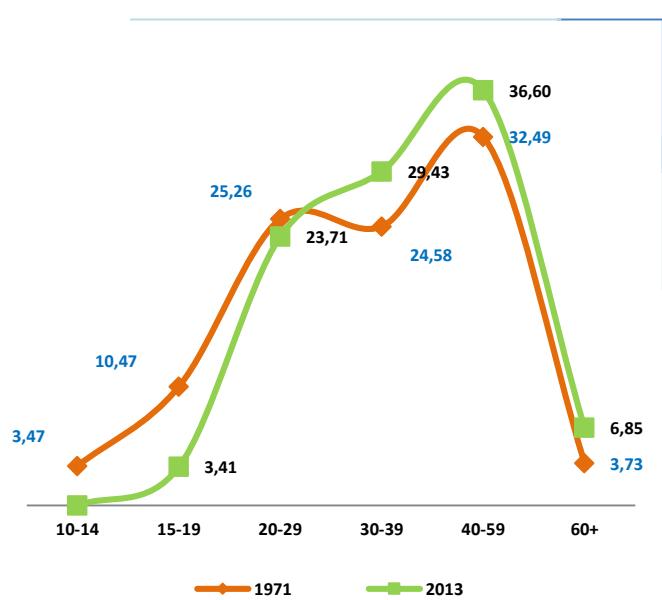
Sumber: Badan Pusat Statistik

TPAK TPT

Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur

Gambar 12.13.
Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur
Tahun 1971 dan 2013

Memperhatikan pola proporsi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa puncak persentase penduduk yang bekerja paling banyak berada di kelompok umur 40 – 59 tahun. Pada tahun 1971 persentase penduduk yang bekerja di kelompok umur 10 – 14 tahun sebesar 3,47 persen kemudian memiliki puncak pada kelompok umur 40 – 59 tahun dengan persentase penduduk yang bekerja sebesar 32,49 persen yang kemudian turun menjadi 3,73 persen untuk kelompok umur 60 tahun ke atas. Memiliki pola yang sama persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2013 paling rendah berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun dengan persentase sebesar 3,41 persen dan puncaknya berada pada kelompok umur 40 – 59 tahun dengan 36,60 persen. Kemudian turun kembali pada kelompok umur 60 tahun ke atas dengan 6,85 persen. Dengan demikian kelompok umur penduduk yang bekerja



Hal yang menggembirakan persentase penduduk yang bekerja di kelompok umur muda (usia sekolah) termasuk rendah. Pada tahun 1971 persentase penduduk yang bekerja di kelompok umur 15 – 19 tahun sebesar 10,47 persen turun menjadi 3,41 persen pada tahun 2013. Keadaan ini menggambarkan bahwa tidak banyak penduduk usia sekolah yang masuk ke dalam dunia kerja, sehingga penduduk usia sekolah benar-benar hanya melakukan kegiatan bersekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk Aceh.

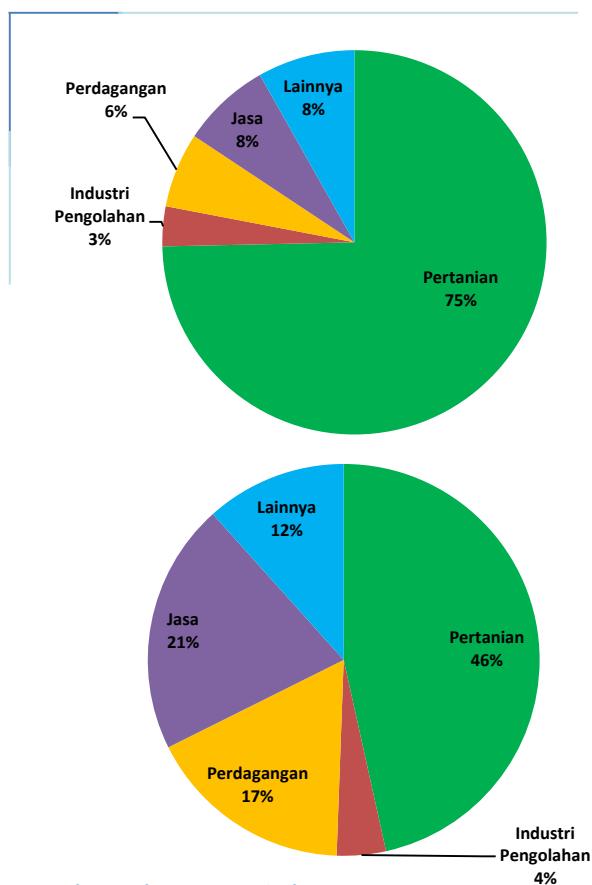
Tabel 12.4.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur (Persen) Tahun 1971 – 2013

Tahun	10-14	15-19	20-29	30-39	40-59	60+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1971a	3,47	10,47	25,26	24,58	32,49	3,73	100,00
1980a	3,11	10,63	27,47	23,10	28,63	7,06	100,00
1985a	4,27	8,99	27,80	24,04	28,00	6,90	100,00
1990a	3,29	10,39	27,05	25,04	27,21	7,02	100,00
1993a	4,49	14,13	29,06	28,62	34,89		111,19
1996a	1,39	9,38	24,96	26,86	30,40	7,01	100,00
1997a	2,34	9,83	24,53	24,98	31,03	7,29	100,00
1998a	3,94	10,30	24,11	23,23	31,67	6,75	100,00
2007b	-	4,10	25,07	28,70	36,04	6,09	100,00
2008b	-	4,75	25,83	27,83	33,75	7,84	100,00
2009b	-	4,27	26,63	27,54	33,97	7,59	100,00
2010b	-	3,67	25,14	29,32	34,97	6,89	100,00
2011b	-	4,47	26,15	29,01	34,74	5,62	100,00
2012b	-	3,77	24,03	30,08	35,51	6,60	100,00
2013b	-	3,41	23,71	29,43	36,60	6,85	100,00

Catatan : a = penduduk 10 tahun ke atas
b = penduduk 15 tahun ke atas

Sumber :

Gambar 12.14.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 1971-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa mayoritas penduduk yang bekerja (tahun 1971 dan 2013) pada lapangan usaha pertanian. Pada tahun 1971, sebanyak 75 persen penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian. Dengan kata lain, 3 dari 4 orang penduduk yang bekerja di Aceh menggantungkan hidup pada lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2013 jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian berkurang menjadi hanya 46 persen. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Keadaan ini memberikan gambaran, bahwa lapangan usaha pekerja yang awalnya mayoritas pada sektor pertanian mulai mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Terbukti dengan menurunnya persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian dan semakin tingginya persentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Melihat gambar di samping banyak penduduk yang berpindah lapangan usaha dari pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Peningkatan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan mencapai 11 persen dan sektor jasa mencapai 12 persen apabila dibandingkan sejak tahun 1971 ke tahun 2013.

Tabel 12.5.
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1971 – 2013

Tahun	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1971a	481.054	21.590	40.664	48.267	52.744	644.319
1980a	588.645	32.826	65.797	99.047	46.205	832.520
1985a	742.118	48.378	119.808	127.693	53.970	1.091.967
1990a	835.381	67.004	130.628	139.609	102.431	1.275.053
1991a	885.052	75.820	138.237	146.977	85.313	1.331.399
1992a	1.013.934	57.001	123.568	159.121	99.225	1.452.849
1993a	1.001.405	62.225	153.608	181.260	121.560	1.520.058
1994a	932.713	65.088	160.471	194.987	108.183	1.461.442
1995a	921.864	92.878	167.571	203.940	116.622	1.502.875
1996a	917.538	89.115	198.059	226.128	121.698	1.552.538
1997a	933.833	86.975	213.569	226.513	117.597	1.578.487
1998a	924.876	90.144	196.773	231.553	97.698	1.541.044
2006b	542.518	7.173	74.088	32.109	394.791	1.050.679
2007b	780.344	75.812	248.516	257.688	208.401	1.570.761
2008b	786.198	86.762	252.853	282.749	213.436	1.621.998
2009b	847.095	80.772	264.453	331.508	208.733	1.732.561
2010b	809.788	77.828	314.323	361.971	212.344	1.776.254
2011b	898.225	72.509	299.183	358.704	223.852	1.852.473
2012b	842.866	73.844	282.455	353.716	245.666	1.798.547
2013b	848.932	73.877	311.346	378.077	212.354	1.824.586

Catatan : a = penduduk 10 tahun ke atas
b = penduduk 15 tahun ke atas

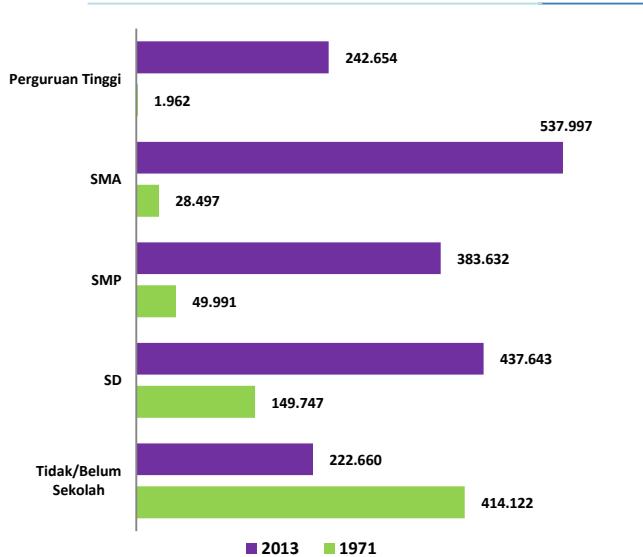
Sumber :

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi

Kualitas pekerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk yang bekerja. **Asumsinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi produktivitas kerjanya.** Sehingga diharapkan semakin tahun tingkat pendidikan pekerja semakin tinggi.

Pada tahun 1971 penduduk yang bekerja masih didominasi oleh penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah dengan jumlah pekerja mencapai 414.122 jiwa atau sekitar 64,27 persen dari total penduduk yang bekerja. Sebaliknya jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan perguruan tinggi hanya sekitar 1.962 jiwa atau sekitar 0,30 persen.

Gambar 12.15.
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Tahun 1971 dan 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sepanjang tahun 1971 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan tingkat pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh. Pada tahun 1971 pekerja Aceh paling banyak tidak/belum sekolah sedangkan pada tahun 2013 pekerja Aceh paling banyak berpendidikan SMA dengan jumlah pekerja mencapai 537.997 jiwa atau sekitar 29,49 persen dari total penduduk yang bekerja dan pekerja dengan pendidikan tidak/belum sekolah semakin mengecil dengan jumlah 222.660 jiwa atau sekitar 13,30 persen. Dengan demikian telah terjadi peningkatan kualitas pekerja di Provinsi Aceh sepanjang 57 tahun usianya.

Tabel 12.6.

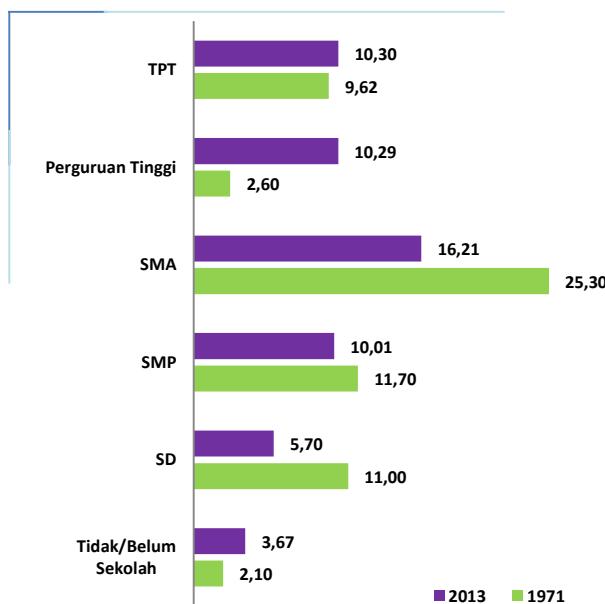
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 1971 – 2013

Tahun (1)	Tidak/Belum Sekolah (2)	SD (3)	SMP (4)	SMA (5)	Perguruan Tinggi (6)	Jumlah (7)
1971a	414.122	149.747	49.991	28.497	1.962	644.319
1980a	218.862	309.672	57.902	51.468	4.162	642.066
1985a	166.779	651.881	138.703	100.505	13.832	1.071.700
1990a	528.197	387.829	163.399	167.635	27.993	1.275.053
1991a	633.067	350.513	146.375	169.639	31.805	1.331.399
1993a	141.565	502.555	224.031	206.961	52.661	1.127.773
1995a	535.308	554.260	162.263	204.150	46.894	1.502.875
1996a	412.801	572.576	248.425	259.740	58.996	1.552.538
1997a	436.735	534.776	265.173	282.232	59.571	1.578.487
1998a	426.360	522.084	258.880	275.534	58.166	1.541.024
2007b	172.020	472.028	414.806	372.477	139.430	1.570.761
2008b	208.869	493.296	357.066	402.344	160.423	1.621.998
2009b	296.927	420.749	375.467	458.913	180.505	1.732.561
2010b	272.232	419.764	395.171	483.689	205.398	1.776.254
2011b	280.182	431.306	393.900	519.684	227.401	1.852.473
2012b	231.613	436.590	404.666	501.897	223.781	1.798.547
2013b	222.660	437.643	383.632	537.997	242.654	1.824.586

Catatan : a = penduduk 10 tahun ke atas
b = penduduk 15 tahun ke atas

Sumber :

Gambar 12.16.
Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Tahun 1971 dan 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ternyata penduduk dengan pendidikan tinggi belum ter dengan pendidikan rendah yang lebih banyak terserap di j terlihat bahwa pengangguran dengan pendidikan tinggi semakin meningkat persentasenya. Sehingga dapat disimpulkan terja dalam pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan

Secara total, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 1971. Pada tahun 1971 angka pengangguran sebesar 9,62 persen dan meningkat menjadi 10,30 persen pada tahun 2013. Namun demikian sepanjang tahun 1971 sampai dengan 2010 tingkat pengangguran terbuka selalu mengalami fluktuasi baik naik maupun turun.

Apabila dianalisis menurut pendidikan, pada tahun 1971 pengangguran paling banyak berpendidikan SMA sebesar 25,30 persen begitu juga pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 16,21 persen. Pada tahun 1971 pengangguran dengan pendidikan tidak/belum sekolah merupakan pengangguran terendah dengan persentase sebesar 2,10 persen yang juga sama pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 3,67 persen.

Tabel 12.7.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan
Tahun 1971 – 2013

Tahun	Tidak/Belum Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	TPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1971 ^a	2.10	11.00	11.70	25.30	2.60	9.62
1980 ^a	1.10	1.70	1.80	3.90	0.40	2.81
1985 ^a	0.70	0.20	3.90	23.60	21.40	1.93
1990 ^a	1.10	1.60	3.30	8.10	7.90	2.81
1994 ^a	1.20	2.40	3.20	6.50	6.50	5.67
1995 ^a	1.20	3.50	11.40	20.10	14.90	7.42
1996 ^a	1.20	1.10	3.10	8.30	15.60	6.42
1997 ^a	0.60	3.20	8.70	15.90	17.60	7.02
1998 ^a	4.80	7.00	14.50	35.50	34.70	12.32
2007 ^b	6.42	6.80	8.85	16.28	8.23	9.84
2008 ^b	3.57	5.03	9.00	16.62	12.08	9.56
2009 ^b	2.81	5.04	8.03	15.57	8.61	8.71
2010 ^b	2.89	4.70	6.65	14.51	10.15	8.37
2011 ^b	3.10	3.42	7.53	12.52	7.39	7.43
2012 ^b	3.40	5.19	8.91	15.46	6.88	9.10
2013 ^b	3.67	5.70	10.01	16.21	10.29	10.30

Catatan : a = penduduk 10 tahun ke atas
 b = penduduk 15 tahun ke atas

Sumber :

Upah Pekerja

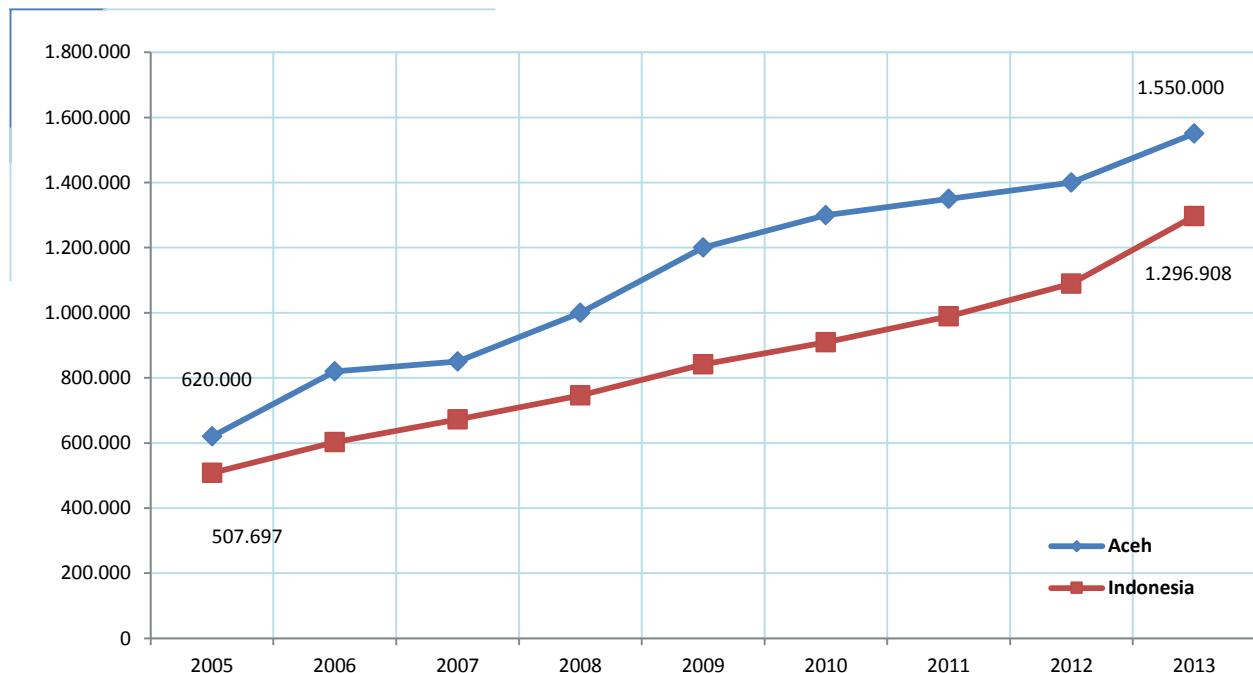
Untuk melihat kesejahteraan pekerja maka perlu diperhatikan tingkat upahnya. Tingkat upah yang mencukupi kebutuhan hidup akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja, sebaliknya tingkat upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup maka tidak akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berubah setiap tahun sesuai dengan kondisi di daerah.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya empat puluh hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari. Penetapan upah minimum berdasarkan usulan upah dari Dewan Pengupahan daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.

Merujuk pada gambar di bawah, terlihat bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 upah minimum Provinsi Aceh selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata upah minimum nasional. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di Provinsi Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Karena untuk menetapkan upah minimum daerah perlu dilakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang akan dijadikan dasar penetapan upah minimum.

Pada tahun 2005 upah minimum Provinsi Aceh sebesar Rp 620.000 lebih tinggi Rp 112.303 dibandingkan rata-rata upah minimum nasional yaitu sebesar Rp 507.697. Dalam kurun waktu delapan tahun upah minimum di Provinsi Aceh telah mengalami kenaikan sebesar Rp 930.000 atau sekitar 150 persen dengan rata-rata kenaikan 18,75 persen per tahun. Secara nasional dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2013, rata-rata upah minimum mengalami kenaikan sebesar Rp 789.211 atau sekitar 155 persen dengan rata-rata **kenaikan 19,43 persen per tahun**. Keadaan upah minimum Provinsi Aceh pada tahun 2013 ditetapkan pada angka Rp 1.550.000 lebih tinggi Rp 253.092 dibandingkan rata-rata upah minimum nasional yang sebesar Rp 1.296.908. **Dengan demikian tingkat kesejahteraan pekerja Aceh lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan pekerja Indonesia secara rata-rata.** Hal ini dikarenakan tingkat upah pekerja Aceh sudah lebih tinggi dibandingkan upah rata-rata pekerja Indonesia.

Gambar 12.17.
Upah Minimum Provinsi Tahun 1971 – 2013



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh

Ketersediaan Sarana Kesehatan

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, sarana ini juga harus terjangkau oleh masyarakat luas baik dari segi akses maupun biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu Pemerintah Aceh telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada tanggal 1 Juni 2010. Tujuan umum program JKA adalah mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia.

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan vital yang diharapkan mampu memberikan berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat telah banyak bertambah. Pada tahun 1989 jumlah rumah sakit baik umum maupun khusus sebanyak 20 fasilitas, berkembang 150 persen pada tahun 2013 menjadi sebanyak 50 unit. Seiring dengan penambahan jumlah rumah sakit, maka ketersediaan tempat tidur pasien juga ikut bertambah.

Pada tahun 1989 jumlah tempat tidur sebanyak 1.560 meningkat menjadi 6.722 pada tahun 2013. Penambahan fasilitas rumah sakit dan tempat tidur diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Aceh.

Agar dapat menjangkau masyarakat di daerah pedesaan, Pemerintah Aceh juga terus membangun puskesmas yang dapat melayani masyarakat di tingkat kecamatan. Jumlah puskesmas pada tahun 1989 sebanyak 153 telah berkembang menjadi 334 puskesmas pada tahun 2013. Selain itu jumlah puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas keliling (pusling) juga telah mengalami peningkatan sejak tahun 1989 sampai dengan 2013. Pustu sebelumnya berjumlah 518 fasilitas, saat ini telah bertambah menjadi 964 fasilitas. Demikian juga pusling dimana sebelumnya berjumlah 115 fasilitas, saat ini bertambah sehingga menjadi 361 fasilitas. Penambahan fasilitas ini bertujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat Aceh baik di kota maupun di desa.

**Tabel 13.1.
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit) Tahun 1989 – 2013**

Tahun	RS Umum + Khusus	T.Tidur	Puskesmas	Pustu	Pusling	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1989	20	1.560	153	518	115	...
1993	21	1.772	188	661	170	...
1994	23	2.024	212	714	209	...
1995	23	2.024	212	714	203	...
1996	23	1.869	214	749	275	...
1997	24	1.860	216	755	211	...
1998	24	2.017	218	755	203	...
1999	25	2.036	218	755	211	...
2000	26	2.165	218	766	217	...
2001	22	1.840	218	803	213	...
2002	22	1.893	233	695	195	...
2003	22	1.932	240	789	238	...
2004	31	2.513	247	830	240	...
2005	34	2.720	272	798	255	...
2006	39	2.718	278	825	293	...
2007	43	2.721	284	896	353	2.230
2008	47	3.163	292	903	292	2.348
2009	47	2.533	307	930	339	1.418
2010	49	3.777	316	951	336	1.661
2011	50	3.755	325	957	347	1.932
2012	59	6.350	330	1.219	362	2.312
2013	50	6.722	334	964	361	1.986

Sumber: Aceh Dalam Angka (1989-2014)

Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu daerah. Sama dengan peningkatan fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di Aceh juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1971 komposisi dokter terdiri dari 37 dokter umum (88%), 1 dokter spesialis (2%), dan 4 dokter gigi (10%). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena jumlah dokter spesialis hanya berjumlah satu orang. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya waktu komposisi dokter pada tahun 2013 berubah menjadi 795 dokter umum (56%), 440 dokter spesialis (31%), dan 195 dokter gigi (14%). Dengan demikian terjadi perubahan komposisi dokter spesialis dari 2 persen menjadi 31 persen. Perubahan komposisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh dengan semakin banyak dokter spesialis yang melayani masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, dokter juga didukung oleh tenaga paramedis seperti bidan dan perawat. Sama halnya dengan jumlah dokter, jumlah bidan dan perawat juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1971 jumlah perawat sebanyak 19 orang telah meningkat sebanyak 4.905 orang sehingga menjadi 4.924 orang pada tahun 2013.

Pertumbuhan jumlah bidan juga mengalami hal yang menggembirakan dimana pada tahun 1971 jumlah bidan sebanyak 107 orang bertambah 9.654 orang sehingga pada tahun 2013 jumlah bidan mencapai 9.761 orang. Pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dengan semakin banyak tenaga kesehatan yang bekerja di Aceh, maka pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh diharapkan mampu dipenuhi sehingga derajat kesehatan masyarakat Aceh menjadi baik.

Tabel 13.2.
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 1971 – 2013

Tahun (1)	Dokter Umum (2)	Dokter Spesialis (3)	Dokter Gigi (4)	Perawat (5)	Bidan (6)
1971	37	1	4	19	107
1975	37	1	8	112	142
1980	37	1	8	112	142
1985	171	1	8	255	174
1990	469	56	136	308	350
1991	480	67	154	1.464	475
1992	480	67	154	1.650	816
1993	534	69	201	1.896	1.226
1994	346	100	75	2.207	1.729
1995	346	100	133	2.668	1.994
1997	352	95	173	1.736	5.117
1999	203	40	86	1.572	1.513
2000	203	40	86	1.572	1.513
2001	181	80	78	2.107	1.710
2002	145	11	46	1.570	1.368
2003	407	90	123	2.024	4.526
2004	234	823	235	243	823
2005	390	82	96	2.519	1.939
2006	552	201	124	2.871	2.013
2007	596	155	154	2.495	1.995
2008	552	185	124	2.863	2.013
2009	660	126	133	4.143	3.979
2010	830	302	173	6.702	6.137
2011	1.137	340	216	9.697	13.859
2012	840	68	178	5.707	8.056
2013	795	440	195	4.924	9.761

Sumber: Aceh Dalam Angka (1971-2014)

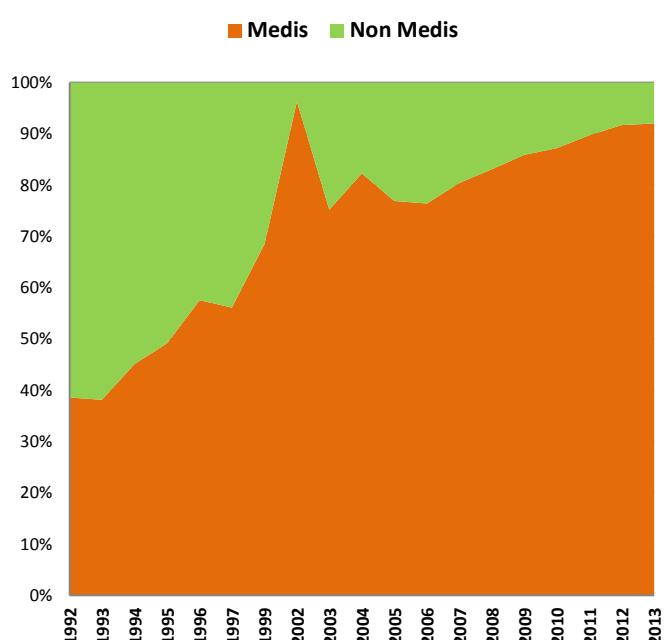
Penolong Kelahiran

Angka kematian bayi sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan penolong kelahiran. Semakin banyak kelahiran ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, tenaga medis lainnya) maka semakin rendah angka kematian bayi yang menjadikan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Pada tahun 1992 lebih dari 62 persen peristiwa kelahiran dibantu oleh tenaga nonmedis, sedangkan kurang dari 40 persen kelahiran yang dibantu tenaga medis. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kelahiran tanpa penolong tenaga medis rawan terjadi komplikasi baik bagi ibu maupun bagi bayi yang dilahirkan. Hal ini berisiko tinggi menyumbang angka kematian bayi dan ibu.

Namun hal yang menggembirakan mulai terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, dimana persentase kelahiran ditolong tenaga medis perlahan-lahan mulai naik sehingga melebihi jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga nonmedis. Persentase kelahiran ditolong tenaga

Gambar 13.1
Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran
Tahun 1992 – 2013



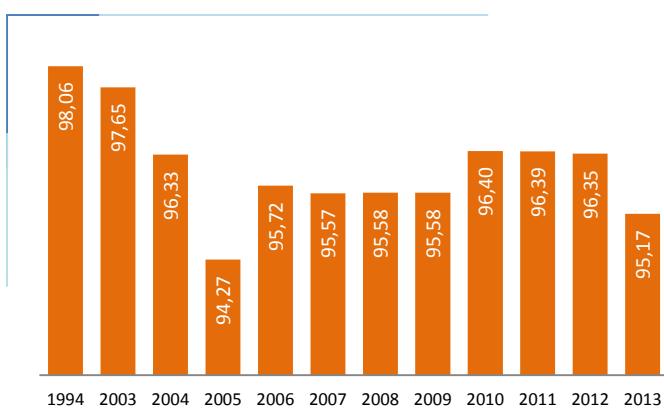
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 13.3.
Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran Tahun 1992 – 2013

Tahun (1)	Dokter Umum (2)	Dokter Spesialis (3)	Dokter Gigi (4)	Perawat (5)	Bidan (6)	Lainnya (5)	Jumlah (6)
1992	3,20	33,75	1,64	56,61	2,41	2,39	100,00
1993	3,25	33,86	1,00	57,96	2,54	1,39	100,00
1994	3,91	39,64	1,55	53,35	1,03	0,52	100,00
1995	2,74	44,90	1,47	48,96	1,64	0,29	100,00
1996	2,73	51,92	2,92	41,01	1,08	0,34	100,00
1997	4,10	50,11	1,89	42,45	0,95	0,50	100,00
1999	4,98	61,78	1,74	29,80	1,18	0,52	100,00
2002	24,83	71,45	-	1,24	2,48	-	100,00
2003	4,00	69,50	1,70	22,90	1,70	0,20	100,00
2004	4,88	76,84	0,53	15,95	1,74	0,06	100,00
2005	8,67	67,39	0,85	20,18	2,14	0,77	100,00
2006	6,36	68,99	1,05	21,15	2,11	0,34	100,00
2007	9,03	70,63	0,74	18,69	0,76	0,15	100,00
2008	9,38	73,09	0,61	16,03	0,72	0,17	100,00
2009	8,77	76,51	0,58	13,30	0,82	0,02	100,00
2010	11,45	75,16	0,56	12,56	0,22	0,05	100,00
2011	10,50	78,74	0,42	10,00	0,29	0,05	100,00
2012	11,85	79,51	0,34	7,88	0,38	0,04	100,00
2013	12,86	78,96	0,15	7,76	0,17	0,10	100,00

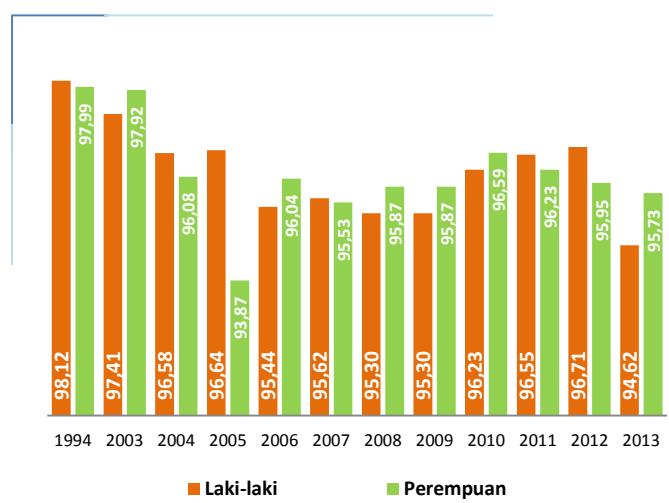
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.2.
Persentase Anak Usia 2 – 4 Tahun yang Pernah Disusui
Tahun 1994 – 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.3.
Persentase Anak Usia 2 – 4 Tahun yang Pernah Disusui
Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 – 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi usia kurang dari dua tahun sangat berhubungan erat dengan derajat kesehatan bayi. ASI sangat bermanfaat bagi kepentingan tumbuh dan berkembang bayi. Nutrisi yang terkandung dalam ASI dapat menjadi sumber imunitas bayi saat masih kecil sampai pada masa dewasanya. ASI mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi dan alergi. Banyak penelitian di berbagai negara maju maupun negara berkembang telah memberikan bukti kuat bahwa ASI menurunkan angka kejadian maupun derajat berat berbagai penyakit infeksi, termasuk diantaranya diare, infeksi saluran napas, otitis media (infeksi telinga tengah), infeksi saluran kemih, meningitis bakteri (infeksi selaput otak karena bakteri) serta sepsis (infeksi berat di berbagai organ tubuh) pada bayi baru lahir. Berdasarkan keuntungan pemberian ASI tersebut sewajarnyalah apabila pemerintah menggalakan program pemberian ASI eksklusif bagi bayi, yaitu pemberian ASI kepada bayi mulai dilahirkan sampai berusia enam bulan tanpa makanan pendamping apapun. Idealnya bayi disusui sampai dengan genap berusia dua tahun (24 bulan). Bayi yang sehat memberikan dampak bagi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.

Secara umum pemberian ASI bagi balita di Aceh sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui di Aceh dimana sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 persentase anak yang disusui melebihi 90 persen. Walaupun sudah cukup baik, tetapi persentase di tahun-tahun ke depannya memberikan kecenderungan penurunan persentase anak yang disusui. Pada tahun 1994 persentase anak yang disusui mencapai 98,06 persen, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 95,17 persen. Mengingat pentingnya kandungan nutrisi dalam ASI Pemerintah Aceh perlu melakukan program untuk menggerakkan ibu agar memberikan ASI bagi bayinya, sehingga program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Melihat pemberian ASI antara anak laki-laki dengan anak perempuan terlihat bahwa untuk kedua jenis kelamin pemberian ASI sudah cukup baik yang ditandakan dengan besarnya persentase pemberian ASI baik bagi anak perempuan maupun bagi anak laki-laki. Sepanjang tahun 1994 sampai dengan 2013 persentase anak berusia 2 – 4 tahun yang pernah disusui menurut jenis kelamin mengalami fluktuasi. Namun demikian jarak

Imunisasi

Imunisasi adalah modal dasar kesehatan masa depan bagi anak karena dapat mencegah penyakit dan memberikan perlindungan terhadap infeksi secara efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati. Terdapat lima jenis imunisasi dasar yang harus didapatkan oleh seorang anak. Imunisasi tersebut adalah BCG, DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Imunisasi campak merupakan tolok ukur kelengkapan imunisasi bagi seorang anak.

Cakupan imunisasi bagi balita pada tahun 2004 sebesar 75 persen untuk BCG, 75 persen untuk DPT, 83 persen untuk polio, 64 persen untuk hepatitis B, dan 74 persen untuk campak. Berarti cakupan imunisasi polio adalah cakupan tertinggi dan hepatitis B merupakan cakupan terendah. Imunisasi polio dapat menjadi cakupan imunisasi tertinggi dikarenakan pemerintah telah melaksanakan Program Pekan Imunisasi Nasional sejak tahun 1992.

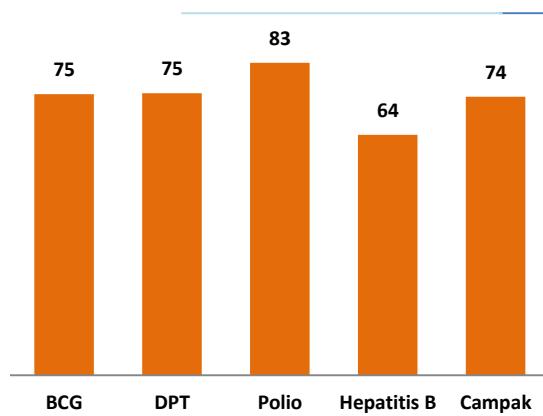
Sedikit berbeda dengan tahun 2004, pada tahun 2013 cakupan imunisasi BCG mencapai 88 persen, DPT 84 persen, polio 85 persen, hepatitis B 80 persen, dan campak 74 persen. Dengan demikian terjadi peningkatan cakupan imunisasi BCG sebesar 13 persen, DPT sebesar 9 persen, polio sebesar 2 persen, dan hepatitis B sebesar 16 persen, sedangkan cakupan imunisasi campak stagnan pada angka 74 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan cakupan imunisasi pada balita di Provinsi Aceh sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan ini memberikan kabar gembira bagi pemenuhan derajat kesehatan masyarakat Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh pemenuhan imunisasi pada balita.

Tabel 13.4.
Percentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2004 – 2013

Tahun (1)	BCG (2)	DPT (3)	Polio (4)	Campak/Morbili (5)	Hepatitis B (6)
2004	74,90	75,10	83,20	74,20	64,00
2005	65,78	63,70	86,90	56,58	51,45
2006	74,45	73,43	91,13	70,93	62,60
2007	75,64	73,09	83,06	66,98	65,65
2009	85,32	83,17	85,50	74,08	77,80
2010	87,12	84,70	87,67	74,25	79,92
2011	87,26	84,78	87,20	74,15	79,40
2012	87,53	85,33	86,08	75,43	80,00
2013	87,80	84,40	84,90	74,43	79,80

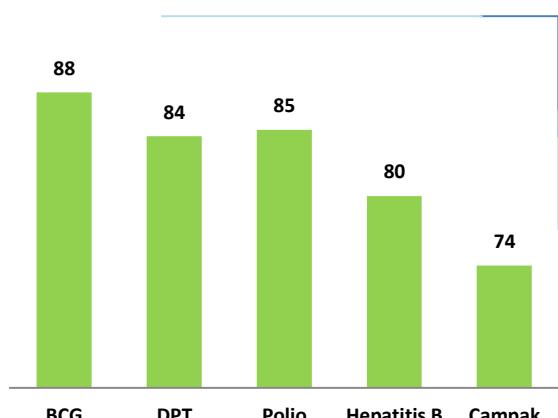
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.4.
Percentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2004



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.5.
Percentase Balita yang Sudah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Tahun 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendidikan dan Sosial Budaya

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang pendidikan harus merupakan prioritas utama yang perlu ditingkatkan kualitasnya karena pendidikan merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan tingkat kesejahteraan akan tercapai.

Sesuai UUD 1945 dan GBHN, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana amanat tersebut telah dilaksanakan khususnya di Provinsi Aceh, dapat dilihat melalui gambaran umum mengenai kemampuan membaca dan menulis, status pendidikan, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis yang tercermin dari angka melek huruf. Melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Pada Tabel 13.5 memperlihatkan bahwa buta huruf di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 1971 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 31,98 persen menjadi 2,89 persen pada tahun 2013.

Jika dilihat dari jenis kelamin, umumnya persentase perempuan yang buta huruf selalu lebih besar daripada persentase laki-laki yang buta huruf, namun perbedaannya dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 1971 selisih persentase penduduk perempuan yang buta huruf dengan persentase penduduk laki-laki yang buta huruf adalah sebesar 22,46 persen, sedangkan pada tahun 2013 selisih sekitar 2,74 persen.

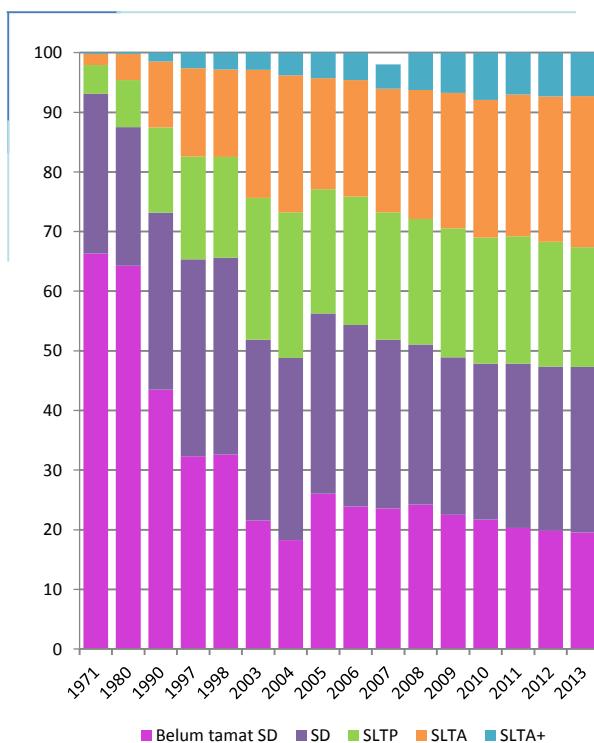
Kemampuan baca tulis huruf latin penduduk Aceh pada tahun 1971 hanya mencapai 65,28 persen. Dalam kurun waktu 1971-1990 terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 85,03 persen. Kemudian pada tahun 2013 telah mencapai 96,64 persen, hal ini merupakan suatu peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 13.5.
Komposisi Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis (Persen) Tahun 1971 – 2013

Tahun	Jenis Kelamin	Kemampuan Baca Tulis			
		Latin	Lainnya	Buta Huruf	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1971	L	76,91	2,47	20,62	100
	P	53,92	3,00	43,08	100
	L+P	65,28	2,74	31,98	100
1980	L	80,48	1,73	17,79	100
	P	64,64	2,29	33,07	100
	L+P	72,56	2,01	25,43	100
1985	L	90,41	2,32	7,27	100
	P	77,63	4,21	18,16	100
	L+P	83,95	3,27	12,78	100
1990	L	90,32	1,70	7,98	100
	P	79,79	2,96	17,25	100
	L+P	85,03	2,33	12,64	100
1993	L	91,81	2,17	6,02	100
	P	82,27	3,33	14,40	100
	L+P	87,04	2,75	10,21	100
1994	L	92,18	1,46	6,36	100
	P	83,18	2,44	14,38	100
	L+P	87,60	1,96	10,44	100
1995	L	92,17	1,66	6,17	100
	P	83,90	3,17	12,93	100
	L+P	87,99	2,42	9,58	100
1996	L	93,36	1,29	5,35	100
	P	86,25	1,99	11,77	100
	L+P	89,73	1,65	8,63	100
1997	L	94,27	1,19	4,53	100
	P	87,15	2,13	10,72	100
	L+P	90,64	1,67	7,68	100
1998	L	94,94	0,87	4,19	100
	P	87,63	2,33	10,03	100
	L+P	91,24	1,61	7,14	100
1999	L	95,70	0,87	3,43	100
	P	89,46	1,95	8,59	100
	L+P	92,55	1,41	6,03	100
2002	L	98,88	-	1,12	100
	P	96,30	-	3,70	100
	L+P	97,56	-	2,44	100
2003	L	97,15	1,04	1,81	100
	P	93,45	1,88	4,67	100
	L+P	95,29	1,46	3,45	100
2004	L	97,28	0,54	2,18	100
	P	92,84	1,53	5,63	100
	L+P	95,03	1,04	3,93	100
2005	L	95,57	1,10	3,33	100
	P	91,04	1,78	7,18	100
	L+P	93,27	1,44	5,29	100
2006	L	92,71	3,88	3,41	100
	P	88,10	5,08	6,81	100
	L+P	90,36	4,49	5,15	100
2007	L	94,94	1,97	3,09	100
	P	89,93	3,51	6,56	100
	L+P	92,38	2,76	4,87	100
2008	L	97,94	4,92	2,06	100
	P	94,91	4,45	5,09	100
	L+P	96,39	4,68	3,61	100
2009	L	97,10	1,14	1,76	100
	P	92,71	2,90	4,38	100
	L+P	94,82	2,06	3,13	100
2010	L	97,41	1,69	1,91	100
	P	93,77	2,29	3,55	100
	L+P	95,56	2,00	2,74	100
2011	L	97,90	0,01	2,09	100
	P	94,77	-	5,23	100
	L+P	96,32	0,01	3,66	100
2012	L	98,17	0,01	1,83	100
	P	95,08	0,01	4,91	100
	L+P	96,61	0,01	3,38	100
2013	L	98,23	0,27	1,51	100
	P	95,06	0,68	4,25	100
	L+P	96,64	0,48	2,89	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.6.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 1971-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk laki-laki yang tamat SLTP naik dari 6,32 persen pada tahun 1971 menjadi 20,79 persen pada tahun 2013. Begitu juga dengan penduduk perempuan mengalami peningkatan dari 3,45 persen pada tahun 1971 menjadi 19,41 persen pada tahun 2013. Persentase penduduk laki-laki yang tamat SLTA naik dari 2,73 persen pada tahun 1971 menjadi 28,49 persen di tahun 2013, sedangkan penduduk perempuan naik dari 1,02 persen menjadi 22,23 persen pada kurun waktu 1971-2013. Penduduk yang berpendidikan tamat diatas SLTA, untuk penduduk laki-laki juga mengalami peningkatan yaitu dari 0,34 persen di tahun 1971 menjadi 5,88 persen di tahun 2013. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami peningkatan sebesar 8,62 persen selama kurun waktu 1971-2013.

Tabel 13.6.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 1971-2013

Jenjang yang Ditamatkan	1971	1980	1990	1997	1998	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BELUM TAMAT SD																
Laki-Laki	58,74	50,35	39,33	29,03	29,54	19,48	16,97	23,86	21,75	21,34	21,13	20,23	19,16	18,52	17,66	17,49
Perempuan	73,73	69,19	47,57	35,50	35,56	23,60	18,05	28,13	25,98	25,68	27,13	24,60	24,13	22,09	22,06	21,58
Jumlah	66,32	64,27	43,48	32,32	32,58	21,54	18,24	26,03	23,90	23,56	24,20	22,51	21,68	20,31	19,88	19,55
SEKOLAH DASAR																
Laki-Laki	31,87	24,96	30,27	33,69	33,10	29,27	28,53	29,92	30,08	28,20	27,30	26,75	25,90	27,41	27,02	27,35
Perempuan	21,74	21,52	29,14	32,35	33,99	31,33	30,19	30,54	30,78	28,40	26,40	26,08	26,45	27,69	27,90	28,10
Jumlah	26,75	23,24	29,70	33,01	33,04	30,30	30,58	30,24	30,44	28,30	26,84	26,40	26,18	27,55	27,46	27,73
SLTP																
Laki-Laki	6,32	9,35	15,49	18,22	17,95	23,61	23,76	21,38	22,21	21,94	21,77	22,08	21,96	22,15	21,83	20,79
Perempuan	3,45	6,17	13,08	16,31	15,86	24,01	23,12	20,27	20,84	20,72	20,37	21,27	20,29	20,50	20,15	19,41
Jumlah	4,87	7,87	14,28	17,24	16,89	23,81	24,40	20,81	21,51	21,32	21,05	21,65	21,11	21,32	20,98	20,10
SLTA																
Laki-Laki	2,73	5,86	13,06	16,20	16,29	24,45	24,80	20,77	21,65	22,87	24,25	24,97	25,92	26,20	27,26	28,49
Perempuan	1,02	2,99	9,12	13,49	13,05	18,44	19,43	16,61	17,52	18,71	19,18	20,62	20,37	21,42	21,51	22,23
Jumlah	1,87	4,41	11,08	14,82	14,65	21,45	22,98	18,66	19,54	20,74	21,65	22,70	23,10	23,80	24,36	25,34
SLTA +																
Laki-Laki	0,31	0,48	1,85	2,86	3,13	3,19	3,89	4,07	4,30	5,64	5,55	5,97	7,05	5,72	6,24	5,88
Perempuan	0,06	0,13	1,09	2,35	2,53	2,62	3,89	4,45	4,87	6,49	6,93	7,44	6,46	8,31	8,39	8,68
Jumlah	0,19	0,3	1,46	2,61	2,83	2,91	3,79	4,26	4,60	4,08	6,26	6,74	7,92	7,02	7,31	7,28

Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu indikator pokok kualitas pendidikan formal suatu daerah adalah ijazah tertinggi yang dimiliki penduduknya, semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh rata-rata penduduknya, semakin tinggi juga sumber daya manusia daerah tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari semakin tingginya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi.

Selama periode 1971-2013, persentase penduduk yang belum tamat SD menurun sebanyak 46,77 poin yaitu dari 66,32 persen pada tahun 1971 menjadi 19,55 persen di tahun 2013. Untuk persentase penduduk yang tamat SD mengalami peningkatan yaitu dari 26,75 persen menjadi 27,73 persen. Persentase penduduk yang tamat SLTP juga mengalami peningkatan. Bisa dilihat juga bahwa persentase penduduk yang tamat SLTA dan diatas SLTA juga terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang memiliki ijazah/STTB lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, terlihat perbandingan persentase ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk perempuan lebih besar untuk setiap jenjang pendidikan kecuali untuk yang memiliki ijazah SLTP dan SLTA.

Pendidikan yang Sedang Diduduki

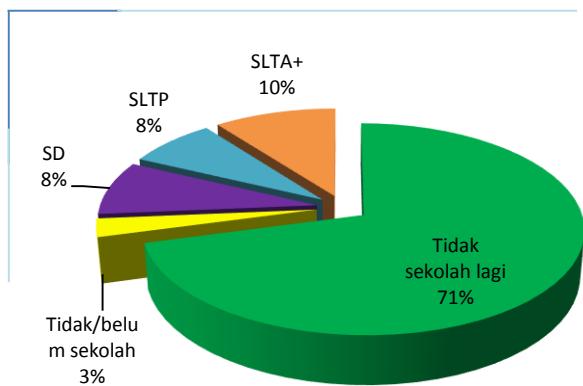
Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Usaha ini bukan merupakan usaha perorangan atau hanya merupakan usaha pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Relevansi pendidikan merupakan konsep “*link and match*”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai kebutuhan zaman. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mutlak diperlukan, sehingga kualitas dan kuantitas pendidikan dapat ditingkatkan demi mendukung terciptanya sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki dapat dilihat pada Tabel 13.7. Selama periode 1995-2013, Persentase penduduk yang masih menduduki bangku SD cenderung menurun dari 11,70 persen menjadi 8,43 persen, dan terjadi peningkatan untuk tingkat SLTP dan SLTA masing-masing dari 6,73 persen dan 5,21 persen menjadi 7,56 persen dan 10,37 persen dalam periode yang sama. Kemudian persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi juga meningkat sebesar 3,27 persen yaitu dari 67,54 persen pada tahun 1995 menjadi 70,81 persen pada tahun 2013. Sedangkan persentase penduduk yang tidak/belum bersekolah menunjukkan penurunan sebesar 5,99 persen yaitu dari 8,82 persen pada tahun 1995 menjadi 2,83 persen pada tahun 2013. Persentase penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Baik yang masih sekolah maupun yang tidak bersekolah lagi kecuali yang tidak/belum bersekolah lebih besar persentase penduduk perempuan.

Tabel 13.7.
Percentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Sedang Diduduki
Tahun 1995-2013

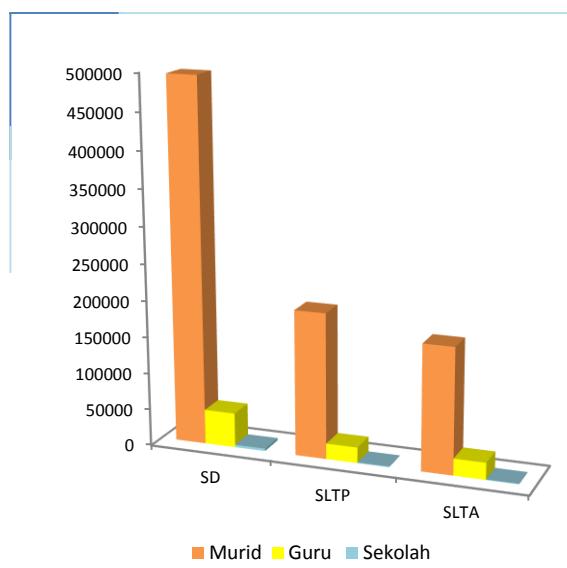
Tahun/Jenis Kelamin	Pendidikan yang Sedang Diduduki						Persen
	Tidak/Belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA+	Tidak Sekolah Lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1995	L	5,74	12,29	7,24	5,65	69,08	100
	P	11,85	11,12	6,23	4,78	66,02	100
	L+P	8,82	11,70	6,73	5,21	67,54	100
1996	L	4,39	12,22	7,46	5,34	70,59	100
	P	10,10	10,92	7,45	4,75	66,78	100
	L+P	7,30	11,56	7,45	5,04	68,64	100
1997	L	0,83	11,18	8,11	5,29	74,59	100
	P	2,06	7,91	7,35	5,43	77,25	100
	L+P	1,50	9,47	7,73	5,41	75,89	100
1998	L	3,34	12,02	7,36	5,49	71,79	100
	P	8,66	10,46	6,54	5,20	69,16	100
	L+P	6,02	11,23	6,95	5,35	70,45	100
2003	L	2,45	10,10	8,81	8,20	70,44	100
	P	5,45	8,56	7,62	8,38	70,00	100
	L+P	3,96	9,33	8,21	8,29	70,22	100
2005	L	3,67	9,93	8,51	8,20	69,69	100
	P	7,29	8,35	8,19	9,05	67,12	100
	L+P	5,51	9,12	8,35	8,63	68,38	100
2006	L	3,36	9,09	8,71	9,01	69,83	100
	P	6,52	7,95	7,72	10,13	67,68	100
	L+P	4,97	8,51	8,20	9,58	68,73	100
2007	L	3,14	9,46	8,28	9,55	69,59	100
	P	7,50	7,81	7,05	10,21	67,43	100
	L+P	5,37	8,61	7,65	9,88	68,48	100
2008	L	2,81	9,19	7,82	9,35	70,82	100
	P	6,71	8,54	6,46	10,21	68,08	100
	L+P	4,81	8,86	7,12	9,79	69,42	100
2009	L	2,36	9,26	8,02	9,85	70,50	100
	P	5,76	7,46	6,82	10,54	69,42	100
	L+P	4,13	8,32	7,39	10,21	69,94	100
2010	L	2,36	9,17	7,37	9,17	71,94	100
	P	5,98	8,28	6,75	10,46	68,53	100
	L+P	4,20	8,72	7,05	9,83	70,21	100
2011	L	1,65	8,75	7,38	10,05	72,17	100
	P	4,67	7,17	7,14	10,89	70,12	100
	L+P	3,17	7,96	7,26	10,47	71,14	100
2012	L	1,70	8,75	7,02	9,76	72,78	100
	P	4,75	8,00	7,47	11,02	68,76	100
	L+P	3,23	8,37	7,25	10,39	70,75	100
2013	L	1,46	9,06	7,33	10,08	72,07	100
	P	4,18	7,81	7,78	10,65	69,58	100
	L+P	2,83	8,43	7,56	10,37	70,81	100

Gambar 13.7.
Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Sedang Diduduki Tahun 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.8.
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SD, SLTP dan SLTA Tahun 2012



Sumber: Aceh Dalam Angka (2013)

Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Umum

Salah satu standar penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah standar tenaga pendidik dan sarana prasarana. Tersedianya fasilitas kelas dan gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan program pendidikan yang lebih merata dan terjangkau pada setiap penduduk. Dalam penyediaan gedung tempat belajar juga perlu dipertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi sekolah dan tempat tinggal penduduk.

Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh pada tahun 1971 jumlah SD sebanyak 868 buah, SLTP sebanyak 498 dan SLTA sebanyak 73 buah. Sedangkan tahun 2012 untuk SD naik menjadi 3.353 buah, SLTP sebanyak 956 dan SLTA sebanyak 595 buah. Ini berarti pembangunan sekolah dalam kurun lima puluhan tahun di Provinsi Aceh telah maju dengan pesat, disamping fasilitas kelas dan gedung makin bertambah ditunjang dengan tenaga pengajar (guru) setiap tahun makin bertambah. Pada tahun 1971 jumlah tenaga pengajar (guru) tingkat SD sebanyak 4.996 orang guru untuk 185.217 orang murid. Kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 47.789 orang guru untuk 496.193 orang murid. Kemudian pada tingkat SLTP, jumlah guru pada tahun 1971 sebanyak 871 orang guru untuk 23.335 orang murid dan pada tahun 2012 naik menjadi 21.686 orang guru untuk 199.693 orang murid. Pada jenjang pendidikan SLTA jumlah tenaga pengajar guru pada tahun 1971 adalah 388 orang guru untuk 10.649 orang murid kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 23.377 orang guru untuk 173.320 orang murid.

Pada tahun 1994 di Provinsi Aceh telah didirikan SMU Modal Bangsa sebagai tanggapan atas ajakan Mendikbud untuk mendirikan SMA unggul yang kemudian ditanggapi serius oleh Pemda Tk I Daerah Provinsi Aceh dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Mengingat tuntutan kebutuhan akan sumber daya manusia bagi pembangunan di Provinsi Aceh dinilai sudah semakin mendesak, maka Pemda TK I Daerah Provinsi Aceh melakukan terobosan dalam hal pembinaan generasi muda, antara lain melalui pendirian SMU Modal Bangsa yang diharapkan akan menjadi sasaran untuk menghasilkan kader-kader pembangunan bangsa. Bukan hanya SMA Modal Bangsa, setelah tsunami melanda Provinsi Aceh, pada tahun 2005 juga didirikan Fatih Bilingual School. Dalam waktu singkat, sekolah ini telah menjadi kebanggaan daerah Aceh dengan prestasi luar biasa dalam olimpiade nasional dan internasional.

Tabel 13.8.
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Umum
Tahun 1971-2012

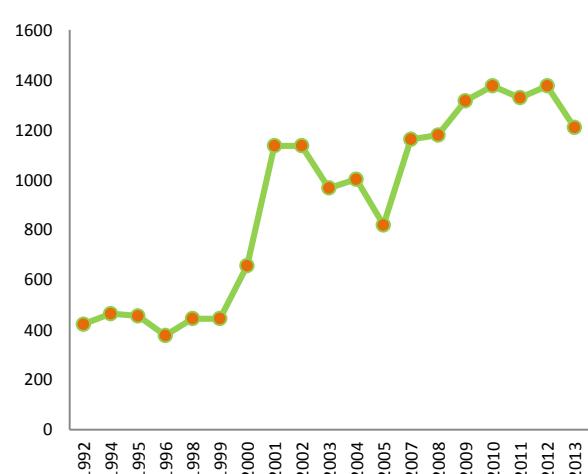
Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1971	868	185.217	4.996	167	23.335	897	73	10.649	388
1981	2.111	426.104	13.963	317	82.572	5.332	147	46.483	3.098
1985	2.748	508.440	19.818	439	127.709	8.136	189	72.342	4.827
1986	2.821	510.349	21.996	466	132.609	6.132	189	73.883	2.495
1987	2.895	521.316	23.175	477	137.131	6.796	196	77.767	2.905
1988	2.954	622.041	23.599	497	127.046	6.344	214	83.859	3.681
1989	2.967	536.731	23.616	498	118.050	6.540	224	81.358	3.988
1990	2.993	510.766	24.501	471	108.894	8.976	240	80.792	4.709
1991	3.033	513.115	24.300	471	104.285	7.281	239	71.262	4.580
1992	3.092	519.775	24.650	488	106.090	7.250	250	67.976	4.850
1993	3.092	513.786	24.664	457	114.757	9.582	245	65.097	6.603
1994	3.159	555.173	25.740	471	125.125	9.141	223	52.519	5.141
1995	3.158	549.914	25.542	474	135.664	9.390	218	56.661	5.083
1996	3.166	569.652	25.478	490	142.721	10.189	220	63.285	5.118
1997	3.196	582.470	25.275	498	151.057	9.758	223	148.806	5.109
1998	3.271	600.584	25.860	506	154.015	10.290	232	153.995	5.579
1999	3.220	583.763	24.397	499	157.109	10.228	251	79.065	5.620
2000	3.273	601.598	26.075	515	163.168	10.845	235	80.905	5.843
2001	3.221	631.697	28.840	528	163.168	10.845	215	79.736	5.843
2002	3.307	573.028	26.570	529	166.130	10.480	235	80.102	6.857
2003	3.244	575.510	24.283	566	184.350	8.861	256	99.571	6.810
2004	3.271	579.804	29.774	572	175.529	10.849	292	173.892	7.956
2005	3.291	547.436	27.252	585	195.955	10.714	288	125.104	6.655
2006	3.259	526.831	27.641	633	208.973	10.102	420	162.028	7.441
2007	3.278	537.287	23.737	701	167.533		606	193.217	
2008	3.794			674	198.283		484	143.085	
2009	3.276	516.477	44.237	827	200.077	18.673	478	172.014	19.032
2010	3.323	519.956	46.852	885	201.403	20.293	531	182.566	17.261
2011	3.321	507.903	46.962	923	201.240	20.990	547	184.876	17.848
2012	3.353	496.193	47.789	956	199.693	21.686	595	173.320	23.377

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Sekolah Agama

Keistimewaan Aceh dalam bidang Pendidikan dan Agama terus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat di daerah Provinsi Aceh. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk meningkatkan pendidikan di bidang agama, pada tahun 1992 jumlah fasilitas pesantren telah meningkat hingga mencapai 422 buah pesantren dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 1.210 buah pesantren pada tahun 2013. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, dimana seorang teungku/kayi/ustad mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam huruf/Bahasa Arab. Pada pesantren terpadu terdapat fasilitas pendidikan umum dan madrasah mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah.

Gambar 13.9.
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Umum
Tahun 1971-2012



Sumber: Aceh Dalam Angka (1971-2013)

Jumlah fasilitas pendidikan di bawah Departemen Agama terjadi peningkatan. Jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta pada tahun 1972 sebanyak 528 buah dengan jumlah murid sekitar 109.820 orang murid yang dibimbing oleh 2.597 orang guru. Pada tahun 2011 meningkat sebanyak 565 buah sekolah dengan jumlah murid sekitar 120.912 orang yang dibimbing oleh 11.049 orang guru. Pada tingkat MTsN/S jumlah sekolah dari 59 buah pada tahun 1972 menjadi 452 buah pada tahun 2011 yang ditempati oleh 72.418 murid dengan 6.877 orang guru. Sedangkan untuk tingkat MAN/S juga mengalami peningkatan dari 8 buah sekolah pada tahun 1972 menjadi 194 buah sekolah pada tahun 2011. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah siswa-siswi yang bersekolah di MAN/S tersebut hingga mencapai 42.599 orang murid dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 5.074 orang yang tersebar di pelosok Provinsi Aceh.

Tabel 13.9.
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru pada Sekolah Agama
Tahun 1972-2011

Tahun	MIN/S			MTsN/S			MAN/S		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1972	528	109.820	2.597	59	3.580	157	8	258	26
1974	555	93.678	2.649	58	5.014	433	9	644	66
1981	553	93.447	3.546	103	12.180	1.039	33	4.972	447
1984	552	96.916	3.600	114	20.118	1.345	43	6.038	534
1985	514	88.475	3.607	108	20.516	1.344	44	6.106	613
1986	542	89.700	3.653	126	26.258	1.595	51	8.631	706
1987	538	87.357	3.895	134	28.696	1.738	49	9.302	842
1988	546	89.715	4.179	139	28.593	1.897	53	10.440	843
1989	549	86.468	4.243	144	29.613	1.924	54	10.879	897
1993	534	94.913	3.802	154	29.186	2.250	54	11.023	1.061
1996	538	91.610	3.669	159	32.037	2.571	52	10.595	1.094
1998	519	91.633	5.881	190	42.624	3.359	71	14.082	1.432
1999	569	101.986	6.004	213	54.378	4.359	102	20.236	2.207
2000	520	103.367	7.392	201	83.225	3.412	105	22.107	2.254
2001	547	106.681	6.452	231	59.511	4.357	100	23.963	2.327
2002	554	106.667	6.470	233	59.511	3.140	117	11.582	2.804
2003	547	111.384	6.426	228	59.511	3.849	114	34.152	2.756
2004	564	122.764	7.372	266	67.336	6.008	154	36.209	3.720
2005	537	114.507	8.185	281	65.645	5.900	159	38.319	3.327
2006	550	114.841	8.185	295	64.852	5.900	163	40.145	3.327
2007	549	112.764	9.149	324	68.153	6.707	196	40.093	3.755
2008	558	113.843	9.874	316	66.417	7.145	189	38.953	4.233
2009	570	117.876	11.280	343	74.237	7.716	196	42.915	4.272
2010	566	114.683	10.827	345	76.817	7.007	196	37.679	4.066
2011	565	120.912	11.049	452	72.418	6.877	194	42.599	5.074

Sumber: Aceh Dalam Angka (1972-2012)

Pengeluaran Rumah Tangga

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Secara umum suatu keluarga atau masyarakat dalam keadaan ekonomi yang terbatas akan memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu dari pada kebutuhan nonpangan. Seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi dan sudah terpenuhinya kebutuhan akan pangan, wajarnya suatu keluarga atau masyarakat akan mengalihkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan akan bahan nonpangan. Semakin besar persentase pengeluaran nonpangan, berarti semakin sejahtera suatu keluarga atau masyarakat.

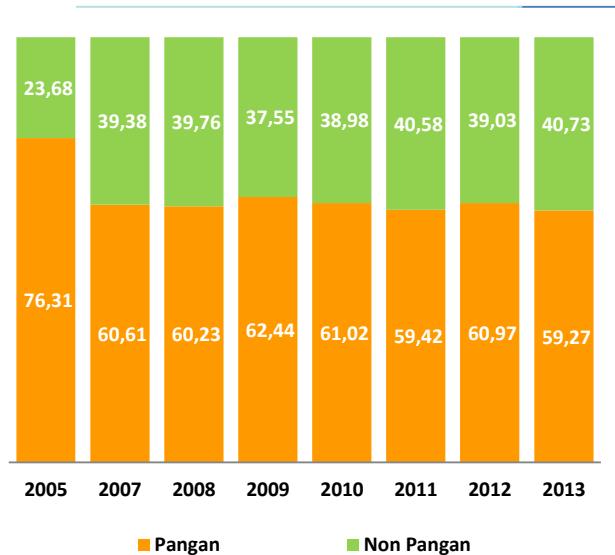
Melihat persentase pengeluaran per kapita menurut kelompok barang di Provinsi Aceh tahun 2005 – 2013 tergambar bahwa pengeluaran masyarakat Aceh masih didominasi dengan pengeluaran untuk bahan pangan. Kondisi ini memberikan arti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih relatif rendah. Namun demikian melihat tren persentase pengeluaran per kapita untuk bahan pangan semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh.

Merujuk data Susenas terlihat bahwa pada tahun 2005 persentase pengeluaran per kapita bahan pangan sebesar 76,31 persen sedangkan bahan nonpangan sebesar 23,68 persen. Data tersebut juga menunjukkan terjadi penurunan persentase dari pengeluaran per kapita untuk bahan nonpangan, dimana pada tahun 2013 pengeluaran per kapita untuk bahan nonpangan sebesar 59,27 persen. sebaliknya pengeluaran bahan nonpangan mulai meningkat menjadi 40,73 persen.

Memperhatikan lebih lanjut, apabila kita melihat persentase pengeluaran per kapita bahan pangan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa persentase pengeluaran per kapita untuk bahan pangan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan pada tiap tahun sejak tahun 1981-2013. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah perdesaan.

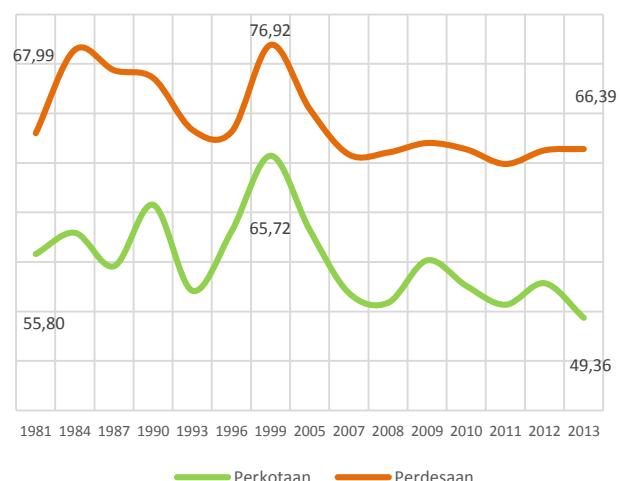
Pada tahun 1999 persentase pengeluaran per kapita bahan pangan merupakan yang tertinggi baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase pengeluaran per kapita bahan pangan daerah perkotaan sebesar 65,72 persen, sedangkan daerah perdesaan lebih tinggi 11,2 persen yaitu sebesar 76,92 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa pada tahun 1999 persentase pengeluaran per kapita masyarakat Aceh lebih banyak dihabiskan untuk membeli bahan pangan, sehingga alokasi pengeluaran untuk bahan nonpangan menjadi berkurang. Terserapnya pengeluaran yang terlalu besar ke bahan pangan mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang kurang baik bagi masyarakat. Penurunan kesejahteraan masyarakat pada tahun 1999 diakibatkan imbas dari krisis moneter yang melanda Aceh dan Indonesia pada tahun 1998.

Gambar 13.10.
Percentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang
Tahun 2005 – 2013



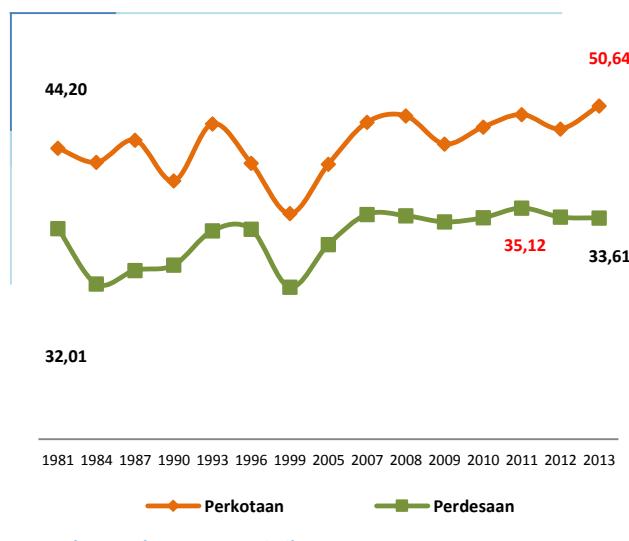
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.11.
Percentase Pengeluaran Per Kapita Barang Pangan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1981-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.12.
Persentase Pengeluaran Per Kapita Barang Nonpangan Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1981-2013

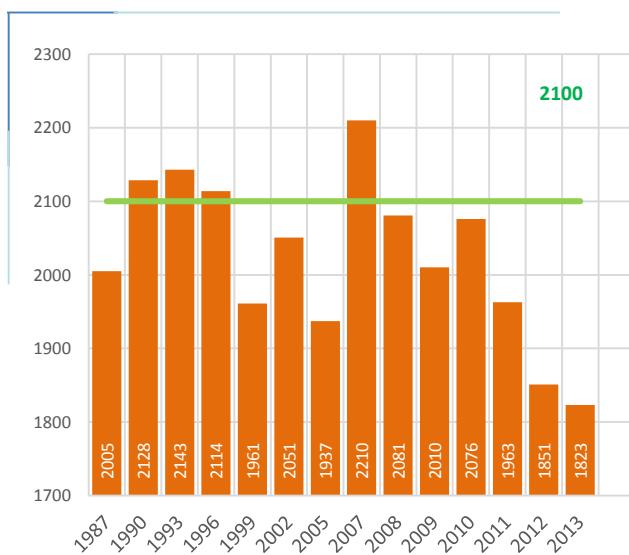


Sumber: Badan Pusat Statistik

Berbanding terbalik dengan persentase pengeluaran per kapita bahan pangan, untuk persentase pengeluaran per kapita bahan nonpangan pengeluaran masyarakat di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengeluaran per kapita bahan nonpangan masyarakat perdesaan. Situasi ini juga memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah perdesaan.

Menurut gambar di samping, persentase pengeluaran per kapita bahan nonpangan di daerah perkotaan mencapai posisi tertinggi pada tahun 2013 mencapai angka 50,64 persen yang artinya pengeluaran masyarakat kota lebih dari setengah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nonpangan. Keadaan ini memberikan sinyal yang menggembirakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan. Untuk daerah perdesaan persentase pengeluaran per kapita nonpangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase mencapai 35,12 persen. dengan kata lain satu dari tiga bagian pendapatan masyarakat perdesaan dihabiskan untuk bahan nonpangan, sedangkan dua bagian lainnya untuk bahan pangan.

Gambar 13.13.
Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Tahun 1987-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi Kalori dan Protein

Pada dasarnya kebutuhan akan pangan terbagi menjadi dua yaitu kalori dan protein. Terpenuhinya kebutuhan akan kalori dan protein merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat suatu daerah. Sebagian besar kebutuhan akan kalori dipenuhi dari konsumsi makanan pokok, sedangkan pemenuhan akan kebutuhan protein sebagian besar berasal dari hewan. Hasil Widjikarya Pangan dan Gizi tahun 1978 menyebutkan kebutuhan minimum kalori yang dikonsumsi penduduk adalah sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari sedangkan protein 45 gram per hari. Jadi apabila kebutuhan minimum kalori per kapita tidak dapat terpenuhi menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah kurang baik.

Hasil Susenas tahun 1987 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Aceh belum terpenuhi kebutuhan minimum kalorinya. Hal ini terlihat dari jumlah kalori yang dikonsumsi masyarakat Aceh perhari masih berada di bawah jumlah kalori minimum yang harus dikonsumsi per hari yaitu sebesar 2.100 kilo kalori. Pada tahun 1987 jumlah kalori yang dikonsumsi per kapita per hari sebesar 2.000 kilo kalori dan pada tahun 2013 turun menjadi 1.823 kilo kalori. Namun demikian pada tahun 1990, 1993, 1996 dan 2007 pemenuhan kalori penduduk Aceh telah melebihi batas minimum yaitu masing-masing sebesar 2.128 kilo kalori, 2.143 kilo kalori, 2.114 kilo kalori, dan 2.210 kilo kalori.

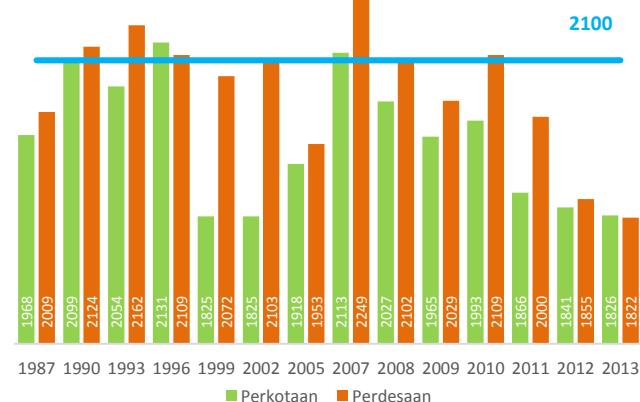
Pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat ternyata lebih banyak terpenuhi pada masyarakat perdesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Terlihat dari jumlah pemenuhan kalori per kapita per hari yang selalu lebih tinggi bagi masyarakat di daerah perdesaan daripada masyarakat di daerah perkotaan. Hal ini sejalan dengan besarnya persentase pengeluaran bahan pangan di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Sejak tahun 1987 sampai dengan 2013, pemenuhan kebutuhan kalori di daerah perdesaan yang melebihi 2.100 kilo kalori per kapita per hari terjadi pada tahun 1990 dengan 2.124 kilo kalori, 1993 dengan 2.162 kilo kalori, 1996 dengan 2.109 kilo kalori, 2002 dengan 2.103 kilo kalori, 2007 dengan 2.249 kilo kalori, 2008 dengan 2.102 kilo kalori, dan 2010 dengan 2.109 kilo kalori. Sedangkan pemenuhan kalori melebihi 2.100 kilo kalori per kapita per hari di daerah perkotaan hanya terjadi dua kali yaitu pada tahun 1996 dan 2007 dengan pemenuhan kalori masing-masing sebesar 2.131 kilo kalori dan 2.113 kilo kalori.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minimal protein sebanyak 45 gram per kapita per hari, keadaan masyarakat Aceh sudah lebih baik dibandingkan pemenuhan kebutuhan kalorinya. Kondisi ini tercermin dari pemenuhan protein yang selalu melebihi batas minimal 45 gram per kapita per hari sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 1987 konsumsi protein masyarakat Aceh per kapita per hari mencapai 49 gram. Kondisi ini terus naik hingga berada di puncaknya pada tahun 2007 dimana konsumsi protein mencapai 61 gram per kapita per hari. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi kecenderungan penurunan konsumsi protein masyarakat sehingga pada tahun 2013 jumlah konsumsi protein sebanyak 51 gram per kapita per hari.

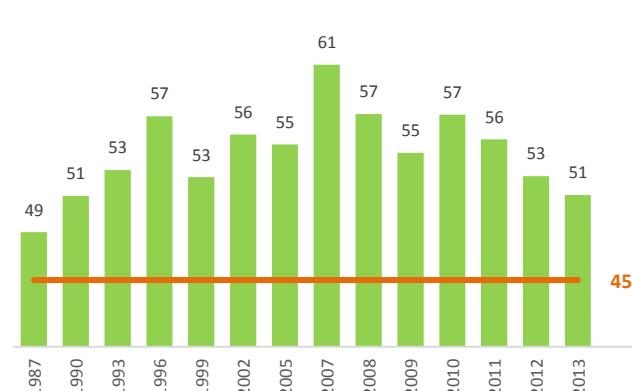
Seiring dengan pemenuhan kebutuhan protein secara total, apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal baik di perdesaan maupun di perkotaan, masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan keduanya telah mampu memenuhi kebutuhan minimum protein sebesar 45 gram per kapita per hari. Tetapi berbanding terbalik dengan pemenuhan kalori antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan pemenuhan protein masyarakat perdesaan, kecuali pada tahun 1999 dimana masyarakat perkotaan hanya mampu mengkonsumsi protein sebesar 51 gram per kapita per hari lebih rendah 3 gram dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Pada tahun ini, masyarakat di daerah perdesaan mampu mengkonsumsi protein sebesar 54 gram per kapita per hari. Karena pada tahun 1999 merupakan tahun yang terdampak atas krisis moneter, kondisi ini menginformasikan bahwa krisis moneter lebih memberikan imbas kepada masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat perdesaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan berupa protein.

Gambar 13.14.
Percentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang
Tahun 2005-2013



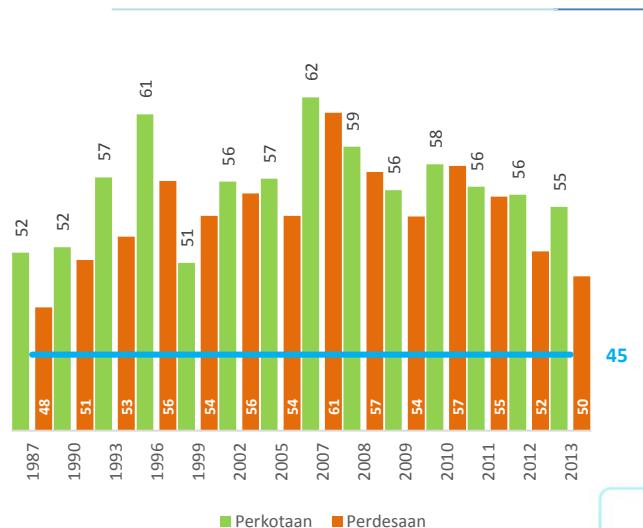
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.15.
Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari
Tahun 1987-2013

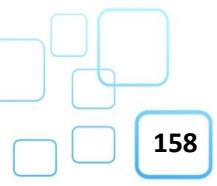


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.16.
Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari Menurut Daerah
Tahun 1987-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik



Kemiskinan

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 – 2013 garis kemiskinan di Provinsi Aceh selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 garis kemiskinan di Aceh sebesar Rp 172.084 yang artinya satu orang penduduk di Aceh memerlukan Rp 172.084 per bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup, namun pada tahun 2013 meningkat sehingga diperlukan Rp 330.654 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dalam kurun waktu delapan tahun terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp 158.570 atau rata-rata sebesar Rp 19.821 per tahun.

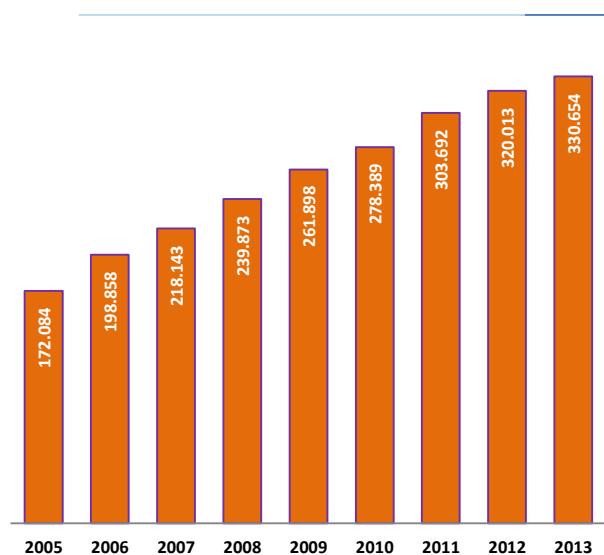
Membandingkan garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan terlihat bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 garis kemiskinan daerah perkotaan selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan daerah perdesaan. Hal ini memberikan gambaran, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal di kota memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal di desa.

Pada daerah perkotaan garis kemiskinan tahun 2005 sebesar Rp 195.882 yang artinya diperlukan uang minimal Rp 195.882 bagi satu orang yang tinggal di daerah perkotaan selama satu bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimalnya. Garis kemiskinan di daerah perkotaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp 195.882 naik menjadi Rp 359.217 di tahun 2013. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp 163.335 selama delapan tahun atau rata-rata Rp 20.416.

Kenaikan garis kemiskinan daerah perdesaan juga selalu terjadi setiap tahun, namun garis kemiskinannya selalu berada di bawah garis kemiskinan daerah perkotaan. Pada tahun 2005 garis kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp 166.608 kemudian naik menjadi Rp 319.416 pada tahun 2013. Maka selama delapan tahun telah terjadi peningkatan garis kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp 152.808 atau rata-rata sebesar Rp 19.101 per tahun.

Gambar 13.17.

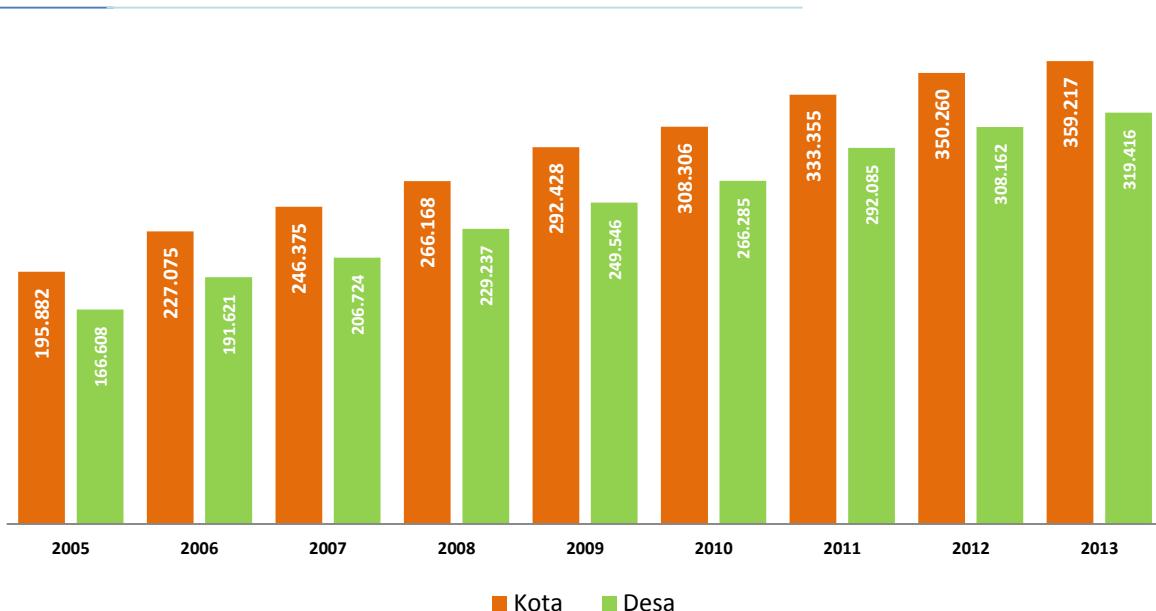
Garis Kemiskinan Tahun 2005-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.18.

Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal
Tahun 2005-2013

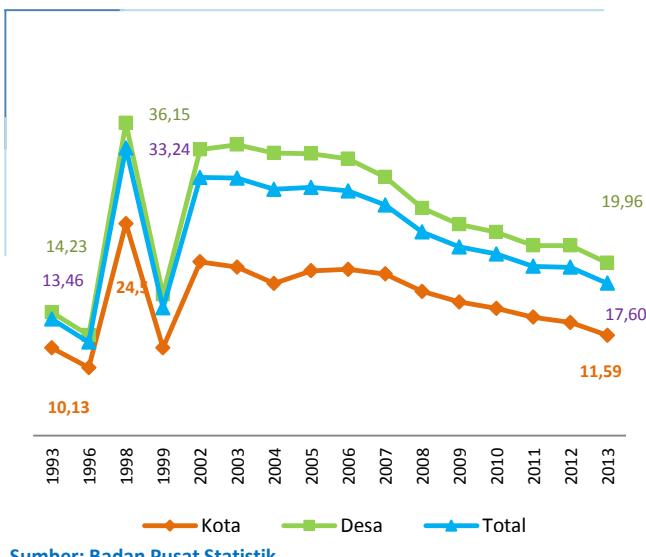


Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk Miskin

Hasil Susenas tahun 1993 – 2013 menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Sepanjang rentang tahun tersebut, jumlah penduduk miskin paling banyak terjadi pada tahun 1998 dengan penduduk miskin mencapai angka 1.354,1 ribu jiwa yang bertempat tinggal di kota sebanyak 249,2 ribu jiwa dan tinggal di daerah perdesaan sebanyak 1.104,9 ribu jiwa.

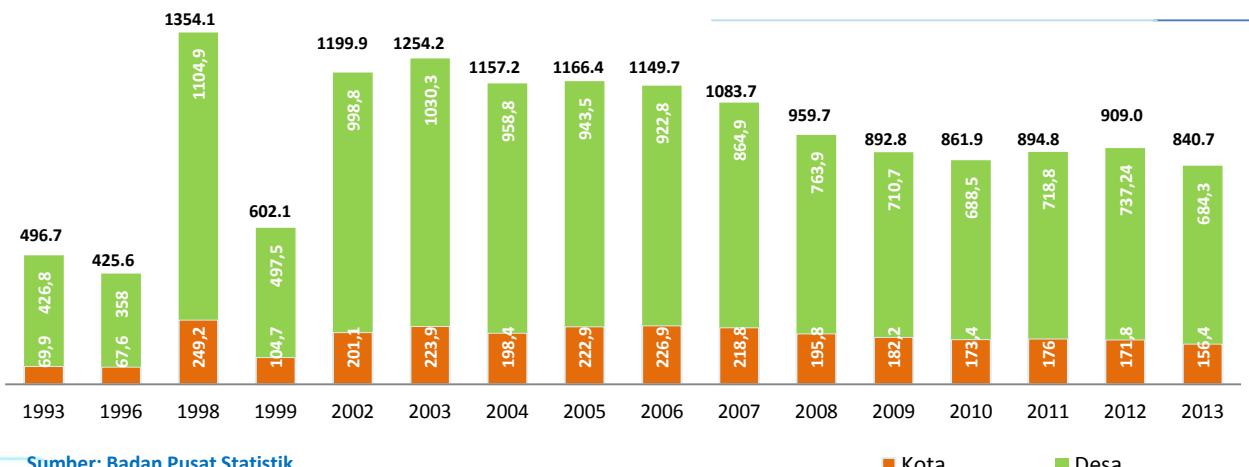
Gambar 13.19.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1993-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 kondisi Aceh mulai kembali stabil kecuali terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang ikut memengaruhi perekonomian Aceh, sehingga pada tahun 2005 persentase penduduk miskin sedikit meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2004. Setelah bencana tersebut Aceh mulai menata dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Tren persentase penduduk miskin yang terus menurun mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh dalam menjalankan program penurunan kemiskinan hingga pada tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 17,60 persen.

Gambar 13.20.
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Tahun 1999-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

■ Kota ■ Desa

Hal yang sama juga ditampilkan pada grafik persentase penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal di Provinsi Aceh tahun 1993 – 2013. Grafik tersebut juga melihatkan puncak tertinggi dari persentase penduduk miskin berada pada tahun 1998, dimana persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 33,24 persen secara total dengan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 24,5 persen dan penduduk miskin di perdesaan mencapai 36,15 persen.

Lonjakan penduduk miskin pada tahun 1998 disebabkan terjadinya krisis moneter yang menerjang perekonomian Indonesia secara umum sehingga perekonomian Aceh juga merasakan imbasnya. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi lonjakan harga barang dan jasa sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang mengakibatkan lonjakan penduduk miskin pada tahun ini.

Pada tahun 1993 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 13,46 persen. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 tren persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan terlihat dari garis grafik yang menurun. Namun demikian, dikarenakan krisis ekonomi yang melanda perekonomian persentase penduduk miskin melonjak tajam pada tahun 1998. Setelah krisis berlalu persentase penduduk miskin kembali turun pada tahun 1999. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena pada kurun waktu 1999 – 2002 terjadi kembali peningkatan persentase penduduk miskin diakibatkan konflik bersenjata yang terjadi di Aceh pada tahun 2000.

Distribusi Pendapatan

Merujuk pada batasan tersebut terlihat bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan 2013 ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan 40 persen penduduk berpendapatan rendah telah menikmati pendapatan di atas 17 persen. Pada tahun 1984 pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah telah menikmati pendapatan sebesar 25,56 persen. Namun demikian, kecenderungannya distribusi pendapatan makin tidak merata, karena pada tahun 2013 dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah pendapatan yang dinikmati turun menjadi 20,83 persen walaupun secara kategori masih termasuk ketimpangan rendah.

Berdasarkan pengkategorian tersebut, *Gini Ratio* Aceh berada diantara 0,223 – 0,385 sehingga berada di tingkat ketimpangan rendah sampai sedang.

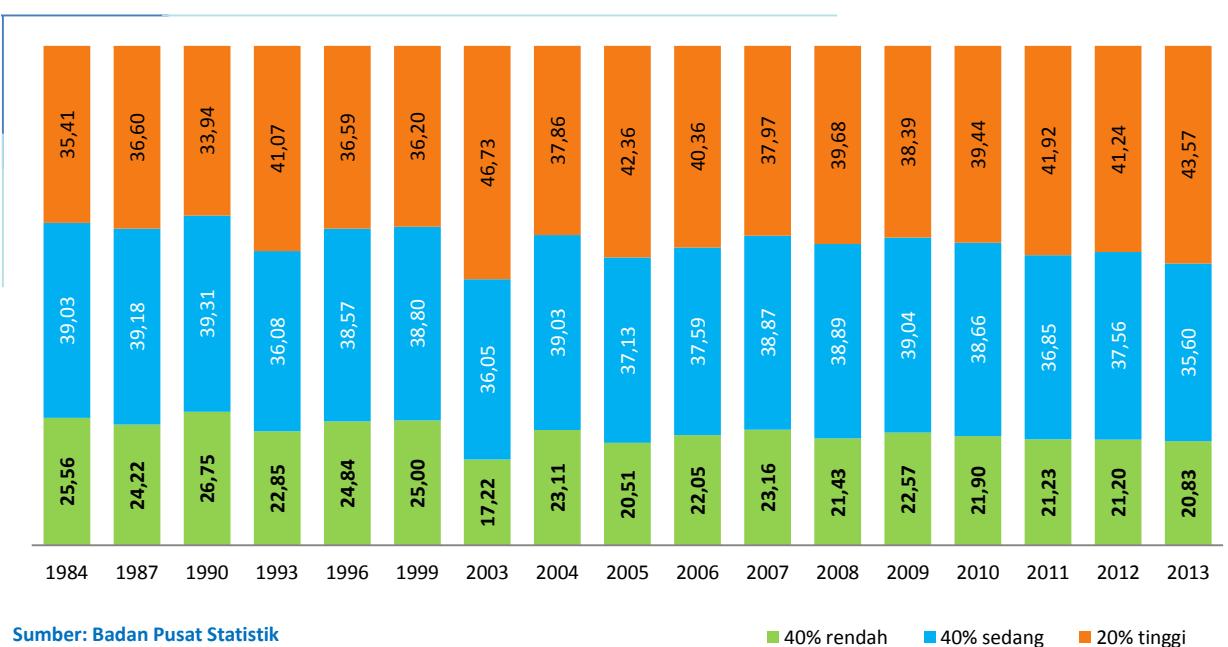
Pada tahun 1984 sampai dengan 2010 *Gini Ratio* mayoritas berada pada angka kurang dari 0,3 yang berarti ketimpangan pendapatan rendah, namun pada tahun 2011 sampai 2013 *Gini Ratio* selalu berada di atas 0,3 yang berarti ketimpangan sedang. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh semakin besar. Ketimpangan dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang akan lebih mudah dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah. Oleh sebab itu perlu antisipasi pemerataan pendapatan agar masyarakat ekonomi lemah tidak mengalami guncangan hebat apabila terjadi gejolak pada perekonomian daerah.

Tabel 13.10.
Percentase Pembagian Pengeluaran dan *Gini Ratio*
Tahun 1984-2013

Tahun	Distribusi Pembagian Pengeluaran			<i>Gini Ratio</i>
	40 % rendah	40 % sedang	20 % tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1984	25,56	39,03	35,41	0,255
1987	24,22	39,18	36,60	0,256
1990	26,75	39,31	33,94	0,223
1993	22,85	36,08	41,07	0,293
1996	24,84	38,57	36,59	0,259
1999	25,00	38,80	36,20	0,251
2003	17,22	36,05	46,73	0,385
2004	23,11	39,03	37,86	0,274
2005	20,51	37,13	42,36	0,327
2006	22,05	37,59	40,36	0,299
2007	23,16	38,87	37,97	0,274
2008	21,43	38,89	39,68	0,301
2009	22,57	39,04	38,39	0,301
2010	21,90	38,66	39,44	0,294
2011	21,23	36,85	41,92	0,302
2012	21,20	37,56	41,24	0,326
2013	20,83	35,60	43,57	0,305

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 13.21
Distribusi Pendapatan Tahun 1984-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

■ 40% rendah ■ 40% sedang ■ 20% tinggi

Tabel 13.11.

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya
Tahun 1990-2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Aceh dihitung pertama kali tahun 1990 semenjak UNDP (*United Nations Development Programme*) merekomendasikan. Ketika itu angka IPM Provinsi Aceh tercatat 61,90, berada pada kategori menengah bawah ($50 \leq \text{IPM} < 66$).

Enam tahun berikutnya meningkat tajam menjadi 69,40 dan berada pada kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$). Pada masa itu pembangunan era orde baru cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini juga diikuti dengan pertambahan *reduksi shortfall* IPM periode tersebut sebesar 3,28 per tahun.

Setelah naik tajam pada periode sebelumnya, pada tahun 1999 pembangunan manusia di provinsi paling barat Indonesia ini mengalami penurunan yang cukup berarti. Terbukti dari angka IPM tahun itu menjadi 65,30. Terlepas dari berbagai sebab di daerah, saat itu Indonesia secara umum mengalami krisis ekonomi yang demikian parah, sehingga pembangunan manusia secara keseluruhan menjadi terganggu. *Reduksi shortfall* kala itu mencapai -4,47.

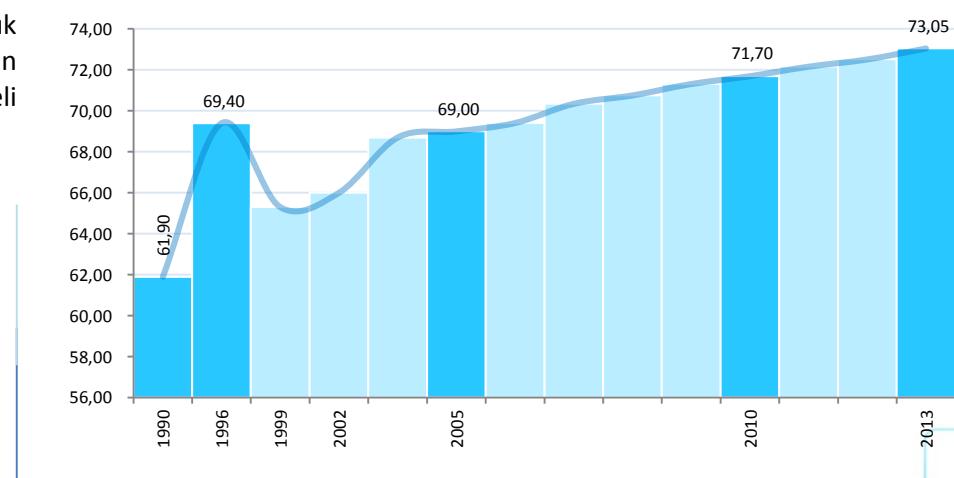
Lebih dari satu dekade berikutnya, tepatnya tahun 2013, IPM Provinsi Aceh mencapai 73,05. Berada pada peringkat 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Keempat komponen pembentuk IPM memperlihatkan kondisi yang semakin membaik. Namun demikian, khusus untuk daya beli belum mampu menyamai kemampuan daya beli pada tahun 1999 sekalipun (Rp 662,80).

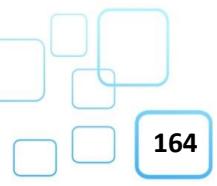
Barangkali dibutuhkan stimulasi melalui program khusus di daerah ini untuk memacu peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Gambar 13.22.
Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 1990-2013

Tahun	Harapan Hidup	Melek Huruf	Lama Sekolah	Daya Beli	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990					61,90
1996					69,40
1999	67,70	93,10	7,20	662,80	65,30
2002	67,70	95,80	7,80	557,50	66,00
2004	67,90	95,70	8,40	585,80	68,70
2005	68,00	96,00	8,40	588,90	69,00
2006	68,30	96,20	8,50	589,47	69,41
2007	68,40	96,20	8,50	600,95	70,35
2008	68,50	96,20	8,50	605,56	70,76
2009	68,60	96,39	8,63	610,27	71,31
2010	68,70	96,88	8,81	611,42	71,70
2011	68,80	96,95	8,90	615,60	72,16
2012	68,94	96,99	8,93	618,79	72,51
2013	69,40	97,04	9,02	621,40	73,05

Sumber : Sumber: Badan Pusat Statistik (berbagai terbitan)





PERUMAHAN

Perumahan dan lingkungan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perumahan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi selain kebutuhan akan sandang dan pangan. Lingkungan yang bersih, rapi dan terjaga juga menjadi gambaran tentang kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi kehidupan yang layak. Oleh karena itu sasaran program pembangunan perumahan juga mencakup perbaikan sarana lingkungan permukiman, khususnya perbaikan sanitasi lingkungan.

Fasilitas Listrik PLN

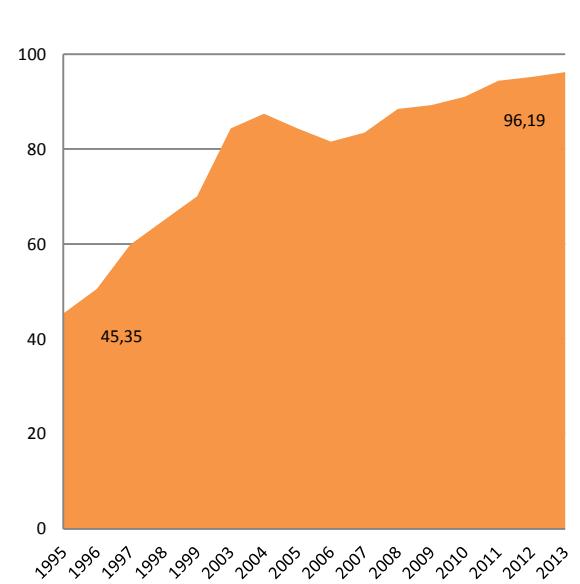
Salah satu fasilitas perumahan yang penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Selain itu listrik juga lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Oleh sebab itu ketersediaan fasilitas listrik PLN dapat menjadi acuan bagi kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan. Berdasarkan hasil Susenas tahun 1995, sebanyak 45,35 persen rumah tangga telah menggunakan fasilitas penerangan listrik PLN dan mengalami peningkatan sebesar 50,81 persen sehingga cakupan pada tahun 2013 mencapai 96,19 persen. Hal ini tentu merupakan hal yang menggembirakan bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas Air Minum

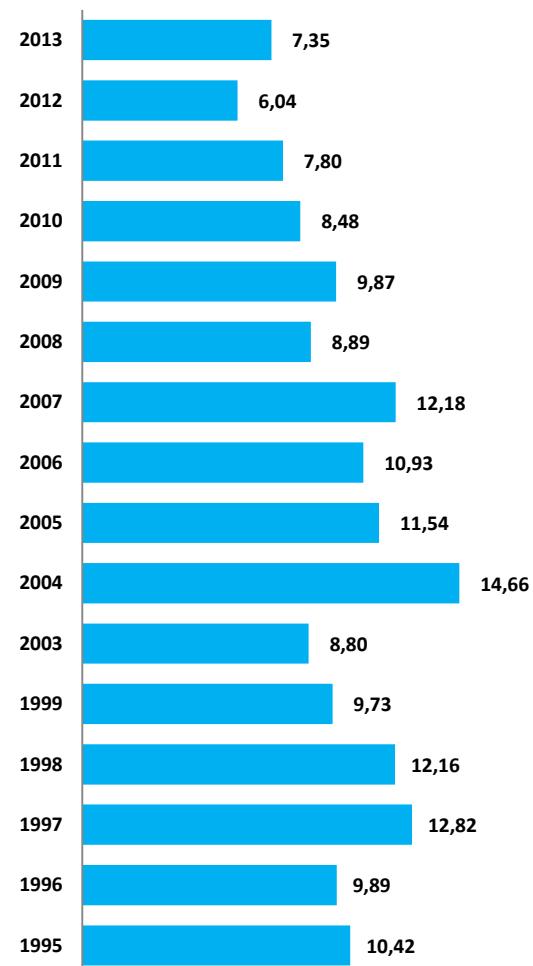
Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terutama untuk minum, memasak mencuci, mandi, dan kakus. Menurut Kementerian Kesehatan RI, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Oleh sebab itu sumber air minum menggunakan ledeng dapat dikatakan sebagai sumber air minum yang baik.

Rumah tangga pengguna air ledeng sebagai fasilitas air minum di Aceh pada tahun 1995 sebesar 10,42 persen. Sampai dengan tahun 2013 kondisinya cukup stabil kecuali pada tahun 2004 persentase rumah tangga pengguna ledeng sebagai sumber air minum mencapai yang tertinggi yaitu sebesar 14,66 persen. Namun demikian akibat bencana gempa bumi dan tsunami persentase rumah tangga pengguna ledeng sebagai sumber air minum menurun menjadi 11,54 persen. Selanjutnya persentase rumah tangga pengguna ledeng sebagai sumber air minum terus mengalami penurunan lebih dikarenakan bergantinya sumber air minum masyarakat ke air minum isi ulang/air minum kemasan.

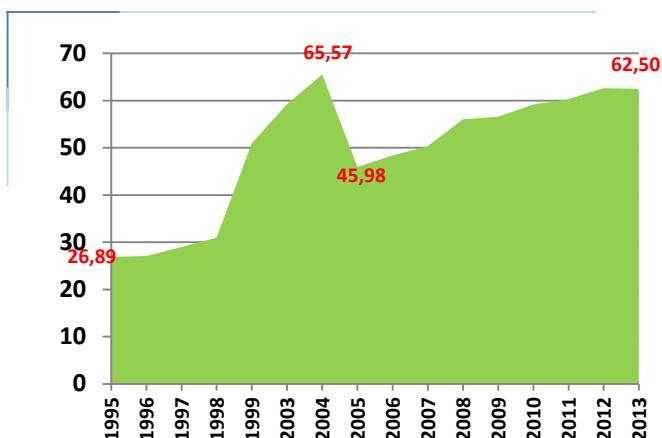
Gambar 14.1
Percentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN
Tahun 1995 - 2013



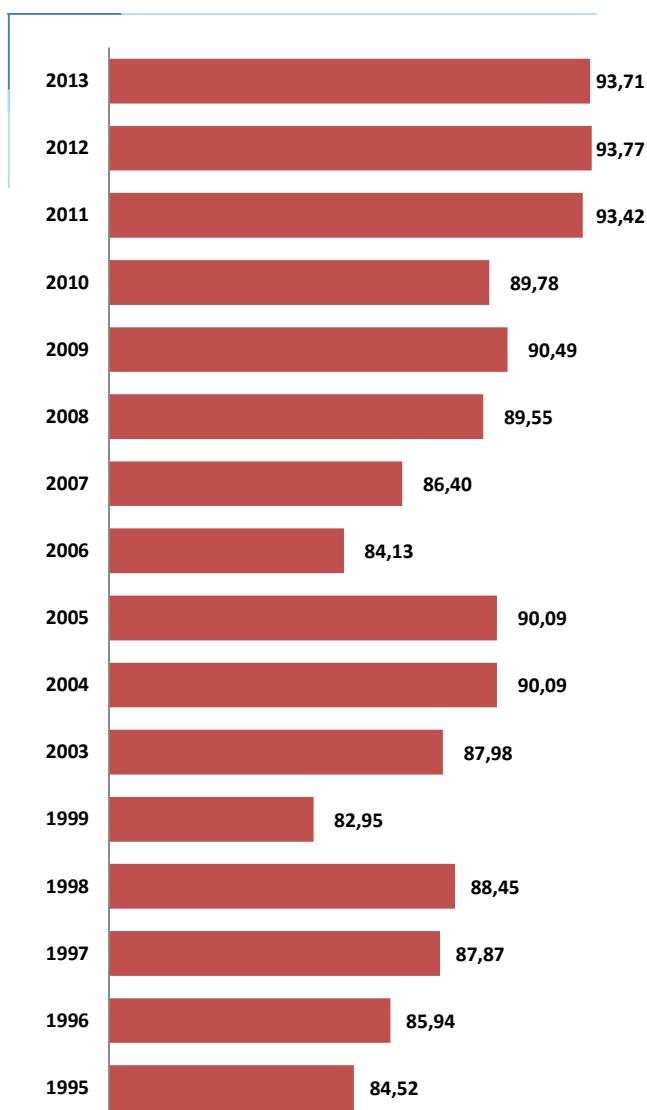
Gambar 14.2
Percentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Air Minum Ledeng Tahun 1995 – 2013



Gambar 14.3
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Jamban Sendiri
Tahun 1995 – 2013



Gambar 14.4.
Persentase Rumah Tangga mempunyai Lantai Bukan Tanah
Tahun 1995 – 2013



Fasilitas Jamban Sendiri

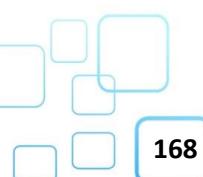
Jamban adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja/kotoran manusia yang sering disebut WC. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik berdampak mengkawatirkan terutama pada kesehatan dan kualitas air untuk rumah tangga maupun keperluan komersial.

Persentase rumah tangga dengan fasilitas jamban sendiri pada tahun 1995 sebesar 26,89 persen meningkat sebesar 35,61 persen sehingga pada tahun 2013 menjadi 62,50 persen. Peningkatan persentase rumah tangga dengan fasilitas jamban sendiri menunjukkan terjadinya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan bidang perumahan. Pada tahun 2004 persentase rumah tangga dengan fasilitas jamban sendiri mencapai 65,57 persen turun menjadi 45,98 persen pada tahun 2005 diakibatkan terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan rumah tangga tinggal di barak penampungan sehingga menggunakan jamban secara bersama-sama. Penanganan korban bencana yang baik menyebabkan falitisa penggunaan jamban sendiri terus meningkat setelah bencana.

Fasilitas Lantai Bukan Tanah

Salah satu ciri rumah yang sehat adalah lantai rumah yang bukan tanah. Rumah yang berlantai tanah dipandang kurang baik bagi kesehatan karena memiliki struktur lembab yang dapat mengganggu kesehatan penghuninya. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat memiliki lantai rumah bukan tanah sebagai salah satu ukuran derajat kesejahteraannya.

Memperhatikan gambar di samping, terlihat bahwa pada tahun 1995 persentase rumah tangga dengan lantai rumah bukan tanah di Aceh sebesar 84,52 persen atau dengan kata lain terdapat 15,48 persen rumah tangga dengan rumah berlantai tanah. Rumah tangga yang memiliki lantai tanah diharapkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini sepertinya sudah cukup tercapai dengan kondisi persentase rumah tangga yang memiliki lantai bukan tanah semakin meningkat hingga pada tahun 2013 mencapai 93,71 persen. Peningkatan ini tentu memberikan kabar gembira bagi pembangunan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas hidup di bidang perumahan.



Luas Lantai

Kualitas rumah tinggal yang baik akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung dan terjamin kesehatannya. Salah satu ukuran kesehatan perumahan diantaranya luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah sering dianggap sebagai gambaran untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut pedoman umum Rumah Sederhana Sehat kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Menurut kementerian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m². Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,4 orang per rumah tangga maka suatu hunian dikatakan layak untuk ditempati di Aceh apabila telah melebihi 44 m² per rumah. Oleh sebab itu digunakan ukuran rumah lebih dari 50 m².

Pada tahun 1995 persentase rumah tangga yang mempunyai rumah dengan luas lantai lebih dari 50 m² sebesar 48,15 persen. Pada tahun selanjutnya mengalami trend yang meningkat sehingga mencapai puncaknya pada tahun 2004 dengan persentase sebesar 60,30 persen. Namun demikian, akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 persentase rumah tangga yang mempunyai rumah dengan luas lantai lebih dari 50 m² mengalami penurunan hingga mencapai 38,89 persen pada tahun 2005. Tetapi, kondisi perekonomian yang terus membaik menjadikan trendnya kembali meningkat hingga pada tahun 2013 mencapai angka 48,64 persen.

Gambar 14.5
Persentase Rumah Tangga Mempunyai Rumah dengan Luas Lantai >50 m² Tahun 1995 – 2013

